



KEMENTERIAN PERTANIAN



**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015 - 2019**





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/Permentan/HK.140/4/2015**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perlu menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
13. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam:

- a. menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II;
- b. menyusun rencana/program pembangunan daerah/provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pertanian;
- c. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar instansi pertanian di Pusat dan Daerah; dan
- d. pengendalian program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Pejabat Unit Kerja Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjabarkan dan menyusun lebih lanjut mengenai:

- a. Renstra Kementerian Pertanian kedalam Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II;
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 April 2015



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Para Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/Permentan/HK.140/4/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015-2019**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2015**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR BOKS	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2010-2014	6
1.1.1. Produk Domestik Bruto	6
1.1.2. Penyediaan Lapangan Kerja	6
1.1.3. Investasi Sektor Pertanian	9
1.1.4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian	10
1.1.5. Nilai Tukar Petani	13
1.1.6. Kesejahteraan Petani	15
1.1.7. Capaian Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2010-2014	19
A. Produksi Tanaman Pangan	19
B. Produksi Hortikultura	21
C. Produksi Perkebunan	24
D. Produksi Peternakan	27
1.1.8. Faktor Pendukung Pembangunan Pertanian	30
A. APBN Kementerian Pertanian	30
B. Pengembangan Kapasitas Institusi Kementerian Pertanian	31
C. Pembangunan Sumberdaya Insani Pelaku Agribisnis	34
D. Pembangunan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Manajemen Sumberdaya Alam Pertanian	37
E. Pembangunan pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	55
F. Pembangunan Sistem Inovasi	58
G. Penyediaan Pangan Masyarakat	61
H. Perlindungan Produk Pertanian Melalui Perkarantinaaan	67
I. Pertanian dalam Jasa Lingkungan	69





1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pertanian	72
1.2.1. Potensi	72
A. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem	72
B. Lahan Pertanian	73
C. Teknologi	74
D. Tenaga Kerja	76
E. Pasar	77
1.2.2. Permasalahan	79
A. Lahan	80
B. Infrastruktur	83
C. Sarana Produksi	85
D. Regulasi	88
E. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	90
F. Permodalan	94
1.2.3. Tantangan Pembangunan Pertanian 2015-2019	95
A. Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi	95
B. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam	96
C. Kondisi Perekonomian Global	98
D. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi	101
E. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian	102
II. VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019	105
2.1. Visi Kementerian Pertanian	106
2.2. Misi Kementerian Pertanian	107
2.3. Tujuan	107
2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	107
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	111
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	112
3.2. Strategi Kementerian Pertanian	115
3.2.1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan	117
3.2.2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian	119
3.2.3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit	121



3.2.4. Penguatan kelembagaan petani	122
3.2.5. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian	122
3.2.6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi	123
3.2.7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian	124
3.2.8. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian	125
3.2.9. Peningkatan dukungan perkarantinaaan	125
3.2.10. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi	125
3.2.11. Pelayanan informasi publik	126
3.2.12. Pengelolaan regulasi	127
3.2.13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	127
3.2.14. Pengelolaan perencanaan	127
3.2.15. Penataan dan penguatan organisasi	127
3.2.16. Pengelolaan sistem pengawasan	128
3.3. Kebijakan Kementerian Pertanian	128
3.3.1. Kebijakan Umum	128
A. Kebijakan peningkatan swasembada beras dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, cabai dan bawang merah	128
B. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri	130
C. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaaan dan ketahanan pangan	133
D. Pengembangan kawasan pertanian	137
E. Kebijakan fokus komoditas strategis	140
F. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan	141
G. Kebijakan tatakelola Kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi	144
3.3.2. Kebijakan Teknis Operasional	145
A. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman	145
B. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian	148
C. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian	149





D. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian	151
E. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	153
3.4. Langkah Operasional	154
3.4.1. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	154
3.4.2. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Tebu	156
3.4.3. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Daging	159
3.4.4. Langkah Operasional Peningkatan Diversifikasi Pangan	161
3.4.5. Langkah Operasional Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	163
3.4.6. Langkah Operasional Penyediaan dan Peningkatan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi	167
3.4.7. Langkah Operasional Peningkatan Kesejahteraan Petani	168
3.5. Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian	170
3.5.1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	170
3.5.2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan	170
3.5.3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	171
3.5.4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	171
3.5.5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	171
3.5.6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	172
3.5.7. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	172
3.5.8. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	172
3.5.9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	173
3.5.10. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	173



3.5.11. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	173
3.5.12. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	174
3.6. Kerangka Regulasi	174
3.7. Kerangka Kelembagaan	176
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	183
4.1. Target Makro	184
4.1.1. Produk Domestik Bruto (PDB)	184
4.1.2. Penyerapan Tenaga Kerja	184
4.1.3. Investasi Sektor Pertanian	184
4.1.4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian	186
4.1.5. Nilai Tukar Petani	187
4.1.6. Pendapatan Perkapita	188
4.2. Target Kinerja	188
4.3. Kerangka Pendanaan	190
V. DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN	195
VI. PENUTUP	203
LAMPIRAN	207





DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2011-2014	7
Tabel 2.	Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014	12
Tabel 3.	Perkembangan PDB Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2010-2014 atas Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp 000)	16
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2010–2013	18
Tabel 5.	Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2010-2014	19
Tabel 6.	Luas Panen Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014	20
Tabel 7.	Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014	20
Tabel 8.	Produksi Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014	22
Tabel 9.	Luas Panen Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014	23
Tabel 10.	Produktivitas Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014	23
Tabel 11.	Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014	24
Tabel 12.	Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014	25
Tabel 13.	Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014	26
Tabel 14.	Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2010 – 2014	28
Tabel 15.	Populasi Ternak Tahun 2010 – 2014	29
Tabel 16.	Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014	30
Tabel 17.	Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Tahun 2010 - 2014	35
Tabel 18.	Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Umur Tahun 2008 - 2012	36
Tabel 19.	Jumlah Kelompok Tani Tahun 2010 – 2014	36
Tabel 20.	Anggaran APBN di Lingkup Kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dalam Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014	39
Tabel 21.	Luas Lahan Sawah per Provinsi Hasil Pemetaan Lahan Sawah Tahun 2012	40
Tabel 22.	Realisasi dari Target Perluasan dan Pengelolaan Lahan serta Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2010-2014	41
Tabel 23.	Kondisi Jaringan Irigasi berdasarkan Kewenangan Penanganan di Indonesia Tahun 2012	44



Tabel 24. Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014	46
Tabel 25. Perkembangan Realisasi Subsidi Pupuk 2010-2014	46
Tabel 26. Penyaluran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Pembiayaan Pertanian Tahun 2010-2014	47
Tabel 27. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2010 - 2014	49
Tabel 28. Realisasi Penyaluran BLBU 2010-2012 dan Benih Bersubsidi Tahun 2013	50
Tabel 29. Capaian Kinerja Kegiatan Perbenihan Hortikultura Tahun 2013	52
Tabel 30. Produksi dan Realisasi Semen Beku dan Embrio Sapi Tahun 2010-2014	54
Tabel 31. Konsumsi Beras di Tingkat Rumah Tangga Tahun 2010-2014	62
Tabel 32. Pola Pangan Harapan Tahun 2010 – 2014	63
Tabel 33. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2009-2013	64
Tabel 34. Jasa Lingkungan Subsektor Pertanian Indonesia dan Strategi Peningkatan Nilai Positif Jasa Lingkungan	70
Tabel 35. Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian	106
Tabel 36. Tugas Pengelola Kawasan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	138
Tabel 37. Sasaran Perluasan Areal Lahan Pertanian Tahun 2015-2019	141
Tabel 38. Kebutuhan Jumlah Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019	180
Tabel 39. Target Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub-sektor Pertanian Tahun 2015-2019, Harga Konstan Tahun 2000	185
Tabel 40. Sasaran Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2015-2019	185
Tabel 41. Sasaran Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015-2019	186
Tabel 42. Sasaran Neraca Perdagangan Produk Pertanian Tahun 2015-2019	186
Tabel 43. Sasaran PDB per Kapita Sektor Pertanian Tahun 2015 - 2019	188
Tabel 44. Target Kinerja Kementerian Pertanian	189
Tabel 45. Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pembangunan Pertanian	197





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2010-2014	7
Gambar 2.	Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2009-2013	8
Gambar 3.	Pertumbuhan Pangsa Tenaga Kerja Pertanian dan Pertumbuhan Pangsa PDB Pertanian Tahun 2010-2014	8
Gambar 4.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Tahun 2010-2014	9
Gambar 5.	Perkembangan Ekspor - Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014	11
Gambar 6.	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010 – 2014	14
Gambar 7.	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2014	17
Gambar 8.	Proporsi Anggaran APBN Kementerian Pertanian pada Eselon I Akumulasi Tahun 2010-2014	31
Gambar 9.	Ketersediaan dan Konsumsi Pangan (Energi) Tahun 2010-2014	66
Gambar 10.	Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2010-2014	66
Gambar 11.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2015-2019	108
Gambar 12.	Peta Strategi Kementerian Pertanian	116
Gambar 13.	Langkah Operasional Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	156
Gambar 14.	Langkah Operasional Peningkatan Produksi Tebu	157
Gambar 15.	Langkah Operasional Peningkatan Produksi Daging	161
Gambar 16.	Langkah Operasional Peningkatan Diversifikasi Pangan	163
Gambar 17.	Langkah Operasional Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	165
Gambar 18.	Sasaran Nilai Tukar Petani Tahun 2015-2019	187



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Sasaran Produksi Padi Tahun 2015- 2019	208
Lampiran 2.	Sasaran Produksi Jagung Tahun 2015- 2019	209
Lampiran 3.	Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2015- 2019	210
Lampiran 4.	Sasaran Produksi Kacang Tanah Tahun 2015- 2019	211
Lampiran 5.	Sasaran Produksi Kacang Hijau Tahun 2015- 2019	212
Lampiran 6.	Sasaran Produksi Ubi Kayu Tahun 2015- 2019	213
Lampiran 7.	Sasaran Produksi ubi jalar Tahun 2015- 2019	214
Lampiran 8.	Sasaran Produksi Cabai Merah Besar Tahun 2015- 2019	215
Lampiran 9.	Sasaran Produksi Cabai Rawit Tahun 2015- 2019	216
Lampiran 10.	Sasaran Produksi Bawang Merah Tahun 2015-2019	217
Lampiran 11.	Sasaran Produksi Kentang Tahun 2015- 2019	218
Lampiran 12.	Sasaran Produksi Mangga Tahun 2015- 2019	219
Lampiran 13.	Sasaran Produksi Manggis Tahun 2015- 2019	220
Lampiran 14.	Sasaran Produksi Nenas Tahun 2015- 2019	221
Lampiran 15.	Sasaran Produksi Jeruk Siam/keprok Tahun 2015- 2019	222
Lampiran 16.	Sasaran Produksi Salak Tahun 2015- 2019	223
Lampiran 17.	Sasaran Produksi Temulawak Tahun 2015- 2019	224
Lampiran 18.	Sasaran Produksi Krisan Tahun 2015- 2019	225
Lampiran 19.	Sasaran Produksi Anggrek Tahun 2015- 2019	226
Lampiran 20.	Sasaran Produksi Tebu Tahun 2015- 2019	227
Lampiran 21.	Sasaran Produksi Sawit Tahun 2015- 2019	228
Lampiran 22.	Sasaran Produksi Karet Tahun 2015- 2019	229
Lampiran 23.	Sasaran Produksi Kakao Tahun 2015- 2019	230
Lampiran 24.	Sasaran Produksi Kopi Tahun 2015- 2019	231
Lampiran 25.	Sasaran Produksi Lada Tahun 2015- 2019	232
Lampiran 26.	Sasaran Produksi Pala Tahun 2015- 2019	233
Lampiran 27.	Sasaran Produksi Teh Tahun 2015- 2019	234
Lampiran 28.	Sasaran Produksi Nilam Tahun 2015- 2019	235
Lampiran 29.	Sasaran Produksi Jambu Mete Tahun 2015- 2019	236





Lampiran 30. Sasaran Produksi Kapas Tahun 2015- 2019	237
Lampiran 31. Sasaran Produksi Tembakau Tahun 2015- 2019	238
Lampiran 32. Sasaran Produksi Cengkeh Tahun 2015- 2019	239
Lampiran 33. Sasaran Produksi Kelapa Tahun 2015- 2019	240
Lampiran 34. Sasaran Produksi Daging Sapi (Karkas) Tahun 2015- 2019	241
Lampiran 35. Sasaran Produksi Daging Sapi (Meat Yield) Tahun 2015- 2019	242
Lampiran 36. Sasaran Produksi Daging Kerbau (Karkas) Tahun 2015- 2019	243
Lampiran 37. Sasaran Produksi Daging Kerbau (Meat Yield) Tahun 2015- 2019	244
Lampiran 38. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2015- 2019	245
Lampiran 39. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2015- 2019	246
Lampiran 40. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2015- 2019	247
Lampiran 41. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2015- 2019	248
Lampiran 42. Sasaran Produksi Daging Ayam Petelur Tahun 2015- 2019	249
Lampiran 43. Sasaran Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Tahun 2015- 2019	250
Lampiran 44. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2015- 2019	251
Lampiran 45. Sasaran Produksi Telur Ayam Buras Tahun 2015- 2019	252
Lampiran 46. Sasaran Produksi Telur Ayam Ras Petelur Tahun 2015- 2019	253
Lampiran 47. Sasaran Produksi Telur Itik Tahun 2015- 2019	254
Lampiran 48. Sasaran Produksi Susu Tahun 2015- 2019	255
Lampiran 49. Sasaran Volume Ekspor-Impor Komoditas Pertanian Utama Tahun 2015- 2019	256
Lampiran 50. Sasaran Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan Sawah Tahun 2015-2019	257
Lampiran 51. Sasaran Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan Hortikultura Tahun 2015-2019	258
Lampiran 52. Sasaran Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan Perkebunan Tahun 2015-2019	259
Lampiran 53. Target Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan Areal Hijau Makanan Ternak dan Padang Penggembalaan Tahun 2015-2019	260
Lampiran 54. Sasaran Tambahan Luas Areal Pertanian yang Terlayani Jaringan Irigasi Tahun 2015-2019	261



Lampiran 55. Sasaran Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian dan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun 2015-2019	262
Lampiran 56. Sasaran Tambahan Areal SRI (System of Rice Intensification) Tahun 2015-2019	263
Lampiran 57. Sasaran Desa Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun 2015-2019	264
Lampiran 58. Sasaran Desa Mandiri Pembibitan Ternak Sapi dan Kerbau Tahun 2015-2019	265
Lampiran 59. Sasaran Desa Organik Tanaman Pangan Tahun 2015-2019	266
Lampiran 60. Sasaran Desa Organik Ditjen Hortikultura Tahun 2015-2019	267
Lampiran 61. Sasaran Desa Organik Ditjen PPHP Tahun 2015-2019	268
Lampiran 62. Sasaran Pembangunan Gudang dengan Fasilitas Pengolahan Pasca panen di Sentra Produksi Hortikultura Tahun 2015-2019	269
Lampiran 63. Sasaran Pembangunan Gudang Berpendingin dan Fasilitas Rumah Potong Hewan Tahun 2015-2019	270
Lampiran 64. Sasaran Lokasi Pasar Tani Tahun 2015-2019	271
Lampiran 65. Sasaran Lokasi Pasar Ternak Tahun 2015-2019	272
Lampiran 66. Sasaran Lokasi Pembangunan Taman Sains Pertanian - TSP (Agro Science Park - ASP) Tahun 2015-2019	273
Lampiran 67. Sasaran Lokasi Pembangunan Taman Tekno Pertanian - TTP (Agro Techno Park - ATP) Tahun 2015-2019	274
Lampiran 68. Sasaran Lokasi Penelitian Reklamasi Lahan Eks Tambang Tahun 2015-2019	275
Lampiran 69. Sasaran Lokasi Pemanfaatan lahan eks tambang Untuk Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (Ternak) Tahun 2015-2019	276
Lampiran 70. Kegiatan Terkait Sasaran Dalam Nawa Cita	277
Lampiran 71. Strategi, Pendekatan, Faktor Kritis dan Keluaran Pengembangan Kawasan	279
Lampiran 72. Susunan (Pola) Konsumsi Pangan Tahun 2015-2019	281
Lampiran 73. Matrik Kerangka Regulasi	282
Lampiran 74. Matrik Kinerja dan Pendanaan kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	289





DAFTAR BOX

Boks 1.	UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	91
Boks 2.	Undang-undang RI No. 18 tahun 20012 tentang Pangan.	132
Boks 3.	Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain.	135
Boks 4.	Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar	155



DAFTAR SINGKATAN

AEC	: Asean Economic Community
AFTA	: Asean Free Trade Area
AKG	: Angka Kecukupan Gizi
AP2RL	: Akselerasi Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan Lestari
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BBH	: Balai Benih Hortikultura
BBIB	: Balai Besar Inseminasi Buatan
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBN	: Bahan Bakar Nabati
BD	: Benih Dasar
BET	: Balai Embrio Transfer
BIB	: Balai Inseminasi Buatan
BP	: Benih Pokok
BP3K	: Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BP4K	: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BPSBTPH	: Balai Penagawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
BR	: Benih Sebar
CSR	: Corporate social responsibility
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH-CHT	: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DEMAPAN	: Desa Mandiri Pangan
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPI	: Dampak Perubahan Iklim
GAP	: Good Agricultural Practices
Gernas	: Gerakan Nasional
GHP	: Good Handling Practices
GKG	: Gabah Kering Giling
GMP	: Good Manufacturing Practices
GP2TT	: Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu
GRK	: Gas Rumah Kaca
HACCP	: Hazard analysis and critical control points
HET	: Harga Eceran Tertinggi
HPP	: Harga Pembelian Pemerintah
Ib	: Indeks harga yang dibayar petani
ICVAR	: Incremental Capital Value-Added Ratio





IG	: Indikasi Geografis
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPTEK	: Ilmu pengetahuan dan teknologi
It	: Indeks harga yang diterima petani
JARWO	: Jajar Legowo
JIDES	: Jaringan Irigasi Tingkat Desa
JITUT	: Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani
K/L	: Kementerian / Lembaga
KEHATI	: Keanekaragaman Hayati
KKP-E	: Kredit ketahanan Pangan dan Energi
KPEN-RP	: Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
KPPP	: Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
KRPL	: Kawasan Rumah Pangan Lestari
KSS	: Kerjasama Selatan-Selatan
KUPS	: Kredit Usaha Pembibitan Sapi
KUR	: Kredit Usaha rakyat
LKMA	: Lembaga Kredit Mandiri Agribisnis
LLIP	: Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian
LM3	: Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat
MEA	: Masyarakat Ekonomi Asean
MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MP3KI	: Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia
MRL	: Maximum Residue Limit
NTP	: Nilai Tukar Petani
OPT	: Organisme Pengganggu Tanaman
P2BN	: Peningkatan Produksi Beras Nasional
P3A	: Perkumpulan Petani Pemakai Air
P4S	: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya
PASPA	: Penerapan Alat Pasca Panen
PDB	: Produk Domestik Bruto
PG	: Pabrik Gula
PLP2B	: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
PMA	: Penanaman Modal Luar Negeri
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PPDI	: Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
PPH	: Pola Pangan Harapan



PPHT	: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu
PSDS	: Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi
PSO	: Public Service Obligation
PUAP	: Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
Renstra	: Rencana Strategis
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPPA	: Reformasi Perencanaan Program dan Penganggaran
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDG	: Sumberdaya Genetik
SDM	: Sumberdaya manusia
SDMC	: Sistem Diseminasi Multi Channel
SIDA	: Sistem Inovasi Daerah
SINAS	: Sistem Inovasi Nasional
SIPP	: Strategi Induk Pembangunan Pertanian
SKP	: Satuan Kerja Pegawai
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPG	: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
SLPHT	: Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
SL-PTT	: Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
SPM	: Standar Pelayanan Umum
SPS	: Sanitary and Phytosanitary
SRI	: System of Rice Intensification
TK	: Tenaga Kerja
TK	: Tenaga Kerja
UPB	: Unit Prosesing Benih
UPH	: Unit Pengolahan Hasil
UPJA	: Usaha Pelayanan Jasa Alsintan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

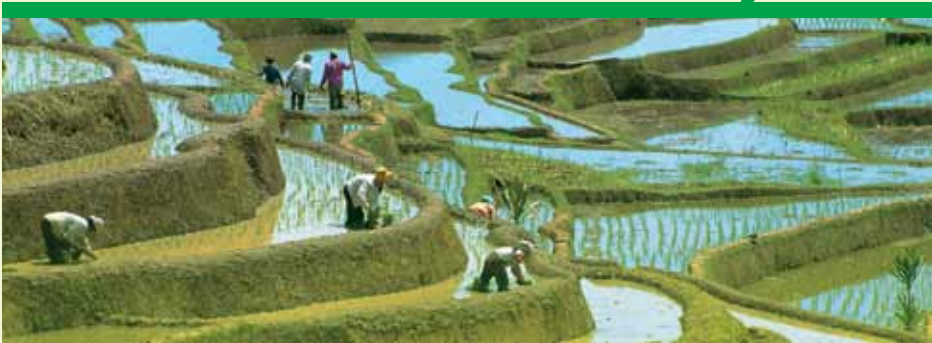




BAB I



PENDAHULUAN





Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2010-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi





kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan sekitar 3,90 %. Sub-sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja. Investasi di sektor pertanian primer baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2 % dan 18,6 % per tahun. Rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju pertumbuhan ekspor mencapai 7,4 % dan pertumbuhan impor 13,1 % per tahun. Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2 % per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010 – 2014. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014.



Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis, potensi perekonomian yang semula digerakkan oleh sumberdaya energi dan bahan baku asal fosil dituntut untuk dilakukan transformasi menjadi berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati. Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri dan revolusi teknologi informasi berbasis bahan



fosil telah berakhir dan digantikan oleh era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan bioengineering yang mampu menghasilkan biomasa sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain secara berkelanjutan. Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidro-karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslah ditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (*Biorevolution*). Untuk itu, pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah pembangunan *Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan* (Kementan, 2014).

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging , (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.





1.1. Kondisi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2010-2014

1.1.1. Produk Domestik Bruto

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) pada tahun 2014, yaitu sekitar 879,23 triliun rupiah atau 10,26 % dari PDB nasional yang besarnya 8.568,12 triliun rupiah (berdasarkan harga konstan tahun 2010). Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB pertanian sempit tersebut berkisar antara 3,47 hingga 4,58 % dengan rata-rata sekitar 3,90 %, pada saat yang sama PDB nasional tumbuh sekitar 5,70 %. Dengan adanya ketimpangan pertumbuhan tersebut, maka kontribusi pertanian semakin menurun dari 10,99 % di tahun 2010 menjadi 10,26 % dari total PDB nasional di tahun 2014.

1.1.2. Penyediaan Lapangan Kerja

Selama periode 2010-2014, sektor pertanian masih merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar, walaupun ada kecenderungan menurun. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010 sekitar 38,69 juta tenaga kerja atau sekitar 35,76% dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 35,76 juta tenaga kerja atau 30,27%. Data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier dari sistem dan usaha agribisnis. Bila tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar. Walaupun kemampuan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja nasional sangat besar, namun di sisi lain justru menjadi beban bagi sektor Pertanian dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya.



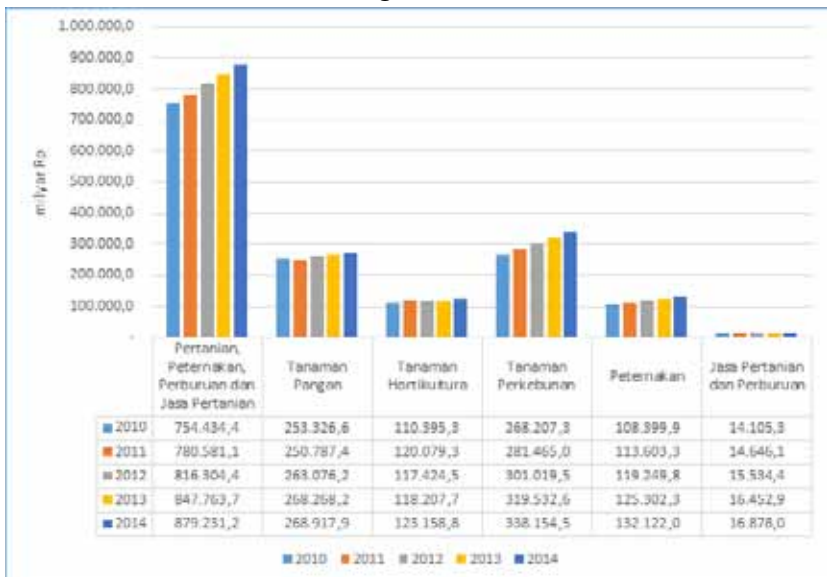


Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2011-2014

Subsektor	Pertumbuhan (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
PDB Nasional		6,17	6,03	5,58	5,02	5,70
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian		3,47	4,58	3,85	3,71	3,90
1.1. Tanaman Pangan		(1,00)	4,90	1,97	0,24	1,53
1.2. Tanaman Hortikultura		8,77	(2,21)	0,67	4,19	2,83
1.3. Tanaman Perkebunan		4,94	6,95	6,15	5,83	5,97
1.4. Peternakan		4,80	4,97	5,08	5,44	5,07
1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan		3,83	6,07	5,91	2,58	4,60

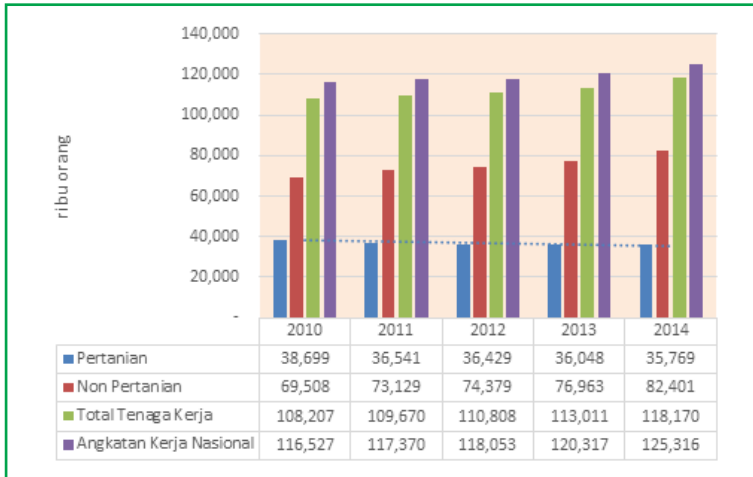
Sumber: BPS

Gambar 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010



Sumber: BPS

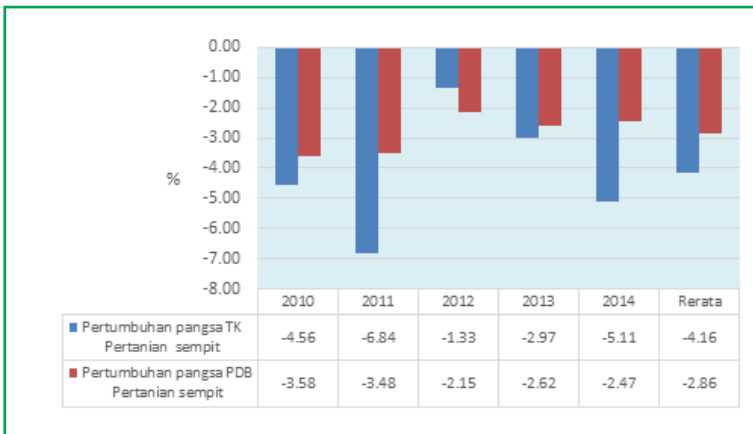




Gambar 2. Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2010-2014

Sumber: BPS (diolah)

Ket: tahun 2014: angka perkiraan



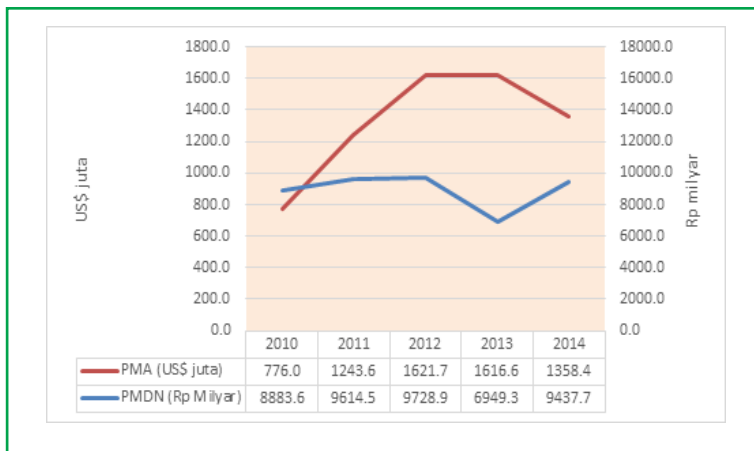
Gambar 3. Pertumbuhan Pangsa Tenaga Kerja Pertanian dan Pertumbuhan Pangsa PDB Pertanian Tahun 2010-2014



Bila disandingkan data pertumbuhan pangsa tenaga kerja pertanian dengan pertumbuhan pangsa PDB, maka pada periode tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan pangsa tenaga kerja pertanian sebesar -4,16 %/tahun dan pada saat yang bersamaan terjadi pula penurunan pertumbuhan pangsa PDB sebesar -2,86 %/tahun. Dengan membandingkan tingkat penurunan pangsa tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat penurunan pangsa PDB, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan perkapita tenaga kerja di sektor pertanian semakin membaik (Gambar 3).

1.1.3. Investasi Sektor Pertanian

Investasi sektor pertanian terdiri dari investasi swadaya petani, pemerintah dan swasta. Diperkirakan total investasi di sektor pertanian mencapai 400 trilyun rupiah di tahun 2014. Investasi sektor pertanian terbesar berasal dari swadaya petani dalam bentuk prasarana lahan serta sarana pendukungnya. Sedangkan investasi pemerintah melalui APBN dan APBD yang diperkirakan hanya sekitar 4 % dari total investasi di sektor pertanian.



Gambar 4. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Tahun 2010-2014

Sumber : BKPM (diolah PSEKP)
 Keterangan : *) angka proyeksi





Kontribusi investasi swasta terhadap total investasi di sektor pertanian sangat kecil, namun peningkatan investasi swasta di sektor pertanian akan mencerminkan kondisi yang kondusif bagi sektor pertanian sebagai tujuan investasi. Investasi merupakan penggerak pertumbuhan PDB sektor pertanian dimana makin tinggi investasi, maka makin besar pertumbuhan PDB sektor pertanian.

Salah satu indikator aliran investasi ke sektor pertanian adalah persetujuan investasi di sektor tersebut. Selama periode 2010-2014 persetujuan investasi di sektor pertanian dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) fluktuatif namun masih meningkat dengan pertumbuhan sekitar 4,2 %/tahun. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 18,6 %/tahun. Nilai investasi PMDN di sektor pertanian di tahun 2014 adalah sekitar 9,43 triliun rupiah, sedangkan untuk PMA sekitar 1,35 milyar US\$.

Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus pada sub- sektor tanaman pangan dan perkebunan, dibandingkan dengan sub-sektor peternakan. Pada periode 2010-2014, realisasi investasi PMDN dan PMA pada sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan mencapai 98%. Sementara sisanya adalah investasi di sub-sektor peternakan.

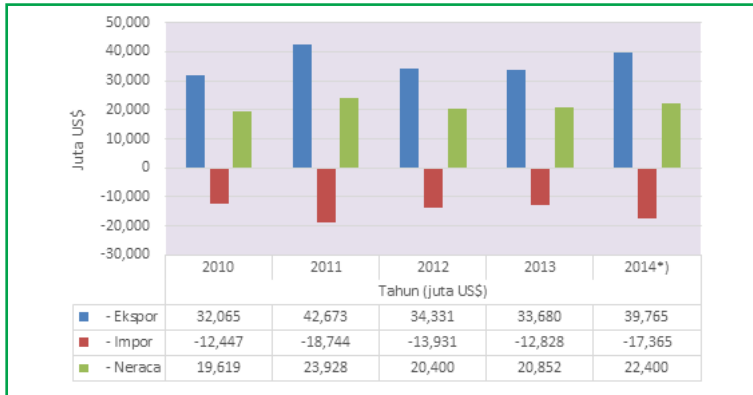
Investasi PMDN pertanian di sektor sekunder berupa investasi industri hasil pertanian pada periode 2010-2013 mengalami penurunan sebesar 23%, sementara itu, investasi PMA meningkat dengan laju 14%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor primer. Hal ini terjadi karena pertanian Indonesia masih berupaya mencapai dan mempertahankan swasembada pangan terutama beras untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk dan konsumsinya.

1.1.4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian

Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus. Hal ini karena sumbangan surplus neraca perdagangan sub-sektor perkebunan yang relatif besar, sementara sub-sektor lainnya cenderung pada posisi defisit. Laju pertumbuhan ekspor selama periode 2010-2014 sebesar 7,4 %/



tahun, sementara laju pertumbuhan impor lebih tinggi yaitu sekitar 13,1 %/tahun, walaupun demikian secara rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan masih tumbuh positif dengan laju 4,2 %/tahun (Gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan Ekspor - Impor dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014

Bila ditelaah berdasarkan subsektor, maka kondisi perdagangan komoditas tanaman pangan Indonesia dalam posisi defisit atau dengan kata lain bahwa Indonesia menjadi negara *net importer*. Komoditas pangan yang menyumbang impor terbesar adalah gandum, kedelai diikuti oleh jagung dan beras. Sebaliknya komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah ubi kayu.

Neraca perdagangan produk hortikultura masih mengalami defisit. Namun demikian, kinerja ekspor produk hortikultura mengalami peningkatan rata sebesar 19,9 %/tahun, sedangkan impornya tumbuh hanya 12,6 %/tahun. Kondisi defisit neraca perdagangan hortikultura terutama terjadi pada kelompok komoditas buah dan





sayur, sementara pada tanaman obat dan tanaman hias menunjukkan surplus perdagangan. Buah-buahan manggis dan mangga menjadi penyumbang ekspor terbesar sedangkan untuk kelompok sayuran adalah kol, wortel, tomat dan kentang. Sebaliknya, buah-buahan yang dominan menyedot devisa adalah durian dan jeruk dan untuk kelompok sayuran adalah bawang merah, bawang putih, kentang dan wortel.

Tabel 2. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014

No	Sub Sektor	Tahun (juta US\$)				
		2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Tanaman Pangan					
	- Ekspor	478	585	151	967	560
	- Impor	3.894	7.024	6.307	5.659	6.481
	- Neraca	-3.416	-6.439	-6.156	-4.692	-5.921
2	Hortikultura					
	- Ekspor	391	491	505	784	752
	- Impor	1.293	1.686	1.813	1.469	1.929
	- Neraca	-902	-1.195	-1.309	-685	-1.176
3	Perkebunan					
	- Ekspor	30.703	40.690	33.119	30.687	37.123
	- Impor	6.028	8.844	3.112	2.686	5.926
	- Neraca	24.675	31.846	30.007	28.002	31.197
4	Peternakan					
	- Ekspor	494	907	557	1.243	1.330
	- Impor	1.232	1.191	2.698	3.015	3.029
	- Neraca	-737	-284	-2.142	-1.772	-1.699
	PERTANIAN					
	- Ekspor	32.065	42.673	34.331	33.680	39.765
	- Impor	12.447	18.744	13.931	12.828	17.365
	- Neraca	19.619	23.928	20.400	20.852	22.400

Sumber: BPS (diolah Ditjen PPHP)

Sub-sektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor terbesar di sektor pertanian dengan nilai ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan nilai impornya. Sebagian besar produk perkebunan utama diekspor ke negara-negara lain. Sedangkan produk turunan yang diimpor adalah gula yang selama ini masih diimpor dalam



bentuk *raw sugar*. Ekspor komoditas perkebunan hanya tumbuh dengan laju 6,9 %/tahun, sementara impor tumbuh dengan laju sebesar 22,2%/tahun. Laju pertumbuhan nilai ekspor sebagian komoditas perkebunan seperti kakao, tembakau dan teh mengalami percepatan, dan sebagian mengalami perlambatan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan tebu.

Komoditas peternakan utama Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional terdiri dari daging (sapi, kambing/domba, babi, ayam), ternak hidup sumber daging (sapi, kerbau, babi, kambing), hati/jeroan, telur untuk konsumsi, dan susu. Laju pertumbuhan nilai ekspor sub-sektor peternakan rata-rata sebesar 43,8%/tahun, sedangkan laju pertumbuhan nilai impornya meningkat 33,9%/tahun. Kondisi ini mencerminkan defisit neraca perdagangan sub-sektor peternakan dan besaran defisit neraca perdagangan cenderung menurun. Secara keseluruhan, sumber defisit neraca perdagangan komoditas peternakan yang terbesar adalah impor susu, ternak sapi dan daging sapi, dengan jumlah yang sangat besar, sementara sumber surplus hanya ekspor ternak babi yang jumlahnya sangat kecil.

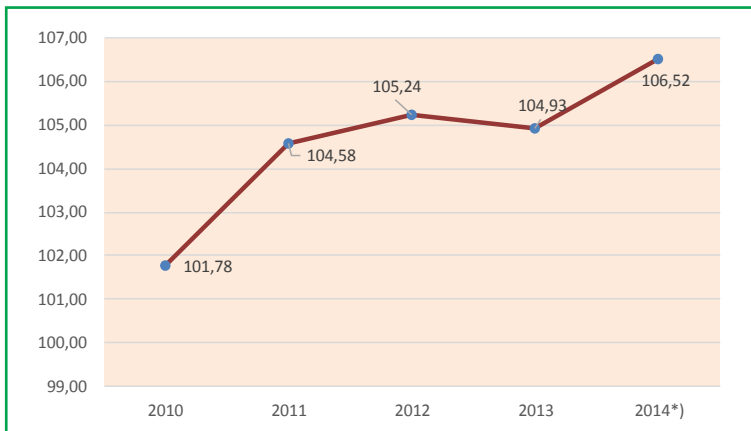
1.1.5. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan harga barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Umumnya,





NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Namun demikian, sebagai alat ukur kesejahteraan petani, penggunaan asumsi tingkat produksi yang tetap dinilai kurang relevan, karena kuantitas tetap berarti NTP tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Karena itu NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. Dengan kata lain, bahwa NTP bukan mutlak sebagai ukuran kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga yang dilakukan Kementerian Pertanian, namun belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani.



Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010 – 2014

Ket: tahun dasar 2007=100

Tahun 2014 adalah data sementara

Selama periode 2010 – 2014, secara umum NTP meningkat walaupun sempat menurun pada tahun 2013. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada tahun 2011. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan indeks harga yang dibayar petani.



Peningkatan indeks harga yang diterima petani merupakan hasil dari kebijakan Kementerian Pertanian dalam upaya perlindungan harga komoditas pertanian, sedangkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani merupakan hasil kebijakan diluar kendali Kementerian Pertanian. Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani, namun hal ini dapat memacu inflasi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks harga yang dibayar petani tidak terlalu progresif.

1.1.6. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Tingkat kesejahteraan petani diukur dari: (1) pendapatan per kapita; (2) tingkat kemiskinan dan (3) tingkat kerawanan pangan rumah tangga pertanian.

A. Pendapatan Perkapita

Kesejahteraan petani yang diukur dengan pendapatan/kapita diperoleh dengan menghitung nilai produk domestik bruto (PDB) total, pertanian luas dan pertanian sempit masing-masing dibagi dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang terlibat dalam pertanian luas dan jumlah penduduk yang terlibat dalam pertanian sempit. Data yang tersedia di tingkat nasional untuk pertanian luas dan sempit adalah jumlah rumah tangga di masing-masing kategori. Oleh karena itu, untuk menghitung jumlah penduduk dalam pertanian luas dan sempit diperoleh dengan mengalikan jumlah rumah tangga masing-masing di pertanian luas dan sempit dengan





jumlah anggota rumah tangga (diasumsikan jumlah anggota rumah tangga adalah empat orang). Berdasar perhitungan tersebut data pada Tabel 3 menunjukkan perkembangan pendapatan/kapita petani masing-masing untuk perhitungan berdasarkan PDB dengan harga konstan tahun 2000.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasar harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 % dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010–2014. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan, namun demikian secara nominal tingkat pendapatan/kapita petani tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2014 misalnya, tingkat pendapatan/kapita pertanian dalam arti luas dan sempit masing-masing sekitar Rp 9.032/kapita/hari dan Rp 7.966/kapita/hari; padahal berdasarkan Bank Dunia batas garis kemiskinan adalah pendapatan US\$ 2/kapita/hari, dengan tingkat kurs US\$ terhadap rupiah tahun 2014 yang telah melewati Rp 10.000/1US\$ tentu menunjukkan masih relatif rendahnya tingkat kesejahteraan petani atau penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Tabel 3. Perkembangan PDB Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2010-2014 atas Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp 000)

Tahun	PDB Total/Kapita	PDB Pertanian Luas/ TK Pertanian Luas	PDB Pertanian Sempit/ TK Pertanian Sempit
2010	9.703,46	7.116,64	6.120,72
2011	10.192,14	7.416,99	6.662,32
2012	10.683,12	7.950,24	6.947,53
2013	11.146,91	8.724,54	7.639,48
2014*	11.641,88	9.032,85	7.966,07

Sumber: BPS (diolah)

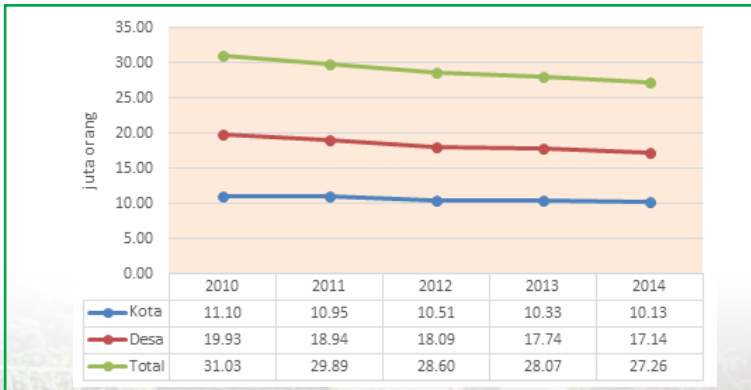
Ket: * Data perkiraan





B. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di pertanian didekati dengan menggunakan data jumlah dan persentase penduduk miskin di desa. Jumlah penduduk miskin di desa umumnya lebih banyak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan di kota. Pada periode 2010-2014, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2010 sebanyak 11,10 juta berkurang sebesar -2,25 %/tahun sehingga menjadi 10,13 juta di tahun 2014. Karena sebagian besar penduduk perdesaan bermata pencaharian di sektor pertanian, maka dapat dimaknai bahwa tingkat kemiskinan di sektor pertanian kondisinya lebih banyak dibanding di sektor lainnya.



Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2014

Sumber: BPS (diolah)
Ket: 2014 angka sementara





C. Kerawanan Pangan Rumah Tangga

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan katagori *kronis* untuk jangka panjang dan *transien* untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.000 kkal/hari. Jika konsumsi perkapita adalah kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90 % dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90 % dari AKG termasuk katagori tahan pangan.

Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan bencana tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upayaantisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2010–2013

Rincian	2010	2011	2012	2013	Pertumbuhan (%/Tahun)
1. Jumlah Penduduk Sangat Rawan ^{a)} :					
a. Jumlah (juta Jiwa)	35,71	42,08	47,65	47,02	5,96
b. Persentase	15,34	17,41	19,46	19,04	4,81
2. Jumlah Penduduk Rawan ^{b)} :					
a. Jumlah (juta Jiwa)	72,44	78,49	80,58	83,65	3,23
b. Persentase	31,12	32,48	32,91	33,87	2,12
3. Jumlah Penduduk Tahan Pangan ^{c)} :					
a. Jumlah (juta Jiwa)	124,61	121,01	116,61	116,31	-1,95
b. Persentase	53,53	50,10	47,63	47,09	-3,03

Sumber data: BPS tahun 2011 - 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian,

Catatan: (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; dan (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,

Jumlah penduduk yang sangat rawan pangan pada tahun 2011 sekitar 42,08 juta orang bertambah menjadi 47,65 juta pada tahun 2012, pada tahun 2013 menurun sedikit menjadi 47,02 juta.



Sementara itu, penduduk yang rawan pangan pada tahun 2011 mencapai 78,49 juta orang, bertambah menjadi 80,58 juta pada tahun 2012, dan bertambah lagi menjadi 83,65 juta pada tahun 2013. Sedangkan penduduk tahan pangan pada tahun 2011 sebanyak 121,01 juta orang, menurun menjadi 116,61 juta pada tahun 2012, dan pada tahun 2011 berkurang menjadi 116,31 juta. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan.

1.1.7. Capaian Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2010-2014

A. Produksi Tanaman Pangan

Produksi padi antara tahun 2010-2014 meningkat rata-rata sebesar 1,63 %/tahun. Demikian pula produksi jagung meningkat walaupun dengan tingkat yang lebih rendah yaitu sekitar 1,11 %/tahun dan produksi kedelai meningkat sebesar 1,93 %/tahun.

Tabel 5. Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditas		2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertumbuhan
			(ribu ton)					(%)
1	Padi	Jawa	36.375	34.405	36.527	37.493	36.659	0,29
		Luar Jawa	30.094	31.352	32.529	33.787	34.173	3,24
		Indonesia	66.469	65.757	69.056	71.280	70.832	1,63
2	Jagung	Jawa	9.944	9.467	10.712	10.095	10.159	0,81
		Luar Jawa	8.383	8.176	8.675	8.416	8.874	1,52
		Indonesia	18.328	17.643	19.387	18.512	19.033	1,11
3	Kedelai	Jawa	633	574	604	522	622	0,37
		Luar Jawa	274	277	240	258	332	5,98
		Indonesia	907	851	844	780	954	1,93

Ket: 2014 data ASEM



**Tabel 6. Luas Panen Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014**

No	Komoditas		2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertumbuhan
			(ribu hektar)					(%)
1	Padi	Jawa	6.358	6.165	6.186	6.467	6.000	0,20
		Luar Jawa	6.895	7.038	7.260	7.368	7.393	1,76
		Indonesia	13.253	13.203	13.446	13.835	13.793	1,01
2	Jagung	Jawa	2.139	1.945	2.011	1.959	1.954	-2,13
		Luar Jawa	1.993	1.919	1.946	1.863	1.844	-1,36
		Indonesia	4.132	3.864	3.957	3.821	3.838	-1,77
3	Kedelai	Jawa	439	404	382	343	379	-3,28
		Luar Jawa	221	218	186	208	236	2,31
		Indonesia	660	622	568	551	615	-1,45

Ket: 2014 data ASEM

Tabel 7. Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditas		2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertumbuhan
			(ku/ha)					%
1	Padi	Jawa	57,21	55,81	59,05	57,98	57,28	0,08
		Luar Jawa	43,65	44,54	44,81	45,85	46,22	1,45
		Indonesia	50,15	49,80	51,36	51,52	51,35	0,60
2	Jagung	Jawa	46,49	48,65	53,26	51,54	51,98	2,94
		Luar Jawa	42,07	42,61	44,57	45,19	47,11	2,88
		Indonesia	44,36	45,65	48,99	48,44	49,59	2,87
3	Kedelai	Jawa	14,40	14,20	15,80	15,23	16,42	3,49
		Luar Jawa	12,38	12,71	12,90	12,41	14,06	3,38
		Indonesia	13,73	13,68	14,85	14,16	15,51	3,25

Ket: 2014 data ASEM

Pemicu peningkatan produksi padi diantaranya karena peningkatan luas panen seluas 540 ribu ha dan produktivitas sebesar 1,20 ku/ha. Pertumbuhan luas panen padi di Jawa hanya sekitar 0,20 %/tahun sedangkan di luar Jawa sekitar 1,76 %/tahun. Demikian pula dengan



peningkatan produktivitas padi di Jawa hanya sekitar 0,08 %/tahun sedangkan di luar Jawa sekitar 1,45 %/tahun.

Peningkatan produksi jagung terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sekitar 2,87 %/thn, walaupun luas panen mengalami penurunan sekitar -1,77 %/tahun. Luas panen jagung baik di Jawa maupun di luar Jawa mengalami penurunan. Sedangkan luas panen kedelai terjadi penurunan yang besar di Jawa (-3,28 %/thn) dan meningkat di luar Jawa (2,31 %/thn). Produktivitas jagung dan kedelai baik di Jawa maupun di luar Jawa mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

B. Produksi Hortikultura

Produksi komoditas utama hortikultura selama kurun waktu 2010–2014 menunjukkan pola yang berfluktuatif. Hal ini terjadi tidak hanya pada komoditas sayuran, tetapi juga pada kelompok komoditas buah dan florikultura. Selama periode tahun 2010-2014, laju pertumbuhan produksi tertinggi adalah pada komoditas mangga yaitu sebesar 21,95 %/tahun, disusul manggis, krisan dan temulawak masing-masing sebesar 13,82 %, 12,26 % dan 11,00 %. Sebaliknya laju pertumbuhan produksi terkecil yaitu pada cabe merah, kentang dan jeruk yang pertumbuhannya di bawah 4,13 %/tahun.

Komoditas utama hortikultura yang mengalami peningkatan produktivitas yang tinggi diantaranya krisan, salak, dan cabe rawit. Namun demikian ada juga komoditi hortikultura yang mengalami penurunan produktivitas seperti mangga, jeruk, manggis dan temulawak.



**Tabel 8. Produksi Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014**

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014 *	Rerata Pertum- buan
		(ton)					(%/thn)
1	Cabe Besar	807.160	888.852	954.310	1.012.879	926.000	3,76
2	Cabe Rawit	521.704	594.227	702.214	713.502	598.700	4,40
3	Bawang Merah	1.048.934	893.124	964.195	1.010.773	1.201.900	4,21
4	Kentang	1.060.805	955.488	1.094.232	1.124.282	1.211.400	3,77
5	Mangga	1.287.287	2.131.139	2.376.333	2.192.928	2.598.092	21,95
6	Pisang	5.755.073	6.132.695	6.189.043	6.279.279	7.070.489	5,38
7	Jeruk	2.028.904	1.818.949	1.611.768	1.654.732	2.243.837	4,13
8	Durian	492.139	883.969	888.127	759.055	846.503	19,27
9	Manggis	84.538	117.595	190.287	139.602	113.096	13,82
10	Salak	749.876	1.082.125	1.035.406	1.030.401	980.969	8,68
11	Temulawak	26.671	24.105	44.085	33.441	31.729	11,00
12	Krisan **	185.232	305.867	397.651	387.208	218.910	12,26
13	Melati	21.600	22.541	22.862	30.258	26.544	6,46

Ket:

*) *Angka Sementara*

**) *Satuan produksi dalam ribu tangkai*

***) *Satuan produksi dalam Kg*

Bila dilihat dari luas panen, maka komoditas hortikultura yang mengalami peningkatan luas panen adalah mangga, manggis, durian dan temu lawak. Komoditas lain tidak mengalami kenaikan luas panen yang signifikan, bahkan beberapa diantaranya cenderung menurun.





Tabel 9. Luas Panen Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014 *	Rerata Per-tumbuhan
		(ha)					(%/thn)
1	Cabe Besar	122.755	121.063	120.275	124.110	113.078	(1,93)
2	Cabe Raw1it	114.350	118.707	122.091	125.122	105.196	(1,71)
3	Bawang Merah	109.634	93.667	99.519	98.937	116.977	2,33
4	Kentang	66.531	59.882	65.989	70.187	75.778	3,54
5	Mangga	131.674	208.280	219.667	247.239	298.983	23,93
6	Pisang	101.276	104.156	103.158	103.449	117.864	4,03
7	Jeruk	57.083	51.688	51.793	53.516	43.170	(6,34)
8	Durian	46.290	69.045	63.189	61.246	68.983	12,53
9	Manggis	10.231	16.180	17.850	18.200	15.305	13,62
10	Salak	27.223	24.729	26.944	29.711	28.366	1,15
11	Temulawak **	14.406	13.599	18.606	19.069	19.125	10,06
12	Krisan **	10.535	8.811	9.852	9.080	5.127	(13,08)
13	Melati **	8.115	7.522	8.278	9.790	8.270	1,57

Ket:

*) Angka Sementara

**) Satuan dalam ribu m²

Tabel 10. Produktivitas Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014 *	Rerata Pertumbuhan
		(ton/ha)					(%/thn)
1	Cabe Besar	6,58	7,34	7,93	8,16	8,19	5,71
2	Cabe Rawit	4,56	5,01	5,75	5,70	5,69	5,90
3	Bawang Merah	9,57	9,54	9,69	10,22	10,27	1,73
4	Kentang	15,94	15,96	16,58	16,02	15,99	0,08
5	Mangga	9,78	10,23	10,82	8,87	8,69	(3,41)
6	Pisang	56,83	58,88	60,70	60,00	59,99	1,38
7	Jeruk	52,82	58,04	52,66	51,99	51,98	(0,17)
8	Durian	10,63	12,80	14,06	12,39	12,27	3,95
9	Manggis	8,26	7,27	10,66	7,67	7,39	(2,00)
10	Salak	27,55	43,76	38,43	34,68	34,58	8,89
11	Temulawak ***	1,85	1,77	2,37	1,87	1,66	(0,49)
12	Krisan **	17,58	34,71	40,36	42,64	42,70	29,87
13	Melati ***	2,66	3,00	2,76	3,09	3,21	5,13

Ket:

*) Angka Sementara

**) Satuan produksi dalam tangkai/m²

***) Satuan dalam Kg/m²





C. Produksi Perkebunan

Pola pertumbuhan produksi komoditas perkebunan unggulan nasional selama periode 2010-2014 bervariasi. Terdapat 12 komoditas yang menunjukkan pola positif, yaitu tembakau, kelapa sawit, kapas, cengkeh, karet, tebu, lada, kopi, nilam, kakao dan kelapa. Sedangkan tiga komoditas lainnya, yaitu jarak pagar, teh dan jambu mete karena berbagai kendala menunjukkan pola pertumbuhan produksi negatif dengan laju penurunan rata-rata sekitar -1,18 sampai -12,14 %/tahun. Kemiri sunan tidak mengalami kinerja produksi yang menggembirakan karena sampai dengan tahun 2013 capaian produksi sangat rendah.

Tabel 11. Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013*	2014**)	Rerata Per-tumbuhan
		(ton)					(%/thn)
1	Karet	2.734.854	2.990.184	3.012.254	3.107.544	3.204.503	4,09
2	Kelapa Sawit	21.958.120	23.096.541	26.015.518	27.746.125	29.512.764	7,71
3	Kelapa	3.166.666	3.174.379	3.189.897	3.228.110	3.262.721	0,75
4	Kopi	686.921	638.646	691.163	698.887	711.513	1,03
5	Kakao	837.918	712.231	740.513	777.539	817.322	-0,23
6	Jambu Mete	115.149	114.789	116.915	117.537	118.174	0,65
7	Lada	83.663	87.089	88.160	89.724	89.622	1,75
8	Cengkeh	98.386	72.207	99.890	100.725	101.670	3,38
9	Teh	156.604	150.776	145.575	146.682	147.704	-1,43
10	Jarak Pagar	7.081	6.576	6.424	6.218	3.023	-16,01
11	Kemiri Sunan	2	1	0	0	0	-37,50
12	Tebu	2.290.116	2.267.887	2.591.687	2.550.991	2.790.000	5,28
13	Kapas	3.174	2.275	2.948	853	1.782	9,78
14	Tembakau	135.678	214.524	260.818	260.183	261.659	20,00
15	Nilam	2.206	2.866	2.648	2.659	2.690	5,97

Ket:

*) Data sementara

**) Data estimasi

Setelah tahun 2011, tanaman kemiri sunan tidak dipanen karena tidak ada UPH (unit pengolahan hasil) sehingga tidak ada realisasi produksi



Berbagai komoditi perkebunan sebagian diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN biasanya mengelola komoditas kelapa sawit, teh dan karet.

Tabel 12. Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013*	2014 **)	Rerata Per-tumbuhan
		(ha)					(%/thn)
1	Karet	3.445.415	3.456.128	3.506.201	3.555.763	3.606.128	0,98
2	Kelapa Sawit	8.385.394	8.992.824	9.572.715	10.010.824	10.261.784	5,46
3	Kelapa	3.739.350	3.767.704	3.781.649	3.787.283	3.792.511	-0,03
4	Kopi	1.210.365	1.233.698	1.235.289	1.240.919	1.246.545	-0,29
5	Kakao	1.650.356	1.732.641	1.774.463	1.852.944	1.944.663	4,15
6	Jambu Mete	570.930	575.841	575.920	576.181	577.168	0,15
7	Lada	179.318	177.490	177.787	178.251	178.945	-0,75
8	Cengkeh	470.041	485.191	493.888	494.462	495.404	1,18
9	Teh	122.898	123.938	122.206	122.545	122.991	-0,08
10	Jarak Pagar	50.106	47.676	47.397	47.407	28.581	-10,02
11	Kemiri Sunan	918	944	962	962	995	5,20
12	Tebu	454.111	451.788	451.255	469.227	449.873	0,42
13	Kapas	10.194	10.238	9.565	3.130	5.600	-2,75
14	Tembakau	216.271	228.770	270.290	270.232	270.992	5,99
15	Nilam	24.472	28.008	29.381	29.783	31.288	5,10

Ket:

*) *Data sementara*

**) *Data estimasi*

Meningkatnya produksi pada beberapa komoditas perkebunan antara lain disebabkan oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/benih bervariasi unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, pemberdayaan petani, penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT), pemeliharaan kebun induk, fasilitas bibit/benih unggul, penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).





Untuk tembakau, dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada daerah penghasil tembakau, menjadikan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada para pekebun tembakau di wilayahnya secara intensif.

**Tabel 13. Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan
Tahun 2010-2014**

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013*	2014 **)	Rerata Per-tumbuhan
		(kg/ha)					(%/thn)
1	Karet	793,77	865,18	859,12	873,95	1.107,00	9,17
2	Kelapa Sawit	2.618,62	2.568,33	2.717,67	2.771,61	3.982,00	12,39
3	Kelapa	846,85	842,52	843,52	852,36	1.181,00	9,80
4	Kopi	567,53	517,67	559,52	563,20	763,00	8,86
5	Kakao	507,72	411,07	417,32	419,62	911,00	25,03
6	Jambu Mete	201,69	199,34	203,01	203,99	367,00	20,27
7	Lada	466,56	490,67	495,87	503,36	782,00	15,77
8	Cengkeh	209,31	148,82	202,25	203,71	330,00	17,43
9	Teh	1.274,26	1.216,54	1.191,23	1.196,96	1.480,00	4,38
10	Jarak Pagar	462,00	434,00	310,00	302,00	246,00	-13,94
11	Kemiri Sunan	667,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tebu	5.043,08	5.019,80	5.743,28	5.436,58	6.543,84	7,24
13	Kapas	311,36	222,18	308,19	272,52	325,00	4,44
14	Tembakau	627,35	937,73	964,96	962,81	973,00	13,30
15	Nilam	119,00	132,00	144,00	145,00	109,00	-1,03

Ket:

*) Data sementara

**) Data estimasi

Pengembangan tanaman karet difokuskan pada sentra-sentra pengembangan di koridor ekonomi MP3EI Sumatera dan Kalimantan serta perluasan areal di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca konflik, pemberdayaan petani dan pembangunan/pemeliharaan kebun sumber bahan tanam.

Peningkatan produksi tebu cukup signifikan sebagai hasil dari kegiatan perluasan areal tebu dan penerapan sistem tebang





Manis, Bersih dan Segar (MBS), fasilitasi penyediaan benih unggul bermutu, bantuan alat dan sarana produksi bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan areal pada daerah potensial pengembangan tebu.

Untuk tanaman bahan baku energi terbarukan, pengembangan kemiri sunan selama periode 2010-2014 baru dimulai rintisan pada tahun 2011 dan diarahkan pada perluasan areal penanaman sehingga diproyeksikan baru berproduksi pada tahun 2015. Jarak pagar masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar dapat dihasilkan varietas unggul baru, teknik budidaya jarak pagar yang produktivitasnya tinggi dan sistem usahanya di tingkat petani yang dapat menghasilkan keuntungan. Kementerian Pertanian sudah mengembangkan kopi *specialty* jauh sebelum tahun 2009 yang memiliki cita rasa khas tertentu dari daerah sentra pengembangan kopi baik arabika maupun robusta.



Penurunan produksi pada beberapa komoditas disebabkan karena anomali iklim. Selain itu, penurunan produksi disebabkan oleh penurunan luas areal, serta rendahnya produktivitas karena tanaman tua seperti yang dialami pada perkebunan teh. Selain itu menurunnya produksi juga disebabkan pada komoditi yang mengalami tingkat harga yang kurang menguntungkan seperti pada komoditas teh sehingga petani kurang bergairah merawat tanamannya.

D. Produksi Peternakan

Produksi hasil peternakan terdiri dari produksi daging, telur, dan susu. Produksi secara nasional untuk daging dan telur selama tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang cukup berarti yaitu masing masing sebesar 5,98 dan 7,08 %/thn. Sedangkan produksi susu mengalami penurunan sebesar -2,73 %/thn.



**Tabel 14. Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2010 – 2014**

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014 *)	Rerata Per-tumbuhan
		(ribu ton)					(%/thn)
	DAGING:	2.366,20	2.554,20	2.666,10	2.882,00	2.982,60	5,98
1	Sapi	436,5	485,3	508,9	504,8	540	5,55
2	Kerbau	35,9	35,3	37	37,8	41,2	3,58
3	Kambing	68,8	66,3	65,2	65,2	67,9	-0,29
4	Domba	44,9	46,8	44,4	41,5	43,6	-0,59
5	Babi	212	224,8	232,1	298,4	311,1	10,53
6	Kuda	2	2,2	2,9	1,8	2,5	10,69
7	Ayam Buras	267,6	264,8	267,5	319,6	332,1	5,84
8	Ayam Ras Petelur	57,7	62,1	66,1	77,1	81	8,94
9	Ayam Ras Pedaging	1.214,30	1.337,90	1.400,50	1.497,90	1.524,90	5,90
10	Itik	26	28,2	30,1	32,1	32,5	5,77
11	Kelinci	0,1	0,2	0,4	0,6	0,5	58,33
12	Burung Puyuh	-	0,1	6,9	0,9	0,9	2.237,68
13	Merpati	0,4	0,1	0,6	0,2	0,2	89,58
14	Itik Manila	-	-	3,6	4	4,4	10,56
	TELUR:	1.379,60	1.479,80	1.628,70	1.728,30	1.812,80	7,08
15	Ayam Buras	175,5	187,6	197,1	194,6	197,4	3,03
16	Ayam Ras Petelur	945,6	1.027,80	1.139,90	1.224,40	1.299,20	8,28
17	Itik	245	256,2	265	264,1	267,8	2,27
18	Burung Puyuh	13,4	8,2	15,8	18,9	19,1	18,64
19	Itik Manila	-	-	11	26,3	29,3	75,25
20	SUSU	909,5	974,7	959,7	786,8	798,4	-2,73

Sumber data : Data Statistik Ditjen PKH 2013, *= angka sementara





Produksi daging tahun 2014 mencapai 2,98 juta ton. Produksi daging ini sebagian besar yaitu 52% berasal dari daging ayam ras pedaging. Sedangkan daging sapi berkontribusi 19,2% terhadap total produksi daging nasional. Sedangkan produksi telur tahun 2014 mencapai 1,81 juta ton, yang terdiri dari telur ayam ras petelur (71,1%) dan lainnya berupa telur ayam buras, itik burung puyuh dan itik manila.

Tabel 15. Populasi Ternak Tahun 2010 – 2014

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014 *)	Rerata Pertumbuhan
		(Ribu ekor)					(%/thn)
I	RUMINANSIA						
1	Sapi Potong	13.582	14.824	15.981	12.686	14.703	3,1
2	Sapi Perah	488	597	612	444	483	1,5
3	Kerbau	2.000	1.305	1.438	1.110	1.321	(7,1)
4	Kambing	16.620	16.946	17.906	18.500	19.216	3,7
5	Domba	10.725	11.791	13.420	14.926	15.716	10,1
II	NON RUMINANSIA						0,0
1	Babi	7.477	7.525	7.900	7.611	7.873	1,4
2	Kuda	419	409	437	434	455	2,2
3	Kelinci	834	760	1.075	1.137	1.054	7,8
III	UNGGAS						0,0
1	Ayam Buras	257.544	264.340	274.564	276.777	286.538	2,7
2	Ayam Ras Petelur	105.210	124.636	138.718	146.622	154.657	10,2
3	Ayam Ras Pedaging	986.872	1.177.991	1.244.402	1.344.191	1.481.872	10,8
4	Itik	44.302	43.488	44.357	43.710	44.095	(0,1)
5	Puyuh	7.054	7.357	12.234	12.553	12.635	18,5
6	Merpati	490	1.209	1.806	2.139	2.163	53,9
7	Itik Manila	-	-	4.938	7.645	8.680	34,2

Sumber data : Data Statistik Ditjen PKH 2013, *= angka sementara

Produksi susu nasional tahun 2014 mencapai 0,79 juta ton. Produksi susu ini masih terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana mencapai 97 % dari total produksi susu nasional.





1.1.8. Faktor Pendukung Pembangunan Pertanian

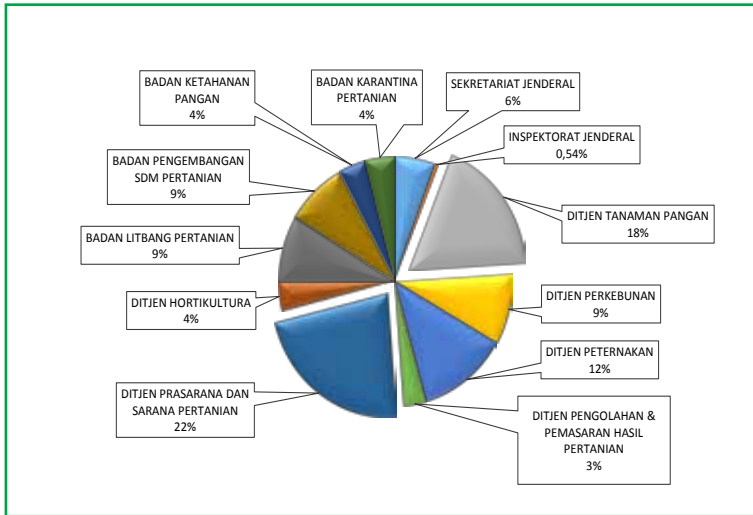
A. APBN Kementerian Pertanian

Selama tahun 2010 hingga tahun 2014, alokasi APBN Kementerian Pertanian memperlihatkan tren yang terus meningkat, kecuali di tahun 2014 mengalami penurunan. APBN Kementerian Pertanian tercatat sebesar Rp 8,03 triliun pada tahun 2010, kemudian terus meningkat secara fluktuatif hingga pada tahun 2014 mencapai Rp 13,61 triliun.

Tabel 16. Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

No	Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Juta rupiah					
1	Sekretariat Jenderal	1.417.466	555.151	603.977	550.196	1.103.063	4.229.852
2	Inspektorat Jenderal	66.097	67.510	67.237	69.837	65.528	336.209
3	Ditjen Tanaman Pangan	892.368	2.839.939	4.522.601	3.138.097	2.273.832	13.666.837
4	Ditjen Perkebunan	454.116	1.975.106	1.459.989	1.772.821	1.316.320	6.978.352
5	Ditjen Peternakan	940.690	2.297.274	2.542.691	2.292.426	1.391.464	9.464.544
6	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	326.709	404.068	503.078	650.842	502.959	2.387.656
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	755.184	5.260.940	4.473.221	3.773.473	2.715.886	16.978.703
8	Ditjen Hortikultura	330.276	606.336	565.520	809.546	524.670	2.836.348
9	Badan Litbang Pertanian	908.282	1.103.372	1.267.436	1.778.051	1.558.099	6.615.240
10	Badan Pengembangan SDM Pertanian	1.161.788	1.319.925	1.416.122	1.434.296	1.098.836	6.430.967
11	Badan Ketahanan Pangan	397.684	628.970	687.547	692.070	458.545	2.864.816
12	Badan Karantina Pertanian	387.390	542.867	734.304	857.891	603.845	3.126.296
	TOTAL	8.038.049	17.601.457	18.843.722	17.819.545	13.613.046	75.915.819

Bila diakumulasikan selama periode 2010 - 2014, total anggaran Kementerian Pertanian sekitar Rp 75,91 trilyun. Anggaran terbesar adalah untuk mendukung program pengembangan infrastruktur pertanian pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (22%), disusul dengan program pada Ditjen Tanaman Pangan (18%) dan program pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (12%).



Gambar 8. Proporsi Anggaran APBN Kementerian Pertanian pada Eselon I Akumulasi Tahun 2010-2014

B. Pengembangan Kapasitas Institusi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mendukung tercapainya Empat Target Sukses Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian telah melakukan penataan manajemen pembangunan dan pemerintahan di bidang pertanian. Secara garis besar pengembangan kapasitas institusi Kementerian Pertanian telah dilakukan melalui: (1) pengembangan sumber daya manusia aparatur; (2) penguatan organisasi dan (3) reformasi kelembagaan. Disamping itu telah dilakukan identifikasi kesenjangan kapasitas institusi seluruh unit kerja serta pengembangan kompetensi aparatur untuk dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan dan mengkoordinasikan pembinaan pembangunan di sektor pertanian. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.





Salah satu kebijakan pembangunan pertanian 2010-2014 yang telah berhasil dilakukan adalah peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip *clean government* dan *good governance*. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai capaian audit kinerja birokrasi dan audit laporan keuangan serta semakin menurunnya kerugian negara dari penyimpangan pengelolaan APBN. Kondisi tersebut telah dicapai melalui: (1) penataan unit kerja di pusat maupun di daerah (UPT), (2) Peningkatan kapasitas aparatur untuk pengembangan sikap dan perilaku, (3) peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis melalui kegiatan reguler dalam bentuk serangkaian workshop, simposium, seminar, pendidikan dan pelatihan serta (4) pembinaan etos kerja, moral dan disiplin pegawai. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur juga telah dilakukan melalui (1) perbaikan sistem dan prosedur kerja, (2) penataan pola rekrutmen calon pegawai dan (3) pengembangan rumpun jabatan fungsional; (4) perbaikan sarana dan lingkungan kerja; serta (5) penerapan manajemen modern dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan pertanian.

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketahanan pangan sebagai urusan wajib di daerah, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan*. Namun demikian dalam operasionalnya SPM Bidang Ketahanan Pangan belum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, karena rumusan indikator yang dituangkan merupakan *outcome* yang untuk mengoperasionalkannya membutuhkan bimbingan teknis kepada aparat daerah untuk memahami konsep dan definisi ketahanan pangan.

Penataan kelembagaan juga telah dilakukan terhadap kelembagaan yang bersifat non struktural di lingkungan Kementerian Pertanian, antara lain: Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, Komisi Minyak Sawit Indonesia, Badan Benih Nasional, Dewan Gula Indonesia, Dewan Kakao Indonesia, dan Dewan Rempah Indonesia. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan tugas spesifik atau tugas penunjang dari unit struktural yang secara tidak langsung telah mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian.



Secara umum upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam penataan kelembagaan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penataan Organisasi Kementerian Pertanian
Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan uraian rincian tugas pekerjaan sampai Eselon IV di lingkup Kementerian Pertanian. Di samping itu telah dilakukan pengembangan 10 Rumpun Jabatan Fungsional Ilmu Hayati dan jabatan fungsional lainnya. Namun demikian, uraian tugas ini belum mengatur secara jelas kedudukan dan tugas pokok dan fungsi pejabat fungsional khusus dan fungsional umum. Di samping itu, sejalan dengan anggaran berbasis kinerja dan untuk diterapkannya remunerasi penuh, maka akan disusun uraian tugas hingga ke pegawai secara individual yang dikenal dengan nama Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- b. Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian telah berupaya mewujudkan keberadaan organisasi UPT di daerah yang mandiri dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mendukung otonomi daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui: penguatan fasilitas prasarana, sarana dan personil. Saat ini UPT Kementerian Pertanian berjumlah 158 unit, yang tersebar di masing-masing Eselon I.





- c. Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian.
- Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menyusun organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud. Namun demikian, pada kenyataannya struktur dan nomenklatur SKPD lingkup pertanian di daerah sangat beragam dan dukungan pendanaan APBD masih relatif terbatas untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan di daerah.

C. Pembangunan Sumberdaya Insani Pelaku Agribisnis

Ditinjau dari peranannya dalam sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan serapan tenaga kerja, sumbangan PDRB sektor pertanian sekitar 15,04%, dengan menanggung lebih dari 36,42% tenaga kerja dapat dikatakan memiliki peranan yang tidak proporsional (BPS, Februari 2014). Rendahnya sumbangan PDRB ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian yang menyebabkan lambatnya adopsi berbagai teknologi tepat guna dan minimnya pemanfaatan peluang-peluang untuk meningkatkan produktivitas.

Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, sebanyak 11,5% tenaga





kerja di sektor pertanian sebagian besar merupakan tenaga kerja yang berusia antara 40 – 44 tahun dan disusul sebanyak 11,0% tenaga kerja kelompok usia 44 - 45 tahun. Dilihat dari sisi pendidikan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2012, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat sekolah dasar mencapai 74,5%, disusul oleh lulusan sekolah menengah pertama sebesar 15,7% dan lulusan sekolah menengah atas sebesar 9,15%. Kondisi ini sangat timpang dengan ketenagakerjaan pada sektor industri pengolahan dan jasa. Pada sektor industri pengolahan sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 14,8% dan pada berbagai sektor jasa sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 33,4%. Ketimpangan ini yang menyebabkan perbedaan pendapatan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa.

Tabel 17. Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Tahun 2010 - 2014

Tahun	Jenis Kelamin				TOTAL	Pertumbuhan (%)
	Laki-laki (orang)	Pertumbuhan (%)	Perempuan (orang)	Pertumbuhan (%)		
2010	23.781.233	0,36	14.917.810	0,02	38.699.043	0,23
2011	22.482.257	(5,46)	14.059.715	(5,75)	36.541.972	(5,57)
2012	22.339.140	(0,64)	14.090.110	0,22	36.429.250	(0,31)
2013	22.095.252	(1,09)	13.952.948	(0,97)	36.048.200	(1,05)
2014	21.903.063	(0,87)	13.866.085	(0,62)	35.769.148	(0,77)
Rerata 2010 - 2014	22.520.189	(1,54)	14.177.334	(1,42)	36.697.523	(1,49)

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Pertanian dalam Badan PPSDMP (2013)

Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa diperlukan untuk mengurangi beban tenaga kerja di sektor pertanian. Namun perpindahan tersebut idealnya proporsional dalam hal umur dan tingkat pendidikan sehingga tetap ada regenerasi yang





berkelanjutan. Berdasarkan data BPS, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0.64% per tahun pada periode tahun 2005–2009, dan penurunan sebesar 1.49% per tahun antara tahun 2010 sampai tahun 2014. Penurunan pertumbuhan tenaga kerja terbesar justru pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 3.41% per tahun.

Tabel 18. Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Umur Tahun 2008 - 2012

Tahun	Umur Tenaga Kerja				
	15-29 Tahun	30-44 Tahun	45-59 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
2008	9.312.562	13.009.636	10.706.534	5.246.159	38.364.981
2009	9.273.128	13.062.569	10.871.778	5.402.522	38.609.997
2010	8.421.813	13.353.185	11.381.631	5.542.414	38.699.043
2011	8.416.895	12.782.136	10.484.742	4.858.199	36.541.972
2012	8.081.531	12.848.562	10.402.542	5.096.615	36.429.250
Rerata Pertumbuhan	-3.41	-0.45	-0.61	-0.47	-1.25

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Pertanian dalam Badan PPSDMP (2013)

Tabel 19. Jumlah Kelompok Tani Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Poktan	Pertumbuhan %	Jumlah Gapoktan	Pertumbuhan %
2010	279.523	3,21	30.636	8,24
2011	299.759	7,24	36.244	18,31
2012	307.309	2,52	37.237	2,74
2013	318.453	3,63	37.632	1,06
2014				
Rerata	301.261	4,15	35.437	7,59

Sumber : Badan PPSDMP(2014)

Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah daripada sektor industri dan jasa menjadi faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati. Generasi muda lebih



tertarik pada sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung meruakan gambaran pemulihan sebagian petani yang tidak menghendaki generasi penerusnya untuk menjadi petani juga. Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Untuk menumbuhkan minat generasi muda telah dilakukan berbagai upaya termasuk mengembangkan dan memperkenalkan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat tani baik laki-laki maupun perempuan, khususnya golongan muda dalam melakukan produksi di tingkat *on-farm* dan *off-farm*. Selain itu, dibuka akses yang lebih besar pada pemuda, terutama kepada yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA atau perguruan tinggi untuk dapat membuka usaha di bidang pertanian. Dalam meningkatkan keterampilan petani, telah dikembangkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga milik petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumberdaya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan. Lembaga pelatihan ini merupakan lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani secara swadaya baik perorangan maupun kelompok. Selain itu, dikembangkan pula Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) yang merupakan kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat, serta mempunyai kekuatan dan potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan pedesaan. LM3 dikembangkan pada lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, seminari, paroki, pasraman dan vihara.

D. Pembangunan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Manajemen Sumberdaya Alam Pertanian

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, bibit/benih, pupuk, pestisida, alsintan, investasi dan pembiayaan merupakan elemen





penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya. Kementerian Pertanian melalui kewenangan yang dimilikinya melakukan pengaturan dalam optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana ini dengan mengeluarkan berbagai regulasi. Selain itu melalui anggaran pembangunan yang ada, telah dilakukan berbagai inisiatif awal untuk peningkatan kapasitas prasarana dan sarana yang ada.

Dana pembangunan untuk prasarana dan sarana pertanian merupakan komponen terbesar dari alokasi anggaran untuk Ketahanan Pangan yang dialokasikan ke Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan lainnya. Dari alokasi anggaran untuk Ketahanan Pangan yang di alokasikan pemerintah pada tahun 2014, sebanyak 31,5 triliun atau 43,5% dari total anggaran digunakan untuk prasarana dan sarana. Jumlah ini sebenarnya lebih besar lagi, karena dari alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian di tahun 2014 sebesar 15,5 triliun, sebesar 3,195 triliun dialokasikan untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dimana sebagian besar mandatnya terkait dengan prasarana dan sarana pertanian.

Pembiayaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana irigasi sesuai kewenangannya (primer dan sekunder). Sedangkan di Kementerian Pertanian dilakukan perbaikan dan pembangunan irigasi di tingkat usahatani (tersier) sekaligus bertindak sebagai fasilitator dan regulator dengan pokok kegiatan mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan monev kegiatan di seluruh Provinsi.





Tabel 20. Anggaran APBN di Lingkup Kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dalam Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(Trilyun rupiah)					
I. Kementerian Negara/Lembaga	12,8	11,1	20,2	23,3	22,5	22,1
1. 018 Kementerian Pertanian	7,7	8,0	16,0	18,2	16,4	15,5
2. 033 Kementerian PU (irigasi)	5,1	3,1	4,2	5,1	6,1	6,6
II. Non K/L	36,9	39,2	37,6	40,8	49,5	50,3
1. Subsidi	32,9	35,7	33,0	33,1	40,9	41,4
a. Subsidi Pangan	13,0	15,2	16,5	19,1	21,5	18,8
b. Subsidi Pupuk	18,3	18,4	16,3	14,0	17,9	21,0
c. Subsidi Benih	1,6	2,2	0,1	0,1	1,5	1,6
2. Belanja Lain-lain	1,0	1,0	1,5	4,5	4,4	4,0
a. Cadangan beras pemerintah	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
b. Cadangan stabilisasi pangan				1,4	2,0	2,0
c. Cadangan benih nasional			0,5	0,3	0,4	0,0
d. Cadangan ketahanan pangan				0,7		
3. Transfer ke Daerah (DAK)	3,0	2,5	3,1	3,2	4,2	4,9
a. DAK Irigasi	1,5	1,0	1,3	1,3	1,6	2,3
b. DAK Pertanian	1,5	1,5	1,8	1,9	2,5	2,6

Secara rinci gambaran pengembangan prasarana dan sarana 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Sumberdaya Lahan dan Air

Salah satu masalah utama terkait dengan sumberdaya lahan adalah akurasi data tentang lahan pertanian. Hal ini menjadi perhatian khusus Menteri Pertanian, sehingga pada perencanaan awal kegiatan Kementerian Pertanian masalah perbaikan akurasi data lahan ini menjadi salah satu prioritas utama. Selama tahun 2010-2014 perbaikan dan penyempurnaan data lahan, salah satunya diupayakan melalui kegiatan audit lahan dengan memetakan sebaran luas dan jenis lahan sawah di luar Jawa dan di luar kawasan hutan pada skala





1:10.000. Hasil dari kegiatan audit lahan untuk lahan sawah terlihat di Tabel 21.

Tabel 21. Luas Lahan Sawah per Provinsi Hasil Pemetaan Lahan Sawah Tahun 2012

No.	Nama Provinsi	DATA BPS 2011	DATA PSP 2012
I	SUMATERA	2.311.447	2.054.755
1	Aceh	307.556	320.656
2	Sumatera Utara	468.442	383.179
3	Riau	115.897	82.914
4	Kepulauan Riau	393	826
5	Sumatera Selatan	629.355	570.741
6	Sumatera Barat	231.463	229.425
7	Kepulauan Bangka Belitung	5.932	5.454
8	Jambi	113.757	108.173
9	Bengkulu	90.217	70.013
10	Lampung	348.435	283.376
II	KALIMANTAN	1.068.490	917.454
11	Kalimantan Timur	90.518	72.489
12	Kalimantan Barat	318.581	277.314
13	Kalimantan Selatan	457.154	399.236
14	Kalimantan Tengah	202.237	168.214
III	SULAWESI	939.834	737.939
15	Sulawesi Utara	56.181	45.344
16	Gorontalo	28.707	30.217
17	Sulawesi Tengah	137.786	54.718
18	Sulawesi Tenggara	85.585	52.648
19	Sulawesi Barat	55.016	39.984
20	Sulawesi Selatan	576.559	515.008
IV	BALI DAN NUSATENGARA	464.814	456.973
21	Bali	80.060	77.300
22	Nusa Tenggara Barat	240.180	230.843
23	Nusa Tenggara Timur	144.574	148.829
V	MALUKU DAN PAPUA	58.562	50.874
24	Maluku	14.085	13.578
25	Maluku Utara	9.093	8.726
26	Papua Barat	7.648	5.097
27	Papua	27.756	23.473
VI	JAWA	3.251.694	3.444.579
28	Jawa Timur	1.106.449	1.084.278
29	Jawa Tengah	960.970	1.064.776
30	Jawa Barat	930.507	1.039.828
31	DI Yogyakarta	55.291	57.376
32	DKI Jakarta	1.312	1.756
33	Banten	197.165	196.565
	Jawa	3.251.694	3.444.579
	Luar Jawa	4.843.167	4.217.975
	Indonesia	8.094.861	7.662.554

Selama tahun 2010-2014, Kementerian pertanian telah berhasil mencetak areal pertanian baru seluas 347.984 hektar. Bila dilihat kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang diperkirakan sekitar 50-100 ribu hektar setahunnya, maka pencetakan areal pertanian baru ini baru dapat mempertahankan luasan areal pertanian pangan yang ada. Sementara itu kualitas lahan yang baru dicetak umumnya produktivitasnya masih dibawah lahan yang



dialihfungsikan. Upaya pencetakan areal pertanian baru banyak mengalami hambatan di lapang, terutama sulitnya mendapatkan areal yang siap untuk dicetak sebagai areal pertanian baru.

Tabel 22. Realisasi dari Target Perluasan dan Pengelolaan Lahan serta Pengelolaan Air Irigasi Tahun 2010-2014

No	Kegiatan	Satuan	2010		2011		2012		2013		2014	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan												
1	Perluasan Areal TP, Horti, Bun, dan Nak	Ha	28.892	90,67	103.417	92,48	107.463	91,76	72.175	93,66	36.033	79,38
2	Optimalisasi Lahan	Ha	6.360	100,00	23.033	93,11	198.184	94,46	253.660	100,00	118.200	68,80
3	Jalan Pertanian	Km	948	100,00	1.487	89,69	442	98,88	291	99,32	DAK	DAK
4	Pengembangan Metode SRI	Ha	1.240	100,00	10.190	91,31	54.993	91,20	205.800	100,00	136.750	82,67
5	Pra Pasca Sertifikasi Lahan	Persil	54.847	77,63	32.000	106,67	72.300	95,26	42.188	64,36		0,00
B. Pengelolaan Air Irigasi												
6	Pengembangan Sumber Air	Unit	950	76,86	2.567	98,62	1.644	97,80	297	99,00	202	72,14
7	Pengembangan Jaringan Irigasi	Ha	94.087	91,73	237.784	93,22	523.530	99,80	542.807	98,69	120.085	24,02
8	Pembangunan Embung / Dam Parit	Paket	202	78,91	3.157	100	1.553	99,17	415	98,57	8.846	92,15
9	Pengembangan Kelembagaan P3A	Paket	139	99,29	673	102,59	297	99,00	720	95,87	-	-

Dari sisi regulasi, upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam implementasinya





belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk memantapkan upaya pelaksanaan undang-undang di atas selama lima tahun terakhir sudah berhasil diterbitkan berbagai peraturan dan ketentuan lanjutan, diantaranya dengan terbitnya turunan Undang-Undang Nomor 41 / 2009, yaitu PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Permentan Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan, Permentan Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Permentan Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya Kementerian Pertanian ikut secara aktif dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sementara itu dalam mendukung sertifikasi lahan, agar petani mendapat kepastian hukum terhadap lahan yang diusahakannya serta dapat membantunya untuk mengakses fasilitas pembiayaan seperti bank, juga diinisiasi dalam bentuk program pra dan pasca sertifikasi lahan. Selama tahun 2011 dan 2012 telah berhasil dilaksanakan pada 32.000 dan 72.300 persil lahan. Namun pada tahun 2013 jumlah itu berkurang menjadi hanya 697 persil lahan.

Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat petani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan Indeks Pertanamannya. Selama tahun 2011-2013 telah berhasil dilaksanakan upaya optimalisasi seluas 474.707 hektar dengan pencapaian target kegiatan lebih dari 90 %. Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan





dilaksanakan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan *System of Rice Intensification* (SRI). Selama 2011-2013 luas areal yang berhasil dikembangkan melalui pendekatan SRI meningkat dari 10.440 hektar menjadi 205.450 hektar dengan realisasi program di atas 93 %. Pengembangan jalan pertanian pada tahun 2011 berhasil dilaksanakan sepanjang 1.564 kilometer, sementara itu pada tahun 2012 dan 2013 panjang jalan usahatani yang dilaksanakan hanya sekitar 447 dan 304 kilo meter.

Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan melalui pengembangan sumberdaya air, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan embung dan dam parit serta pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selama tahun 2011-2012 telah dilakukan pengembangan sumberdaya air sebanyak 2.567 dan 1,644 unit, namun selama tahun 2013 hanya dikembangkan sebanyak 432 unit.

Dalam pengembangan jaringan irigasi, selama tahun 2010-2014 alokasi anggarannya terbagi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Sejalan dengan semangat Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air bahwa pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.





Tabel 23. Kondisi Jaringan Irigasi berdasarkan Kewenangan Penanganan di Indonesia Tahun 2012

Kondisi Jaringan	Kewenangan			Total (Ha)
	Pusat	Provinsi	Kab./Kota	
Jaringan Baik (Ha)	1.250.100	555.057	1.676.141	3.481.298
Jaringan Rusak (Ha)	1.064.900	868.165	1.815.820	3.748.885
Jumlah (Ha)	2.315.000	1.423.222	3.491.961	7.230.183

Sumber: Kementerian PU

Walaupun secara ketentuan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab para petani/P3A, namun kenyataannya tidak semua petani/P3A mampu untuk memperbaikinya. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membantu untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,3 juta hektar. Rehabilitasi kualitas dan kuantitas jaringan irigasi seluas 1,34 juta hektar. Selain itu, PU melakukan pembangunan daerah irigasi dan rawa seluas 500 ribu hektar.

Perbaikan saluran irigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian selama tahun 2011-2013 seluas 1.264.053 hektar, realisasi program ini berkisar 91-99 %. Selain perbaikan saluran irigasi, dilakukan pengembangan embung dan dam parit yang meliputi 3.157 unit pada tahun 2011, dan 1.553 unit selama tahun 2012 dan 328 unit pada tahun 2013 dan sebanyak 9600 unit pada tahun 2014.

Pengembangan pengelolaan air di tingkat petani melalui P3A didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selama tahun 2011-2013 telah dilakukan pengembangan kelembagaan P3A sebanyak 1.595 unit.

Pupuk, Alsintan dan Pembiayaan

Kementerian Pertanian sebagai pelaku utama di dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berperan penting di dalam: (1) penetapan



alokasi kebutuhan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET) bersubsidi per tahunnya; (2) penetapan produsen pupuk bersubsidi (bersama kementerian BUMN) dan menilai kebenaran data/dokumen pembayaran subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen; dan (3) penyaluran dana subsidi kepada produsen pupuk. Sementara itu, di dalam distribusi pupuk, Kementerian Perdagangan sangat berperan di dalam menetapkan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta melakukan pengawasan di dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2010-2013 adalah 87,85%. Persentase realisasi subsidi pupuk tertinggi sebesar 102,87% pada tahun 2012 sedangkan dan persentase realisasi terendah pada tahun 2010 sebesar 77,61%.

Beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang belum valid, di mana terdapat indikasi penggelembungan (*mark-up*) luas lahan dan jumlah petani. Pada aspek penyaluran/distribusi, penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO (*Delivery order*), keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat provinsi maupun kabupaten belum menjalankan fungsi pengawasan





secara optimal. Mereka dinilai tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan pengawasan, serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan.

Tabel 24. Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

NO	Jenis Subsidi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Rp Juta)				
1	PSO1)	14.750.662	15.562.534	13.958.484	15.828.706	18.047.250
2	BLP2)	1.610.000	405.000	405.000		
3	Pengawasan	-	-	-		
	Jumlah	16.360.662	15.967.534	14.363.484	15.828.706	18.047.250

Keterangan: 1) PSO = Public Service Obligation. PSO merupakan tugas layanan publik yang dilaksanakan oleh BUMN. 2) BLP = Bantuan Langsung Pupuk.

Tabel 25. Perkembangan Realisasi Subsidi Pupuk 2010-2014

Tahun	Volume (Ton)		
	Alokasi	Realisasi	%
2010	9.480.749	7.358.000	77,61
2011	9.733.224	8.397.134	86,27
2012	10.528.920	8.913.290	84,66
2013	8.611.050	8.858.365	102,87
2014 *	7.778.000	3.906.018	50,22

Ket: *) Realisasi penyaluran s/d Mei 2014

Berbagai upaya telah dikembangkan Kementerian Pertanian untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pupuk. Untuk peredaran pupuk, dengan pengembangan sistem penyaluran tertutup terus diupayakan perbaikan dalam distribusi. Terkait dengan bentuk subsidi kepada petani, selama tahun 2010-2011 telah dilakukan pengkajian yang komprehensif terhadap pemberian subsidi pupuk. Uji coba pemberian subsidi langsung kepada petani sebagai pengganti subsidi kepada pabrik pupuk belum sepenuhnya berhasil dengan baik, sehingga subsidi kepada pabrik terus dilakukan.

Pengembangan alat dan mesin pertanian dikembangkan melalui pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).



Pengembangan dengan pendekatan UPJA ini diharapkan akan membantu peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat. Selama tahun 2011-2013 telah dikembangkan UPJA mandiri sebanyak 7.133, dimana pada tahun 2011 dikembangkan sebanyak 7.023 paket UPJA mandiri dan tahun 2012 sebanyak 100 paket dan tahun 2013 sebanyak 10 paket. Sementara itu Kementan juga menyalurkan alat dan mesin pertanian kepada beberapa kelompok masyarakat. Selama tahun 2011-2013 telah disalurkan sebanyak 9.794 alat dan mesin pertanian. Penyaluran ini lebih berfungsi sebagai stimulan untuk menggerakkan swadaya petani.

Tabel 26. Penyaluran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Pembiayaan Pertanian Tahun 2010-2014

No	Kegiatan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
a. Pupuk dan Pestisida							
1	Pupuk Bersubsidi	Juta Ton	7,358	8,39	8,91	8,85	4,56
2	Bantuan Langsung Pupuk	Juta Ton	0,19	0,21	0,01	0	0
3	UPPO	Unit	300	1133	100	490	37
4	Pengembangan Rumah Kompos	Unit	242	263	0	0	0
b. Alat dan Mesin Pertanian							
5	Alat dan Mesin	Unit		1072	2217	6505	4161
6	UPJA Mandiri	Paket		7023	100	20	0
c. Pembiayaan Pertanian							
7	PUAP	Gapoktan	8587	9110	6050	3300	319
8	Kegiatan LKMA	LKMA	0	25	60	27	50

Dari sisi pembiayaan kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya, Kementerian Pertanian memfokuskan kegiatannya pada Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) serta penguatan Lembaga Kredit Mandiri Agribisnis (LKMA) yang pengembangannya sejalan dengan program PUAP. Pelaksanaan PUAP melanjutkan apa yang telah dirintis sejak lima tahun terakhir dan dilaksanakan di desa baru sehingga ditargetkan semua desa yang berbasis kegiatan pertanian telah dapat dilayani oleh PUAP. Sementara itu pengembangan LKMA diharapkan dapat membantu penyediaan sumber pembiayaan bagi petani dengan mudah dan murah. Selama tahun 2011-2013 telah dikembangkan kegiatan PUAP di 18.460 desa dari 19.300 yang ditargetkan. Gapoktan penerima PUAP diharapkan





dapat berkembang dan pada tahun kedua gapoktan mendapat LKMA. Untuk periode 2011-2014 sudah dilatih 162 gapoktan untuk menjadi LKMA.

Inisiatif lainnya dalam membantu pembiayaan usahatani adalah melalui subsidi bunga kredit

melalui berbagai program. Selain itu diupayakan menyambungkan petani dengan beragam sumber pembiayaan lainnya seperti dana tanggung jawab sosial BUMN dan perusahaan swasta. Untuk melindungi petani dari kegagalan usaha juga telah diinisiasi pengembangan asuransi pertanian, yang dalam tiga tahun terakhir telah dilakukan dalam bentuk *pilot project* di berbagai lokasi.

Perbenihan

Sasaran strategis kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan adalah meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai. Fokus utama kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan pada tahun 2013 antara lain pemberdayaan penangkar benih padi dan kedelai, perbanyak benih sumber (BS-BD, BD-BP) tanaman pangan, pengawasan dan sertifikasi benih, dan optimalisasi/revitalisasi Unit Prosesing Benih (UPB).

Realisasi kegiatan pemberdayaan penangkar benih padi pada tahun 2013 seluas 10.257 ha dan pemberdayaan penangkar benih kedelai seluas 3.014 ha. Kegiatan perbanyak benih sumber terealisasi seluas 564,80 ha, sedangkan pengawasan dan sertifikasi benih mencapai 144.196,12 ha (luas penangkaran) dan 249.578,20 ton (produksi benih). Optimalisasi/revitalisasi UPB telah terealisasi sebanyak 10 unit.



Tabel 27. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

Uraian	Satuan	Realisasi				
		2010	2011	2012	2013	2014*
Pemberdayaan Penangkar Benih	Ha					
- Padi	Ha			9.027	10.257	
- Jagung	Ha			571	-	
- Kedelai	Ha			2.332	3.014	
Perbanyakan Benih Sumber (BS-BD, BD-BP)	Ha	220,95	367,60	489,50	564,80	110,00
Pengawasan dan Sertifikasi Benih						
- Luas Penangkaran	Ha	161.004,61	156.795,83	178.899,34	144.196,12	48.054,66
- Produksi Benih	Ton	310.414,08	348.997,48	359.909,87	249.578,20	54.669,26
Realisasi/Optimalisasi UPB	Unit			11	10	

Ket: tahun 2014 data sementara

Disamping itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga mengelola anggaran subsidi benih, yang bertujuan menyediakan benih unggul bermutu untuk menunjang kegiatan SL-PTT padi, jagung dan kedelai yang disediakan oleh PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani.

Realisasi penyaluran/penjualan benih bersubsidi untuk benih padi inbrida tahun 2013 mencapai 46.987 ton atau setara dengan 1.879.484 ha. Realisasi penyaluran/penjualan benih bersubsidi untuk benih padi hibrida tahun 2013 sebanyak 1.810 ton atau setara dengan 120.676 ha. Realisasi penyaluran/ penjualan benih bersubsidi untuk benih jagung komposit tahun 2013 sebanyak 365 ton atau setara dengan 14.593 ha. Realisasi penyaluran/ penjualan benih bersubsidi untuk benih jagung hibrida tahun 2013 sebanyak 598 ton atau setara dengan 39.922 ha dan realisasi penyaluran/penjualan benih bersubsidi untuk benih kedelai tahun 2013 sebanyak 2.426 ton atau setara 60.640 ha.





Tabel 28. Realisasi Penyaluran BLBU 2010-2012 dan Benih Bersubsidi Tahun 2013

No.	Komoditas	BLBU (Ton)			Subsidi Benih 2013	
		2010	2011	2012	(Ton)	(Ha)
1	Padi Inbrida	63.475	69.203	57.247	46.987	1.879.484
2	Padi Hibrida	6.439	5.814	2.777	1.810	120.676
3	Padi Lahan Kering	6.985	12.175	10.695		
3	Jagung Komposit				365	14.593
4	Jagung Hibrida	13.904	7.626	3.870	598	39.922
5	Kedelai	20.408	12.000	12.037	2.426	60.640
6	Kacang Tanah	7.356				
	Jumlah	118.567	106.818	86.626	52.186	2.115.315

Untuk sub-sektor hortikultura, selama ini kebutuhan benih untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura dipenuhi dari produksi dalam negeri (Balai Benih Hortikultura, penangkar benih, produsen benih swasta) dan pemasukan benih dari luar negeri. Pemasukan benih dari luar negeri dilakukan karena produksi benih dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, keterbatasan ketersediaan varietas atau yang benihnya tidak dapat atau belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Kelembagaan perbenihan adalah lembaga yang mendukung pengembangan perbenihan baik itu dari segi manajemen maupun sebagai praktisi penyedia benihnya antara lain adalah: Balai Benih Hortikultura (BBH), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), penangkar, produsen dan pedagang benih hortikultura. Dinas di provinsi yang menangani perbenihan hortikultura berperan dalam pembinaan penangkar dan menciptakan penangkar baru yang ada di wilayah tugasnya.

Penataan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan hortikultura akan berdampak terhadap perwujudan industri perbenihan untuk menghasilkan benih bermutu dari varietas unggul secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pengelolaan atau penataan komponen-komponen prasarana dan sarana pendukung secara harmonis. Komponen-komponen dimaksud meliputi seluruh



unsur yang tergabung dalam sistem perbenihan yang mencakup kegiatan pemuliaan dan pengembangan varietas, produksi dan prosesing benih, penyimpanan, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, distribusi dan pemasaran, promosi dan sosialisasi penggunaan benih bermutu kepada petani/konsumen.

Secara umum, kondisi kelembagaan perbenihan yang ada sekarang belum dapat dikategorikan sebagai lembaga industri perbenihan yang ideal dan membutuhkan suatu penanganan khusus agar mampu beroperasi secara profesional, baik yang dikelola oleh perorangan, usaha kelompok, maupun kelembagaan perbenihan pemerintah.

Beberapa permasalahan dalam pengembangan sistem perbenihan hortikultura antara lain : a) terbatasnya varietas yang diminati dan selera pasar yang cepat berubah; perubahan permintaan pasar yang sangat cepat menyebabkan sering terjadinya pelaku usaha tanaman mendatangkan benih dari luar negeri yang jenis maupun varietasnya disukai masyarakat; b) lemahnya penguasaan teknologi produksi; khususnya petani/penangkar benih yang memproduksi benih untuk kebutuhan sendiri belum menguasai teknologi yang spesifik bagi masing-masing jenis tanaman, c) terbatasnya sarana produksi benih; d) lemahnya permodalan penangkar benih, dan e) keterbatasan kemampuan dan petugas perbenihan yang mengelola sistem informasi manajemen perbenihan, sehingga informasi/data tidak dapat tersedia setiap saat, serta f) belum optimalnya *software* perbenihan hortikultura serta keterbatasan *hardware* perbenihan hortikultura, baik di BBH, BPSBTPH maupun gapoktan/kelompok tani.



**Tabel 29. Capaian Kinerja Kegiatan Perbenihan Hortikultura Tahun 2013**

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Ketersediaan Benih Tanaman Sayur	Kg	814.169	773.461	95,00	6.871.239	6.507.352	94,70
2	Ketersediaan Benih Tanaman Florikultura	Benih	8.864.640	8.071.255	91,05	3.683.915	3.341.645	90,71
3	Ketersediaan Benih Tanaman Obat	Kg	38.218	37.721	98,70	981.547	870.999	88,74
4	Ketersediaan Benih Tanaman Buah	Batang	1.198.845	1.122.119	93,60	10.828.607	9.950.634	91,89
5	Penguatan Kelembagaan	Lembaga	199	191	95,98	24.664.341	23.606.598	95,71
6	Pembinaan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih	Kali	432	402	93,06	12.485.810	11.604.397	92,94
7	Pemasarakatan Benih Bermutu	Kali	2.182	1.920	87,99	48.057.837	42.377.999	88,18
8	Sarana Prasarana	Unit	120	115	95,83	6.755.737	6.463.891	95,68
9	Pedoman-pedoman	Judul	16	15	93,75	1.117.508	1.059.818	94,84
10	Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Buah Bermutu	Provinsi	31	31	100	1.420.400	1.399.450	98,53
11	Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Sayur dan Obat Bermutu	Provinsi	18	18	100	1.579.050	1.542.330	97,67
12	Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Florikultura Bermutu	Provinsi	17	17	100	1.522.278	1.491.482	97,98
13	Pembinaan Pengawasan Mutu Benih	Provinsi	33	33	100	1.172.082	1.137.295	97,03
14	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	100	5.677.249	5.332.074	93,92
15	Kendaraan Bermotor	Unit	1	1	100	200.000	170.085	85,04

Catatan: Kegiatan pada matriks di atas sesuai form PMK 249/2011

Beberapa solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain a) pertemuan koordinasi antar pusat, daerah dan instansi terkait (Dinas Provinsi, BPSBTPH, BBH) yang menangani perbenihan sangat dibutuhkan dalam rangka penyediaan benih sesuai kebutuhan benih dalam pengembangan kawasan, b) pembinaan penangkar-



penangkar benih buah terutama di daerah luar Jawa masih sangat diperlukan, dalam rangkaantisipasi jumlah SDM yang masih terbatas dan peningkatan penerapan teknologi produksi benih, c) distribusi Benih sumber tanaman buah sangat diperlukan guna merangsang penumbuhan penangkar benih tanaman buah di daerah dan mengoptimalkan peran Balai Benih Hortikultura di berbagai daerah terutama Balai Benih Hortkutura di luar Jawa dalam penyediaan sumber mata tempel untuk perbanyak benih berikutnya serta sebagai pohon koleksi, d) meningkatkan pemanfaatan kegiatan pengembangan perbenihan dalam mendukung penyediaan benih hortikultura bermutu seperti pemberdayaan kelembagaan perbenihan, perbaikan sistim informasi *supply/demand* benih, fasilitasi akses modal untuk mendukung pengembangan perbenihan, penumbuhan penangkar di sentra-sentra produksi, pemberdayaan *stakeholder* perbenihan untuk menciptakan varietas yang berdaya saing dengan teknologi produksi dan pilot proyek penangkaran benih bermutu.

Untuk sub-sektor peternakan, kegiatan perbenihan sub-sektor peternakan yang utama adalah menghasilkan benih ternak berupa semen beku sapi dan embrio sapi serta bibit hijauan makanan ternak unggul yang didistribusikan ke masyarakat. Sedangkan kegiatan perbibitan ternak seperti menghasilkan bibit ternak unggul dan tatakelolanya dilakukan oleh 10 (sepuluh) UPT perbibitan yang berada di seluruh Indonesia.





Tabel 30. Produksi dan Realisasi Semen Beku dan Embrio Sapi Tahun 2010-2014

No.	Benih Ternak	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1 Semen beku sapi							
a.	Target	dosis	4.953.000	5.052.600	4.160.400	4.325.400	4.857.900
b.	Realisasi	dosis	5.009.077	5.388.788	5.170.604	5.199.604	*)
		%	101	107	124	120	*)
2 Embrio sapi							
a.	Target	dosis	4.953	5.052	4.160	4.858	700
b.	Realisasi	dosis	5.009	5.388	5.170	5.199	*)
		%	101	107	124	107	*)

*) belum terdata

Produksi semen beku dilakukan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Jawa Timur dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Jawa Barat. Sedangkan produksi embrio dilakukan oleh Balai Embrio Transfer (BET) Cipelang Jawa Barat. Kinerja kedua produksi benih ternak sangat baik karena realisasi setiap tahunnya melebihi 100%. Data semen beku dan embrio yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 30.

Namun demikian, ada kegiatan penting yang berhubungan dengan perbenihan di sub-sektor peternakan yaitu uji zuriat, uji performans, dan pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan. Kegiatan uji zuriat dilakukan untuk menghasilkan bibit pejantan unggul yang cocok dengan kondisi agroklimat di Indonesia dalam upaya mengurangi ketergantungan pada pejantan impor. Sedangkan uji performans dilakukan untuk menghasilkan bibit, khususnya pejantan dengan meningkatkan produktivitas melalui pendekatan faktor genetik.

Sementara untuk menjaga dan melestarikan serta upaya pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan telah dilakukan penetapan Wilayah Sumber Bibit pada tahun 2013 yaitu wilayah sumber bibit Itik Alabio (Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kalimantan Selatan) dan wilayah sumber bibit sapi Bali (Kabupaten Barru-Sulawesi Selatan). Selanjutnya akan menyusul wilayah sumber bibit dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sapi SO, Kuda Sandel Wood), Kabupaten Kebumen (sapi PO), Blora (Sapi PO), Rembang (Sapi



PO), Banyumas (Kambing PE), Banjarnegara (Kambing PE, Domba Batur) dan Ciamis (Ayam Sentul).

Untuk sub-sektor perkebunan, telah dibangun sistem usaha perbenihan yang berbentuk kelembagaan usaha perbenihan baik berupa Usaha Pembenih Besar (UPB) maupun Usaha Pembenih Kecil (UPK) yang memproduksi



benih berupa biji/kecambah/stek maupun benih siap salur. Produksi benih ini merupakan benih yang berkualitas. Untuk menjamin kualitas sumber benih perkebunan, secara operasional dilalukan oleh tiga Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat) untuk mengawasi dan menguji mutu benih di seluruh Indonesia.

Kinerja pembangunan industri perbenihan perkebunan selama periode 2009-2013 sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya peran swasta maupun masyarakat dalam mengembangkan usaha perbenihan perkebunan, namun demikian peran pemerintah baik pusat maupun daerah masih diperlukan dalam memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan bagi komoditas perkebunan yang kurang diminati oleh swasta. Untuk itu, sejak lima tahun terakhir Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka merevitalisasi perbenihan perkebunan antara lain berupa pembangunan kebun sumber bahan tanaman (kebun induk, kebun entres, blok penghasil tinggi, pohon induk terpilih dan kebun penangkaran) dan pemeliharaan serta penguatan kelembagaan perbenihan.

E. Pembangunan pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pengolahan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian. Dalam periode 2010-2014 telah dilakukan fasilitasi pengolahan diantaranya (1) revitalisasi penggilingan





padi sebanyak 1.373 unit, (2) pengolahan tepung berbasis bahan baku lokal sebanyak 196 unit yang menghasilkan tepung cassava, tapioka, sagu dan ubi jalar, (3) pengolahan Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) Bersih menjadi lateks segar, *sit angin*, *sit asap*, *slab*, dan *lump* sebanyak 186 unit, (4) pengolahan kakao menjadi kakao fermentasi (5) pengolahan kelapa menjadi Virgin Coconut Oil (VCO),

minyak goreng, ataupun produk sampingnya seperti *nata de coco*, asap cair, sabut dan arang aktif/briket sekitar 110 unit, dan (6) pengolahan susu 110 unit untuk diolah menjadi susu *pasteurisasi*, *yoghurt*, keju, es krim, kerupuk susu, *steak* susu, sabun susu, permen/karamel susu dan dodol susu.

Dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertanian, maka beberapa langkah yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Selama tahun 2010-2013, Kementerian Pertanian telah menerbitkan sebanyak 88 Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor pertanian. Penerapan SNI masih bersifat sukarela (*voluntary*) namun bisa menjadi wajib bila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Saat ini komoditi atau produk pertanian yang telah berstatus SNI secara wajib adalah gula kristal mentah dan gula kristal putih.
- 2) Untuk mendukung pengembangan mutu dan standarisasi bidang pertanian diperlukan juga kerjasama dan harmonisasi standarisasi, baik bilateral maupun regional. Harmonisasi dan kerjasama yang telah dilakukan antara lain: (a) kerjasama *Trade Support Program (TSP II)* yaitu *kerjasama teknis Indonesia dengan Uni Eropa* dengan tujuan mendorong *Export Quality Infrastructure (EQI)*, (b) harmonisasi standar dan regulasi teknis bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar dan regulasi internasional maupun persyaratan mitra dagang, dilaksanakan



melalui partisipasi aktif Indonesia di forum regional ASEAN dan APEC serta forum internasional yaitu *Codex Alimentarius* dan ISO. Harmonisasi standar di tingkat ASEAN utamanya untuk menyiapkan produk pertanian memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.

- 3) Penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan (SJMKP) terbagi dalam: (a) organik, dimana selama periode 2009-2014 telah dilakukan pembinaan sistem pertanian organik 246 pelaku usaha/poktan/gapoktan dan sertifikasi organik kepada 105 pelaku usaha/poktan/gapoktan. (b) pembinaan penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan kepada 90 pelaku usaha/poktan/gapoktan.
- 4) Pengawasan jaminan mutu di rantai produksi dan distribusi (unit kebun, rumah kemas di gapoktan dan eksportir)
- 5) Sertifikasi dan pengujian alsintan.
- 6) Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Practices Good Manufacturing Practices* (GMP)
- 7) Mengembangkan produk pertanian ramah lingkungan melalui Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).
- 8) Meningkatkan keamanan pangan melalui kewenangan Kementerian Pertanian yang diamanatkan dalam PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan, Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Infrastruktur mutu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah (OKKP-P/OKKP-D), Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO) dan Laboratorium Penguji.

Membangun jejaring pasar

Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam membangun jejaring pasar diantaranya adalah

- (1) Meningkatkan akses petani terhadap pasar. Hal-hal





tersebut antara lain kebijakan harga dan tataniaga bagi komoditas strategis, pengembangan pasar dan promosi komoditas unggulan yang prospektif, penyediaan sarana dan pengembangan kelembagaan pasar, pengembangan kerjasama dan kemitraan, dukungan analisis dan informasi pasar yang memberikan nilai tambah bagi pelaku yang berbasis pada teknologi informasi yang semakin maju.

- (2) Mengembangkan jejaring pasar domestik, melalui pengembangan sarana dan kelembagaan pasar yaitu: sub terminal agribisnis, pasar tani, pasar ternak, unit pemasaran poktan gapoktan, dan pasar lelang. Selain itu dilakukan pemantauan dan stabilisasi harga, advokasi dan penguatan akses pasar domestik dan pelayanan informasi pasar.
- (3) Pengembangan Informasi Pasar (PIP) melalui sistem informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, lengkap, kontinyu dan up to date merupakan instrumen yang vital serta memegang peranan yang amat penting bagi para pelaku agribisnis.
- (4) Promosi dalam negeri, melalui pameran pada umumnya diikuti juga dengan berbagai kegiatan lainnya seperti *talkshow*, temu bisnis (*buyer meet seller*) dan sosialisasi manfaat produk.
- (5) Mengembangkan jejaring pasar internasional, dimaksudkan

untuk melakukan percepatan pertumbuhan nilai ekspor, memperlambat laju impor baik dalam bentuk segar maupun olahan sehingga mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan produk pertanian antara lain melalui kebijakan pencitraan produk yang lebih baik, meningkatkan akses pasar dan perlindungan produk dalam negeri dari dampak persaingan global.

F. Pembangunan Sistem Inovasi

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian yang telah berhasil dicapai Kementerian Pertanian selama ini. Beberapa hasil inovasi meliputi



penciptaan varietas unggul baru, teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan. Sub Sistem Inovasi Perbenihan Nasional telah menghasilkan beragam varietas baru terutama padi. Akan tetapi berbagai varietas unggul baru tersebut (Inpari, Inpago, Inpara, dan Hibrida) masih belum menggeser sepenuhnya keberadaan varietas unggul lama, karena belum optimalnya fungsi diseminasi dan sistem perbenihan nasional.

Sementara sub-sistem Inovasi Produksi Berkelanjutan telah menghasilkan berbagai output, terutama teknologi perbaikan sistem usahatani, seperti penyempurnaan teknologi jarak tanam melalui sistem Jajar Legowo (Jarwo), dan berbagai inovasi lainnya. Output unggulan tersebut didukung hasil-hasil analisis dan kajian inovasi logistik dan distribusi sarana produksi. Pada subsistem inovasi pascapanen dan pengolahan hasil, berbagai output telah dihasilkan dengan memanfaatkan *advanced technology* seperti *nano technology* dalam inovasi pengemasan produk pertanian, serta teknologi pengolahan hasil produk pertanian. Dalam bidang Inovasi Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumberdaya Pertanian telah berhasil dikembangkan model Akselerasi Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan Lestari (m-AP2RL) didukung analisis sistem dinamik.

Inovasi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian adalah pedoman identifikasi dampak dan arahan antisipasi, adaptasi serta mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian; *roadmap* strategi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim; serta output berupa Sistem Informasi Katam Terpadu yang berfungsi sebagai alat dalam pengamanan produksi dan pencapaian program peningkatan produksi beras untuk surplus 10 juta ton. Berbagai teknologi pengelolaan sumberdaya lahan yang telah dihasilkan yaitu teknologi sistem pertanian terpadu lahan kering iklim kering; teknologi pengelolaan tanah, air dan pupuk untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman; teknologi pengelolaan lahan suboptimal melalui penerapan pengelolaan hara terpadu dan konservasi tanah; teknologi pemberdayaan agens hayati tanah untuk pemulihan kesuburan tanah terdegradasi; teknologi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pengelolaan tanaman terpadu; teknologi optimalisasi





pemanfaatan lahan rawa; berbagai formula pupuk organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah; serta berbagai *tools/kit* seperti perangkat uji hara tanaman tebu dan sawit, alat pengukur pH, *testkit* digital perangkat uji pupuk organik, perangkat uji tanah rawa, dan alat analisis residu pestisida.

Inovasi kelembagaan serta inovasi koordinasi dan integrasi lintas sektor banyak dihasilkan melalui kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi di seluruh provinsi melalui Balai Pengkajian Teknologi (BPTP). Teknologi spesifik lokasi tersebut terutama diterapkan dalam pendampingan program strategis Kementerian Pertanian. Selain itu, output unggulan seperti Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (m-KRPL) telah berhasil meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, dan secara ekonomis mampu menekan pengeluaran rumah tangga masyarakat pedesaan, meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat, serta konservasi sumberdaya genetik lokal. Salah satu kegiatan yang secara signifikan mampu mengakselerasi pemasyarakatan inovasi pertanian spesifik lokasi adalah implementasi Sistem Diseminasi Multi Channel (SDMC), yang mampu mendekatkan inovasi pertanian ke pertanian lapangan yang produktif, antara lain didukung pengembangan Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian (LLIP). Hingga saat ini telah dikembangkan 12 LLIP pada lahan-lahan suboptimal, wilayah pesisir dan wilayah perbatasan pada sebagian provinsi di Indonesia.

Hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, antara lain telah dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi dalam menentukan kebijakan revitalisasi lahan, revitalisasi sistem





perbenihan dan perbibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi pembiayaan, dan revitalisasi kelembagaan petani, serta inovasi kebijakan terkait distribusi dan perdagangan produk pertanian.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 mencatat keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup: 49 varietas unggul baru padi, 27 varietas unggul baru jagung dan serealia, 114 varietas unggul baru tanaman hortikultura, 38 varietas unggul baru/klon tanaman perkebunan, serta 47 galur unggul ternak, 1222 inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian, 44 teknologi pascapanen hasil pertanian, 139 model kelembagaan dan rekomendasi kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Dalam hal diseminasi teknologi, Kementerian Pertanian dalam periode 2010-2014 mendiseminasi 1307 teknologi ke pengguna. Selain itu juga melakukan sejumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional dalam rangka dipenyebarkan hasil penelitian secara luas. Selama tahun 2010-2014, ada sebanyak 453 inovasi Balitbangtan yang telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya (HKI), dimana 294 diantaranya telah berupa sertifikat HKI.

G. Penyediaan Pangan Masyarakat

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKPG) tahun 2004 merekomendasikan kriteria kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk Indonesia yaitu kebutuhan kalori minimal 2.000 kkal perkapita/tahun, kebutuhan protein minimal 52 gram perkapita/tahun. Sementara itu, untuk ketersediaannya ditetapkan kriteria kecukupan minimal 2.200 kkal perkapita/hari untuk energi dan minimal 57 gram perkapita/hari untuk protein.





Ketersediaan energi tidak menjadi masalah selama periode tahun 2010-2014, karena jauh di atas rekomendasi WKPG dengan rata-rata 3.767 kkal per kapita per hari, bahkan jumlahnya per tahun rata-rata mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 27 kkal per kapita per hari. Rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi tersebut menurun dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi pada periode tahun 2005-2009 yang mencapai 142 kkal per kapita per tahun. Hal ini diduga akibat ketidaksiharasan pertumbuhan penyediaan pangan sumber energi dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Pada sisi konsumsi energi, capaiannya masih 1.987 kkal per kapita per hari atau sedikit di bawah rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Selain itu pertumbuhan konsumsi tersebut menunjukkan pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 5 %. Hal ini diduga terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat. Namun demikian, apabila pertumbuhan konsumsi tersebut dibandingkan dengan periode tahun 2005-2009, sebenarnya terjadi pertumbuhan konsumsi yang positif dari yang sebelumnya minus 32 % menjadi minus 5 %.

Tabel 31. Konsumsi Beras di Tingkat Rumah Tangga Tahun 2010-2014

Tahun	Konsumsi Beras *) (kg/kap/thn)	Pertumbuhan (kg/kap/thn)	Pertumbuhan (%)
2010	99,7	(2,52)	(2,47)
2011	101,7	2,00	2,01
2012	96,6	(5,10)	(5,01)
2013	96,3	(0,30)	(0,31)
2014			
Rata-rata 2010-2014	98,57	(1,48)	(1,45)
Rata-rata 2005-2009	103,25	(0,75)	(0,66)
Sasaran			(1,5)

*) konsumsi beras pada tingkat rumah tangga

Sumber : Susenas BPS Tahun 2010 – 2013, diolah dan dijustifikasi BKP, Kementan





Kinerja kecukupan pangan dari aspek ketersediaan protein mencapai 93,10 gram per kapita per hari atau jauh diatas rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, dengan rata – rata persentase peningkatan sebesar 0,53 %. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan protein pada periode tahun 2005-2009 yang mencapai 3,11 gram per kapita per tahun, maka rata-rata pertumbuhan ketersediaan protein tersebut mengalami penurunan. Hal ini diduga akibat ketidakselarasan pertumbuhan penyediaan pangan sumber protein dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Tabel 32. Pola Pangan Harapan Tahun 2010 – 2014

TAHUN	PPH	PERTUMBUHAN
2010	85,7	
2011	85,6	(0,1)
2012	83,5	(2,1)
2013	81,4	(2,1)
2014		
Rata-rata 2010 – 2014	84,93	1,42
Rata-rata 2005 – 2009	79,50	(0,07)
Sasaran 2013	91,5	





Seperti halnya ketersediaan protein, konsumsi protein jauh diatas rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu mencapai 57,14 gram/kapita/hari. Pertumbuhannya juga meningkat rata-rata sebesar 0,71%/tahun, termasuk apabila dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi protein pada periode 2005-2009 yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Peningkatan pertumbuhan konsumsi protein diduga berkaitan dengan peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Rata-rata konsumsi beras pada periode tahun 2010–2014 sebesar 98,57 kg/kapita/tahun (Tabel 31) dengan laju pertumbuhan konsumsi menunjukkan penurunan 1,48% per tahun. Perkembangan konsumsi beras pada periode tahun 2010–2014 dibandingkan dengan periode tahun 2005–2009 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh mulai ditetapkannya kebijakan diversifikasi pangan melalui berbagai promosi seperti *One Day No Rice* dan pengembangan konsumsi pangan pokok lokal. Namun, penurunan konsumsi beras ini juga perlu diwaspadai mengingat data Susenas yang dilakukan oleh BPS menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan konsumsi terigu.

Tabel 33. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2009-2013

Tahun	(Rp/Kg)										
	Beras		Daging Ayam Ras	Daging Sapi	Minyak Goreng Curah	Gula	Terigu	Kedelai	Telur Ayam	Cabe Merah	Bawang Merah
	Umum	Ter-murah									
2009	6.695	5.477	25.779	59.544	11.025	8.575	7.639	8.408	13.041	26.905	14.542
2010	8.011	6.430	23.897	62.993	12.029	10.090	7.501	8.702	13.471	23.299	16.852
2011	9.341	7.412	23.966	67.077	14.246	10.147	7.538	8.628	15.008	23.763	19.224
2012	10.425	8.281	26.177	76.692	12.956	11.358	7.507	8.843	16.133	24.034	14.651
2013	10.857	8.587	29.841	92.843	13.232	11.874	7.597	9.604	17.676	33.853	36.318
Rata - Rata CV	1,92	2,01	5,77	3,42	2,90	4,12	0,52	2,34	4,38	23,87	16,77
Target CV	<=5	<=5	<=10	<=10	<=5	<=5	<=10	<=10	<=10	<=25	<=25

Untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, aktif dan produktif, masyarakat harus mengkonsumsi pangan yang beragam,





bergizi seimbang dan aman. Para ahli gizi menyarankan kriteria pola pangan yang ideal bagi manusia Indonesia yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 100. Konsumsi pangan ideal adalah jika proporsi jumlah asupan karbohidrat dari sereal (termasuk gandum) maksimum 50 %.

Target skor PPH Indonesia pada tahun 2015 sesuai dengan Perpres 22 tahun 2009 sebesar 95. Perkembangan skor PPH pada periode 2010–2014 (Tabel 32) menunjukkan peningkatan skor PPH sebesar 1,42 per tahun, dengan capaian skor PPH pada tahun 2013 sebesar 81,4. Ini menunjukkan bahwa capaian diversifikasi konsumsi pangan masyarakat belum mencapai sasaran yang diharapkan (PPH = 91,5 pada tahun 2013). Belum tercapainya sasaran tersebut diduga akibat tingginya konsumsi padi–padian, minyak, dan lemak. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya konsumsi sayur–buah, umbi–umbian, pangan hewani, dan kacang - kacangan.

Stabilitas harga pangan pokok merupakan salah satu indikator ketahanan pangan tahun 2010–2014 yang dicirikan dengan koefisien variasi (CV) tidak melebihi target CV masing–masing komoditas. Selama periode tahun 2010–2014 (Tabel 33), perkembangan harga pangan pokok secara umum stabil dengan CV tidak melebihi target. Pangan



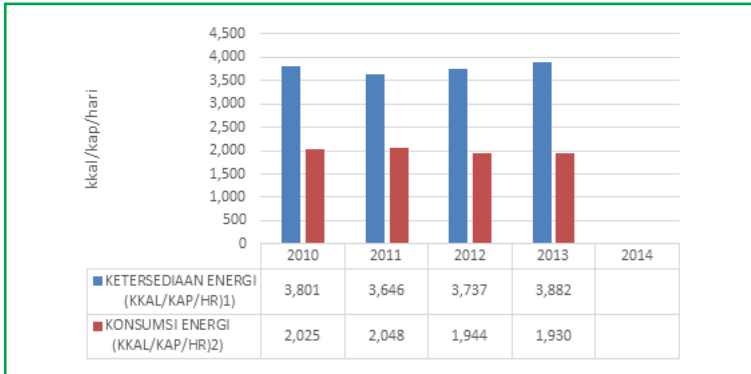
pokok tersebut meliputi komoditas beras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng curah, gula, terigu, kedelai, dan telur ayam. Hal ini menunjukkan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen, meskipun harga–harga tersebut stabil pada kisaran harga yang cukup tinggi.

Namun demikian untuk komoditas cabe merah dan bawang merah cenderung mengalami gejolak harga yang ditunjukkan dengan CV lebih besar dari 10 %. Gejolak ini diakibatkan oleh keterbatasan



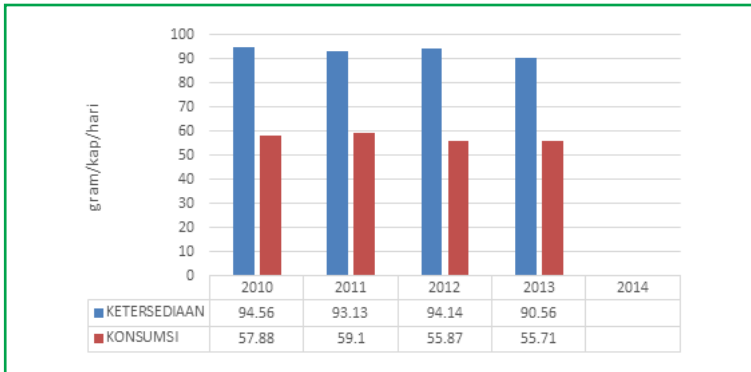


pasokan barang karena perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengakibatkan sejumlah sentra produksi mengalami kegagalan panen.



Gambar 9. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan (Energi) Tahun 2010-2014

Sumber : 1) NBM (BKP, 2013)
2) Susenas, BPS Tahun 2010 – 2013, diolah dan dijustifikasi BKP, Kementan
Ket: rekomendasi WNPg ketersediaan 2.200 dan konsumsi 2.000 kkal/ kap/hari



Gambar 10. Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2010-2014

Sumber : 1) NBM (BKP, 2013)
2) Susenas, BPS Tahun 2010-2013, diolah dan dijustifikasi oleh BKP, Kementan
Ket: sasaran ketersediaan 57 dan konsumsi 52 gram/kap/hari



H. Perlindungan Produk Pertanian Melalui Perkarantinaan

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaan dengan menyempurnakan dan meningkatkan kualitas operasional di lapangan. Upaya perlindungan produk pertanian sebagai wujud dari Empat Target Sukses Kementerian Pertanian, yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan khusus untuk padi, jagung serta daging sapi ditunjukkan dari kemampuan melakukan cegah tangkal terhadap hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

Sebagai tindak lanjut dari temuan OPTK maka dilakukan tindakan karantina pemusnahan dengan cara pembakaran produk tumbuhan yang terinfestasi, karena tindakan perlakuan tidak memungkinkan efektif dilaksanakan.

Dalam kurun waktu 2010-2014 Badan Karantina Pertanian juga telah melakukan cegah tangkal terhadap HPHK berbahaya apalagi yang bersifat zoonosis, antara lain: penyakit *John's Disease* (*Paratuberculosis*), *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE), *Infectious Bovine Rhinotracheitis* (IBR), *Enzootic Bovine Leukosis* (EBL), *Bovine Viral Diarrhea* (BVD), *Leptospira*, *Brucellosis*, baik dalam kegiatan impor maupun antara area (domestik).

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun. Implementasi Peraturan Perkarantinaan dan Keamanan Hayati memberikan pengaruh terhadap menurunkan volume importasi buah dan sayur buah segar antara lain adalah :





- 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012.

Dalam Permentan tersebut terdapat pengaturan pintu pemasukkan guna mengefektifkan tindakan cegah tangkal introduksi OPTK khususnya lalat buah. Pengaturan pintu pemasukan sekaligus selaras dengan ketentuan World Trade Organization - Sanitary and Phytosanitary (WTO-SPS) yang tidak bertentangan untuk melarang perdagangan bebas khususnya buah asal luar negeri. Adanya penutupan pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, berimplikasi terhadap penurunan volume impor buah, sayur segar dan umbi lapis segar.

Perlindungan/proteksi produk tumbuhan juga senantiasa dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga terutama terhadap kesehatan tumbuhan untuk menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*Notification of Non-Compliance*) di negara tujuan.

Badan Karantina Pertanian untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian khususnya tumbuhan dilakukan melalui Skim Audit Badan Karantina Pertanian (SAB). SAB dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang merupakan tata alir proses registrasi melalui proses pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian kepada pelaksana tindakan karantina/perusahaan (pihak ketiga) yang akan diberi mandat untuk melaksanakan fumigasi standar, sertifikasi marking kemasan kayu.

Penyempurnaan penyelenggaraan program registrasi terhadap perusahaan fumigasi dan perusahaan kemasan kayu dalam rangka penguatan kinerja pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penguatan kinerja tersebut dimaksudkan bahwa



dalam Skim Audit Barantan telah menerapkan standar manajemen mutu. Oleh karena itu proses jaminan mutu baik oleh pihak otoritas kompeten (Badan Karantina Pertanian), maupun pelaksana tindakan karantina (pihak ketiga) dapat dipertanggungjawabkan.

I. Pertanian dalam Jasa Lingkungan

Pertanian menyumbangkan beberapa bentuk jasa lingkungan, antara lain mengatur tata air dan mengendalikan banjir pada suatu daerah aliran sungai (DAS), menjaga keberadaan sumberdaya air, mengendalikan erosi, mengendalikan longsor, mempertahankan suhu udara, mendaur-ulang limbah, menjaga kualitas (purifikasi) udara dan memitigasi perubahan iklim. Nilai dari masing-masing jasa lingkungan yang dapat dihasilkan oleh sektor pertanian ditentukan oleh sistem penggunaan dan pengelolaan lahan. Berbagai praktek pertanian bisa menghasilkan jasa lingkungan dan multifungsi yang negatif (*negative externalities*), namun sistem pertanian yang dikelola secara berkelanjutan akan memberikan *positive externalities*. Sistem pertanian berbasis pohon, terutama sistem multistrata seperti *agroforestry*, cenderung memberikan berbagai jasa lingkungan yang positif. Sebaliknya sistem pertanian lahan kering berbasis tanaman semusim yang dikelola secara intensif di lahan berlereng curam, cenderung memberikan berbagai eksternalitas yang negatif. Sistem sawah memberikan berbagai jasa lingkungan terutama dalam hal mengatur tata air, menurunkan suhu udara mikro dan menurunkan bahaya erosi.



**Tabel 34. Jasa Lingkungan Subsektor Pertanian Indonesia dan Strategi Peningkatan Nilai Positif Jasa Lingkungan**

SUB-SEKTOR PERTANIAN	JASA LINGKUNGAN POSITIF	JASA LINGKUNGAN NEGATIF	STRATEGI PENINGKATAN NILAI POSITIF JASA LINGKUNGAN
PERTANIAN DI LAHAN MINERAL			
Tanaman Pangan			
Sawah	Mengatur tata air, mengurangi erosi, mempertahankan biodiversitas fauna dan flora akuatik	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran oleh residu bahan agrokimia pestisida • Konsumsi air yang tinggi • Emisimetana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian konversi lahan sawah • Efisiensi penggunaan bahan agrokimia dan pemupukan berimbang • Irigasi macak-macak dan berselang (intermitten) • Mendaur ulang jerami/sisa tanaman
Tegalan (pada lahan berlereng curam)	-	Sumber erosi dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan inovasi teknologi konservasi dan agroforestry • Mendaur ulang sisa tanaman
Perkebunan dan Hortikultura			
Tanaman pohon-pohonan	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan CO₂ yang relatif tinggi • Meningkatkan daya infiltrasi tanah dan mengurangi risiko erosi dan tanah longsor 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai biodiversitas yang rendah bila dalam bentuk monokultur 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak keberadaan sistem pertanian berbasis pohon-pohonan melalui rehabilitasi lahan terlantar menjadi sistem pertanian berbasis pohon • Meningkatkan biodiversitas melalui sistem multistrata/ agroforestry
Tanaman semusim (annual) dan dua musim (biennial)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber erosi dan sedimentasi • Pencemaran oleh residu bahan agrokimia 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan inovasi teknologi konservasi tanah dan agroforestry • Mendaur ulang sisa tanaman • Peningkatan efisiensi pemupukan dan penggunaan pestisida



<p>Pertanian di lahan gambut</p>	<p>-</p>	<p>Sumber emisi CO2 Terganggunya tata air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan tata air dan mengurangi kedalaman saluran drainase • Intensifikasi pertanian pada untuk pertanian eksisting di lahan gambut agar tekanan terhadap perluasan areal dapat dikurangi • Meminimalkan penggunaan lahan gambut untuk perluasan areal pertanian, dan mengutamakan penggunaan lahan mineral.
<p>Peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber bahan organik dan hara untuk tanaman • Sumber bioenergi (CH4) 	<p>Sumber emisi metana (CH4) dari sistem pencernaan (enteric fermentation) dan kotoran hewan serta emisi nitrous oksida (N2O) dari kotoran hewan ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Digestasi kotoran hewan untuk menghasilkan CH4 sebagai biogas • Peningkatan penggunaan kotoran hewan untuk pupuk

Ada dua pendekatan yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jasa lingkungan pertanian:

1. Pendekatan hukum, dimana pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan insentif praktek pertanian yang memberikan fungsi lingkungan positif dan disinsentif untuk praktek pertanian yang berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan. Pendekatan hukum juga diberlakukan terhadap sektor di luar pertanian yang aktivitasnya mengurangi atau menghilangkan kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan jasa lingkungan, seperti Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Insentif finansial dan bantuan teknis untuk mengembangkan sistem pertanian yang memberikan peningkatan nilai ekonomi dan sekaligus jasa lingkungan.

Kedua pendekatan ini pada umumnya ditempuh secara simultan. Mengingat sektor pertanian semakin dihadapkan kepada tantan-





gan lokal dan global yang semakin serius, maka pemilihan inovasi teknologi diarahkan untuk sistem penggunaan dan pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan daya adaptabilitas dan ketangguhan (*resilience*) sistem tersebut dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan yang lebih tinggi.

1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pertanian

Indonesia memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Namun demikian, berbagai masalah dan tantangan masih dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut termasuk dalam lima tahun ke depan.

1.2.1. Potensi

A. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga, 12 % spesies mamalia, 16 % reptil dan amphibi, dan 17 % burung di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas daratan Indonesia hanya 13 % dari total luas daratan di dunia.

Potensi sumberhayati berasal dari tumbuhan ada sekitar 40 ribu yang terdiri dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah.

Keanekaragaman hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian besar lagi belum teridentifikasi. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi dan obat-obatan. Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah melalui perdagangan tanaman obat dengan nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen. Selain berfungsi untuk menunjang



kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda. Kita bisa menjumpai padang es dan padang rumput dataran tinggi di Papua. Beragam hutan basah dataran rendah di Kalimantan dan Sumatera. Adapula ekosistem danau yang dalam dan rawa dangkal. Untuk itu, agar keanekaragaman hayati dan agoekosistem tidak terancam kelestariannya, maka kita harus arif (bijaksana) dalam memanfaatkannya, dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan aspek kelestariannya.



B. Lahan Pertanian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor pertanian.

Berdasarkan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa.





Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga sebagai lahan cadangan sekitar 34,7 juta hektar, yang berada di kawasan budidaya (APL) seluas 7,45 juta hektar, HPK 6,79 juta hektar dan sekitar 20,46 juta hektar di kawasan Hutan Produksi (HP).

Potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi, sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. Potensi ini apabila dapat dimanfaatkan secara optimal merupakan peluang bangsa kita untuk menjadi lebih maju dan sejahtera.

Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara optimal seperti lahan kering/rawa/lebak/pasang surut/gambut yang merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

C. Teknologi

Teknologi Pertanian Indonesia sendiri berkembang dengan pesat. Dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Banyak

aplikasi teknologi yang digunakan dalam industri pertanian modern di Indonesia guna mengejar hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Berbagai inovasi teknologi telah dihasilkan





oleh Kementerian Pertanian. Melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di daerah yang menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi, untuk mendorong sistem dan usaha pertanian yang efisien, dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal. Teknologi tersebut diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya air seperti teknologi panen air, teknologi pemanfaatan air secara efisiensi melalui irigasi tetes, jaringan irigasi tingkat desa (JIDES) dan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT).

Selain itu, Kementerian pertanian menghasilkan berbagai macam prototipe alat dan mesin pertanian yang bermanfaat bagi petani. Prototipe tersebut merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan perekayasa alsintan, menghasilkan varietas baru, produk lainnya, seperti vaksin, bibit ternak, *tool kit*, peta, dan sebagainya. Teknologi pascapanen diyakini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas produk hasil panen Selain itu teknologi pengolahan juga diperlukan sehingga mampu memberikan nilai tambah dan kualitas dari suatu produk pertanian. Demikian pula teknologi yang terkait dengan pemasaran, misalnya teknologi pengemasan, penyimpanan, sortasi dan lainnya yang tentunya menjadi tantangan bagi lembaga penelitian untuk menghasilkan teknologi yang aplikatif.

Berbagai macam paket teknologi tersebut diharapkan tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Bioteknologi dan teknologi untuk pertanian organik merupakan tulang punggung IPTEK yang belum optimal dikembangkan, perlu diperkuat sehingga menghasilkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Teknologi informasi yang dikembangkan membuka kesempatan dikembangkannya pertanian cermat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas biologis sistem pertanian baik dalam skala nasional, regional, perusahaan hingga usahatani. Hal ini dapat mendukung pengembangan bio-produk yang mempunyai nilai jual lebih baik.





D. Tenaga Kerja

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumahtangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Besarnya jumlah tenaga kerja tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing. Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan keterampilan pertanian dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitas pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

Sub-sektor tanaman pangan merupakan lapangan usaha yang menyerap bagian terbesar tenaga kerja dan sangat dominan dalam mewarnai struktur ketenagakerjaan sektor pertanian maupun nasional. Hampir seluruh penduduk di pedesaan bekerja di sub-sektor tanaman pangan.

Selain semakin meningkatnya kebutuhan terhadap produk pangan, juga posisi tanaman pangan saat ini masih dipandang sebagai komoditas strategis, politis, ekonomis sehingga dipandang perlu upaya peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Disamping itu kegiatan-kegiatan yang berorientasi pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan terutama petani terus akan menjadi prioritas, mengingat masih rendahnya kualitas SDM pertanian.

Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub-sektor tanaman pangan tersedia di pedesaan, namun ada kecenderungan terus menurun



dengan indikasi semakin berkurangnya minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja di sub-sektor pertanian. Jumlah rumah tangga yang berusaha di bidang pertanian selama satu dekade terakhir (2003-2013) diindikasikan menurun sebanyak 5,096 juta RT dan sekitar 4,527 juta RT (89%) berada di Jawa. Sedangkan dari sisi kualitas Sumberdaya Manusia, tenaga kerja ini masih sangat kurang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengupayakan secara berkelanjutan penyediaan SDM Pertanian yang berkualitas.

E. Pasar

Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 237 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,49 persen per tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk termasuk pertanian tanaman pangan di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat, menurut data Mc Kinsey Global Institute, saat ini kelas menengah di Indonesia berjumlah 45 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 135 juta pada





tahun 2030. Hal ini merupakan pasar yang harus kita antisipasi, mengingat ragam permintaannya terhadap produk pertanian semakin besar dan spesifik. Selain itu, akan semakin penting dengan ditetapkannya pasar tunggal ASEAN pada tahun akhir 2015, dimana pasar domestik akan dipenuhi oleh produk negara ASEAN bila tidak mampu menghasilkan produk yang diminta kelas menengah tersebut.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

Pada tahun 2015, kesepakatan ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN akan terealisasi. Pilar utama dalam AEC adalah mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal yang didukung dengan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang lebih bebas.



Lebih bebas yang dimaksudkan adalah adanya pengurangan hambatan tarif maupun non tarif dalam perdagangan antar negara ASEAN. AEC akan membuka peluang bagi Indonesia untuk

memperluas pangsa pasar, mendorong daya saing serta berpotensi menyerap tenaga kerja Indonesia. Perwujudan AEC akan membentuk ASEAN sebagai pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India, Indonesia yang jumlah penduduknya 40 persen dari total jumlah penduduk kawasan menjadikan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang produktif dalam pasar ASEAN.

Penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan semakin banyaknya



produk impor masuk ke Indonesia. Kondisi inilah yang cukup mengkhawatirkan karena berpengaruh pada eksistensi produk lokal, peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi, 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) memperluas jaringan pemasaran, serta 4) meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran. Selain itu, rasa nasionalisme Bangsa Indonesia perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Bila perbaikan ini dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, maka akan mampu memberikan peluang bagi industri manufaktur Indonesia untuk memasarkan produknya dan mampu bersaing dengan produk-produk impor baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

1.2.2. Permasalahan

Pembangunan periode 2010-2014 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2005 – 2009). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2015-2019, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:





A. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

Konversi lahan yang tidak terkendali

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai *real estate*, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar pertahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonsversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru.

Konversi lahan sawah sekitar 80 % terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah





yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian. Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru

Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 330 ribu hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah memang belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 ribu ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut,





selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Pada tahun 1992 kurang lebih 18 juta hektar lahan di Indonesia telah mengalami degradasi atau penurunan kualitas lahan. Pada tahun 2002 luasan tersebut meningkat menjadi 38,6 juta hektar (BPS, 2002). Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan melalui memanfaatkan produk bioteknologi, seperti pupuk dan pestisida hayati yang mengandung mikroba bersifat ramah lingkungan. Penggunaan mikroba sebagai pupuk hayati dapat membantu menyediakan unsur hara yang lengkap bagi tanaman, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan juga sangat penting dalam memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pemakaian pestisida hayati diharapkan selain dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat.

Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, sejak tahun 1993 jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2008, rataan kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0,96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah.





Menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Beternak tidak mempunyai lahan

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain.

Sehubungan hal di atas dan menjamin kebutuhan pangan nasional asal ternak, maka usaha peternakan harus maju dan berkembang. Salah satu syaratnya adalah peternakan harus diberi lahan dengan cara memberi kepastian dalam RTRW untuk ruang peternakan.

B. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan





jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Selain itu, masih terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantinaan, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik komoditas.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadai jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua pelabuhan memiliki *holding ground* untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.





C. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/ bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung





antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Swasembada beras, jagung dan gula yang telah dicapai selama ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih/bibit unggul. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan yang menonjol.

Di Indonesia, sistem perbibitan ternak sudah mengalami kemajuan dalam hal peraturan pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Permasalahan pembibitan sapi potong yang dihadapi saat ini adalah : (1) jumlah bibit ternak belum terpenuhi; (2) kualitas bibit masih rendah; (3) pelaku usaha pembibitan masih kurang respon dalam pembibitan; (4) pengurusan betina produktif akibat pemotongan betina produktif; (5) sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengumpulan; serta (6) kelembagaan pembibitan belum memadai.

Sistem perbibitan nasional diperlukan untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan. Kelembagaan perbibitan ini untuk memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak





serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan. Dengan adanya kelembagaan ini maka peternakan rakyat hingga industri akan mendapatkan manfaatnya. Apabila program perbibitan dalam sebuah kelembagaan meningkat dampaknya peternakan dalam negeri akan meningkat juga sehingga mempunyai bibit yang memiliki kualitas sangat baik.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.





D. Regulasi

Pengembangan sektor pertanian yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan pertanian mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di bidang pertanian. Pengembangan pertanian memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui formulasi kebijakan dan pengamanan kebijakan fiskal dan moneter. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjangkau.

Perubahan konstalasi pemerintahan dari sentralistik menuju otonomi daerah tidak serta merta dapat mengaktualisasikan peran kelembagaan petani dan penyuluhan di daerah. Upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah pasca reformasi dan otonomi daerah, namun belum dapat menunjukkan hasil yang benar-benar dapat memberikan jaminan berjalannya sistem budidaya dan penerapan teknologi untuk dapat mengakselerasi produksi. Pemerintah melalui





Kementerian Pertanian telah mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) Peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan. Penerapan ke empat strategi tersebut sampai di tingkat lapang masih terkendala beberapa aspek antara lain yang dirasakan sangat signifikan adalah pengawalan intensif dari aparat pertanian di daerah produksi (Dinas Pertanian, Penyuluh, POPT, PBT dll) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana sebagian kewenangan bidang pertanian telah dilimpahkan kepada daerah, melalui PP Nomor 38 Tahun 2007. Hasil identifikasi dan pencermatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Program Nasional dalam rangka peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dan pengembangan komoditas pangan lainnya, tidak terkawal dengan baik di daerah, karena dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang pertanian kepada daerah sebagaimana tertuang dalam PP NO 38 TAHUN 2007, tidak serta merta mendapat prioritas dari Pimpinan Daerah, sehingga program dan kegiatan tidak terkawal dengan baik, sebagaimana kita alami pada masa Bimas yang lalu. Hal ini harus menjadi fokus Pemerintah saat ini dan ke depan.

Langkah strategis yang harus dilakukan saat ini dan kedepan adalah, dengan menggerakkan seluruh elemen di daerah melalui peran strategis Pemimpin Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, sampai ke tingkat Desa), sehingga Program peningkatan produksi Beras Nasional yang telah didukung dengan fasilitasi teknologi, sarpras produksi dan dukungan pembiayaan manajemen dapat menjadi suatu Gerakan Nasional dengan satu komando kebijakan untuk dapat mencapai dan mengawal peningkatan produksi beras nasional secara berkelanjutan "Menempatkan pangan sebagai bagian menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta rasa nasionalisme". Untuk mencapai hal tersebut dalam jangka pendek dan menengah peran Presiden secara sentral sangat penting dan dibutuhkan dalam menggerakkan Gubernur, Bupati/Walikota beserta seluruh jajarannya mengawal program peningkatan produksi beras nasional. Forum APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia); APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), serta





pelibatan aktif dunia usaha secara berkeadilan. Hal ini akan sangat besar perannya dalam membangun integrasi dan sinergi program pembangunan pertanian. Dalam jangka panjang harus segera dirancang suatu regulasi yang mampu mengaktualisasikan pangan sebagai kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta menumbuhkan rasa nasionalisme seluruh komponen bangsa.

E. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat

Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan

**Boks 1.****UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegritas dalam koperasi yang ada di pedesaan.

Kelembagaan pasar yang dibangun selama ini, seperti kelembagaan pasar pada Pasar Lelang, Sub Terminal Agribisnis, Pasar Ternak, Pasar Tani (Aspartan, Asosiasi Pasar Tani) dan kelembagaan pada





sistem resi gudang masih harus mendapatkan pengawalan dalam memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan posisi tawar petani yang optimal.

Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Mereka lebih memilih untuk mengadu nasib ke luar kota bahkan ke luar negeri, bekerja di pabrik-pabrik, bidang kedokteran, menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan bergengsi lainnya. Selama ini rata-rata pekerja yang bekerja di sektor pertanian adalah penduduk dengan usia lebih dari 50 tahun. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan senjang





regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada sektor pertanian adalah membangun pertanian lebih maju dan modern berbasis inovasi dan teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan bioindustri pertanian menjadi sangat penting dan strategis untuk mewujudkan upaya tersebut. Jika kondisi tersebut dibangun di perdesaan, tentu akan menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat dan sangat menarik bagi generasi muda untuk tidak lagi pergi ke kota, bahkan generasi muda yang telah bekerja di perkotaan akan kembali





ke perdesaan. Untuk itu beberapa hal penting harus dipersiapkan di perdesaan, yaitu (1) membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian di perdesaan, (2) meningkatkan kapasitas SDM generasi muda pertanian yang lebih baik, dan (3) mendorong kebijakan dan regulasi yang tepat terutama dalam kaitannya dengan kepastian mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan para generasi muda. Langkah konkrit untuk ini antara lain adalah menjaring seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya siswa baru di sekolah-sekolah tinggi pertanian lingkup Kementerian Pertanian, yang diikuti dengan perbaikan kurikulum dan revitalisasi sarana prasarana belajar mengajar termasuk SDM pengajar.

F. Permodalan

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan *prudential* perbankan. Dampak dari penerapan *prudential* perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawasan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.



Dengan terbatasnya pembinaan, pengawasan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usahatani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplementasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengkases kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian.

1.2.3. Tantangan Pembangunan Pertanian 2015-2019

A. Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi

Tantangan global di masa mendatang adalah bagaimana penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9,5 milyar pada tahun 2050, dan apabila dikaitkan dengan adanya perubahan preferensi konsumen maka ketahanan pangan secara global akan menjadi suatu tantangan yang nyata. Di lain pihak, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya.

Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menjadi komitmen global. Untuk





itu, penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan. Tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.

Bahan bakar minyak (BMM) dan bahan bakar gas (BBG) yang berasal dari sumberdaya fosil merupakan hal yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan, yakni sebagai sumber energi penggerak utama transportasi, industri dan juga pertanian. Pasa saat ini bahan bakar berasal dari fosil jumlahnya semakin terbatas. Sejak dieksploitasi mulai abad 20an diperkirakan sumberdaya ini fosil semakin langka. Dengan terbatasnya ketersediaan energi dan fosil, maka harus dicarikan sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian beberapa komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, jagung, ubikayu, tebu, kemiri sunan, jarak pagar dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila sumber energi dari hayati ini atau disebut Bahan Bakar Nabati (BBN) dapat dikembangkan dengan baik, maka ketergantungan terhadap BBM semakin kecil. Di sisi lain dengan berkembangnya permintaan terhadap BBN maka akan memberikan peluang pasar baru bagi produk hasil pertanian para petani.

B. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim *El-Nino* dan *La-Nina* yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas



lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Sejak tahun 1898 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 % per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini cenderung akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Disamping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penciptaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas menjadi sangat penting.

Selain itu, Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah "rawan bencana". Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir,





kekeringan dan macam bencana alam lainnya. Semua bencana alam tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen, dan menimbulkan trauma bagi masyarakat korban bencana. Karena itu, kemampuan untukantisipasi bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pascabencana menjadi penting.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sering terdampak bencana alam paling besar. Bencana alam tersebut berdampak buruk dan mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian yang meliputi bangunan bendung, dam, jaringan irigasi, jalan usahatani, kerusakan tanaman dan ternak, hingga penurunan produktivitas dan produksi pangan. Naiknya suhu permukaan bumi dan pergeseran pola curah hujan menyebabkan terjadinya pergeseran pola musim yang berdampak pada perubahan pola dan kalender tanam. Cuaca yang tidak menentu sering mengakibatkan petani sulit memperkirakan waktu untuk mengolah lahan dan memanen. Akibat perubahan iklim, tidak kurang dari 50 % wilayah pertanian di Indonesia menghadapi musim hujan yang cenderung mundur dan musim kemarau yang cenderung maju, sehingga musim tanam menjadi pendek. Kondisi ini akan sangat berdampak buruk terhadap intensitas tanam jika tidak ada terobosan inovasi dan teknologi yang mampu memecahkan masalah tersebut. Salah satu inovasi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian adalah varietas unggul berumur genjah dan sangat genjah serta inovasi teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman pendukungnya.

C. Kondisi Perekonomian Global

Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara *emerging economic* dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia



dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial. Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002.

Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 % di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 %; 19,4 %; dan 18,8 %.

Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu *emerging country* yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3 persen, dibandingkan dengan Malaysia 5,4 persen, Thailand 5 persen, Singapura 1,2 persen, Filipina 6,6 persen, dan Vietnam 5,7. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar yakni 247 juta jiwa sebagai pasar potensial dan tenaga kerja.

Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang makin kondusif. Dengan masyarakat





ekonomi ASEAN, Indonesia akan berkesempatan mengenyot ekspor ke berbagai negara, di sisi lain bila tidak siap, dunia usaha lokal akan tergulung diterpa produk impor, masyarakat ekonomi ASEAN akan membuat pertukaran tenaga kerja, modal dan perdagangan berlangsung terbuka antar negara ASEAN. Dengan karakter seperti itu, persaingan tidak lagi semata-mata dalam konteks antar negara, tetapi juga antar daerah (region) dan bahkan antar individu.

Persaingan antar daerah atau antar kota tergambar dari pengukuran Global Cities Index 2012, yakni indikator untuk mengukur tingkat daya saing antar kota dengan variabel seperti aktivitas bisnis, Sumber Daya Manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya dan sumberdaya politik. Hasil dari survei tersebut setidaknya memberikan gambaran bagaimana daya saing satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hasil pengukuran index tahun 2012 menunjukkan Singapura berada pada peringkat 11 dengan angka (3.20), Beijing 14 (3.05), Bangkok 43 (1.93), Kuala Lumpur 49 (1.55), Manila 51 (1.49), dan Jakarta 54 (1.30) dari 66 kota yang disurvei.

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 230,6 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,25 % per tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

Krisis pangan dunia dimulai sejak tahun 2005 ketika negara-negara dunia mulai mengkhawatirkan kelangkaan bahan pangan yang menimbulkan kenaikan harga pangan. Laporan FAO menyebutkan



bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam berkisar yaitu dari 75 % sampai 200 %. Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Krisis pangan dikhawatirkan terjadinya gejolak sosial dan politik bagi negara-negara yang mengalamikrisis pangan, seperti terjadi di Somalia pada awal Mei 2008. Mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Atas dasar situasi dan pertimbangan di atas, maka peningkatan produksi pangan menjadi jalan keluar mutlak yang tidak bisa ditawar. Pergerakan harga global berdampak terhadap pengeluaran konsumsi dan biaya hidup, terutama terhadap Negara berkembang yang cenderung pangsa pengeluaran pangan sangat besar. Kondisi ini harus diantisipasi, bila terjadi gejolak harga pangan kedelai akan mengganggu stabilitas, terutama produsen tahu tempe. Lonjakan harga daging juga meningkatkan inflasi, demikian halnya dengan gejolak harga bawang dan cabai.

D. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019 dan 44 % penduduk berada di pedesaan dan 56 % diperkotaan. Sementara kapasitas ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi.

Sementara itu, laju urbanisasi yang tinggi dimana generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus. Fenomena urbanisasi dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional perdesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian perdesaan ke sektor industri ke perkotaan. Pada tahun 1990 persentase penduduk





yang tinggal di wilayah perkotaan hanya sekitar 30,5 %, pada tahun 2010 meningkat menjadi 44,3 % dan diperkirakan pada tahun 2030 menjadi sebesar 53,7 %. Laju urbanisasi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di pertanian, karena diserap oleh kegiatan industri di perkotaan. Kondisi ini makin dominannya petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agro industri di pedesaan.

E. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di perdesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan, yang jarak antar wilayah membutuhkan alat/sarana yang cukup dalam kelancaran distribusi pangan.

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.



Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut.

Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.







BAB II

A large, stylized yellow wheat stalk graphic that curves from the right side of the page towards the center, framing the main title.

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 - 2019





2.1. Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

**Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan
yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat
dan Produk Bernilai Tambah Tinggi
Berbasis Sumberdaya Lokal
untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**

Tabel 35. Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian

Pokok-pokok Visi	Makna Visi
Sistem pertanian bioindustri	Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan
Berkelanjutan	Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi
Beragam	Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan dan selera
Pangan sehat	Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal
Produk bernilai tambah tinggi	Menciptakan produk pertanian yang mensejahterakan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah
Sumberdaya lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi
Kedaulatan pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Kesejahteraan petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya



2.2. Misi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula





2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Gambar 11. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”	1. Mewujudkan kedaulatan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan
	2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
	4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi	5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional	6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik







BAB III



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI





3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-tiga (2015-2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhineka-





an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

- (1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:
 - a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
 - b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
 - c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan,
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.





- (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:
- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
 - b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
 - c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
 - d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
 - e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.





- f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
- c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3.2. Strategi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan **Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP)** sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit



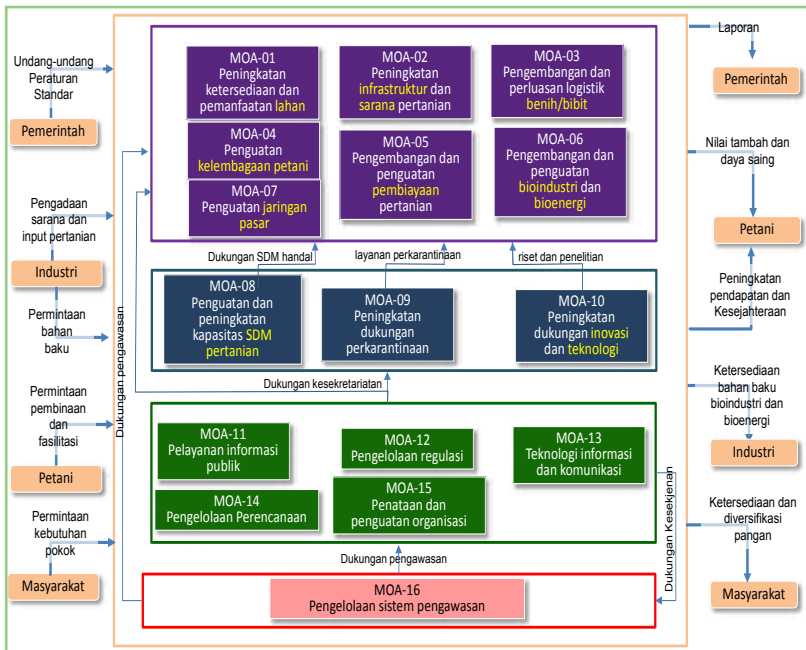


- 4. Penguatan kelembagaan petani
- 5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
- 6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
- 7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :

- 1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
- 2. Peningkatan dukungan perkarantinaan
- 3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
- 4. Pelayanan informasi publik
- 5. Pengelolaan regulasi
- 6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- 7. Pengelolaan perencanaan
- 8. Penataan dan penguatan organisasi
- 9. Pengelolaan sistem pengawasan

Gambar 12. Peta Strategi Kementerian Pertanian





3.2.1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, dalam lima tahun mendatang akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

1. Audit Lahan. Membangun database baik tabular maupun spasial yang lengkap dan akurat melalui inventarisasi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan sistem informasi geografi (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik yang terintegrasi dengan data identitas petani.
2. Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah dan Perda. UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi lahan pangan produktif dan menekan laju konversi lahan pertanian. Selain itu diharapkan mendapat dukungan kesesuaian dengan RTRW kabupaten.
3. Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan perluasan areal pertanian terutama di luar Jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan terutama di Jawa melalui:
 - a) upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui penyusunan dan penerapan perangkat peraturan perundangan,
 - b) pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektar diluar pulau Jawa terutama dengan memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, bekas lahan pertambangan, serta memanfaatkan tumpangsari,
 - c) melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif,
 - d) melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan terutama pada lahan pertanian Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu,
 - e) melakukan upaya reklamasi dan optimasi lahan pada lahan-lahan marginal dan sementara tidak diusahakan atau bernilai Indeks Pertanaman (IP) rendah.

Terkait dengan rencana pendistribusian lahan 9 juta hektar kepada petani, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyiapkan program Reforma Agraria, yang terdiri dari : Redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dan berasal dari hasil legalisasi asset yang subjeknya memenuhi syarat 4,5 juta hektar. Lahan yang menjadi





prioritas untuk dikonversi menjadi lahan pertanian adalah (1) hutan produksi tetap, (2) hutan produksi terbatas, dan (3) hutan lindung. Sementara, hutan produksi dapat dikonversi akan menjadi prioritas berikutnya, yaitu untuk budidaya, industri, pemukiman dan peruntukan lainnya.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkor), dan kawasan hutan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan, atau lahan pertanian yang masih dalam kawasan hutan (wewenang sektor kehutanan).
5. Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam pengelolaan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi segmentasi lahan, dan/atau menjadi lahan non-pertanian. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan segmentasi lahan serta mendorong pengembangan usahatani berskala ekonomi.
6. Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal dengan upaya-upaya yang akan dilakukan diantaranya:
 - a) Melakukan perbaikan dan pencegahan kerusakan tanah, dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air untuk mengurangi erosi dan mencegah longsor serta meningkatkan produktivitas lahan.
 - b) Melakukan penanaman tanaman pohon (buah-buahan) dan perkebunan di daerah kawasan aliran sungai, dan turut serta dalam sistem komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya mengurangi pembabatan dan kerusakan hutan dan rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumberdaya lahan dan air serta lingkungan di kawasan hulu.
 - c) Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan.



7. Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan, melalui upaya:
 - a) Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani.
 - b) Upaya peningkatan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan air.
 - c) Perbaikan struktur fisik tanah dan penambahan bahan organik, serta penerapan berbagai teknologi koservasi tanah dan air.
 - d) Pengembangan dan memantapkan kelembagaan petani pemakai air, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, penyadaran, kepedulian dan partisipasi petani.

3.2.2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

Dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tersier dan kuarter. Disamping itu juga diperlukan infrastruktur di luar areal usahatani seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jalan kabupaten, jalan propinsi, jalan negara, pelabuhan, bandara, sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan lain sebagainya.



2. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri, tapi juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota maupun oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya koordinasi yang baik agar tepat lokasi dan sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan sarana pertanian meliputi bantuan sarana pembuatan pupuk organik, biogas, sarana budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan sarana pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan brigade tanam.
5. Penguatan peran kelompok tani dalam pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Terkait dengan peningkatan layanan irigasi, maka dilakukan upaya-upaya seperti:

- a) Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar Pulau Jawa.
- b) Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi rusak pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bentuk pengelolaan dari pemerintah pusat.
- c) Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- d) Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi.
- e) Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem *out-contracting*.
- f) Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification/SRI*, mengembangkan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian dan menggunakan kembali air buangan dari sawah (*water reuse*).
- g) Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah.





- h) Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.

3.2.3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit

Dalam rangka pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
2. Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal.
3. Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman hingga di tingkat kabupaten
4. Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
5. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/ perbibitan.
6. Membangun industri perbenihan dengan arah sebagai berikut:
 - 1) Kemandirian industri benih nasional yang mencakup kemandirian produksi benih dan industri varietas.
 - 2) Kemandirian penyediaan benih berbasis kawasan.
 - 3) Industri benih berbasis komunitas.
 - 4) Riset berbasis perbenihan.
7. Untuk mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri, maka importir pedagang benih diharuskan mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi produsen benih.
8. Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar) dan kelembagaan UPJA perkebunan.
9. Khusus untuk membangun perbibitan ternak, peran swasta diarahkan pada kelangsungan perbibitan ayam ras mulai dari keberadaan grand parent stock, parent stock sampai final stock. Sedangkan peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan





ketersediaan bibit melalui penerapan sistem perbibitan, yaitu perbaikan mutu benih dan bibit ternak, optimalisasi kelembagaan perbibitan, sertifikasi, penjarangan, pemurnian, dan persilangan melalui penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.

3.2.4. Penguatan kelembagaan petani

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, serta sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok maka akan memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani;
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran;
3. Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Pengendalian Hama Terpadu, Inseminasi Buatan, Perhimpunan Petani Pemakai Air, kelompok usaha pengolahan.
4. Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

3.2.5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

Dalam rangka pengembangan dan penguatan pembiayaan





pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan sistem skim kredit program pertanian untuk memudahkan penyerapan oleh masyarakat petani/peternak dalam kegiatan usahatani tanaman dan ternak termasuk kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasarannya.
2. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi dan koperasi tani sebagai *channeling Agent* lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun non perbankan, untuk membiayai permodalan petani.
3. Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani.
4. Mengembangkan pola kerjasama petani dan pengusaha lokal sehingga ada yang menjadi avalis/penjamin bagi petani dalam meminjam modal usaha pertaniannya.
5. Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di pedesaan sebagai jejaring lembaga pembiayaan formal.
6. Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan gapoktan melalui program pengembangan usaha agribisnis pedesaan sesuai potensi wilayah. Mengembangkan skim perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha melalui asuransi pertanian.
7. Mendorong investasi di pedesaan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya sektor pertanian di pedesaan. Untuk hal ini diupayakan pertumbuhan investasi dalam negeri sebesar 15%/tahun.
8. Mendorong berdirinya bank pertanian sebagai sumber pembiayaan kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir.

3.2.6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi

Dalam rangka pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun peta jalan pengembangan bahan baku bioindustri dan bioenergi.





2. Penguatan pasokan hasil produksi komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi melalui pola kawasan produksi.
3. Mengembangkan industri pengolahan sederhana berbasis di pedesaan
4. Mendorong industri menerapkan *zero waste management*.
5. Mendorong berkembangnya pengolahan lanjutan di dalam negeri dari komoditas pertanian dengan mengacu pohon industri yang ada dan berkembang.
6. Mendorong investasi PMA dan PMDN bidang pengolahan hasil pertanian terutama berteknologi menengah dan tinggi.

3.2.7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan pasar produk pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun peta jalur pemasaran komoditas strategis termasuk komoditas yang sering terkendala distribusi yaitu cabai dan bawang merah dengan memanfaatkan tol laut guna membangun pasar yang terintegrasi dengan baik dari daerah produksi hingga ke konsumen.
2. Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar dan jaringan pasar produk pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga.
3. Fasilitasi kelembagaan pasar dan sistem resi gudang guna meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar bagi petani
4. Memperkuat peran atase pertanian di luar negeri dalam mendukung ekspor produk pertanian.
5. Menggalakkan kampanye positif produk-produk pertanian andalan ekspor.
6. Memperkuat diplomasi dagang produk pertanian baik secara bilateral, regional maupun multilateral.
7. Pendampingan penerapan standar mutu sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu negara tujuan ekspor.
8. Membuka target pasar baru diluar pasar eksisting.



3.2.8. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian

Terdapat tiga komponen SDM pertanian yaitu: 1) non-aparatur yang meliputi petani/tenaga kerja pertanian dan pelaku usaha pertanian lainnya, 2) aparatur pertanian, baik fungsional maupun struktural yang lebih berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian, 3) lembaga petani pedesaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), koperasi, lembaga keuangan mikro, kios sarana produksi, dan lembaga pemasaran.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian tersebut, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan kapasitas penyuluh Pertanian Polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
2. Pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pelatihan bagi pengelola P4S dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan oleh UPT Pelatihan, sedangkan Pelatihan bagi petani pelaku utama agribisnis dilaksanakan oleh P4S.
4. Pendidikan Tinggi bidang Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak (PBT), Pengawas Mutu Pakan Ternak, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, fungsional informasi pasar dan Karantina.
5. Pendidikan Menengah Kejuruan di bidang pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknisi menengah dan menyiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian.

3.2.9. Peningkatan dukungan perkarantinaan

Dalam rangka peningkatan dukungan perkarantinaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:





1. Menyiapkan regulasi teknis, sumberdaya, dana, sarana dan fasilitas pendukung yang handal guna melindungi sumber alam hayati.
2. Implementasi berbagai regulasi internasional kedalam sistem regulasi nasional perkarantinaan.
3. Meningkatkan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Mengoptimalkan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan.

3.2.10. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi

Dalam rangka peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas peneliti di bidang pertanian
2. Meningkatkan penelitian yang memanfaatkan teknologi terkini dalam rangka mencari terobosan peningkatan produktivitas benih/bibit tanaman/ternak.
3. Memperluas cakupan penelitian mulai dari input produksi, efektivitas lahan, teknik budidaya, teknik pasca panen, teknik pengolahan hingga teknik pengemasan dan pemasaran.
4. Meningkatkan diseminasi teknologi kepada petani secara luas
5. Membina petani maju sebagai patron dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru di tingkat lapangan.

3.2.11. Pelayanan informasi publik

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan sarana dalam pelayanan informasi publik.
2. Melaksanakan standar pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi pembangunan di sektor pembangunan.





3.2.12. Pengelolaan regulasi

Dalam rangka pengelolaan regulasi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan regulasi dan turunan regulasi.
2. Menyusun perencanaan penyusunan regulasi lima tahunan
3. Melaksanakan dengar pendapat dari masyarakat terkait dengan konsep peraturan yang akan diterbitkan.
4. Memfasilitasi terbitnya regulasi yang telah disusun.

3.2.13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.
3. Pengelolaan aplikasi dalam mendukung manajemen pembangunan
4. Pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

3.2.14. Pengelolaan perencanaan

Dalam rangka pengelolaan perencanaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dan lima tahunan,
2. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan pertanian lintas sektor dan pusat-daerah, serta
2. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan pertanian.

3.2.15. Penataan dan penguatan organisasi

Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi, maka akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:





1. Penataan organisasi yang lebih ramping dan memenuhi kebutuhan sesuai tugas dan fungsi yang diamanahkan,
2. Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
3. Menjalani sinergitas antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

3.2.16. Pengelolaan sistem pengawasan

Dalam rangka pengelolaan sistem pengawasan, maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengelolaan arah dan strategi kementerian sebagai satu visi bagi setiap aparatur pelaksana,
2. melakukan peninjauan manajemen terhadap jalannya pelaksanaan program,
3. melakukan pengawasan internal,
4. melakukan pengukuran dan pengelolaan kepuasan stakeholders
5. melakukan pengendalian dokumen dan pengarsipan.

3.3. Kebijakan Kementerian Pertanian

Kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019 dibagi dua yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis.

3.3.1. Kebijakan Umum

A. Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula

Jumlah penduduk dunia terus bertambah, dan diprediksi akan mencapai 9,5 miliar pada tahun 2050. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia, cukup wajar kalau ketahanan pangan selalu menjadi fokus perhatian kebijakan pemerintah. Ditambah dengan harga pangan dunia yang cenderung berfluktuasi, berbagai kebijakan, program, dan investasi mulai lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Fakta menyatakan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen





dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) menyarankan agar penyediaan pangan minimal dalam bentuk ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein minimal 57 gram/kapita/hari.

Sejalan dengan perubahan paradigma dari sistem pertanian konvensional menuju sistem pertanian bioindustri berkelanjutan, periode 2015-2019 pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan fokus pada pengembangan lima bahan pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

Pada lima tahun ke depan, akan diupayakan untuk mensinergikan ketahanan pangan dan energi, karena antara pangan dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Apalagi Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi mengisyaratkan bahwa transformasi energi merupakan sebuah wujud dari keberhasilan pertanian yang menghasilkan ketahanan pangan. Sehingga dengan cara itu, perekonomian nasional tidak akan tergantung atau mudah terpengaruh dengan pasar global. Artinya bangsa Indonesia tidak akan rentan menghadapi masalah pangan.

Membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan prasarana yang efektif dan efisien dari hulu hingga hilir melalui berbagai tahapan yaitu : produksi dan pengolahan, penyimpanan, transportasi, pemasaran dan distribusi kepada konsumen. Langkah strategis tersebut didukung melalui: 1) pemantapan ketersediaan





pangan berbasis kemandirian, 2) peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, 3) peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal 4) peningkatan status gizi masyarakat, dan 5) peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Dengan tercapainya ketahanan pangan, secara otomatis langkah menuju swasembada pangan terbuka lebar. Untuk itu, kebijakan swasembada pangan dalam bentuk investasi di sektor pertanian, perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif agar berdampak positif terhadap ketahanan pangan utamanya aktivitas ekonomi, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan dan kemiskinan, bahkan konservasi lingkungan.

B. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri

Peningkatan produk pertanian berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu mulai dari kegiatan di lapangan hingga sampai ke meja konsumen, dengan istilah *from land to table*. Peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui kebijakan Penerapan SNI wajib mulai dari tingkat petani dan pelaku usaha. Salah satu bagian dalam penerapan standar mutu yaitu penerapan sistem jaminan mutu *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* untuk perkarantinaan pertanian,





serta berbagai macam sertifikasi lainnya seperti Global GAP, Organic Farming, Keamanan Pangan/HACCP, serta Maximum Residue Limit (MRL) untuk produk komoditas strategis.

Industri hilir merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan daya saing produk pertanian. Selain itu, peningkatan efisiensi produksi maupun distribusi produk antara lain melalui pengembangan dan penggunaan teknologi budidaya dan input yang lebih efisien, kelembagaan petani yang menunjang efisiensi produksi, konsolidasi lahan pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan luas penguasaan lahan pertanian per individu petani. Selain itu diperlukan penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan menghilangkan inefisiensi dalam bidang pemasaran seperti pungutan liar dan perbaikan sarana infrastruktur informasi dan telekomunikasi.

Untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri dan memperkuat daya saing produk pertanian, sinergitas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan. Perilaku masyarakat pun perlu diperkuat dalam menghadapi perdagangan bebas dengan mengobarkan semangat untuk mencintai produk dalam negeri. Perbaikan tataniaga dilakukan untuk menekan biaya inefisiensi yang timbul. Kebijakan tata niaga tarif/pajak/regulasi ekspor dan impor dilakukan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri. Pengaturan bea masuk bagi produk-produk impor ke dalam negeri merupakan kebijakan sementara dalam jangka pendek sambil dilakukan pembinaan di dalam negeri terhadap produk sejenis agar nantinya memiliki standar kualitas sehingga bisa bersaing dengan kualitas produk impor. Selain itu dapat juga menerapkan kebijakan *non tariff barrier* yang tidak melanggar konvensi internasional terkait perdagangan.

Mekanisme kebijakan penetapan harga dasar/harga pembelian pemerintah (harga pasar yang berlaku) pada musim panen untuk melindungi produsen beras dan komoditi strategis lainnya. Kegiatan promosi produk pertanian untuk memperluas dan meningkatkan pangsa pasar produk pertanian unggulan nasional baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor.





Boks 2.
Undang-undang RI No. 18 tahun 2012
tentang Pangan.

Dalam UU ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; (b) menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; (c) mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (d) mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; (e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; (f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; (g) meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan; dan (h) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional

Lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan meliputi (a) perencanaan pangan; (b) ketersediaan pangan; (c) keterjangkauan pangan; (d) konsumsi pangan dan gizi; (e) keamanan pangan; (f) label dan iklan pangan; (g) pengawasan; (h) sistem informasi pangan; (i) penelitian dan pengembangan pangan; (j) kelembagaan pangan; (k) peran serta masyarakat; dan (l) penyidikan.

Pengembangan komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi (Bahan Bakar Nabati) menjadi penting sesuai dengan inpres Nomor 1 Tahun 2006. Untuk itu, diperlukan kebijakan jangka pendek berupa penyediaan bahan baku untuk mengembangkan dan mengintensifkan komoditas yang sudah ditanam secara luas. Dalam jangka menengah diupayakan untuk mengkaji dan mengembangkan komoditas potensial penghasil bioenergi, dan dalam jangka panjang ditekankan pada pemanfaatan biomassa limbah pertanian (generasi kedua). Untuk mendukung kebijakan tersebut yaitu dengan mengedepankan berbagai aspek seperti riset bioteknologi (pengembangan bibit varietas unggul bahan baku Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk menghasilkan jenis BBN biodiesel, bioetanol,





biooil, dan biogas); dukungan infrastruktur yang meliputi akses dari petani ke industri pengembangan BBN dan pasar; penciptaan pasar domestik yang didukung dengan mengoptimalkan diversifikasi sumber BBN; serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar beralih mengembangkan dan menggunakan BBN. Kebijakan pengembangan komoditas bahan baku BBN ini menjadi bagian dari kebijakan nasional pengembangan energi terbarukan.

C. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaaan dan ketahanan pangan

Benih atau bibit menjadi salah satu unsur dari sarana usahatani yang memerlukan inovasi pertanian yang terus menerus. Untuk itu diperlukan seperti: a) Mendorong penggunaan benih/bibit unggul berpotensi hasil tinggi, adaptif terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan, efektif dalam penggunaan input, termasuk hasil rekayasa genetika dengan protokol untuk menjamin keamanannya, dengan memberikan fasilitasi akses bagi petani; b) Mendorong pembangunan industri perbenihan nasional berbasis sistem inovasi pertanian nasional, termasuk mendorong dan membina petani penangkar menjadi produsen benih yang mandiri; c) Mendorong penurunan penggunaan input eksternal sintetis melalui penggunaan bahan hayati atau penerapan prinsip pemakaian input eksternal sintetis secara bijaksana; d) Mendorong pembangunan bioindustri agroinput; e) Membangun infrastruktur industri agroinput yang meliputi sistem jaminan mutu (protokol standarisasi, laboratorium uji dan penegakannya) dan sistem distribusi yang efektif dan efisien;





dan f) mendorong majunya sistem Sertifikasi benih/bibit tanaman dan ternak serta penerapan standar mutu yang berlaku nasional maupun regional.

Penumbuhan kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya untuk meningkatkan posisi tawar petani sekaligus meningkatkan skala ekonomi agar dapat berdaya saing. Untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani yaitu : a) Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar; b) Struktur organisasi kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, kelompok pembelajaran agribisnis, kelompok usaha bersama agribisnis dan asosiasi) telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit agribisnis; c) Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu; d) Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha; e) Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnya; f) Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi lainnya; g) membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha.

Kelembagaan ekonomi petani ditumbuhkan secara partisipatif yang merupakan peningkatan skala (*scaling up*) kapasitas kelembagaan petani. Alternatif bentuk kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yaitu koperasi dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh petani (PT). Untuk pembentukan PT membutuhkan kriteria khusus yaitu kesiapan petani dalam mengelola organisasi usaha dengan menerapkan prinsip manajemen bisnis profesional serta penyertaan modal sebagai modal dasar perusahaan; h) ketersediaan informasi sesuai jenis, jumlah, kualitas, dan tepat waktu saat dibutuhkan petani mampu meningkatkan adopsi teknologi. Nilai manfaat ekonomi informasi tidak mempengaruhi tingkat adopsi inovasi karena bukan faktor dominan dipertimbangkan petani utama pengambilan keputusan, melainkan ketersediaan biaya usahatani; i) adanya kepastian pasar, tingkat harga jual, kemampuan pembiayaan, modal sosial dan kestabilan harga merupakan indikator yang melandasi perencanaan dan keputusan petani dalam memilih jenis usahatani dan inovasi yang digunakan.

**Boks 3.****Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain.**

Presiden Menginstruksikan antara lain kepada Menteri Pertanian untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain :

- a. Mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) termasuk benih dan bibitnya.
- b. Melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)
- c. Memfasilitasi penyediaan benih dan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)
- d. Mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pasca panen tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)

Perbaikan sistem dan kelembagaan perlindungan petani. Ketidakpastian menjadi salah satu resiko di dalam sektor pertanian sebagai dampak dari bencana alam, perubahan iklim ekstrim, serangan hama penyakit yang menjadikan petani menghadapi kegagalan panen. Implementasi UU Nomor 19/2013 berupa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, yakni: a) Pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; b) Penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani, serta subsidi sarana produksi; c) Penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean; d) Penetapan kawasan usahatani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; e) Fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh menteri; dan f) Memberikan





bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam mengembangkan berbagai inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya pada tiga komoditas utama pangan, yakni padi, jagung, dan kedelai, melalui: a) Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim; b) Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap perubahan iklim; c) Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik; d) Budidaya dan bertani secara berkelanjutan dengan baik, penanganan hasil panen yang baik, pengolahan/pasca panen dan membangun sistem distribusi yang baik. Indikasi atau ukuran keberhasilan pelaksanaan teknologi tersebut adalah standar terhadap produk pertaniannya. Produk pertanian yang baik memenuhi kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Teknologi yang mampu mendaur ulang proses pemanfaatan (*zero waste*) dan pemanfaatan sumberdaya lokal serta diversifikasi merupakan salah satu bagian dari strategi penguatan teknologi.

Penyuluhan pertanian merupakan suatu kesisteman pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha yang berperan dalam meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian oleh kelembagaan penyuluhan pertanian, pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri, maupun bekerjasama, berdasarkan program penyuluhan pertanian yang disusun pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan penyuluhan tidak terlepas dari peran dan kontribusi aktif dari penyuluh pertanian, yang terdiri dari penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Penyuluh pertanian PNS pada dasarnya adalah aparat yang membangun pertanian, pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan pada petani-nelayan beserta keluarganya. Oleh karena itu seorang Penyuluh Pertanian harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.



Institusi Karantina Pertanian Nasional dihadapkan kepada upaya pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) di berbagai sektor guna mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang telah lebih jauh melangkah. Untuk itu diperlukan a) Regulasi teknis, sumber daya, dana, sarana dan fasilitas pendukung yang handal guna melindungi sumber alam hayati nasional, b) Implementasi berbagai regulasi internasional ke dalam sistem regulasi nasional perkarantinaan; c) meningkatkan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; d) Mengoptimalkan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan.

Terkait dengan kedaulatan pangan, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan ketahanan pangan hingga tingkat perseorangan diupayakan dengan landasan kemandirian dan kedaulatan pangan. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan kedaulatan pangan harus dicapai melalui penetapan kebijakan pangan secara mandiri yang menjamin hak pangan bagi masyarakat sampai tingkat perseorangan serta dengan memperhatikan kemampuan negara dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri. Pencapaian kedaulatan pangan harus didukung dengan subsistem yang terintegrasi yang meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan konsumsi pangan dan gizi serta meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan bagi masyarakat.

D. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian

Kawasan pertanian adalah merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan



manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang. Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Pengembangan kawasan pertanian dalam operasionalnya harus disesuaikan dengan potensi agroekosistem, infrastruktur, kelembagaan sosial ekonomi mandiri dan ketentuan tata ruang wilayah.

Tabel 36. Tugas Pengelola Kawasan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengelola kawasan di:	Kepada Pengelola Kawasan:		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten / kota
Pusat	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	
Provinsi	Melaporkan kinerja dan permasalahan	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan,
Kabupaten		Melaporkan kinerja dan permasalahan	Pembinaan di tingkat lapangan

Untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan dalam pengembangan kawasan pertanian, maka secara garis besar dapat dirumuskan langkah-langkah pengembangan kawasan, yaitu sebagai berikut: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergi, (7) pengembangan industri hilir.

Pendekatan yang akan digunakan dalam mengoperasionalkan langkah-langkah pengembangan kawasan, faktor kritis yang harus dipertimbangkan sebagai potensi penghambat, serta keluaran



yang diharapkan dari hasil pelaksanaan strategi, seperti ditampilkan dalam lampiran.

Rancang bangun dan kelembagaan dibutuhkan dalam pengembangan kawasan secara berjenjang. Rancang bangun pengembangan kawasan disusun berdasarkan analisis teknokratis dan rencana kerja melalui telaah kebijakan serta analisis pemeringkatan, klasifikasi dan pemetaan kawasan, serta analisis data dan informasi tabular dan spasial untuk mengarahkan pengembangan dan pembinaan kawasan. Pengelola Kawasan di provinsi menyusun rencana induk (*Master Plan*) untuk setiap jenis kawasan yang ada di provinsi sebagai upaya untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan, program/kegiatan pengembangan kawasan nasional. Adapun Pengelola Kawasan di Kabupaten/Kota menyusun rencana aksi (*Action Plan*) yang merupakan penjabaran operasional dari Master Plan sebagai upaya untuk rencana yang lebih rinci dalam kurun waktu tahun jamak (*multi years*). Pengelolaan kawasan dilakukan secara berjenjang, mulai pengelola di pusat, di provinsi dan di kabupaten/kota seperti pada Tabel 35.

Sumber pembiayaan pengembangan kawasan pertanian nasional berasal dari APBN, investasi swasta dan masyarakat. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan dalam mengembangkan potensi yang ada, melanjutkan dari kondisi saat ini, pengutuhan kegiatan, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran. Sekurang-kurangnya sebesar 30 persen dari total APBN tahunan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan akan dialokasikan untuk memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian nasional. Alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan berdasarkan *need assesment*, potensi jenis komoditas dan lokasi pengembangan kawasan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Selanjutnya Gubernur dan bupati/walikota berperan mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian nasional melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya. Provinsi dan kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam lokasi kawasan pertanian nasional, dapat mengalokasikan APBD dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan. Kementerian Pertanian bersama dengan





Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong minat investor (BUMN, BUMD, PMA, PMDN, koperasi dan lainnya) untuk mengembangkan kawasan pertanian nasional.

E. Kebijakan fokus komoditas strategis

Terkait dengan fokus komoditas yang dikembangkan terdiri dari delapan kelompok produk, yaitu:

1. Bahan makanan pokok nasional: padi, jagung, kedelai, gula, telur dan daging unggas, daging sapi/kerbau
2. Bahan makanan pokok lokal: sagu, jagung, umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar)
3. Produk pertanian penting pengendali inflasi: cabai, bawang merah, bawang putih
4. Bahan baku industri (konvensional): sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala, teh, susu, ubi kayu
5. Bahan baku industri: sorgum, gandum, tanaman obat, minyak atsiri, cengkeh
6. Produk industri pertanian (prospektif): aneka tepung dan jamu
7. Produk energi pertanian (prospektif): biodiesel, bioetanol, biogas
8. Produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor: buah-buahan (nanas, manggis, salak, mangga, jeruk), kambing/domba, babi, florikultura





F. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan

Ketersediaan sarana dan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

(1). Implementasi UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan yang berimplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Kebijakan terkait implementasi UU. No. 41 Tahun 2009 selain diarahkan untuk mencegah alih fungsi lahan yang subur ke lahan non pertanian, juga di arahkan pada program pengembangan melalui upaya terpadu pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.

Tabel 37. Sasaran Perluasan Areal Lahan Pertanian Tahun 2015-2019

Tipologi Lahan	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
	(Ha)					
Cetak Sawah	40.000	130.000	250.000	280.000	300.000	1.000.000
Perluasan Areal Hortikultura	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
Perluasan Areal Perkebunan Rakyat	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	95.000
Perluasan Areal Peternakan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
TOTAL	65.000	165.000	285.000	315.000	335.000	1.165.000

Keterangan :

- * Perluasan areal peternakan terdiri dari dari perluasan kebun hijauan makan ternak (HMT) dan padang penggembalaan
- Jumlah luasan masing-masing kebun HMT dan Padang penggembalaan tidak bisa ditentukan sejak awal karena tergantung kondisi lahan masing-masing daerah

Pengembangan dan pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Perlindungan Lahan Pertanian





Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat serta mempertahankan keseimbangan ekologis sehingga mampu mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

(2). Pemanfaatan Lahan Terdegradasi dalam Aspek Ekologi/Lingkungan

Tingginya laju lahan terdegradasi pada bekas pertambangan (*soil sickness*, lahan kritis) dengan areal yang cukup luas, sehingga merupakan cadangan potensial untuk pengembangan sektor pertanian khususnya pangan cukup besar. Karena lahan terdegradasi umumnya mempunyai perlakuan khusus dan wilayahnya sebagian besar berada di kawasan hutan atau lahan terlantar dan lahan sub optimal, maka kebijakannya diarahkan pada tata kelola dan pemanfaatan sumberdaya lahan yang terdegradasi melalui rehabilitasi. Disamping itu, untuk lahan yang berada di areal sektor lain, maka kebijakan tersebut harus lintas K/L.

(3). Pembangunan dan optimalisasi Pengelolaan air irigasi pertanian

Tata kelola sumberdaya air diarahkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem data dan informasi sumberdaya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan adalah: a) peningkatan fungsi dan rehabilitasi jaringan irigasi; b) optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi; c) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun namun belum berfungsi baik khususnya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; d) rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada



daerah-daerah andalan penghasil padi serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi, e) pengembangan sistem irigasi hemat air.

(4). Konservasi, Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan Pertanian

Konservasi, Rehabilitasi dan Reklamasi lahan pertanian diperlukan dan diarahkan pada perbaikan dampak dari kerusakan tanah tidak yang secara langsung berpengaruh pada hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi air dan tanah, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan.

Pertanian konservasi tepat dalam pemulihan dan pelestarian lingkungan, upaya pencegahan kerusakan dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Kebijakan terkait konservasi, rehabilitasi dan reklamasi diarahkan pada penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Konservasi perlu dilakukan advokasi intensif kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa penyelamatan sumber daya lahan dan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh generasi bangsa Indonesia.

(5). Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (benih/bibit, alat dan mesin pertanian pupuk, obat-obatan dll)

Kebijakan sarana dan prasarana pertanian diarahkan pada implementasi UU No.19 2013 tentang Pemberdayaan Petani. Perbenihan dan Perbibitan merupakan sarana produksi pertanian yang sistem





produksi dan distribusi benih masih lemah. Sarana produksi meliputi: a) benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan b) alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. Kebijakan diarahkan untuk menyediakan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah serta harga yang terjangkau.

G. Kebijakan tatalaksana pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatalaksana pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka arah kebijakan yang akan dilakukan adalah pemantapan pelaksanaan yang telah dilakukan periode sebelumnya. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel,





taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya antaralain: (1) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui kebijakan keterbukaan informasi publik dimana pemerintah harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai; (3) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (organisasi yang tepat, tatalaksana, prosedur yang jelas, regulasi yang tertib); (4) mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik; (5) mengoptimalkan tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja pegawai; (6) penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang profesional yang mempunyai kompetensi; (7) penataan pengawasan dan akuntabilitas kinerja; (8) pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur; (9) penyajian data yang lengkap, akurat dan terpercaya sebagai landasan pengambilan keputusan di semua level birokrasi, serta (10) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka efisiensi kerja dan optimalisasi pelayanan publik.

3.3.2. Kebijakan Teknis Operasional

A. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman

Berdasarkan peran pertanian yang sangat strategis dalam menunjang ketahanan pangan, maka rumusan kebijakan pembangunan pertanian yang terkait dengan dampak perubahan iklim adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan pertanian seyogyanya lebih mengutamakan prinsip adaptasi tanpa





mengabaikan aksi mitigasi, sehingga setiap aksi penurunan emisi GRK di sektor pertanian juga harus menjamin mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas.

2. Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga kegiatan aksi yang akan dipilih harus disesuaikan dengan sistem dan usaha pertanian rakyat. Aksi adaptasi dan mitigasi secara operasional dijabarkan di tiap-tiap eselon I serta di tingkat daerah. Dengan demikian sektor pertanian ikut berkontribusi kepada target nasional dalam penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019.
3. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat spesifik lokasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing wilayah, sehingga teknologi yang akan diterapkan harus bersifat teknologi tepat guna dan spesifik lokasi dengan mengadopsi sebesar-besarnya kearifan lokal.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kebijakan penanganan dampak perubahan iklim tersebut, maka operasionalisasinya harus melembaga ke dalam sistem perencanaan teknokratis yang didukung dengan basis data dan sistem informasi yang valid dan terverifikasi. Pada akhirnya, bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan dampak perubahan iklim di lingkup pertanian adalah sangat luas, mulai dari pengambil kebijakan sampai pelaku usaha di lapangan, maka perlu dilakukan pengarusutamaan penanganan dampak perubahan iklim yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, perumusan, negosiasi, konsensus dan sosialisasi kebijakan perubahan iklim harus dilakukan secara massif dan berkesinambungan.

Sasaran dari adaptasi perubahan iklim subbidang ketahanan pangan meliputi:

1. Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim,
2. Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (*low emission*)





3. Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum.

Sedangkan strategi yang ditempuh dalam adaptasi perubahan iklim yaitu:

1. Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim
2. Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim.
3. Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik.
4. Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rebug petani di tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi kalender tanam dan antisipasi perubahan iklim.

Fenomena bencana alam yang dialami diperlukan adanya kebijakan manajemen bencana yang mendorong kemandirian daerah dalam penanganan bencana. Oleh karena itu bentuk intervensi pemerintah dan pemerintah daerah harus didasarkan pada besarnya potensi dampak bencana terhadap penurunan produksi pertanian, sehingga perlu dibangun kriteria besarnya kejadian bencana untuk masing-masing jenis intervensi yang dibutuhkan. Apabila kejadian bencana hanya mengancam sasaran produksi suatu kabupaten/kota, maka penanganan bencana menjadi tanggung jawab kabupaten/kota yang bersangkutan. Apabila kejadian bencana hanya mengancam sasaran produksi suatu provinsi, maka penanganan menjadi tanggung jawab provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya Apabila kejadian bencana sudah mengancam sasaran produksi suatu nasional, maka penanganan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan intervensi bencana.



Perlindungan tanaman sebagai salah satu upaya dalam penanganan dampak perubahan ekologi dan ekosistem secara mendadak. Perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan, efisien dan diupayakan dilakukan dengan menggunakan musuh alami.

Beberapa langkah dalam mengantisipasi dan menangani bencana alam dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan diantaranya melalui:

- 1) Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso atau banjir.
- 2) Pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani.
- 3) Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- 4) Penerapan pengendalian hama terpadu melalui brigade proteksi tanaman.
- 5) Revitalisasi gudang pestisida, penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- 6) Penguatan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

B. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian

Sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, sistem air, sumberdaya manusia serta adanya saling ketergantungan antar produk adalah melalui budidaya beragam jenis tanaman yang terintegrasi. Salah satu pola integrasi dapat berupa Sistem Integrasi Tanaman, Hewan dan Hutan. Kehadiran beragam jenis tanaman yang terintegrasi dengan peternakan akan menciptakan interaksi organisme (stabilitas hayati) yang tinggi didalam sistem dan menciptakan kompetisi positif dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam seperti cahaya, ruang, nutrisi dan air. Pemanfaatan Sumberdaya alam yang tersedia secara bersama untuk tanaman dan hewan akan meningkatkan efisiensi hayati dari ekosistem. Selain itu dengan sistem integrasi maka akan memberikan tingkat pendapatan dari produk yang beragam, dengan kata lain tidak menggantung pendapatan petani hanya dari satu jenis komoditas. Dengan sistem terintegrasi ini akan memberikan manfaat bagi produk samping,





produk limbah menjadi produk bermanfaat bagi produksi komoditas lainnya, yang disebut model pertanian *zero waste*.

Salah satu isu yang berkembang saat ini adalah kelangkaan energi. Limbah pertanian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bio-fuel (bioenergi) untuk menjawab permasalahan ini. Limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk lain seperti sumber bioenergi, produk sampingan, produk lain yang bernilai tinggi.

C. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian

Sarana produksi utama pertanian yang selama ini diberikan dan akan terus dilanjutkan oleh pemerintah untuk mendukung usaha pertanian, yaitu benih dan pupuk. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menyediakan benih penjenis (*breeder seed*) dan benih dasar (*foundation seed*) dan mengendalikan penyediaan benih pokok (*stock seed*) dan benih sebar (*extention seed*) yang dilakukan oleh produsen benih melalui proses sertifikasi dan akreditasi. Adapun penyediaan pupuk dan organik sebagian besar dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyediaan pupuk organik dilakukan oleh pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat. Selain itu juga didorong tumbuhnya pengolahan pupuk organik yang diusahakan oleh kelompok tani, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ke kelompok lain yang membutuhkan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan subsidi benih dan pupuk, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat menjamin terlaksananya prinsip 6 tepat (yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga) dalam alokasi dan distribusi benih dan pupuk sesuai kebutuhan di masing-masing daerah melalui: (1) peningkatan peran kelembagaan usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan/produksi secara mandiri dan pendaftaran benih dan pupuk yang ramah lingkungan; (2) peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menggunakan benih unggul bersertifikat dan penggunaan pupuk secara berimbang; dan (3) pengawalan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih dan pupuk bersubsidi, serta (4) penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi/wilayah.





Untuk mendukung penjabaran kebijakan di atas, mekanisme dan manajemen pengadaan, penyaluran dan monitoring pengadaan benih dan pupuk tersebut diupayakan terus dilakukan penyempurnaan sehingga memenuhi prinsip 6 tepat. Beberapa strategi subsidi benih dan pupuk yang dibutuhkan adalah: (1) fokus pada penyediaan benih sumber melalui kerjasama dengan UPT dan UPTD perbenihan untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah serta penguatan jalur benih antar lapang; (2) fokus pada peningkatan produksi dan penerapan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, yaitu padi inbrida dan hibrida, jagung komposit dan hibrida dan kedelai melalui kerjasama produksi dengan penangkar benih lokal sebagai upaya mendorong tumbuhnya industri perbenihan yang mandiri; (3) fokus pada penerapan teknologi rekomendasi spesifik lokasi dengan mendorong peningkatan penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui subsidi harga dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik di tingkat petani; (4) fokus pada keluwesan perubahan pagu alokasi subsidi antar daerah, antar waktu dan antar sub-sektor yang didukung dengan upaya peningkatan pengawasan produksi dan peredaran benih dan pupuk melalui peningkatan kinerja komisi pengawasan benih dan pupuk untuk menjamin terlaksananya prinsip 6 Tepat; serta (5) fokus pada pembinaan dan bimbingan teknis kelompok tani dalam penyusunan rencana pengajuan usulan benih dan pupuk bersubsidi (penyusunan RDKK).

Terkait dengan sistem pembiayaan usaha pertanian, terdapat berbagai sumber pembiayaan pertanian yang saat ini tersedia untuk mendukung usaha pertanian yang mencakup perbankan konvensional dan syariah, non perbankan, investasi BUMN dan swasta, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), lembaga masyarakat adat, serta fasilitasi melalui APBN dan APBD. Secara khusus, Pemerintah berupaya menyediakan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada petani untuk mengakses sumber pembiayaan kredit pertanian. Untuk itu, dalam periode 2015-2019 dibutuhkan keberadaan kebijakan pembiayaan yang dapat: (1) mengintegrasikan skema kredit yang mudah diakses, prosedur mudah dan persyaratan lunak, (2) menciptakan skema kredit dengan penyediaan subsidi bunga dan atau penjaminan, (3) menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dari





daerah, perbankan dan pusat (4) dukungan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah dari pusat dan daerah dalam mendampingi petani untuk mengakses sumber permodalan yang tersedia, serta memantau, mengawasi dan melaporkan ketepatan dalam proses pengajuan, pencairan dan penggunaannya; (5) perlindungan terhadap usaha pertanian dan mengurangi dampak resiko (mitigasi) melalui pengembangan usaha pertanian; dan (6) memperkuat status legalitas kepemilikan asset petani.

D. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian

Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, diperlukan program tematik sebagai kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan di sektor pertanian. Program tematik yang berhubungan dengan sektor pertanian diantaranya pengarusutamaan gender, ketenagakerjaan, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).

Pengarustamaan gender (PUG) mengarah kepada aspek kesetaraan dan keadilan petani (laki-laki dan perempuan) dengan memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman, peran dan tanggung jawab serta dampaknya pada seluruh pelaku pembangunan. Telah menjadi komitmen Kementerian/Lembaga sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Kementerian/Lembaga diwajibkan menerapkan PUG sebagai salah satu strategi dalam pencapaian program kerjanya. Strategi tersebut juga harus dilaksanakan pada kebijakan pembangunan tingkat provinsi maupun





kabupaten/kota serta mendorong setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program diawali dengan proses analisis gender melalui empat aspek, yaitu: partisipasi, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari pelaku itu sendiri.

Ketenagakerjaan diupayakan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya manusia dalam perekonomian nasional. Ketenagakerjaan di sektor pertanian mengalami penurunan dari segi jumlah namun diupayakan meningkat dari segi keterampilan. Dengan menurunnya pangsa pasar tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian primer diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan menurunkan jumlah petani yang hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan, yang akhirnya akan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif sama dengan sektor industri dan jasa lainnya.

Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakatnya yang sebagian besar petani. Dengan demikian akan mengurangi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara daerah perbatasan dengan negara tetangga, sehingga akan mendorong utuhnya NKRI. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan potensi ekonomi di bidang pertanian, meningkatkan perdagangan ekspor-impor, menurunnya kegiatan perdagangan produk pertanian ilegal, serta memperkuat layanan perkarantina di perbatasan.

Pengembangan daerah tertinggal ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan daerah maju. Dalam pendekatan sektor pertanian, tidak terlepas dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai, mempercepat peningkatan kapasitas petani, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, penguatan jaringan pasar produk pertanian, dan promosi potensi pertanian daerah tertinggal. Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan lebih memberdayakan Orang Asli Papua di bidang produksi pertanian.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan didorong dalam upaya mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota. Penguatan usaha





budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian sebagai bagian dari usaha ekonomi masyarakat desa dalam ikut mengurangi jumlah desa tertinggal. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian menjadi hal yang perlu diperhatikan. Diharapkan tiap desa memiliki komoditas pertanian unggulan yang diarahkan menjadi sentra produksi salah satu komoditas pertanian sebagai bekal menjadi desa mandiri. Desa-desa yang memiliki kemampuan didorong untuk menjadi desa mandiri benih dan desa organik. Untuk itu diharapkan anggaran desa juga dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian, memperkuat kelembagaan usaha pertanian, serta meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pengolahan hasil pertanian.

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), merupakan perwujudan kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, nonkondisionalitas, saling menguntungkan dan *non-interference*. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama di sektor pertanian dalam KSS terus dilaksanakan diantaranya dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan transfer teknologi.



E. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

Sesuai dengan UU No. 5 tahun 1994, keanekaragaman hayati (KEHATI) merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik





(perairan) lainnya, serta kompleks-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, keanekaragaman hayati terdiri atas tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem.

Kebijakan yang terkait dengan keanekaragaman hayati meliputi: 1) peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan, 2) peningkatan perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, 3) memberikan manfaat dan nilai ekonomi dari kekayaan hayati melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan baru lokal dalam mendukung diversifikasi pangan, biofarmaka, kosmetika dan pemanfaatan lainnya, serta 4) pengembangan iptek dan peningkatan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati.

3.4. Langkah Operasional

Dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

3.4.1. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai

Dalam rangka pencapaian sasaran pencapaian ketahanan pangan sebagai bagian dari kedaulatan pangan nasional, maka disusun langkah operasional peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Target swasembada dari ketiga komoditas tersebut menjadi penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional dengan mengedepankan produksi dalam negeri dan kemandirian didalam menentukan kebijakan nasional di bidang pangan. Langkah operasional peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai terbagi dua yaitu peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas.





a. Peningkatan luas penanaman, melalui:

- Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta hektar
- Optimasi lahan 1 juta hektar,
- Penambahan lahan kering 1 juta hektar untuk kedelai dan jagung serta untuk produk pertanian lainnya,
- Peningkatan indeks pertanaman (IP),
- Pemanfaatan lahan terlantar,
- Penerapan pola tumpangsari,

b. Peningkatan produktivitas, melalui:

- Penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai
- Penyediaan benih unggul padi dan jagung
- Subsidi dan penyediaan pupuk
- Bantuan pengolahan pupuk organik sekitar 1500 unit
- Pembangunan 1000 desa mandiri benih
- Pemberdayaan penangkar benih
- Bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 70 ribu unit,
- Pengembangan jaringan dan optimasi air untuk 4,5 juta hektar,
- Dukungan peralatan pasca panen sekitar 30 ribu unit,
- Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

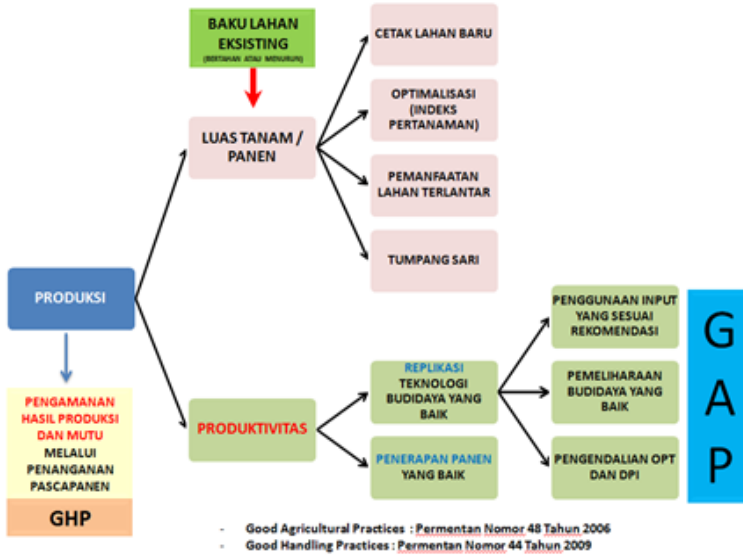
Boks 4.

Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar

Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar atau *Good Agriculture Practices* (GAP) meliputi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT dan menetapkan prinsip traceability (suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya, dari pasar sampai kebun)

Tujuan GAP adalah (1) Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan; (2) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan; (3) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam; (4) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan; (5) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan; (6) Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik; (7) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen





Gambar 13. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai

- Peningkatan kapasitas teknis pertanian untuk 70 ribu orang
- Penguatan balai penyuluhan lebih dari 4000 unit
- Penerapan pengendalian hama dan penyakit
- Revitalisasi penggilingan padi sekitar 2 ribu unit
- Pemanfaatan kalender tanam
- Dukungan *science* dan *agro techno park* di daerah sentra produksi
- Penguatan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) lebih dari 5000 unit.

3.4.2. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Tebu

Tebu sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis Kementerian



- Suplesi air melalui embung atau pompanisasi
- Penyediaan traktor pengolah tanah dan sarana produksi lainnya

b. Peningkatan Produktivitas Tebu

- Penataan varietas tebu dan pengadaan benih tebu
- Penerapan pengelolaan budidaya yang baik dan rawat ratoon
- Penggantian tanaman melalui bongkar ratoon
- Pemupukan yang berimbang

c. Revitalisasi dan Pembangunan industri Gula

- Mendorong peningkatan kapasitas giling pabrik gula yang ada, serta mendorong berdirinya pabrik gula yang baru di sentra produksi tebu
- Optimalisasi hari giling untuk mencegah penurunan rendemen
- Pemanfaatan kapasitas giling pabrik gula

d. Kelembagaan dan Pembiayaan

- Penguatan kelembagaan riset untuk tebu
- Penguatan kelembagaan usahatani
- Peningkatan keterampilan petani tebu
- Fasilitasi kredit yang diberikan melalui KPTR
- Pembiayaan untuk revitalisasi dan pembangunan pabrik gula

e. Kebijakan pemerintah

- Penyempurnaan pengaturan tataniaga pertebuan
- Menjaga stabilitas harga di tingkat petani
- Rekomendasi kebijakan impor gula

Kementerian Pertanian terus berupaya mengembangkan komoditi tebu di wilayah sentra-sentra pengembangan tebu melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas gula. Wilayah provinsi yang dijadikan sentra pengembangan tebu antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Pada





Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Jambi dikembangkan komoditas tebu yang pada saat ini ditujukan sebagai penghasil gula merah karena belum adanya pabrik gula di wilayah tersebut serta dengan memperhatikan potensi lahan, kemampuan dan kebutuhan sentra wilayah tersebut sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan gula merah sebagai bahan baku industri skala rumah tangga.

3.4.3. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Daging

Peningkatan produksi daging dan protein hewani lainnya (telur dan susu) dilakukan antara lain meliputi peningkatan populasi dan distribusi ternak dari kawasan padat ke wilayah berlimpah biomassa tetapi kosong ternak, serta peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan air dan pakan murah, pelayanan pejantan unggul, pelayanan inseminasi buatan yang lebih baik dan penerapan *good farming practices*. Selain itu dilakukan peningkatan produksi daging melalui penggemukan dan tunda potong sesuai potensi genetik dan potensi ekonomi ternak, pencegahan pemotongan sapi (ternak) betina produktif, pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengurangi angka mortalitas anak dan induk serta peningkatan mutu genetik ternak melalui seleksi dan persilangan. Langkah-langkah operasional yang akan dilakukan antara lain meliputi:

a. Peningkatan produktivitas ternak sapi lokal

- Optimalisasi inseminasi buatan dan sinkronisasi berahi pada sekitar 2 juta akseptor pertahun
- Pengadaan pejantan unggul sapi dan kerbau
- Penyediaan air untuk ternak
- Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan
- Pengendalian betina produktif

b. Pengembangan pakan ternak

- Pengembangan hijauan pakan ternak sekitar 4 juta stek pertahun
- Pengembangan pakan olahan/bahan pakan sekitar 14 ribu ton pertahun





c. Penyediaan bibit sapi/kerbau

- Penyediaan benih ternak sekitar 5 juta dosis pertahun
- Penyediaan bibit ternak sekitar 500 ribu ekor pertahun
- Sertifikasi kelembagaan dan wilayah perbibitan ternak sekitar 4 juta sertifikat pertahun

d. Kesehatan hewan

- Penanganan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis sekitar 4 juta dosis per tahun
- Penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan sertifikasi obat hewan sekitar 150 ribu sampel pertahun
- Penguatan kelembagaan otoritas veteriner
- Produksi vaksin, obat hewan dan bahan biologik sekitar 8 juta dosis pertahun
- Penguatan sistem kesehatan hewan nasional di 34 provinsi

e. Kesmavet, pasca panen dan pemasaran

- Penguatan dan perbaikan manajemen Rumah Potong Hewan (RPH)
- penerapan penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
- Fasilitasi kios daging, pasar ternak dan pengaturan pemasaran sapi/kerbau dan daging.
- penerapan kesejahteraan hewan.





f. Regulasi pemerintah

- Perda pemotongan betina produktif
- Perda perizinan pengembangan sapi di perkebunan sawit
- Regulasi impor ternak dan daging
- penyediaan fasilitas skim kredit
- pengaturan stok sapi bakalan



Gambar 15. Langkah Operasional Peningkatan Produksi Daging

3.4.4. Langkah Operasional Peningkatan Diversifikasi Pangan

Diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Diversifikasi pangan tidak saja dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal,





tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan masyarakat.

Diversifikasi pangan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan cadangan pangan masyarakat
 - Pemberdayaan 350 gapoktan/thn
 - Pemberdayaan 1.500 lumbung pangan/thn
- b. Peningkatan penanganan krisis dan kerawanan pangan
 - Pengembangan model kawasan mandiri pangan di lebih dari 200 kawasan pertahun
 - Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi pada lebih dari 450 lokasi
- c. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi
 - Pembangunan model pekarangan pangan di lebih 4.500 desa pertahun
 - Promosi diversifikasi konsumsi pangan
 - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
 - Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan
 - Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.
- d. Peningkatan kualitas distribusi pangan masyarakat
 - Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi
 - Mendorong peningkatan penyediaan dan sinergi fasilitas transportasi seperti penyediaan fasilitas kapal pengangkut ternak dan hasil pertanian lainnya, penguatan sistem logistik nasional untuk input produksi dan produk pangan termasuk wilayah-wilayah terpencil
 - Pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan dan perkembangan harga pangan dan pengendalian fluktuasi harga antara lain melalui operasi pasar





- Pemetaan dan pembangunan ketersambungan rantai pasok komoditas hasil pertanian dengan industri pangan di antaranya melalui pembangunan pasar dan memperkuat kelembagaan pasar
- Rekomendasi atas pengendalian impor pangan



Gambar 15. Langkah Operasional Peningkatan Diversifikasi Pangan

3.4.5. Langkah Operasional Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

Sasaran antara dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan dari produk-produk unggulan pertanian serta meningkatnya jumlah sertifikasi produk pertanian. Sedangkan sasaran akhir dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian. Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, maka upaya-upaya yang dilakukan mulai di tingkat hulu hingga penanganan di hilir, meliputi:





- a. Kesiapan hulu dan budidaya pertanian
 - Peningkatan produksi komoditas ekspor dan substitusi impor
 - Pengembangan dan penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GAP, GHP, registrasi lahan dan registrasi bangsal pasca panen
- b. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan
 - Pengembangan 5.000 unit pengolahan mendukung industri pangan dan pertanian berbasis perdesaan
 - Pendampingan dan penerapan standar, sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada 700 kelompok usaha
 - Mendukung kawasan budidaya yang terintegrasi dengan sentra pengolahan
- c. Penguasaan pasar domestik dalam rangka substitusi impor
 - Revitalisasi sarana dan kelembagaan pasar produk pertanian sebanyak 60 unit/thn (pasar tani, sub terminal agribisnis, pasar ternak, kios daging)
 - Promosi produk pertanian di dalam negeri
 - Stabilisasi harga produk pertanian
 - Pengembangan jaringan pasar yang terintegrasi dengan baik antara sentra produksi dengan sentra konsumen melalui 100 unit pelayanan informasi pasar
 - Pengembangan sistem logistik dan pergudangan sebagai sistem stok
 - Rekomendasi kebijakan impor dan ekspor
- d. Peningkatan Ekspor
 - Pembinaan kelompok agar memenuhi standar mutu ekspor
 - Pengembangan pasar tujuan ekspor potensial
 - Memperkuat peran atase pertanian sebagai market intelligent

Dalam rangka pengembangan komoditas yang bernilai tambah sebagai bagian dari kesiapan hulu dan budidaya, maka langkah-langkah yang diupayakan antara lain:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang berdaya saing, melalui:



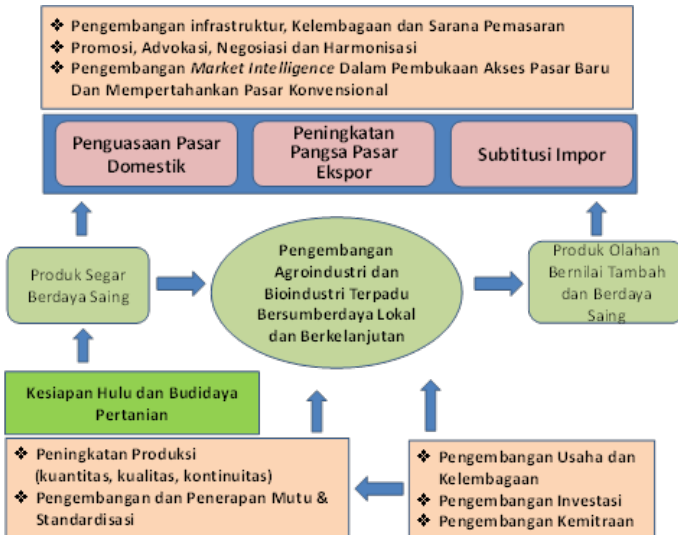


1.1. Pengembangan kawasan hortikultura

- Pengembangan dan pembinaan 7000 hektar kawasan hortikultura
- Perbaikan infrastruktur kebun/lahan
- Registrasi 2000 lahan usaha hortikultura
- Fasilitasi 3000 unit sarana prasarana pasca panen
- Penerapan teknologi inovatif
- pengembangan desa organik berbasis hortikultura

1.2. Pengembangan sistem perbenihan

- Penguatan 158 kelembagaan penangkar perbenihan
- Penumbuhan industri benih
- Penyediaan benih sumber
- Penyediaan benih sebar tanaman hortikultura



Gambar 17. Langkah Operasional Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian





- 1.3. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan
 - Pengelolaan OPT melalui 650 sekolah lapang pengendalian hama terpadu pertahun
 - Pengembangan klinik PHT 350 unit/thn
 - Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman
 - Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan
 - Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif
 - Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim
2. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan yang berdaya saing, melalui:
 - 2.1. Pemantapan Areal Kebun
 - Pemantapan lahan perkebunan sekitar 100 ribu ha/thn
 - Penyediaan lahan untuk kebun benih unggul
 - Pemanfaatan lahan marginal
 - Suplesi air melalui embung atau pompanisasi
 - Penyediaan traktor pengolah tanah dan sarana produksi lainnya
 - 2.2. Peningkatan Produktivitas
 - Penyediaan dan pengadaan benih berkualitas
 - Penerapan pengelolaan budidaya yang baik
 - Pembinaan penanganan hama melalui SL-PHT
 - Antisipasi dampak perubahan iklim
 - Penanganan organisme pengganggu
 - 2.3. Kelembagaan dan Pembiayaan
 - Penguatan kelembagaan dan hasil riset perkebunan
 - Penguatan kelembagaan usahatani
 - Peningkatan keterampilan petani
 - Fasilitasi kredit
 - Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan



2.4. Kebijakan Pemerintah

- Penyempurnaan pengaturan tataniaga hasil perkebunan
- Menjaga stabilitas harga di tingkat petani
- Rekomendasi kebijakan ekspor dan impor produk perkebunan

3.4.6. Langkah Operasional Penyediaan dan Peningkatan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi

Sasaran penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri dan energi terbarukan dari komoditas pertanian.

Dalam sasaran nasional kedaulatan energi, sasaran pemanfaatan bahan bakar nabati adalah : (i) produksi biodiesel sebesar 4,3 – 10 juta KL; dan (ii) produksi bioetanol sebesar 0,34 – 0,93 juta KL, dan terlaksananya pembangunan perkebunan untuk bioenergi pada beberapa lokasi yang potensial. Beberapa komoditi yang dapat dijadikan bahan baku bioindustri dan bioenergi, diantaranya kelapa sawit, kelapa dan ubi kayu.

Langkah operasional dalam penyediaan dan peningkatan bahan baku energi meliputi:

a. Penyediaan bahan baku bioindustri

- Penyusunan roadmap pengembangan bioindustri
- Pengembangan dan penerapan standar mutu komoditas bahan baku industri melalui penerapan GAP dan GHP
- Pengembangan kawasan produksi komoditas bahan baku bioindustri yang terintegrasi dengan kawasan industri
- Pengembangan riset dalam rangka pemanfaatan secara optimal kandungan hasil tanaman dan ternak

b. Penyediaan bahan baku bioenergi

- Mendorong penyediaan bahan baku energi dalam upaya penyediaan energi terbarukan (termasuk biofuel) sebesar 23% dari total pemanfaatan energi nasional di tahun 2025





- Pemanfaatan produk samping hasil ternak dan tanaman sebagai bahan baku energi
- Pengembangan komoditas potensi antara lain sebagai bahan baku energi tanpa mengganggu target produksi bahan pangan masyarakat
- Pengembangan riset bioenergi yang efisien

3.4.7. Langkah Operasional Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sasaran dari peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani, meskipun peningkatan pendapatan petani tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan karena tergantung pula dari tingkat pengeluaran dan faktor-faktor non finansial (sosial). Namun pendapatan petani merupakan indikator yang secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, sehingga indikator dari sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah besaran pendapatan rumahtangga petani.

Pada dasarnya peningkatan kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir dari pembangunan pertanian secara menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan petani merupakan resultante dari kebijakan dan program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Dengan demikian langkah operasional untuk mencapai target sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah melalui peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

Dalam upaya peningkatan pendapatan petani, tidak saja melalui peningkatan produktivitas hasil pertaniannya tapi juga melalui peningkatan produktivitas per petani. Untuk itu perlu dilakukan terobosan manajemen usahatani yang memberikan efisiensi pengelolaan usahatani, baik melalui usahatani sistem korporasi ataupun dengan sistem terobosan lainnya. Upaya ini untuk mengurangi petani gurem yang hanya mengusahakan kurang dari setengah hektar lahan, sehingga mampu mengusahakan lahan hingga seluas 2 hektar.



Peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui:

- a. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban risiko usaha tani melalui asuransi pertanian.
- b. Pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan keterampilan serta akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Mendukung kebijakan adanya peningkatan akses dan aset petani terhadap lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan *land reform* dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan buruh tani, sehingga diharapkan penguasaan lahan hingga seluas 2 hektar tiap petani.
- d. Memberikan kesempatan kepada petani dalam mengembangkan usaha di bidang pengolahan hasil pertaniannya sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi petani.
- e. Mendorong pemanfaatan hasil samping dan limbah dari hasil pertanian dari petani dalam rangka penambahan pendapatan .
- g. Sistem usaha berkelompok guna meningkatkan efisiensi biaya usahatani.





3.5. Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka akan dilaksanakan program-program kementerian dimana satu program terdistribusi pada satu eselon I. Terdapat 12 program yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

3.5.1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan

- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
- Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
- Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

3.5.2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan

- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
- Pengembangan Perlindungan Tanaman Hortikultura
- Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura



3.5.3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
- Dukungan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
- Dukungan Perlindungan Perkebunan
- Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

3.5.4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

- Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
- Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis
- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal
- Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

3.5.5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian

- Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dan Bioindustri
- Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian
- Pengembangan Usaha dan Investasi
- Pengembangan Pemasaran Domestik
- Pengembangan Pemasaran Internasional
- Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya pada Ditjen PPHP





3.5.6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
- Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
- Penyaluran pupuk bersubsidi
- Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian
- Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian

3.5.7. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan

- Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian
- Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian
- Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian
- Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian
- Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian
- Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
- Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura
- Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan
- Penelitian dan pengembangan peternakan
- Penelitian dan pengembangan tanaman pangan
- Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
- Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian

3.5.8. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

- Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
- Pemantapan Pendidikan Menengah Pertanian



- Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian
- Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

3.5.9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan
- Pengembangan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

3.5.10. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

- Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan
- Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
- Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
- Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

3.5.11. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

- Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian





- Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Serta Badan Ketahanan Pangan
- Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian
- Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian
- Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal

3.5.12. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian
- Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral
- Pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kearsipan Kementerian Pertanian
- Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian
- Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian
- Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian
- Penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, kerumahtangaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian
- Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

3.6. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.



Regulasi yang terkait dengan sektor pertanian, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, maupun dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian serta produk peraturan operasional lainnya di level pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kerangka regulasi yang telah ada atau yang dibutuhkan, dikelompokkan mulai dari kebutuhan regulasi terkait input pertanian seperti pemanfaatan sumberdaya genetik, jaminan ketersediaan pupuk dan benih, dukungan infrastruktur, serta regulasi yang terkait lahan dan alsintan. Sedangkan regulasi yang terkait dengan kegiatan budidaya tentunya yang terkait dengan jaminan usahatani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk yang terkait dengan pascapanen, pengolahan dan pemasaran, dibutuhkan regulasi yang mengatur tatacara pascapanen yang baik untuk berbagai produk pertanian, regulasi yang mendorong berkembangnya bioindustri dan pengolahan hasil. Selain itu diperlukan peraturan yang terkait dengan harga, baik itu harga pembelian pemerintah, bea masuk dan bea keluar, serta regulasi lainnya yang mengatur sistem pemasaran yang sehat.

Sedangkan regulasi yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan diperlukan dalam rangka melindungi konsumen serta mendorong produsen menghasilkan produk bermutu. Selain itu juga diperlukan regulasi yang mampu mendorong pertanian memperoleh nilai tambah dari jasa lingkungan seperti agrowisata.

Dalam upaya mewujudkan pencetakan lahan pertanian baru di luar jawa seluas 1 juta hektar serta rencana pendistribusian lahan 9 juta hektar, maka dukungan regulasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya sangat diperlukan.





Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluh, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perkarantinaan, maka perlu dilakukan review terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan fungsi sistem dan kelembagaan penyuluh yang lebih baik. Beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam pembangunan pertanian ke depan diantaranya sebagai berikut:

1. Regulasi di bidang lahan: mempercepat penerbitan Perda Provinsi/ Kab/Kota dan menyempurnakan Perda sesuai UU 41/2009.
2. Regulasi sarana pertanian: perbaikan subsidi pupuk dan subsidi benih; pengembangan sistem perbenihan.
3. Regulasi pembiayaan pertanian: mempercepat dan mempermudah persyaratan akses petani pada skim kredit.
4. Regulasi perlindungan petani: implementasi UU 19/2013 asuransi usahatan
5. Regulasi terkait penganekaragaman pangan dan gizi
6. Regulasi di bidang ekspor pertanian dan impor produk pertanian:
7. Regulasi kemudahan investasi di sektor pertanian

Secara lengkap kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan pertanian seperti ditampilkan pada Lampiran Matrik Kerangka Regulasi.

3.7. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Langkah





strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahan meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*;
3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
8. *Mindset* dan *Cultural Set Aparatur*, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan di pusat, UPT sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif.

Dalam mewujudkan program pembangunan pertanian 2015-2019 sesuai dengan visi dan misi, maka arah penyusunan kelembagaan Kementerian Pertanian seperti pada : Tugas, fungsi dan susunan organisasi eselon I Kementerian Pertanian ditetapkan dengan peraturan presiden. Organisasi eselon II ke bawah disusun sebagai pelaksana mandat/prioritas eselon I, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi. Besaran organisasi masing-masing eselon I tidak harus sama atau seragam, tetapi sesuai dengan beban kerja. Eselon III dan IV dirampingkan dengan mengoptimalkan peran pejabat fungsional sebagai pelaksana tugas pokok.





Kementerian Pertanian telah memiliki sepuluh jabatan fungsional terdiri atas (1) Penyuluh Pertanian; (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; (3) Pengawas Benih Tanaman; (4) Pengawas Bibit Ternak; (5) Medik Veteriner; (6) Paramedik Veteriner; (7) Pengawas Mutu Pakan; (8) Pengawas Mutu Hasil Pertanian; (9) Analis Pasar Hasil Pertanian; dan (10) Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Sedangkan Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan saat ini masih dalam proses penetapan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

Disamping itu, Kementerian Pertanian juga menggunakan 24 (dua puluh empat) jabatan fungsional non rumpun ilmu hayat, terdiri atas: (1) Peneliti; (2) Teknisi Litkayasa; (3) Perekrayasa; (4) Pengawas Sekolah; (5) Guru; (6) Dosen; (7) Widyaiswara; (8) Auditor; (9) Instruktur; (10) Pustakawan; (11) Pranata Komputer; (12) Statistisi; (13) Arsiparis; (14) Analis Kepegawaian; (15) Perencana; (16) Perancang Peraturan Perundang-Undangan; (17) Pranata Humas; (18) Dokter; (19) Dokter Gigi; (20) Perawat; (21) Perawat Gigi; (22) Pranata Lab Kes; (23) Pranata Lab Pendidikan; dan (24) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Badan Ketahanan Pangan sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional diamanatkan sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

Secara hirarki di daerah, Kementerian Pertanian memiliki 160 (seratus enam puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan organisasi mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kebijakan strategis dalam penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan organisasi eselon I dan dilaksanakan setelah penataan kelembagaan pusat telah selesai.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,



efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit organisasi Kementerian Pertanian dan unit kerja/instansi terkait.

Dalam tata hubungan kerja pusat – daerah, penyelenggaraan pembangunan pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab pembangunan pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota.

Selama penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan ini belum diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian. Dengan demikian, penjabaran dan





implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 ini ke dalam Rencana Strategis SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan pembangunan pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Tabel 38. Kebutuhan Jumlah Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019

2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan
(orang)					
21.102	21.181	21.272	21.387	21.425	Data e-formasi usulan kebutuhan pegawai per tahun

Terkait dukungan sumberdaya aparatur sipil negara, Kementerian Pertanian didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 20.344 orang (data per tanggal 17 Juli 2014) yang tersebar di 12 (dua belas) unit kerja eselon I baik yang berada pada kantor pusat maupun unit pelaksana teknis di daerah. Untuk mengantisipasi kekurangan SDM yang ada terkait dengan perubahan lingkungan strategis, telah dilaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai melalui peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mengacu pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Hasil penyusunan kebutuhan pegawai Tahun 2014 hingga 2018 di Kementerian Pertanian seperti pada Tabel 38.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan untuk melakukan pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesionalisme, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012 yang memuat tentang Makna Bekerja dan Nilai-Nilai Kementerian Pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah KKPID (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin). Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian telah dilaksanakan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengacu kepada PP No. 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2013 secara menyeluruh dan konsisten. Penilaian prestasi kerja tersebut terdiri atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai dengan bobot 60% dan 40%.







BAB IV



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





4.1. Target Makro

Target makro pembangunan pertanian selama tahun 2015-2019 mencakup pertumbuhan PDB, neraca perdagangan, investasi, tenaga kerja dan Nilai Tukar Petani

4.1.1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Selama periode 2015-2019, PDB nasional diharapkan tumbuh rata-rata diatas 7 %, sedangkan PDB pertanian (diluar perikanan dan kehutanan) diharapkan tumbuh diatas 3,80 %.

4.1.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) diperkirakan masih cukup besar. Namun demikian diproyeksikan dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di periode 2015-2019, maka diharapkan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menjadi menurun.

4.1.3. Investasi Sektor Pertanian

Investasi pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)





dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyeksi sasaran investasi PMDN untuk pertanian pada tahun 2019 adalah sekitar 12,06 triliun rupiah . Sedangkan proyeksi sasaran investasi PMA untuk pertanian pada tahun 2019 sekitar 1,7 milyar US\$. Tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun dari PMDN dan PMA bidang pertanian diperkirakan sekitar 5,0 dan 4,7 % pertahun.

Tabel 39. Target Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub-sektor Pertanian Tahun 2015-2019, Harga Konstan Tahun 2010

Subsektor	Pertumbuhan (%)						Rerata
	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PDB Nasional	5,02	8,80	6,60	7,10	7,50	8,00	7,60
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,71	3,90	3,98	3,89	3,79	3,80	3,87
1.1. Tanaman Pangan	0,24	4,79	4,85	3,79	2,99	3,04	3,89
1.2. Tanaman Hortikultura	4,19	2,63	2,68	2,75	2,87	2,72	2,73
1.3. Tanaman Perkebunan	5,83	5,43	4,85	5,15	5,02	4,90	5,07
1.4. Peternakan	5,44	3,62	3,30	3,80	4,35	4,72	3,96
1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,58	2,68	2,17	2,45	2,62	2,69	2,52

Tabel 40. Sasaran Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2015-2019

Tenaga Kerja	Pertumbuhan (%)						Rerata
	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah (ribu Orang)	35.769	35.359	35.099	34.890	34.736	34.686	
Pertumbuhan	-0,77	-1,15	-0,74	-0,60	-0,44	-0,14	-0,61



**Tabel 41. Sasaran Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015-2019**

Tahun	Nilai investasi		Pertumbuhan Investasi	
	PMDN (Rp Milyar)	PMA (US\$ Juta)	PMDN (%)	PMA (%)
Baseline 2014	9.437,7	1.358,4		
2015	10.023,1	1.438,2	6,2	5,9
2016	10.647,1	1.523,0	6,2	5,9
2017	10.991,5	1.567,4	3,2	2,9
2018	11.678,2	1.660,2	6,2	5,9
2019	12.066,4	1.710,1	3,3	3,0
Rerata			3,2 – 6,2	2,9 – 5,9

4.1.4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian

Neraca perdagangan pertanian diupayakan terus mengalami surplus, dimana kontribusi terbesar masih diharapkan dari sub-sektor perkebunan. Walaupun untuk produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih defisit, namun diharapkan adanya penurunan laju nilai impor. Diharapkan impor bahan pangan dapat dikendalikan dengan kebijakan yang tepat. Neraca perdagangan pertanian selama tahun 2015-2019 diharapkan menunjukkan tren surplus yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Sasaran Neraca Perdagangan Produk Pertanian Tahun 2015-2019

No.	SUB SEKTOR	Nilai (juta US\$)						Rerata Pertumbuhan (%)
		Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	TANAMAN PANGAN							
	- Ekspor	560	199	219	241	265	292	10,0
	- Impor	6.481	5.993	6.293	6.607	6.938	7.285	5,0
	- Neraca	-5.921	-5.794	-6.074	-6.366	-6.672	-6.993	4,8
2	HORTIKULTURA							
	- Ekspor	752	555	611	672	739	813	10,0
	- Impor	1.929	1.788	1.877	1.971	2.070	2.173	5,0
	- Neraca	-1.176	-1.233	-1.267	-1.300	-1.331	-1.361	2,5



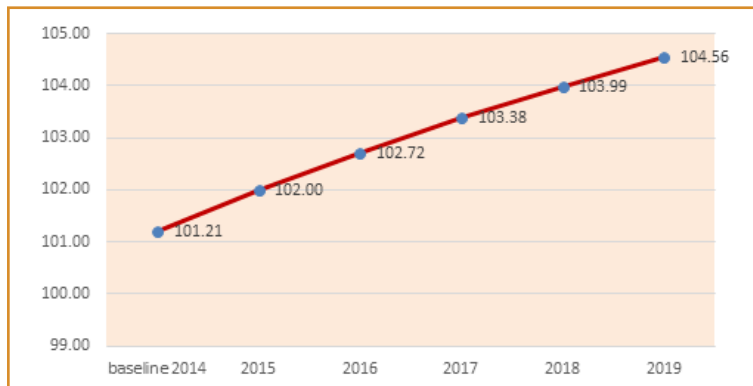
No.	SUB SEKTOR	Nilai (juta US\$)						Rerata Per-tumbuhan (%)
		Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3	PERKEBUNAN							
	- Ekspor	37.123	35.656	39.221	43.143	47.457	52.203	10,0
	- Impor	5.926	2.929	3.075	3.229	3.390	3.560	5,0
	- Neraca	31.197	32.727	36.146	39.914	44.067	48.643	10,4
4	PETERNAKAN							
	- Ekspor	1.330	1.390	1.529	1.682	1.850	2.035	10,0
	- Impor	3.029	3.332	3.498	3.673	3.857	4.050	5,0
	- Neraca	-1.699	-1.942	-1.969	-1.991	-2.007	-2.014	0,9
5	PERTANIAN							
	- Ekspor	39.765	37.800	41.580	45.738	50.312	55.343	10,0
	- Impor	17.365	14.041	14.743	15.481	16.255	17.067	5,0
	- Neraca	22.400	23.759	26.837	30.257	34.057	38.276	12,7

Sumber: Ditjen PPHP

4.1.5. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan perbandingan antara indeks yang diterima petani dan indeks pengeluaran petani. Untuk periode 2015-2019, sasaran angka NTP berkisar antar 101,21 hingga 104,56 yang berarti bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluarannya (Gambar 18).

Gambar 18. Sasaran Nilai Tukar Petani Tahun 2015-2019



Ket: tahun dasar 2012=100





4.1.6. Pendapatan Perkapita

Sebagai sasaran dalam periode 2015-2019, pendapatan perkapita di sektor pertanian seperti pada Tabel 43.

Tabel 43. Sasaran PDB per Kapita Sektor Pertanian Tahun 2015 - 2019

Tahun	Ribu rupiah	
	PDB Total/Kapita	PDB Pertanian Sempit/ TK Pertanian Sempit
Baseline 2014	34.005,84	10.289,67
2015	36.491,22	10.868,43
2016	38.442,18	11.500,78
2017	40.687,40	12.179,29
2018	43.224,58	12.886,66
2019	46.133,56	13.623,30
Rerata pertumbuhan	6,29%	5,77%

Ket: Berdasarkan harga konstan tahun 2010

4.2. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2015-2019. Target Kinerja Kementerian Pertanian seperti pada Tabel 44.





Tabel 44. Target Kinerja Kementerian Pertanian

No.	Rincian IKU	Baseline	Target					Pertumbuhan (%/thn)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula								
	Produksi Padi (juta ton)	70,8	73,4	76,2	78,1	80,1	82,1	3,0
	Produksi Jagung (juta ton)	19,0	20,3	21,4	22,4	23,5	24,7	5,4
	Produksi Kedelai (juta ton)	0,95	1,20	1,82	2,76	2,95	3,00	27,5
	Produksi Gula Tebu (hablur juta ton)	2,63	2,97	3,27	3,50	3,66	3,82	7,8
	Produksi Daging Sapi dan kerbau (ribu ton karkas dan ribu ton daging)	460,4	545,3	588,6	639,6	695,0	755,1	10,5
		368,4	436,2	470,9	511,7	556,0	604,0	10,5
2. Peningkatan diversifikasi pangan								
	Skor Pola Pangan Harapan	81,8	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5	2,5
	Konsumsi Kalori (Kkal)	1.967	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150	1,8
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor								
	Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama (%)	8	10	10	10	10	10	10,0
	Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor (%)	7	-5	-5	-1	1	1	-1,0
	Produksi Cabe besar (ribu ton)	1.041	1.082	1.106	1.140	1.174	1.209	3,0
	Produksi Cabe rawit (ribu ton)	735	751	759	770	782	794	1,6
	Produksi Bawang merah (ribu ton)	1.061	1.125	1.173	1.231	1.294	1.360	5,1
	Produksi Mangga (ribu ton)	2.236	2.285	2.340	2.399	2.460	2.519	2,4
	Produksi Nenas (ribu ton)	1.851	1.888	1.926	1.964	2.003	2.042	2,0
	Produksi Manggis (ribu ton)	142	144	147	150	152	155	1,8
	Produksi Salak (ribu ton)	1.038	1.059	1.080	1.102	1.124	1.146	2,0
	Produksi Kentang (ribu ton)	1.296	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	2,0
	Produksi Jeruk Siam (ribu ton)	1.587	1.640	1.698	1.766	1.845	1.913	3,8
	Produksi Karet (Karet kering ribu ton)	3.153	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,9
	Produksi Kopi (kopi berasan ribu ton)	685	725	738	751	765	778	2,6
	Produksi Kakao (biji kering ribu ton)	709	773	831	872	916	961	6,3
	Produksi Lada (lada kering ribu ton)	92	93	94	95	96	97	1,1
	Produksi Pala (biji kering ribu ton)	26	28	29	30	32	33	5,1
	Produksi Cengkeh (bunga kering ribu ton)	111	113	115	117	119	121	1,9
	Produksi Kelapa (setara kopra ribu ton)	3.031	3.309	3.355	3.401	3.446	3.491	2,9
	Produksi Teh (daun kering ribu ton)	144	160	160	161	162	163	2,6
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi								
	Produksi kelapa Sawit (CPO ribu ton)	29.344	30.798	30.845	32.657	34.515	36.420	4,4
	Produksi Ubi kayu (ribu ton)	26,4	26,5	27,1	27,6	28,2	28,8	1,7
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani								
	PDB pertanian sempit/TK pertanian (Rp. Juta)	8,0	8,3	8,6	9,0	9,4	9,8	4,3
	Tingkat Kemiskinan di pedesaan (juta orang)	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,4	-3,4
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik								
	Nilai reformasi birokrasi kementerian	65	72	73	74	75	76	
	Opini laporan keuangan kementerian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	



4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam menjalankan pembangunan pertanian dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak bisa hanya berasal dari APBN, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah Daerah melalui APBD prov/kab, keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, investasi dalam negeri dan investasi asing, perbankan (skim kredit dan Kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan ICVAR (*Incremental Capital Value-Added Ratio*), untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian guna mencapai target yang telah ditetapkan selama periode jangka waktu 2015-2019 adalah sangat besar, yaitu sekitar Rp 450 triliun lebih setiap tahunnya. Sebagian besar (85 - 90 %) merupakan pembiayaan yang bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat. Sebagian kecil (sekitar 10-15 %) anggaran tersebut disediakan oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pembangunan pertanian, maka harus didukung dengan sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan atau APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Pendanaan Swasta dan Swadaya Masyarakat

Pendanaan swasta baik yang bersumber dari kredit usaha komersial perbankan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun



Penanaman Modal Asing (PMA) seyogyanya dapat ditingkatkan melalui promosi investasi oleh instansi pertanian di pusat, provinsi dan atau kabupaten/kota. Promosi tersebut didasarkan pada potensi dan prospek pembangunan pertanian di daerah.

Kredit usaha komersial perbankan sepenuhnya tergantung pada kelayakan kredit setiap unit usaha. Prinsip yang harus dianut dalam pendanaan swasta adalah *public private partnership*, yaitu kerja sama usaha yang saling memperkuat, saling membesarkan dan saling menguntungkan antara industri besar dengan petani dalam membentuk manajemen rantai pasokan (*supply chain management*).

Sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian adalah yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yaitu bagian dari keuntungan usaha swasta dan BUMN/BUMD.

Pendanaan APBN

Khusus kewenangan di bidang pertanian yang merupakan kewenangan pilihan, maka peran pemerintah dapat diberikan melalui kerangka regulasi, pelayanan publik dan investasi. Investasi dalam bentuk APBN, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sektor (K/L) hanya dimungkinkan pada urusan yang memang menjadi kewenangannya, seperti koordinasi perencanaan, pembinaan data dan statistik pertanian, perkarantinaaan, penelitian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi, pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi yang masih menjadi kewenangan Pemerintah, pengembangan sumberdaya manusia aparatur pertanian di provinsi yang bersifat strategis nasional, penyediaan bibit/benih, vaksin dan obat-obatan hewan yang bersifat lintas provinsi, pelayanan pengujian mutu alat mesin pertanian, pupuk, pestisida dan pakan ternak, subsidi bunga kredit/program, subsidi sarana produksi (terutama benih dan pupuk) kepada petani miskin berlahan sempit; fasilitasi bencana alam yang berstatus bencana nasional, serta proteksi impor dan promosi produk yang berorientasi ekspor.





Sekitar 30 persen dari APBN tahunan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan diupayakan akan dialokasikan untuk memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian yang dibiayai dari APBN. Jenis komoditas dan lokasi pengembangan kawasan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Sedangkan sekitar 70 % dari APBN tahunan dekonsentrasi dan tugas pembantuan akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pertanian agar sesuai dengan standar pelayanan teknis yang telah ditetapkan dalam NSPK.

Pendanaan APBD

Peran yang lebih besar dalam pembangunan pertanian seyogyanya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus) yang diperuntukkan bagi: (1) penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian yang tidak diminati swasta dan tidak mampu dibangun dan dipelihara oleh masyarakat petani; (2) pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan dasar di bidang pertanian yang meliputi pelayanan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, permodalan, pasar dan informasi pasar; dan (3) mengatasi hambatan dalam pemasaran produk pertanian.

Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian dari hulu sampai hilir meliputi: jaringan irigasi (kurang dari 1.000 ha untuk APBD Kabupaten/Kota dan 1.000-3.000 ha untuk APBD provinsi), embung-embung, sumur dalam (artesis), jaringan jalan produksi dan jalan pemasaran ke industri pengolahan, kebun bibit dasar/blok fondasi, balai inseminasi daerah, pusat perbibitan masyarakat, laboratorium serifikasi benih/bibit, pos kesehatan hewan, sarana dan peralatan inseminasi buatan di daerah introduksi, peralatan pengolah tanah berkapasitas besar/traktor, kandang-kandang ternak komunal, pos pengawasan lalu lintas ternak (*check point*), padang penggembalaan dan kebun bibit hijauan makanan ternak, lantai jemur dan alat pengering (*drier*), Rumah Potong Hewan (RPH), gudang/silo yang dilengkapi pergudangan berpendingin ruangan, pasar ternak dan pasar komoditas lainnya, pusat promosi produk dan lain-lain.



Pengembangan kapasitas pelayanan dasar mencakup kelembagaan konsultasi; pendanaan; penyediaan sarana produksi (pupuk, media tanam, benih/bibit, pestisida, vaksin, obat hewan, alsin, pengolahan sederhana, kemasan); pelayanan teknologi, pengembangan sumber daya manusia/penyuluhan; proteksi hama dan penyakit/klinik kesehatan tanaman/hewan; sertifikasi produk; pengujian mutu produk; usaha produksi kelompok; koperasi; usaha produksi skala menengah dan besar; pasar dan informasi pasar, dan yang lainnya.







BAB V

**DUKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
DALAM MEMBANGUN
PERTANIAN**





Ruang lingkup pembangunan pertanian secara geografis sangat luas melintasi batas-batas wilayah administratif. Ruang lingkup pemangku kepentingan juga beragam meliputi aparaturnya pemerintah, anggota badan legislatif, lembaga perguruan tinggi, lembaga penggerak swadaya masyarakat, serta pelaku usaha swasta dan masyarakat petani. Di sisi pemerintahan, pembangunan pertanian melibatkan lintas instansi pemerintah baik di level kementerian, maupun di level satuan kerja perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan pembangunan pertanian yang berada instansi lintas sektoral harus dapat dioptimalkan dengan menghilangkan adanya kebijakan yang saling bertentangan atau terdapat perilaku pemangku kepentingan yang tumpang tindih. Kebijakan pendukung yang ada juga harus bersifat operasional, sehingga rancangan kebijakan harus diketahui sejak awal dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya tentunya akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan dibawah kewenangan Kementerian Pertanian. Untuk itulah diperlukan dukungan dari instansi lain. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi lain seperti pada Tabel 44.



Tabel 45. Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pembangunan Pertanian

No.	K/L	DUKUNGAN
1.	Pemerintah Daerah	Penerbitan Peraturan Daerah, termasuk diantaranya peraturan terkait RTRW.
		Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk investasi pangan, pengembangan padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluh pertanian oleh Pemprov; Kabupaten/Kota
		Pembinaan pengembangan kawasan pertanian
		Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan
2.	Kementerian Dalam Negeri	Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan Daerah terutama terhadap retribusi daerah yang menekan harga dan daya saing produk pertanian,
		Mendorong penerbitan Perda menindak lanjuti UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 4 PP turunannya
		Kebijakan yang mendorong pemanfaatan dana desa ke arah pengembangan potensi desa di sektor pertanian dan industri di pedesaan berbahan baku hasil pertanian.
3	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Revitalisasi infrastruktur jaringan jalan produksi , irigasi primer dan sekunder di wilayah sentra produksi
		Revitalisasi kelembagaan pengelola air/mantri air, waduk dan embung besar di daerah rawan air
4	Kementerian Perindustrian	Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian
		Fasilitasi pengolahan skala kelompok dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok tani tanaman pangan, horikultura, peternakan dan perkebunan
		Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis kawasan pertanian
		Mendorong revitalisasi pabrik gula, revitalisasi penggilingan padi, serta penguatan industri pakan





5	Kementerian Perdagangan	Penetapan harga dan kelancaran distribusi produk pertanian
		Pengaturan importasi sapi bakalan dan daging, serta produk hortikultura
		Kebijakan penataan kerjasama pemasaran internasional di negara tujuan ekspor
		Pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor untuk mendukung peningkatan harga produk segar dan olahan yang berorientasi ekspor
		Promosi cinta produk pertanian nusantara, serta promosi ekspor
		Perlindungan harga bagi produk substitusi impor yang telah mampu dihasilkan masyarakat petani
		Fasilitasi pergudangan di tingkat desa dan resi gudang sebagai sarana stok manajemen
		Penataan struktur pasar dalam negeri yang masih menekan nilai jual produk di tingkat usahatani.
6	Kementerian Perhubungan	Adanya ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas pertanian baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional
		Perbaikan moda transportasi dan distribusi ternak berupa kereta, kapal dan prasarana pelabuhan.
7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Menjadikan sentra komoditas pertanian utama sebagai basis pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan
8	Kementerian Koperasi dan UMKM	Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan usahatani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa, terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk produksi pertanian
9	Kementerian BUMN	Dukungan bagi pengembangan sentra produksi oleh BUMN
		Pembinaan terhadap BUMN produsen pupuk dan benih menjadi lebih profesional dan efisien
		Revitalisasi pabrik gula





10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Dukungan kebijakan konservasi hutan lindung dan DAS untuk menjamin ketersediaan air irigasi serta menekan degradasi lahan dan air pertanian</p> <p>Peningkatan produksi komoditas pertanian melalui tumpang sari (terutama kedelai dan tebu) di Hutan Produksi Konversi dan hutan kemasyarakatan</p> <p>Pemeliharaan plasma nutfah pertanian in-situ</p> <p>Rehabilitasi lahan pertanian terlantar yang belum digunakan serta kemudahan pelepasan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk perluasan areal pertanian</p> <p>Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pemanfaatan pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak</p>
11	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	<p>Kebijakan mencegah dan menekan laju konversi lahan pertanian ke non pertanian</p> <p>Penetapan status penguasaan lahan serta perwujudan dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan</p> <p>Dukungan perluasan lahan bagi pengembangan kawasan pertanian dan redistribusi lahan terlantar</p> <p>Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak</p>
12	Kementerian Keuangan	<p>Penyediaan dana untuk tenaga lapangan; penyuluh pertanian; pengawas benih; petugas karantina pertanian dan tenaga fungsional lainnya.</p> <p>Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian (Skim Khusus Pembiayaan Pertanian)</p> <p>Keterpaduan pemeriksaan produk pertanian di Bandara dan Pelabuhan (Bea Cukai dan Karantina Pertanian)</p> <p>Mendorong dan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal yang tepat.</p>
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>Kebijakan untuk pelestarian sumberdaya air darat (danau dan situ) untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui pengembangan usaha budidaya perikanan</p> <p>Pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari/mina padi dan perlindungan tanaman melalui pengendalian musuh alami oleh ikan</p>
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Kebijakan makro arah pengembangan energi terbarukan</p> <p>Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian</p>





15	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Kebijakan makro arah pengembangan energi terbarukan</p> <p>Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian</p>
16	Kementerian Agama	<p>Kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh pemuka agama</p>
17	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>Kebijakan untuk mendidik anak usia sekolah dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani dan produk pertanian dalam negeri</p> <p>Pembinaan SMK pertanian menjadi sekolah unggulan pencetak tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan budidaya pertanian</p> <p>Pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal</p>
18	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	<p>Pengembangan konsorsium penelitian agro-nanoteknologi untuk meningkatkan produktivitas dan varietas unggul tanaman dan ternak</p> <p>Mengikutsertakan unsur-unsur dalam Perguruan Tinggi dalam pendampingan kelompok petani</p>
19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<p>Sosialisasi program pencapaian swasembada pangan</p> <p>Penyediaan jaringan komunikasi dan informasi bagi balai penyuluhan di kecamatan, serta kantor layanan perkarantinaaan di daerah perbatasan dan pelabuhan terpencil</p>
20	Kementerian Kesehatan	<p>Kebijakan membina dan melindungi petani/peternak dan masyarakat melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan lingkungan dari penyakit zoonosis</p> <p>Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi konsumsi pangan serta pengawasan produk pertanian yang tidak halal</p>
21	Kementerian PAN dan RB	<p>Penambahan tenaga lapangan POPT-PHP, Penyuluh Pertanian, medis dan paramedis kesehatan hewan, Pengawas Benih dan petugas Karantina Pertanian</p>
22	Kementerian Pariwisata	<p>Mendorong dan membina agrowisata dan industri kreatif berbahan baku pertanian</p>



23	TNI dan Polri	Mendukung suasana yang kondusif jalannya kegiatan pertanian di pedesaan tanpa kendala yang diakibatkan oleh pemalsuan pupuk, penyaluran pupuk dan benih yang terhambat, konflik sosial dan penyerobotan lahan usaha, serta membantu rehabilitasi lahan pada daerah pasca bencana alam
24	Kemenko Bidang Perekonomian	Kebijakan makro untuk sektor pertanian Koordinator lintas kementerian/lembaga mendukung ketahanan pangan nasional
25	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas dan daerah sentra dan pengembangan produksi pertanian bagi penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk pertanian
26	Perum Bulog	Kebijakan yang mendorong stabilisasi harga komoditas pangan strategis
		Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerjasama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya.
		Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditi strategis lainnya selain beras dalam rangka menjaga stabilitas harga
		Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di tingkat desa
27	Perbankan	Pengembangan yang lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian
		Merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian
		Kebijakan perbankan yang lebih pro pertanian
28	Perguruan Tinggi	Pengembangan jurusan dan strata pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian pedesaan
		Peningkatan pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat







BAB VI



PENUTUP





Sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015 – 2019 akan mewujudkan **6 (Enam) Sasaran Strategis** yaitu: (1) Pencapaian swasembada beras, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, daya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi (5) Peningkatan pendapatan keluarga petani, dan (6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

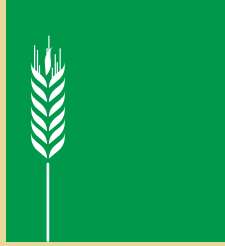
Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) Penguatan jaringan pasar. Untuk peningkatan dampak ekonomi secara signifikan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan kawasan dan fokus komoditas.

Sasaran dan strategi tersebut beserta indikator capaian akan menjadi acuan bagi langkah Kementerian Pertanian ke depan yang secara umum disampaikan dalam bentuk langkah-langkah operasional. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pertanian di tingkat nasional dan wilayah yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan.









LAMPIRAN



Lampiran 1. Sasaran Produksi Padi Tahun 2015 – 2019 (Ton)

NO	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2.029.503	2.107.642	2.160.342	2.214.343	2.269.449
2	Sumatera Utara	3.794.985	3.941.097	4.039.643	4.140.618	4.243.662
3	Sumatera Barat	2.588.013	2.687.655	2.754.859	2.823.720	2.893.991
4	Riau	432.320	448.965	460.191	471.694	483.433
5	Kepulauan Riau	1.411	1.466	1.502	1.540	1.578
6	Jambi	761.666	790.991	810.770	831.036	851.717
7	Sumatera Selatan	3.846.479	3.994.574	4.094.456	4.196.802	4.301.244
8	Kep. Babel	35.090	36.441	37.352	38.286	39.239
9	Bengkulu	688.140	714.634	732.503	750.813	769.498
10	Lampung	3.356.775	3.486.015	3.573.182	3.662.498	3.753.643
11	DKI Jakarta	9.262	9.619	9.859	10.106	10.357
12	Jawa Barat	11.908.316	12.418.727	12.729.253	13.047.435	13.372.134
13	Banten	2.086.911	2.167.260	2.221.451	2.276.979	2.333.644
14	Jawa Tengah	10.150.952	10.714.169	10.982.072	11.256.582	11.536.714
15	DI Yogyakarta	914.484	941.904	965.456	989.589	1.014.216
16	Jawa Timur	12.467.264	12.692.802	13.010.181	13.335.385	13.667.250
17	Bali	882.000	915.958	938.861	962.329	986.278
18	NTB	2.296.703	2.385.129	2.444.768	2.505.878	2.568.240
19	NTT	832.228	864.270	885.881	908.024	930.621
20	Kalimantan Barat	1.564.967	1.625.220	1.665.858	1.707.498	1.749.991
21	Kalimantan Tengah	867.541	900.943	923.471	946.554	970.110
22	Kalimantan Selatan	2.184.969	2.269.093	2.325.831	2.383.968	2.443.295
23	Kalimantan Timur	477.406	495.787	508.184	520.886	533.849
24	Kalimantan Utara	129.100	134.071	137.423	140.858	144.363
25	Sulawesi Utara	651.204	676.276	693.186	710.513	728.195
26	Gorontalo	318.614	330.881	339.155	347.632	356.283
27	Sulawesi Tengah	1.156.704	1.201.239	1.231.275	1.262.052	1.293.460
28	Sulawesi Selatan	5.442.327	5.651.864	5.793.187	5.937.994	6.085.767
29	Sulawesi Barat	484.000	502.635	515.203	528.081	541.223
30	Sulawesi Tenggara	658.780	675.317	692.203	709.505	727.162
31	Maluku	118.345	122.901	125.975	129.123	132.337
32	Maluku Utara	77.199	80.171	82.176	84.230	86.326
33	Papua	201.728	209.495	214.733	220.101	225.578
34	Papua Barat	29.648	30.789	31.559	32.348	33.153
	Indonesia	73.445.034	76.226.000	78.132.000	80.085.000	82.078.000



Lampiran 2. Sasaran Produksi Jagung Tahun 2015 – 2019 (Ton)

NO	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	189.921	199.645	209.053	219.568	230.930
2	Sumatera Utara	1.201.700	1.263.227	1.322.752	1.389.286	1.461.179
3	Sumatera Barat	652.310	692.058	724.668	761.119	800.506
4	Riau	34.761	36.541	38.262	40.187	42.267
5	Kepulauan Riau	838	881	922	969	1.019
6	Jambi	45.287	50.809	53.203	55.880	58.771
7	Sumatera Selatan	203.130	213.530	223.592	234.839	246.991
8	Kep. Babel	995	1.114	1.166	1.225	1.288
9	Bengkulu	97.184	94.686	99.148	104.135	109.524
10	Lampung	1.940.033	2.040.430	2.136.577	2.244.046	2.360.172
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1.156.781	1.151.947	1.206.228	1.266.901	1.332.461
13	Banten	12.972	13.636	14.278	14.996	15.772
14	Jawa Tengah	3.166.504	3.328.629	3.485.476	3.660.795	3.850.235
15	DI Yogyakarta	323.031	342.773	358.925	376.979	396.486
16	Jawa Timur	6.052.830	6.362.735	6.662.552	6.997.678	7.359.795
17	Bali	59.946	63.015	65.984	69.303	72.890
18	NTB	812.726	860.743	901.302	946.638	995.624
19	NTT	727.790	765.053	801.103	841.398	884.939
20	Kalimantan Barat	169.222	177.886	186.268	195.637	205.761
21	Kalimantan Tengah	7.473	8.924	9.344	9.814	10.322
22	Kalimantan Selatan	124.332	130.698	136.856	143.740	151.178
23	Kalimantan Timur	8.150	8.568	8.971	9.423	9.910
24	Kalimantan Utara	1.016	1.068	1.118	1.174	1.235
25	Sulawesi Utara	526.664	553.630	579.717	608.877	640.385
26	Gorontalo	787.941	828.284	867.313	910.939	958.079
27	Sulawesi Tengah	182.165	205.372	215.050	225.867	237.555
28	Sulawesi Selatan	1.568.679	1.697.041	1.777.007	1.866.390	1.962.973
29	Sulawesi Barat	132.267	139.040	145.591	152.914	160.827
30	Sulawesi Tenggara	69.511	67.731	70.923	74.490	78.345
31	Maluku	14.930	16.228	16.992	17.847	18.771
32	Maluku Utara	32.701	26.902	28.169	29.586	31.117
33	Papua	7.444	7.825	8.194	8.606	9.051
34	Papua Barat	2.497	3.148	3.296	3.462	3.641
	Indonesia	20.313.731	21.353.794	22.360.000	23.484.708	24.700.000





Lampiran 3. Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2015 – 2019

NO	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	109.585	165.930	251.863	268.575	273.962
2	Sumatera Utara	7.721	11.691	17.745	18.923	19.302
3	Sumatera Barat	817	1.237	1.878	2.003	2.043
4	Riau	3.802	5.757	8.738	9.318	9.505
5	Kepulauan Riau	18	27	42	44	45
6	Jambi	10.933	16.555	25.129	26.796	27.334
7	Sumatera Selatan	23.390	35.416	53.757	57.324	58.474
8	Kep. Babel	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	8.239	12.476	18.937	20.194	20.599
10	Lampung	17.176	26.007	39.476	42.096	42.940
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	158.052	239.317	363.257	387.360	395.131
13	Banten	10.870	16.459	24.983	26.641	27.175
14	Jawa Tengah	162.376	245.864	373.193	397.956	405.939
15	DI Yogyakarta	26.904	40.737	61.834	65.937	67.259
16	Jawa Timur	351.418	531.240	806.361	859.864	877.113
17	Bali	8.690	13.158	19.973	21.298	21.726
18	NTB	97.917	148.262	225.045	239.978	244.792
19	NTT	4.060	6.147	9.331	9.950	10.150
20	Kalimantan Barat	3.971	6.013	9.127	9.733	9.928
21	Kalimantan Tengah	3.338	5.054	7.672	8.181	8.345
22	Kalimantan Selatan	20.752	31.423	47.696	50.861	51.881
23	Kalimantan Timur	1.708	2.587	3.926	4.187	4.271
24	Kalimantan Utara	60	91	138	147	150
25	Sulawesi Utara	10.602	16.054	24.367	25.984	26.506
26	Gorontalo	5.049	7.646	11.605	12.375	12.624
27	Sulawesi Tengah	17.835	27.006	40.991	43.711	44.588
28	Sulawesi Selatan	101.122	153.116	232.410	247.835	252.807
29	Sulawesi Barat	10.549	15.973	24.245	25.854	26.373
30	Sulawesi Tenggara	12.263	18.568	28.184	30.055	30.658
31	Maluku	3.735	5.656	8.584	9.154	9.338
32	Maluku Utara	1.230	1.862	2.826	3.013	3.074
33	Papua	4.272	7.333	11.131	11.869	12.108
34	Papua Barat	1.545	2.339	3.550	3.786	3.862
Indonesia		1.200.000	1.817.000	2.767.996	2.941.000	3.000.000





Lampiran 4. Sasaran Produksi Kacang Tanah Tahun 2015 – 2019

NO	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	4.511	4.590	4.670	4.752	4.834
2	Sumatera Utara	12.689	12.911	13.137	13.366	13.598
3	Sumatera Barat	9.883	10.056	10.232	10.410	10.591
4	Riau	1.580	1.607	1.636	1.664	1.693
5	Kepulauan Riau	211	214	218	222	226
6	Jambi	1.727	1.757	1.788	1.819	1.850
7	Sumatera Selatan	4.335	4.411	4.488	4.566	4.646
8	Kep. Babel	387	393	400	407	414
9	Bengkulu	4.277	4.352	4.428	4.506	4.584
10	Lampung	11.783	11.990	12.199	12.412	12.628
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	92.715	94.338	95.988	97.664	99.362
13	Banten	14.128	14.375	14.626	14.882	15.140
14	Jawa Tengah	144.648	147.180	149.754	152.370	155.018
15	DI Yogyakarta	67.170	68.346	69.541	70.756	71.986
16	Jawa Timur	222.887	226.788	230.755	234.785	238.866
17	Bali	12.526	12.745	12.968	13.195	13.424
18	NTB	37.354	38.008	38.673	39.349	40.032
19	NTT	18.909	19.240	19.576	19.918	20.264
20	Kalimantan Barat	1.623	1.652	1.681	1.710	1.740
21	Kalimantan Tengah	820	835	849	864	879
22	Kalimantan Selatan	12.858	13.083	13.312	13.544	13.780
23	Kalimantan Timur	1.677	1.706	1.736	1.767	1.797
24	Kalimantan Utara	268	273	277	282	287
25	Sulawesi Utara	9.596	9.764	9.935	10.109	10.284
26	Gorontalo	1.245	1.267	1.289	1.312	1.334
27	Sulawesi Tengah	8.056	8.197	8.341	8.486	8.634
28	Sulawesi Selatan	29.635	30.153	30.681	31.217	31.759
29	Sulawesi Barat	617	628	639	650	662
30	Sulawesi Tenggara	5.592	5.690	5.789	5.890	5.993
31	Maluku	1.857	1.889	1.922	1.956	1.990
32	Maluku Utara	4.418	4.495	4.574	4.654	4.735
33	Papua	2.183	2.222	2.261	2.300	2.340
34	Papua Barat	586	596	607	617	628
	Indonesia	742.750	755.750	768.970	782.400	796.000





Lampiran 5. Sasaran Produksi Kacang Hijau Tahun 2015 – 2019

NO	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1.336	1.356	1.376	1.397	1.417
2	Sumatera Utara	3.301	3.350	3.400	3.451	3.503
3	Sumatera Barat	1.050	1.066	1.082	1.098	1.115
4	Riau	875	888	901	915	929
5	Kepulauan Riau	366	372	377	383	389
6	Jambi	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	2.558	2.596	2.635	2.675	2.715
8	Kep. Babel	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	1.927	1.956	1.985	2.015	2.045
10	Lampung	3.780	3.836	3.894	3.952	4.011
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	15.687	15.922	16.161	16.403	16.648
13	Banten	950	964	979	993	1.008
14	Jawa Tengah	91.787	93.156	94.557	95.974	97.407
15	DI Yogyakarta	465	472	479	486	493
16	Jawa Timur	82.207	83.434	84.689	85.957	87.240
17	Bali	1.675	1.699	1.724	1.751	1.777
18	NTB	31.514	31.984	32.465	32.952	33.444
19	NTT	14.348	14.562	14.781	15.002	15.226
20	Kalimantan Barat	817	829	842	854	867
21	Kalimantan Tengah	150	152	155	157	159
22	Kalimantan Selatan	1.057	1.072	1.088	1.105	1.121
23	Kalimantan Timur	469	476	483	490	498
24	Kalimantan Utara	149	151	154	156	158
25	Sulawesi Utara	2.163	2.195	2.228	2.261	2.295
26	Gorontalo	256	260	263	267	271
27	Sulawesi Tengah	1.186	1.204	1.222	1.240	1.259
28	Sulawesi Selatan	26.152	26.542	26.941	27.345	27.753
29	Sulawesi Barat	849	861	874	887	900
30	Sulawesi Tenggara	1.546	1.569	1.592	1.616	1.640
31	Maluku	1.256	1.274	1.293	1.313	1.332
32	Maluku Utara	455	462	469	476	483
33	Papua	961	975	990	1.005	1.020
34	Papua Barat	261	264	268	272	276
	Indonesia	291.550	295.900	300.360	304.860	309.400





Lampiran 6. Sasaran Produksi Ubi Kayu Tahun 2015 – 2019

NO	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	54.710	55.827	56.966	58.128	59.314
2	Sumatera Utara	958.147	977.707	997.651	1.018.005	1.038.772
3	Sumatera Barat	127.892	130.503	133.165	135.882	138.654
4	Riau	78.703	80.310	81.948	83.620	85.326
5	Kepulauan Riau	15.168	15.478	15.793	16.116	16.444
6	Jambi	45.409	46.336	47.281	48.246	49.230
7	Sumatera Selatan	238.588	243.459	248.425	253.494	258.665
8	Kep. Babel	30.265	30.882	31.512	32.155	32.811
9	Bengkulu	97.663	99.657	101.690	103.764	105.881
10	Lampung	9.055.592	9.240.459	9.428.943	9.621.319	9.817.586
11	DKI Jakarta	692	706	720	735	750
12	Jawa Barat	2.478.185	2.528.776	2.580.357	2.633.003	2.686.715
13	Banten	200.334	204.424	208.594	212.850	217.192
14	Jawa Tengah	3.999.533	4.081.182	4.164.429	4.249.395	4.336.079
15	DI Yogyakarta	1.144.768	1.168.138	1.191.966	1.216.285	1.241.096
16	Jawa Timur	4.342.964	4.431.624	4.522.019	4.614.281	4.708.408
17	Bali	205.438	209.632	213.908	218.272	222.725
18	NTB	121.632	124.115	126.647	129.231	131.867
19	NTT	1.074.413	1.096.347	1.118.710	1.141.534	1.164.821
20	Kalimantan Barat	279.896	285.610	291.435	297.381	303.448
21	Kalimantan Tengah	121.381	123.859	126.385	128.964	131.595
22	Kalimantan Selatan	149.726	152.783	155.899	159.080	162.325
23	Kalimantan Timur	111.447	113.722	116.042	118.409	120.825
24	Kalimantan Utara	35.465	36.189	36.927	37.681	38.449
25	Sulawesi Utara	96.113	98.075	100.076	102.118	104.201
26	Gorontalo	21.465	21.903	22.350	22.806	23.271
27	Sulawesi Tengah	86.394	88.158	89.956	91.791	93.664
28	Sulawesi Selatan	608.611	621.036	633.704	646.633	659.824
29	Sulawesi Barat	70.117	71.548	73.008	74.497	76.017
30	Sulawesi Tenggara	263.654	269.037	274.524	280.125	285.840
31	Maluku	167.899	171.327	174.821	178.388	182.027
32	Maluku Utara	158.718	161.958	165.262	168.633	172.073
33	Papua	55.330	56.460	57.612	58.787	59.986
34	Papua Barat	33.687	34.375	35.076	35.791	36.522
	Indonesia	26.530.000	27.071.600	27.623.800	28.187.400	28.762.400



Lampiran 7. Sasaran Produksi Ubi Jalar Tahun 2015 – 2019

NO	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	16.576,77	16.889,54	17.202,30	17.515,07	17.827,84
2	Sumatera Utara	184.036,35	187.508,74	190.981,12	194.453,51	197.925,89
3	Sumatera Barat	84.779,60	86.379,22	87.978,83	89.578,45	91.178,06
4	Riau	13.086,92	13.333,84	13.580,77	13.827,69	14.074,61
5	Kepulauan Riau	1.614,46	1.644,92	1.675,38	1.705,85	1.736,31
6	Jambi	25.151,55	25.626,11	26.100,67	26.575,23	27.049,78
7	Sumatera Selatan	33.048,55	33.672,11	34.295,67	34.919,23	35.542,78
8	Kep. Babel	7.034,73	7.167,46	7.300,19	7.432,92	7.565,65
9	Bengkulu	26.468,40	26.967,80	27.467,21	27.966,61	28.466,01
10	Lampung	59.691,24	60.817,49	61.943,74	63.069,99	64.196,24
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	622.036,44	633.772,97	645.509,51	657.246,05	668.982,58
13	Banten	46.695,03	47.576,07	48.457,11	49.338,15	50.219,18
14	Jawa Tengah	190.548,22	194.143,47	197.738,72	201.333,97	204.929,22
15	DI Yogyakarta	8.215,43	8.370,44	8.525,45	8.680,45	8.835,46
16	Jawa Timur	208.691,54	212.629,12	216.566,70	220.504,27	224.441,85
17	Bali	105.240,66	107.226,33	109.212,00	111.197,67	113.183,35
18	NTB	15.350,63	15.640,27	15.929,90	16.219,54	16.509,17
19	NTT	130.940,56	133.411,13	135.881,71	138.352,29	140.822,86
20	Kalimantan Barat	15.449,50	15.741,00	16.032,50	16.324,00	16.615,50
21	Kalimantan Tengah	13.866,63	14.128,27	14.389,90	14.651,54	14.913,17
22	Kalimantan Selatan	39.836,63	40.588,26	41.339,90	42.091,53	42.843,17
23	Kalimantan Timur	33.155,32	33.780,52	34.406,09	35.031,66	35.657,22
24	Kalimantan Utara	8.108,28	8.261,58	8.414,57	8.567,57	8.720,56
25	Sulawesi Utara	65.393,84	66.627,68	67.861,53	69.095,37	70.329,22
26	Gorontalo	4.592,65	4.679,31	4.765,96	4.852,61	4.939,27
27	Sulawesi Tengah	42.577,34	43.380,69	44.184,03	44.987,38	45.790,72
28	Sulawesi Selatan	77.767,30	79.234,60	80.701,91	82.169,22	83.636,52
29	Sulawesi Barat	18.807,86	31.955,53	19.517,59	19.872,46	20.227,32
30	Sulawesi Tenggara	31.363,76	19.162,73	32.547,30	33.139,07	33.730,84
31	Maluku	28.693,38	29.234,76	29.776,15	30.317,53	30.858,92
32	Maluku Utara	37.144,84	37.845,69	38.546,53	39.247,38	39.948,22
33	Papua	442.855,70	451.211,46	459.567,23	467.923,00	476.278,77
34	Papua Barat	11.179,94	11.390,88	11.601,83	11.812,77	12.023,71
	Indonesia	2.650.000,05	2.699.999,99	2.750.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00



Lampiran 8. Sasaran Produksi Cabai Merah Besar Tahun 2015 – 2019

NO	PROVINSI	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	45.093	46.446	47.839	49.274	50.752
2	Sumatera Utara	172.857	177.269	182.587	188.065	193.707
3	Sumatera Barat	65.098	66.757	68.760	70.822	72.947
4	R i a u	9.921	9.950	10.249	10.556	10.873
5	Kepulauan Riau	1.969	2.028	2.088	2.151	2.216
6	J a m b i	41.508	42.753	44.036	45.357	46.718
7	Sumatera Selatan	16.580	16.540	17.036	17.547	18.073
8	Kep Bangka Belitung	3.864	3.980	4.099	4.222	4.349
9	Bengkulu	42.775	43.789	45.103	46.456	47.850
10	Lampung	37.707	38.570	39.727	40.919	42.146
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	268.048	274.677	282.918	291.405	300.147
13	B a n t e n	6.502	6.394	6.586	6.784	6.987
14	Jawa Tengah	155.266	158.773	163.536	168.442	173.495
15	DI Yogyakarta	18.414	18.756	19.319	19.899	20.496
16	Jawa Timur	109.181	111.321	114.661	118.101	121.644
17	Bali	16.710	16.892	17.399	17.921	18.459
18	N T B	6.800	7.004	7.214	7.430	7.653
19	N T T	2.037	2.098	2.161	2.225	2.292
20	Kalimantan Barat	3.183	3.118	3.212	3.308	3.408
21	Kalimantan Tengah	1.232	1.109	1.142	1.176	1.212
22	Kalimantan Selatan	5.879	5.576	5.744	5.916	6.093
23	Kalimantan Timur	4.699	4.722	4.864	5.010	5.160
24	Kalimantan Utara	3.044	3.093	3.186	3.281	3.380
25	Sulawesi Utara	445	459	473	487	501
26	Gorontalo	3.264	3.362	3.463	3.566	3.673
27	Sulawesi Tengah	28.759	29.622	30.511	31.426	32.369
28	Sulawesi Selatan	1.438	1.481	1.525	1.571	1.618
29	Sulawesi Barat	3.024	3.114	3.208	3.304	3.403
30	Sulawesi Tenggara	2.300	2.369	2.440	2.513	2.588
31	Maluku	1.196	1.232	1.269	1.307	1.346
32	Maluku Utara	2.848	2.934	3.022	3.112	3.206
33	Papua	249	256	264	272	280
34	Papua Barat	249	256	264	272	280
	INDONESIA	1.082.136	1.106.700	1.139.902	1.174.098	1.209.321



Lampiran 9. Sasaran Produksi Cabai Rawit Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	38.470	39.055	39.649	40.253	40.865
2	Sumatera Utara	38.715	39.304	39.902	40.509	41.125
3	Sumatera Barat	7.461	7.574	7.690	7.806	7.925
4	Riau	6.728	6.830	6.934	7.039	7.147
5	Kepulauan Riau	971	986	1.001	1.016	1.031
6	Jambi	13.988	14.201	14.417	14.636	14.859
7	Sumatera Selatan	4.183	4.246	4.311	4.377	4.443
8	Kep. Bangka Belitung	3.511	3.564	3.618	3.673	3.729
9	Bengkulu	13.546	13.752	13.961	14.174	14.389
10	Lampung	13.980	14.193	14.409	14.628	14.850
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	130.276	131.656	133.659	135.692	137.756
13	Banten	4.558	4.500	4.569	4.638	4.709
14	Jawa Tengah	89.963	90.811	92.192	93.595	95.019
15	DI Yogyakarta	3.452	3.435	3.487	3.540	3.594
16	Jawa Timur	238.879	242.010	245.691	249.429	253.223
17	Bali	21.551	21.729	22.059	22.395	22.736
18	NTB	30.313	30.774	31.242	31.717	32.200
19	NTT	3.492	3.546	3.600	3.654	3.710
20	Kalimantan Barat	5.963	5.979	6.069	6.162	6.256
21	Kalimantan Tengah	4.144	4.132	4.195	4.259	4.323
22	Kalimantan Selatan	2.944	2.792	2.835	2.878	2.921
23	Kalimantan Timur	5.128	5.142	5.221	5.300	5.381
24	Kalimantan Utara	2.544	2.571	2.610	2.650	2.690
25	Sulawesi Utara	8.866	9.001	9.138	9.277	9.418
26	Gorontalo	13.157	13.323	13.525	13.731	13.940
27	Sulawesi Tengah	8.027	8.149	8.273	8.399	8.527
28	Sulawesi Selatan	19.712	19.156	19.447	19.743	20.043
29	Sulawesi Barat	2.068	2.099	2.131	2.164	2.197
30	Sulawesi Tenggara	5.102	5.180	5.258	5.338	5.420
31	Maluku	3.662	3.718	3.775	3.832	3.890
32	Maluku Utara	878	892	905	919	933
33	Papua	3.994	3.870	3.929	3.988	4.049
34	Papua Barat	1.054	885	898	912	926
	INDONESIA	751.283	759.055	770.601	782.324	794.224



Lampiran 10. Sasaran Produksi Bawang Merah Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	4.405	4.305	4.522	4.750	4.990
2	Sumatera Utara	9.479	9.635	10.120	10.630	11.166
3	Sumatera Barat	47.621	49.645	52.147	54.775	57.536
4	Riau	218	14	15	16	17
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	1.116	1.172	1.231	1.293	1.358
7	Sumatera Selatan	394	253	266	279	293
8	Kep Bangka Belitung	153	-	-	-	-
9	Bengkulu	772	811	852	894	940
10	Lampung	601	255	268	282	296
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	128.636	134.099	140.858	147.957	155.414
13	Banten	2.181	2.129	2.237	2.350	2.468
14	Jawa Tengah	464.327	486.656	511.183	536.947	564.009
15	DI Yogyakarta	10.537	11.068	11.626	12.212	12.827
16	Jawa Timur	269.154	282.021	296.235	311.165	326.848
17	Bali	9.168	9.255	9.721	10.211	10.726
18	N T B	112.554	117.905	123.848	130.089	136.646
19	N T T	3.526	3.596	3.777	3.968	4.168
20	Kalimantan Barat	102	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	123	65	68	72	76
22	Kalimantan Selatan	364	61	64	67	70
23	Kalimantan Timur	136	35	37	39	41
24	Kalimantan Utara	119	18	19	19	20
25	Sulawesi Utara	1.701	1.572	1.651	1.734	1.822
26	Gorontalo	661	265	278	292	307
27	Sulawesi Tengah	5.473	5.105	5.362	5.633	5.916
28	Sulawesi Selatan	49.555	51.086	53.661	56.366	59.206
29	Sulawesi Barat	148	156	164	172	180
30	Sulawesi Tenggara	306	53	56	58	61
31	Maluku	622	546	573	602	632
32	Maluku Utara	239	144	151	158	166
33	Papua	838	719	755	793	833
34	Papua Barat	18	19	20	21	22
	INDONESIA	1.125.247	1.172.663	1.231.765	1.293.846	1.359.056





Lampiran 11. Sasaran Produksi Kentang Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	13.302	13.568	13.840	14.116	14.398
2	Sumatera Utara	118.485	120.855	123.272	125.737	128.252
3	Sumatera Barat	52.539	53.590	54.661	55.755	56.870
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	88.816	90.593	92.404	94.253	96.138
7	Sumatera Selatan	3.321	3.387	3.455	3.524	3.594
8	Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	15.090	15.392	15.700	16.014	16.334
10	Lampung	782	797	813	829	846
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	304.300	310.386	316.593	322.925	329.384
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	321.705	328.137	334.702	341.396	348.224
15	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	223.316	227.783	232.338	236.985	241.725
17	Bali	3.794	3.870	3.948	4.027	4.108
18	N T B	4.771	4.866	4.964	5.063	5.164
19	N T T	355	362	369	376	384
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	135.500	138.210	140.974	143.794	146.670
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	277	283	288	294	300
28	Sulawesi Selatan	35.633	36.346	37.073	37.814	38.570
29	Sulawesi Barat	29	29	30	30	31
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	218	223	227	232	237
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	114	116	119	121	123
34	Papua Barat	27	28	28	29	30
	INDONESIA	1.322.374	1.348.821	1.375.798	1.403.314	1.431.380





Lampiran 12. Sasaran Produksi Manga Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	26.997	27.645	28.336	29.059	29.760
2	Sumatera Utara	36.014	36.878	37.800	38.764	39.699
3	Sumatera Barat	8.068	8.262	8.468	8.684	8.894
4	Riau	6.473	6.628	6.794	6.967	7.135
5	Kepulauan Riau	17.291	17.706	18.148	18.611	19.060
6	Jambi	2.072	2.121	2.174	2.230	2.284
7	Sumatera Selatan	2.311	2.367	2.426	2.488	2.548
8	Bangka Belitung	4.802	4.917	5.040	5.169	5.294
9	Bengkulu	10.094	10.336	10.594	10.864	11.126
10	Lampung	3.706	3.795	3.889	3.989	4.085
11	DKI Jakarta	11.776	12.059	12.360	12.676	12.982
12	Jawa Barat	340.951	349.134	357.862	366.988	375.842
13	Banten	833.335	853.338	874.674	896.973	918.612
14	Jawa Tengah	59.616	61.046	62.573	64.168	65.716
15	DI Yogyakarta	421.607	431.726	442.519	453.803	464.751
16	Jawa Timur	38.455	39.378	40.362	41.391	42.390
17	Bali	38.198	39.115	40.093	41.115	42.107
18	Nusa Tenggara Barat	115.332	118.100	121.053	124.140	127.135
19	Nusa Tenggara Timur	64.103	65.641	67.282	68.998	70.663
20	Kalimantan Barat	3.919	4.013	4.114	4.218	4.320
21	Kalimantan Tengah	5.197	5.321	5.454	5.594	5.729
22	Kalimantan Selatan	6.024	6.169	6.323	6.484	6.640
23	Kalimantan Timur	7.065	7.235	7.416	7.605	7.788
24	Kalimantan Utara	3.533	3.617	3.708	3.802	3.894
25	Sulawesi Utara	6.442	6.596	6.761	6.934	7.101
26	Gorontalo	11.473	11.749	12.042	12.350	12.648
27	Sulawesi Tengah	3.699	3.787	3.882	3.981	4.077
28	Sulawesi Selatan	18.214	18.651	19.118	19.605	20.078
29	Sulawesi Barat	16.825	17.229	17.660	18.110	18.547
30	Sulawesi Tenggara	154.404	158.110	162.063	166.196	170.205
31	Maluku	5.438	5.568	5.707	5.853	5.994
32	Maluku Utara	1.322	1.354	1.387	1.423	1.457
33	Papua	840	860	881	904	926
34	Papua Barat	399	408	418	429	439
	INDONESIA	2.285.995	2.340.859	2.399.381	2.460.565	2.519.926





Lampiran 13. Sasaran Produksi Manggis Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1.442	1.468	1.494	1.521	1.548
2	Sumatera Utara	12.809	13.039	13.274	13.513	13.756
3	Sumatera Barat	12.410	12.634	12.861	13.093	13.329
4	Riau	3.745	3.812	3.881	3.951	4.022
5	Kepulauan Riau	3.857	3.927	3.998	4.069	4.142
6	Jambi	166	169	172	175	178
7	Sumatera Selatan	1.568	1.596	1.625	1.654	1.684
8	Bangka Belitung	3.730	3.797	3.866	3.935	4.006
9	Bengkulu	724	737	750	764	778
10	Lampung	735	748	762	776	790
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	30.896	31.453	32.015	32.596	33.183
13	Banten	14.971	15.241	15.515	15.794	16.078
14	Jawa Tengah	21.912	22.307	22.708	23.117	23.533
15	DI Yogyakarta	10.923	11.119	11.320	11.523	11.730
16	Jawa Timur	1.855	1.889	1.923	1.957	1.992
17	Bali	4.379	4.458	4.539	4.620	4.703
18	Nusa Tenggara Barat	3.691	3.757	3.825	3.894	3.964
19	Nusa Tenggara Timur	31	31	32	32	33
20	Kalimantan Barat	1.008	1.026	1.045	1.063	1.082
21	Kalimantan Tengah	1.506	1.533	1.561	1.589	1.618
22	Kalimantan Selatan	750	764	777	791	805
23	Kalimantan Timur	113	115	117	119	121
24	Kalimantan Utara	57	58	59	60	61
25	Sulawesi Utara	662	674	686	699	712
26	Gorontalo	1.186	1.207	1.229	1.251	1.274
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	1.052	1.071	1.091	1.110	1.130
29	Sulawesi Barat	129	131	134	136	138
30	Sulawesi Tenggara	7.745	7.884	8.026	8.170	8.317
31	Maluku	236	240	244	249	253
32	Maluku Utara	663	675	687	699	712
33	Papua	3	3	3	3	3
34	Papua Barat	3	3	3	3	3
INDONESIA		144.957	147.566	150.222	152.926	155.679





Lampiran 14. Sasaran Produksi Nenas Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	780	795	811	828	844
2	Sumatera Utara	380.202	387.801	395.559	403.471	411.493
3	Sumatera Barat	534	545	556	567	578
4	Riau	156.532	159.663	162.856	166.113	169.416
5	Kepulauan Riau	286	292	298	303	309
6	Jambi	260.597	265.809	271.125	276.547	282.046
7	Sumatera Selatan	96.472	98.402	100.370	102.377	104.413
8	Bangka Belitung	25.850	26.367	26.894	27.432	27.977
9	Bengkulu	532	543	554	565	576
10	Lampung	30.942	31.560	32.192	32.835	33.488
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	195.590	199.502	203.492	207.562	211.689
13	Banten	520	531	541	552	563
14	Jawa Tengah	188.474	192.244	196.089	200.011	203.988
15	DI Yogyakarta	846	863	880	898	916
16	Jawa Timur	281.294	286.920	292.658	298.511	304.446
17	Bali	771	787	802	818	834
18	Nusa Tenggara Barat	32.248	32.893	33.551	34.222	34.902
19	Nusa Tenggara Timur	11.312	11.539	11.769	12.005	12.244
20	Kalimantan Barat	136.631	139.364	142.151	144.994	147.877
21	Kalimantan Tengah	16.160	16.484	16.813	17.150	17.491
22	Kalimantan Selatan	18.050	18.411	18.779	19.154	19.535
23	Kalimantan Timur	32.998	33.658	34.331	34.331	35.014
24	Kalimantan Utara	10.999	11.219	11.444	11.444	11.671
25	Sulawesi Utara	1.904	1.942	1.981	2.021	2.061
26	Gorontalo	341	348	355	362	369
27	Sulawesi Tengah	169	173	176	180	184
28	Sulawesi Selatan	3.346	3.413	3.482	3.551	3.622
29	Sulawesi Barat	669	683	696	710	724
30	Sulawesi Tenggara	2.893	2.951	3.010	3.071	3.132
31	Maluku	178	182	185	189	193
32	Maluku Utara	20	20	21	21	21
33	Papua	228	232	237	242	247
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	INDONESIA	1.888.368	1.926.136	1.964.658	2.003.037	2.042.864



Lampiran 15. Sasaran Produksi Jeruk Siam Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	7.970	8.249	8.579	8.965	9.296
2	Sumatera Utara	345.707	357.807	372.120	388.865	403.253
3	Sumatera Barat	42.929	44.432	46.209	48.288	50.075
4	Riau	5.202	5.384	5.599	5.851	6.068
5	Kepulauan Riau	2.013	2.084	2.167	2.265	2.349
6	Jambi	241	249	259	271	281
7	Sumatera Selatan	11.878	12.293	12.785	13.361	13.855
8	Bangka Belitung	10.001	10.351	10.765	11.249	11.665
9	Bengkulu	15.764	16.316	16.968	17.732	18.388
10	Lampung	6.399	6.623	6.888	7.198	7.464
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	31.239	32.332	33.625	35.138	36.438
13	Banten	545.438	564.528	587.110	613.530	636.230
14	Jawa Tengah	4.001	4.141	4.307	4.500	4.667
15	DI Yogyakarta	14.958	15.481	16.101	16.825	17.448
16	Jawa Timur	2.931	3.034	3.155	3.297	3.419
17	Bali	148.933	154.145	160.311	167.525	173.724
18	Nusa Tenggara Barat	2.955	3.058	3.181	3.324	3.447
19	Nusa Tenggara Timur	19.211	19.883	20.679	21.609	22.409
20	Kalimantan Barat	163.470	169.191	175.959	183.877	190.681
21	Kalimantan Tengah	5.654	5.851	6.086	6.359	6.595
22	Kalimantan Selatan	115.581	119.626	124.411	130.010	134.820
23	Kalimantan Timur	8.669	8.972	9.331	9.751	10.111
24	Kalimantan Utara	4.335	4.486	4.666	4.876	5.056
25	Sulawesi Utara	744	770	801	837	868
26	Gorontalo	26.706	27.641	28.747	30.040	31.152
27	Sulawesi Tengah	2.219	2.297	2.389	2.496	2.588
28	Sulawesi Selatan	11.828	12.242	12.732	13.305	13.797
29	Sulawesi Barat	56.595	58.576	60.919	63.660	66.016
30	Sulawesi Tenggara	14.108	14.602	15.186	15.869	16.457
31	Maluku	7.832	8.107	8.431	8.810	9.136
32	Maluku Utara	4.024	4.165	4.331	4.526	4.693
33	Papua	595	616	641	670	694
34	Papua Barat	248	257	267	279	289
	INDONESIA	1.640.377	1.697.790	1.765.702	1.845.159	1.913.430



Lampiran 16. Sasaran Produksi Salak Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	174	177	181	185	189
2	Sumatera Utara	239.668	244.462	249.351	254.338	259.414
3	Sumatera Barat	2.488	2.538	2.589	2.640	2.693
4	Riau	787	803	819	836	853
5	Kepulauan Riau	285	290	296	302	308
6	Jambi	698	711	726	740	755
7	Sumatera Selatan	1.469	1.499	1.529	1.559	1.590
8	Bangka Belitung	619	631	644	657	670
9	Bengkulu	1.931	1.970	2.009	2.049	2.090
10	Lampung	2.326	2.372	2.419	2.468	2.517
11	DKI Jakarta	49	50	51	52	53
12	Jawa Barat	131.065	133.686	136.360	139.087	141.863
13	Banten	2.235	2.280	2.326	2.372	2.419
14	Jawa Tengah	482.386	492.036	501.873	511.914	522.131
15	DI Yogyakarta	72.859	74.316	75.802	77.318	78.861
16	Jawa Timur	59.298	60.484	61.694	62.927	64.183
17	Bali	34.384	35.072	35.774	36.489	37.217
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	11	11	11
19	Nusa Tenggara Timur	916	934	953	972	991
20	Kalimantan Barat	718	732	747	762	777
21	Kalimantan Tengah	1.686	1.719	1.754	1.789	1.825
22	Kalimantan Selatan	827	843	860	877	895
23	Kalimantan Timur	6.612	6.744	6.879	6.879	7.016
24	Kalimantan Utara	2.204	2.248	2.293	2.293	2.339
25	Sulawesi Utara	77	79	80	82	84
26	Gorontalo	2	3	3	3	3
27	Sulawesi Tengah	29	29	30	30	31
28	Sulawesi Selatan	12.615	12.867	13.124	13.387	13.654
29	Sulawesi Barat	34	35	35	36	37
30	Sulawesi Tenggara	562	573	585	597	609
31	Maluku	41	42	43	43	44
32	Maluku Utara	6	6	6	6	6
33	Papua	160	163	166	170	173
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	INDONESIA	1.059.220	1.080.404	1.102.012	1.123.870	1.146.301





Lampiran 17. Sasaran Produksi Temulawak Tahun 2015-2019

NO.	PROVINSI	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	133	140	147	154	162
2	Sumatera Utara	325	341	358	376	395
3	Sumatera Barat	23	24	25	26	27
4	R i a u	78	82	86	90	95
5	Kepulauan Riau	3	4	4	4	4
6	J a m b i	36	38	40	42	44
7	Sumatera Selatan	108	113	119	125	131
8	Kep Bangka Belitung	4	5	5	5	5
9	Bengkulu	164	172	181	190	200
10	Lampung	466	489	514	540	567
11	DKI Jakarta	6	7	7	7	7
12	Jawa Barat	275	289	304	319	335
13	B a n t e n	28	29	31	32	34
14	Jawa Tengah	18.061	18.960	19.908	20.907	21.952
15	DI Yogyakarta	4.881	5.126	5.382	5.651	5.934
16	Jawa Timur	13.396	14.066	14.769	15.508	16.283
17	Bali	-	-	-	-	-
18	N T B	155	163	171	179	188
19	N T T	318	333	350	368	386
20	Kalimantan Barat	101	106	111	117	123
21	Kalimantan Tengah	43	45	47	50	53
22	Kalimantan Selatan	264	278	292	306	321
23	Kalimantan Timur	83	88	92	96	101
24	Kalimantan Utara	42	44	46	48	50
25	Sulawesi Utara	34	36	37	39	41
26	Gorontalo	4	4	5	5	5
27	Sulawesi Tengah	41	43	45	47	49
28	Sulawesi Selatan	144	152	159	167	175
29	Sulawesi Barat	5	5	5	5	5
30	Sulawesi Tenggara	96	100	106	111	117
31	Maluku	2	2	2	2	2
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2	3	3	3	3
	INDONESIA	39.321	41.287	43.351	45.519	47.795





Lampiran 18. Sasaran Produksi Krisan Tahun 2015-2019

NO.	PROVINSI	PRODUKSI (TANGKAI)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	3.051.615	3.269.373	3.532.212	3.893.297	4.203.306
3	Sumatera Barat	261.890	280.578	303.135	334.124	360.729
4	Riau	2.732	2.927	3.163	3.486	3.764
5	Kepulauan Riau	6.170	6.610	7.142	7.872	8.499
6	Jambi	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	11.656	12.488	13.492	14.871	16.055
8	Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	2.517	2.697	2.914	3.212	3.468
10	Lampung	40.324	43.202	46.675	51.446	55.542
11	DKI Jakarta	9.320	9.985	10.788	11.890	12.837
12	Jawa Barat	232.497.549	249.088.116	269.113.398	296.623.928	320.242.985
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	131.583.369	140.972.899	152.306.328	167.876.073	181.243.418
15	DI Yogyakarta	4.562.606	4.888.184	5.281.167	5.821.042	6.284.550
16	Jawa Timur	77.186.343	82.694.208	89.342.357	98.475.515	106.316.753
17	Bali	2.280.106	2.442.810	2.639.198	2.908.994	3.140.626
18	N T B	80.718	86.478	93.430	102.981	111.181
19	N T T	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	6.871	7.361	7.953	8.766	9.464
21	Kalimantan Tengah	4.205	4.505	4.867	5.365	5.792
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	8.306	8.899	9.614	10.597	11.441
24	Kalimantan Utara	4.153	4.449	4.807	5.298	5.720
25	Sulawesi Utara	2.797.945	2.997.600	3.238.591	3.569.661	3.853.900
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	4.917	5.268	5.692	6.274	6.774
28	Sulawesi Selatan	665.146	712.609	769.899	848.603	916.174
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	1.206	1.292	1.396	1.538	1.660
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	1.620	1.735	1.875	2.066	2.231
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	INDONESIA	455.071.284	487.544.273	526.740.093	580.586.899	626.816.868



Lampiran 19. Sasaran Produksi Angrek Tahun 2015-2019

NO.	PROVINSI	PRODUKSI (TANGKAI)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2.173	2.277	2.395	2.555	2.689
2	Sumatera Utara	879.640	921.751	969.218	1.034.208	1.088.626
3	Sumatera Barat	34.781	36.446	38.323	40.893	43.045
4	R i a u	9.217	9.658	10.155	10.836	11.406
5	Kepulauan Riau	7.606	7.970	8.381	8.943	9.414
6	J a m b i	10.054	10.535	11.078	11.821	12.443
7	Sumatera Selatan	35.965	37.687	39.627	42.285	44.510
8	Kep Bangka Belitung	9.689	10.153	10.676	11.391	11.990
9	Bengkulu	8.998	9.428	9.914	10.579	11.136
10	Lampung	80.310	84.155	88.488	94.422	99.390
11	DKI Jakarta	1.039.980	1.089.768	1.145.886	1.222.724	1.287.062
12	Jawa Barat	5.880.964	6.162.506	6.479.852	6.914.357	7.278.178
13	B a n t e n	7.154.711	7.497.230	7.883.306	8.411.922	8.854.543
14	Jawa Tengah	1.373.570	1.439.327	1.513.447	1.614.931	1.699.906
15	DI Yogyakarta	76.899	80.581	84.730	90.412	95.169
16	Jawa Timur	3.227.546	3.382.060	3.556.223	3.794.684	3.994.354
17	Bali	1.108.506	1.161.574	1.221.391	1.303.291	1.371.868
18	N T B	8.832	9.255	9.732	10.384	10.930
19	N T T	916	960	1.009	1.077	1.134
20	Kalimantan Barat	1.108.225	1.161.279	1.221.081	1.302.960	1.371.519
21	Kalimantan Tengah	6.943	7.275	7.650	8.163	8.593
22	Kalimantan Selatan	1.464	1.534	1.613	1.721	1.812
23	Kalimantan Timur	89.100	93.366	98.174	104.757	110.269
24	Kalimantan Utara	44.550	46.683	49.087	52.378	55.134
25	Sulawesi Utara	185.227	194.095	204.090	217.775	229.234
26	Gorontalo	13.175	13.806	14.517	15.491	16.306
27	Sulawesi Tengah	51.641	54.113	56.900	60.715	63.910
28	Sulawesi Selatan	149.379	156.530	164.591	175.627	184.868
29	Sulawesi Barat	2.261	2.370	2.492	2.659	2.799
30	Sulawesi Tenggara	29.794	31.220	32.828	35.029	36.872
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	1.563	1.638	1.723	1.838	1.935
33	Papua	11.387	11.933	12.547	13.388	14.092
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	INDONESIA	22.645.066	23.729.163	24.951.124	26.624.216	28.025.136



Lampiran 20. Sasaran Produksi Tebu Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	42,13	57,14	68,30	80,73	88,79
2	Sumatera Utara	50,11	60,52	65,09	69,39	78,53
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	25,11	38,17	45,92	51,19	56,11
7	Sumatera Selatan	124,90	159,52	168,80	175,24	188,71
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	978,21	1.022,54	1.035,88	1.054,27	1.065,93
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	165,87	196,45	230,92	247,89	255,29
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	365,81	399,05	435,98	450,98	462,00
15	D.I. Yogyakarta	37,81	55,56	68,62	73,67	82,78
16	Jawa Timur	1.079,88	1.137,48	1.175,75	1.238,94	1.285,76
17	Ball	-	-	-	-	-
18	NTB	-	-	25,22	25,22	25,22
19	NTT	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	41,48	63,69	79,28	86,40	103,92
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	60,69	79,89	89,36	95,20	116,08
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	10,88	10,88	10,88
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	TOTAL	2.972,00	3.270,00	3.500,00	3.660,00	3.820,00





Lampiran 21. Sasaran Produksi Sawit Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	855,85	857,33	987,16	1.195,44	1.294,06
2	Sumatera Utara	4.886,88	4.888,52	4.928,22	5.055,74	5.095,65
3	Sumatera Barat	1.176,37	1.179,00	1.212,75	1.494,49	1.597,36
4	Riau	7.119,27	7.121,00	7.285,05	7.394,23	7.597,02
5	Kepulauan Riau	40,00	41,00	44,00	47,00	52,00
6	Jambi	1.944,37	1.946,66	2.085,67	2.294,55	2.395,61
7	Sumatera Selatan	3.012,63	3.015,59	3.186,86	3.283,77	3.392,50
8	Bangka Belitung	540,83	542,69	546,11	548,09	554,21
9	Bengkulu	836,23	838,72	884,30	977,06	1.099,33
10	Lampung	450,44	452,26	586,77	698,31	794,52
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	37,22	38,34	39,49	40,68	46,90
13	Banten	30,28	32,00	33,00	35,59	38,02
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	NTB	-	-	-	-	-
19	NTT	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	2.197,97	2.200,00	2.382,00	2.486,84	2.694,00
21	Kalimantan Tengah	3.622,43	3.626,08	3.785,06	3.879,88	4.085,12
22	Kalimantan Selatan	1.446,76	1.449,00	1.587,00	1.674,00	1.898,00
23	Kalimantan Timur	1.688,41	1.690,00	1.871,35	1.974,33	2.095,09
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	275,33	278,21	383,64	486,49	595,30
28	Sulawesi Selatan	55,71	57,00	63,00	68,95	83,33
29	Sulawesi Barat	320,44	322,41	478,77	582,17	695,60
30	Sulawesi Tenggara	80,21	82,33	85,67	88,07	93,22
31	Maluku	17,60	19,57	22,32	25,22	29,08
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	102,65	104,36	107,83	109,83	115,27
34	Papua Barat	60,43	63,00	70,55	74,12	78,68
	TOTAL	30.798,32	30.845,070	32.656,58	34.514,85	36.419,87





Lampiran 22. Sasaran Produksi Karet Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	80,67	87,76	95,53	103,65	109,84
2	Sumatera Utara	456,48	466,16	478,89	486,68	498,51
3	Sumatera Barat	125,60	133,54	140,54	151,21	159,55
4	Riau	330,31	348,21	358,17	369,16	378,20
5	Kepulauan Riau	22,05	22,29	22,53	22,78	23,03
6	Jambi	270,32	283,44	295,58	309,07	319,29
7	Sumatera Selatan	918,43	928,09	938,59	949,82	959,11
8	Bangka Belitung	42,33	42,55	42,76	42,98	43,20
9	Bengkulu	96,79	98,74	101,54	109,34	117,31
10	Lampung	70,45	74,76	79,75	85,15	88,45
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	60,82	61,45	62,08	63,72	64,36
13	Banten	14,78	16,87	17,88	19,01	20,50
14	Jawa Tengah	42,49	43,81	44,14	46,47	48,81
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	30,73	31,99	32,26	33,52	34,79
17	Bali	0,31	0,32	0,33	0,35	0,37
18	NTB	-	-	-	-	-
19	NTT	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	248,87	257,67	269,59	279,19	289,88
21	Kalimantan Tengah	230,66	241,09	250,31	261,00	278,11
22	Kalimantan Selatan	183,66	194,03	210,65	221,08	237,87
23	Kalimantan Timur	75,65	86,64	98,99	109,23	118,22
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	6,06	6,14	6,24	6,37	6,48
28	Sulawesi Selatan	8,03	8,17	8,28	8,42	8,55
29	Sulawesi Barat	0,39	0,43	0,47	0,52	0,58
30	Sulawesi Tenggara	0,15	0,17	0,19	0,22	0,24
31	Maluku	0,82	0,84	0,85	0,87	0,89
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	3,18	3,23	3,28	3,32	3,40
34	Papua Barat	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
	TOTAL	3.320,06	3.438,42	3.559,46	3.683,19	3.809,60





Lampiran 23. Sasaran Produksi Kakao Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	30,27	35,48	38,33	40,09	42,18
2	Sumatera Utara	35,33	38,89	41,12	44,02	47,17
3	Sumatera Barat	63,12	68,81	71,69	73,13	75,16
4	Riau	4,94	5,12	5,51	5,66	5,79
5	Kepulauan Riau	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006
6	Jambi	0,55	0,60	0,75	0,83	0,91
7	Sumatera Selatan	3,79	3,85	3,91	3,97	4,04
8	Bangka Belitung	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21
9	Bengkulu	4,55	4,62	4,78	4,89	4,97
10	Lampung	26,80	28,55	31,19	33,30	35,21
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	2,92	3,07	3,16	3,25	4,33
13	Banten	2,64	2,84	2,93	3,04	3,16
14	Jawa Tengah	1,74	1,88	1,99	2,11	2,22
15	D.I. Yogyakarta	0,86	0,89	0,93	0,97	1,01
16	Jawa Timur	32,32	32,65	32,77	32,89	33,00
17	Bali	4,12	4,22	4,34	4,41	4,48
18	NTB	2,12	2,19	2,27	2,33	2,39
19	NTT	11,76	14,54	16,09	18,32	19,88
20	Kalimantan Barat	2,03	2,22	2,31	2,40	2,52
21	Kalimantan Tengah	0,22	0,25	0,30	0,32	0,35
22	Kalimantan Selatan	0,069	0,072	0,074	0,080	0,086
23	Kalimantan Timur	3,32	3,44	3,51	3,61	3,72
24	Kalimantan Utara	3,35	3,47	3,55	3,68	3,74
25	Sulawesi Utara	4,33	4,49	4,56	4,66	4,79
26	Gorontalo	3,73	4,80	5,11	6,54	7,23
27	Sulawesi Tengah	160,47	170,15	175,22	178,12	180,58
28	Sulawesi Selatan	123,12	130,11	133,20	135,10	137,18
29	Sulawesi Barat	80,49	84,38	90,26	99,01	116,27
30	Sulawesi Tenggara	130,56	134,81	139,44	145,16	148,74
31	Maluku	8,34	8,39	9,42	10,46	11,22
32	Maluku Utara	10,52	15,57	19,11	27,22	29,19
33	Papua	10,12	16,09	19,11	21,20	24,08
34	Papua Barat	4,34	4,40	4,90	5,03	5,19
	TOTAL	773,00	831,00	872,00	916,00	961,00





Lampiran 24. Sasaran Produksi Kopi Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	58,50	59,72	62,75	65,01	66,40
2	Sumatera Utara	62,37	63,66	63,84	64,58	65,31
3	Sumatera Barat	32,83	33,34	33,77	34,24	34,71
4	Riau	2,09	2,23	2,39	2,45	2,61
5	Kepulauan Riau	0,035	0,036	0,037	0,039	0,040
6	Jambi	14,44	14,51	14,64	14,89	15,04
7	Sumatera Selatan	148,87	150,26	152,22	153,44	155,33
8	Bangka Belitung	0,032	0,034	0,035	0,036	0,038
9	Bengkulu	56,72	57,61	58,34	59,15	59,97
10	Lampung	135,06	136,69	138,71	140,09	141,43
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	18,02	18,15	18,25	18,31	18,48
13	Banten	2,71	2,76	2,82	2,89	2,96
14	Jawa Tengah	22,57	23,61	24,01	25,14	26,46
15	D.I. Yogyakarta	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72
16	Jawa Timur	62,18	63,37	64,61	66,33	68,05
17	Bali	20,34	20,99	21,85	22,71	23,32
18	NTB	4,47	4,54	4,59	4,66	4,72
19	NTT	25,21	26,64	27,13	28,12	29,53
20	Kallimantan Barat	4,25	4,32	4,37	4,43	4,50
21	Kalimantan Tengah	1,97	2,02	2,06	2,10	2,14
22	Kalimantan Selatan	1,26	1,32	1,35	1,38	1,42
23	Kalimantan Timur	1,02	1,08	1,11	1,14	1,19
24	Kalimantan Utara	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88
25	Sulawesi Utara	3,34	3,43	3,48	3,50	3,65
26	Gorontalo	0,82	0,83	0,84	0,86	0,87
27	Sulawesi Tengah	3,51	4,38	4,60	4,81	5,02
28	Sulawesi Selatan	27,79	27,91	28,78	29,50	29,91
29	Sulawesi Barat	6,65	6,71	6,76	6,82	6,85
30	Sulawesi Tenggara	3,71	3,77	3,81	3,86	3,91
31	Maluku	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48
32	Maluku Utara	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49
33	Papua	1,52	1,60	1,65	1,72	1,76
34	Papua Barat	0,15	0,18	0,20	0,22	0,25
	TOTAL	724,78	738,11	751,49	764,93	778,43





Lampiran 25. Sasaran Produksi Lada Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,26	0,29	0,30	0,32	0,33
2	Sumatera Utara	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
3	Sumatera Barat	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
4	Riau	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Kepulauan Riau	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Jambi	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
7	Sumatera Selatan	7,92	7,98	8,04	8,08	8,14
8	Bangka Belitung	34,03	34,11	34,52	34,84	34,98
9	Bengkulu	2,05	2,12	2,25	2,40	2,55
10	Lampung	26,03	26,52	26,63	26,74	26,89
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0,86	0,88	0,91	1,03	1,09
13	Banten	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22
14	Jawa Tengah	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68
15	D.I. Yogyakarta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
16	Jawa Timur	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37
17	Bali	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	NTB	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19	NTT	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
20	Kalimantan Barat	3,65	3,68	3,72	3,74	3,77
21	Kalimantan Tengah	0,15	0,17	0,18	0,19	0,22
22	Kalimantan Selatan	0,26	0,29	0,32	0,35	0,37
23	Kalimantan Timur	5,92	6,01	6,09	6,14	6,21
24	Kalimantan Utara	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
25	Sulawesi Utara	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20
28	Sulawesi Selatan	5,20	5,23	5,27	5,32	5,41
29	Sulawesi Barat	4,66	4,69	4,73	4,80	4,98
30	Sulawesi Tenggara	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	Papua	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	TOTAL	93,00	94,07	95,15	96,24	97,35





Lampiran 26. Sasaran Produksi Pala Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,01	2,05	2,07	2,09	2,10
2	Sumatera Utara	0,88	0,87	0,88	0,89	0,91
3	Sumatera Barat	1,00	1,02	1,03	1,04	1,05
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06
10	Lampung	0,84	0,88	0,92	0,96	1,08
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	0,57	0,62	0,68	0,70	0,72
17	Bali	-	-	-	-	-
18	NTB	-	-	-	-	-
19	NTT	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	3,72	4,47	5,26	6,14	7,10
26	Gorontalo	1,34	1,37	1,40	1,42	1,47
27	Sulawesi Tengah	0,85	0,88	0,92	1,03	1,12
28	Sulawesi Selatan	1,25	1,32	1,36	1,38	1,40
29	Sulawesi Barat	0,58	0,60	0,62	0,64	0,68
30	Sulawesi Tenggara	0,95	1,01	1,06	1,13	1,18
31	Maluku	5,56	5,60	5,68	5,71	5,75
32	Maluku Utara	1,37	1,40	1,45	1,47	1,48
33	Papua	1,12	1,13	1,15	1,17	1,18
34	Papua Barat	3,71	3,82	3,92	4,05	4,11
	TOTAL	27,72	29,03	30,40	31,85	33,36





Lampiran 27. Sasaran Produksi Teh Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	15,42	15,47	15,50	15,54	15,58
3	Sumatera Barat	8,83	8,90	8,93	8,95	9,02
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	6,50	6,52	6,55	6,59	6,60
7	Sumatera Selatan	2,70	2,74	2,78	2,83	2,86
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	1,60	1,66	1,68	1,72	1,77
10	Lampung	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	107,10	107,34	107,61	107,88	108,07
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	11,50	11,63	11,87	12,16	12,46
15	D.I. Yogyakarta	0,74	0,75	0,76	0,77	0,79
16	Jawa Timur	5,06	5,20	5,28	5,30	5,32
17	Bali	-	-	-	-	-
18	NTB	-	-	-	-	-
19	NTT	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	0,18	0,19	0,21	0,22	0,25
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	TOTAL	159,63	160,41	161,18	161,96	162,74





Lampiran 28. Sasaran Produksi Nilam Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,213	0,213	0,215	0,217	0,219
2	Sumatera Utara	0,180	0,180	0,183	0,184	0,185
3	Sumatera Barat	0,299	0,300	0,302	0,305	0,308
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	0,235	0,235	0,236	0,237	0,239
7	Sumatera Selatan	0,030	0,030	0,032	0,033	0,034
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	0,051	0,051	0,052	0,053	0,054
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0,248	0,248	0,249	0,251	0,252
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	0,203	0,203	0,204	0,205	0,206
15	D.I. Yogyakarta	0,012	0,012	0,013	0,014	0,016
16	Jawa Timur	0,239	0,240	0,242	0,244	0,246
17	Ball	0,008	0,008	0,010	0,011	0,013
18	NTB	-	-	-	-	-
19	NTT	0,012	0,012	0,013	0,014	0,015
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	0,006	0,007	0,009	0,011	0,012
23	Kalimantan Timur	0,011	0,011	0,013	0,015	0,017
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	0,009	0,010	0,012	0,014	0,015
27	Sulawesi Tengah	0,302	0,302	0,303	0,304	0,305
28	Sulawesi Selatan	0,401	0,401	0,403	0,405	0,407
29	Sulawesi Barat	0,284	0,284	0,285	0,286	0,287
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	0,007	0,007	0,008	0,009	0,010
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,75	2,76	2,78	2,81	2,84





Lampiran 29. Sasaran Produksi Jambu Mete Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,001	0,001	0,002	0,003	0,005
2	Sumatera Utara	0,002	0,002	0,002	0,004	0,005
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	0,001	0,001	0,002	0,002	0,004
6	Jambi	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
8	Bangka Belitung	0,004	0,004	0,006	0,007	0,008
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	0,015	0,015	0,017	0,019	0,021
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0,036	0,036	0,042	0,047	0,051
13	Banten	0,001	0,001	0,002	0,002	0,004
14	Jawa Tengah	9,25	9,25	9,40	9,69	9,82
15	D.I. Yogyakarta	0,22	0,22	0,48	0,67	0,97
16	Jawa Timur	13,79	13,79	13,99	14,24	14,37
17	Bali	3,58	3,58	3,67	3,84	4,19
18	NTB	14,34	14,34	14,55	14,78	14,98
19	NTT	41,30	41,30	41,58	41,97	42,21
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	0,063	0,063	0,072	0,077	0,079
22	Kalimantan Selatan	0,050	0,050	0,053	0,057	0,059
23	Kalimantan Timur	0,011	0,011	0,013	0,015	0,019
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	0,022	0,022	0,028	0,033	0,036
26	Gorontalo	0,58	0,58	0,69	0,88	1,09
27	Sulawesi Tengah	3,02	3,02	3,20	3,42	3,58
28	Sulawesi Selatan	17,40	17,40	17,68	17,78	17,92
29	Sulawesi Barat	0,23	0,23	0,45	0,59	0,75
30	Sulawesi Tenggara	16,27	16,27	16,48	16,75	16,96
31	Maluku	1,01	1,01	1,28	1,42	1,65
32	Maluku Utara	1,44	1,44	1,58	1,72	1,95
33	Papua	0,59	0,59	0,71	0,84	1,04
34	Papua Barat	0,40	0,40	0,65	0,78	0,89
	TOTAL	123,63	123,65	126,63	129,64	132,66





Lampiran 30. Sasaran Produksi Kapas Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-
7	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14
17	Bali	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29
18	NTB	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37
19	NTT	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	1,03	1,04	1,05	1,06	1,08
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,85	1,93	2,01	2,09	2,18





Lampiran 31. Sasaran Produksi Tembakau Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	7,18	7,22	7,27	7,30	7,37
2	Sumatera Utara	10,58	10,63	10,66	10,69	10,76
3	Sumatera Barat	5,19	5,21	5,23	5,25	5,31
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	4,24	4,25	4,26	4,27	4,32
7	Sumatera Selatan	1,53	1,55	1,57	1,63	1,68
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	-	-	-	-	-
10	Lampung	2,41	2,43	2,45	2,48	2,55
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	18,91	24,94	32,97	39,00	43,24
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	50,46	53,62	55,52	57,83	64,11
15	D.I. Yogyakarta	2,70	2,73	2,76	2,79	2,83
16	Jawa Timur	100,26	107,74	115,31	119,55	125,22
17	Bali	5,17	5,20	5,24	5,27	5,31
18	NTB	60,37	62,54	65,25	74,32	81,21
19	NTT	4,83	4,92	5,01	5,08	5,13
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	1,53	1,55	1,57	1,63	1,65
28	Sulawesi Selatan	4,23	4,27	4,32	4,38	4,45
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
	TOTAL	279,59	298,80	319,39	341,47	365,14





Lampiran 32. Sasaran Produksi Cengkeh Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,32	2,35	2,37	2,40	2,43
2	Sumatera Utara	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
3	Sumatera Barat	1,82	1,84	1,86	1,90	1,96
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	3,32	3,34	3,36	3,38	3,40
6	Jambi	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
7	Sumatera Selatan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	Bangka Belitung	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
9	Bengkulu	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
10	Lampung	0,92	0,93	0,95	0,96	0,97
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	6,62	6,65	6,71	6,78	6,83
13	Banten	4,81	4,83	4,86	4,89	4,92
14	Jawa Tengah	6,50	6,55	6,58	6,70	6,84
15	D.I. Yogyakarta	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42
16	Jawa Timur	11,12	11,18	11,23	11,26	11,31
17	Bali	3,13	3,15	3,18	3,21	3,24
18	NTB	0,16	0,18	0,20	0,21	0,22
19	NTT	2,12	2,15	2,18	2,21	2,24
20	Kalimantan Barat	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28
21	Kalimantan Tengah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
22	Kalimantan Selatan	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
23	Kalimantan Timur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	9,50	9,53	9,57	9,62	9,68
26	Gorontalo	0,77	0,79	0,83	0,86	0,89
27	Sulawesi Tengah	13,88	13,98	14,06	14,39	14,45
28	Sulawesi Selatan	17,52	17,58	17,63	17,68	17,72
29	Sulawesi Barat	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46
30	Sulawesi Tenggara	6,61	6,65	6,69	6,75	6,80
31	Maluku	14,94	15,15	16,19	17,29	18,37
32	Maluku Utara	4,70	5,95	6,37	6,44	6,79
33	Papua	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
34	Papua Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	TOTAL	112,62	114,71	116,83	118,99	121,19





Lampiran 33. Sasaran Produksi Kelapa Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	58,23	60,18	61,91	63,02	64,14
2	Sumatera Utara	90,81	92,34	93,11	96,22	97,22
3	Sumatera Barat	90,65	92,13	93,17	95,95	96,75
4	Riau	441,32	443,72	444,88	446,88	447,01
5	Keulauan Riau	11,89	11,97	12,07	12,18	12,29
6	Jambi	132,22	134,92	135,62	136,81	137,44
7	Sumatera Selatan	65,66	67,15	68,79	70,42	71,07
8	Bangka Belitung	6,62	7,64	8,66	9,68	10,71
9	Bengkulu	8,43	9,49	9,72	10,64	11,72
10	Lampung	114,31	115,55	116,78	118,07	119,22
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	109,90	111,22	112,23	114,55	115,67
13	Banten	53,82	54,99	55,92	56,20	57,80
14	Jawa Tengah	193,10	195,44	196,94	198,27	199,60
15	D.I. Yogyakarta	46,30	47,64	48,02	49,46	50,91
16	Jawa Timur	287,95	289,93	290,76	292,05	293,90
17	Ball	67,36	68,86	69,21	71,05	72,71
18	NTB	64,39	66,79	67,23	69,73	70,26
19	NTT	70,27	71,75	72,89	74,91	75,55
20	Kallimantan Barat	80,84	82,40	83,04	84,77	85,52
21	Kallimantan Tengah	36,94	38,59	39,32	41,15	42,01
22	Kalimantan Selatan	35,15	37,06	38,69	39,01	40,34
23	Kalimantan Timur	7,74	9,14	11,77	13,22	14,84
24	Kallimantan Utara	1,23	2,45	4,52	6,88	7,29
25	Sulawesi Utara	311,21	312,21	315,54	316,21	317,61
26	Gorontalo	75,70	76,15	78,65	79,22	80,82
27	Sulawesi Tengah	211,86	212,26	214,83	215,24	216,49
28	Sulawesi Selatan	89,52	90,08	93,71	94,44	97,19
29	Sulawesi Barat	54,57	55,87	57,21	58,59	60,99
30	Sulawesi Tenggara	52,41	53,84	55,33	56,90	58,48
31	Maluku	124,68	125,81	127,30	128,48	130,18
32	Maluku Utara	268,43	269,88	271,20	272,02	274,99
33	Papua	21,58	22,67	24,77	25,89	29,36
34	Papua Barat	24,06	25,12	27,19	28,26	31,34
	TOTAL	3.309,15	3.355,23	3.400,98	3.446,38	3.491,43





Lampiran 34. Sasaran Produksi Daging Sapi (karkas) Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	8,83	9,57	10,44	11,38	12,41
2	Sumatera Utara	18,61	20,17	22,00	23,99	26,15
3	Sumatera Barat	23,32	25,27	27,57	30,06	32,77
4	Riau	8,32	9,02	9,84	10,73	11,69
5	Jambi	4,43	4,80	5,23	5,71	6,22
6	Sumatera Selatan	14,64	15,86	17,30	18,86	20,56
7	Bengkulu	4,26	4,62	5,04	5,49	5,99
8	Lampung	14,23	15,42	16,82	18,35	20,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,99	3,24	3,54	3,86	4,21
10	Kepulauan Riau	0,56	0,61	0,66	0,72	0,79
11	DKI Jakarta	18,19	19,71	21,51	23,45	25,56
12	Jawa Barat	72,57	78,63	85,78	93,54	101,96
13	Jawa Tengah	61,73	66,88	72,96	79,56	86,73
14	DI. Yogyakarta	8,72	9,45	10,31	11,24	12,25
15	Jawa Timur	101,68	110,16	120,18	131,05	142,85
16	Banten	37,03	40,12	43,77	47,73	52,02
17	Bali	9,05	9,80	10,70	11,66	12,71
18	Nusa Tenggara Barat	12,81	13,88	15,14	16,51	18,00
19	Nusa Tenggara Timur	11,19	12,12	13,23	14,42	15,72
20	Kalimantan Barat	8,15	8,84	9,64	10,51	11,46
21	Kalimantan Tengah	4,32	4,68	5,10	5,57	6,07
22	Kalimantan Selatan	9,86	10,69	11,66	12,71	13,86
23	Kalimantan Timur	8,67	9,39	10,24	11,17	12,17
24	Kalimantan Utara	0,63	0,69	0,75	0,82	0,89
25	Sulawesi Utara	4,61	4,99	5,45	5,94	6,47
26	Sulawesi Tengah	4,65	5,04	5,49	5,99	6,53
27	Sulawesi Selatan	14,66	15,88	17,33	18,89	20,59
28	Sulawesi Tenggara	3,89	4,21	4,59	5,01	5,46
29	Gorontalo	3,65	3,96	4,32	4,71	5,13
30	Sulawesi Barat	2,94	3,18	3,47	3,79	4,13
31	Maluku	2,71	2,94	3,21	3,50	3,81
32	Maluku Utara	0,88	0,96	1,05	1,14	1,24
33	Papua Barat	4,12	4,46	4,87	5,31	5,78
34	Papua	2,76	2,99	3,26	3,56	3,88
	Indonesia	509,68	552,20	602,43	656,91	716,06





Lampiran 35. Sasaran Produksi Daging Sapi (Meat Yield) Tahun
2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	7,06	7,65	8,35	9,11	9,93
2	Sumatera Utara	14,89	16,13	17,60	19,19	20,92
3	Sumatera Barat	18,66	20,21	22,05	24,05	26,21
4	Riau	6,66	7,21	7,87	8,58	9,35
5	Jambi	3,54	3,84	4,19	4,57	4,98
6	Sumatera Selatan	11,71	12,69	13,84	15,09	16,45
7	Bengkulu	3,41	3,69	4,03	4,39	4,79
8	Lampung	11,39	12,34	13,46	14,68	16,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,40	2,60	2,83	3,09	3,37
10	Kepulauan Riau	0,45	0,49	0,53	0,58	0,63
11	DKI Jakarta	14,56	15,77	17,20	18,76	20,45
12	Jawa Barat	58,06	62,90	68,62	74,83	81,57
13	Jawa Tengah	49,38	53,50	58,37	63,65	69,38
14	DI. Yogyakarta	6,98	7,56	8,25	8,99	9,80
15	Jawa Timur	81,34	88,13	96,14	104,84	114,28
16	Banten	29,62	32,09	35,01	38,18	41,62
17	Bali	7,24	7,84	8,56	9,33	10,17
18	Nusa Tenggara Barat	10,25	11,10	12,11	13,21	14,40
19	Nusa Tenggara Timur	8,95	9,70	10,58	11,54	12,58
20	Kalimantan Barat	6,52	7,07	7,71	8,41	9,17
21	Kalimantan Tengah	3,45	3,74	4,08	4,45	4,85
22	Kalimantan Selatan	7,89	8,55	9,33	10,17	11,09
23	Kalimantan Timur	6,93	7,51	8,19	8,94	9,74
24	Kalimantan Utara	0,51	0,55	0,60	0,65	0,71
25	Sulawesi Utara	3,69	3,99	4,36	4,75	5,18
26	Sulawesi Tengah	3,72	4,03	4,39	4,79	5,22
27	Sulawesi Selatan	11,73	12,70	13,86	15,11	16,47
28	Sulawesi Tenggara	3,11	3,37	3,67	4,01	4,37
29	Gorontalo	2,92	3,17	3,45	3,77	4,10
30	Sulawesi Barat	2,35	2,55	2,78	3,03	3,30
31	Maluku	2,17	2,35	2,57	2,80	3,05
32	Maluku Utara	0,71	0,77	0,84	0,91	0,99
33	Papua Barat	3,29	3,57	3,89	4,24	4,63
34	Papua	2,21	2,39	2,61	2,85	3,10
	Indonesia	407,74	441,76	481,95	525,53	572,85





Lampiran 36. Sasaran Produksi Daging Kerbau (Karkas) Tahun
2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON KARKAS)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,52	2,57	2,63	2,69	2,76
2	Sumatera Utara	3,20	3,26	3,34	3,41	3,50
3	Sumatera Barat	2,44	2,49	2,54	2,60	2,67
4	Riau	1,29	1,31	1,34	1,37	1,41
5	Jambi	2,64	2,70	2,76	2,82	2,89
6	Sumatera Selatan	0,77	0,78	0,80	0,82	0,84
7	Bengkulu	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94
8	Lampung	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	Kepulauan Riau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
12	Jawa Barat	3,20	3,27	3,35	3,42	3,51
13	Jawa Tengah	2,12	2,17	2,22	2,27	2,32
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
16	Banten	7,11	7,26	7,42	7,59	7,78
17	Bali	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
18	Nusa Tenggara Barat	3,00	3,06	3,13	3,20	3,28
19	Nusa Tenggara Timur	1,21	1,24	1,27	1,30	1,33
20	Kalimantan Barat	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
21	Kalimantan Tengah	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
22	Kalimantan Selatan	0,78	0,79	0,81	0,83	0,85
23	Kalimantan Timur	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
24	Kalimantan Utara	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
27	Sulawesi Selatan	3,21	3,28	3,35	3,43	3,52
28	Sulawesi Tenggara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
31	Maluku	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	INDONESIA	35,61	36,36	37,18	38,05	38,98





Lampiran 37. Sasaran Produksi Daging Kerbau (Meat Yield) Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,01	2,06	2,10	2,15	2,21
2	Sumatera Utara	2,56	2,61	2,67	2,73	2,80
3	Sumatera Barat	1,95	1,99	2,04	2,08	2,13
4	Riau	1,03	1,05	1,07	1,10	1,13
5	Jambi	2,12	2,16	2,21	2,26	2,32
6	Sumatera Selatan	0,61	0,63	0,64	0,66	0,67
7	Bengkulu	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75
8	Lampung	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	Kepulauan Riau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
12	Jawa Barat	2,56	2,62	2,68	2,74	2,81
13	Jawa Tengah	1,70	1,74	1,77	1,82	1,86
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
16	Banten	5,69	5,81	5,94	6,08	6,22
17	Bali	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	2,40	2,45	2,51	2,56	2,63
19	Nusa Tenggara Timur	0,97	0,99	1,01	1,04	1,06
20	Kalimantan Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
21	Kalimantan Tengah	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
22	Kalimantan Selatan	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68
23	Kalimantan Timur	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
24	Kalimantan Utara	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
27	Sulawesi Selatan	2,57	2,62	2,68	2,75	2,81
28	Sulawesi Tenggara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
31	Maluku	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Indonesia		28,49	29,09	29,74	30,44	31,18





Lampiran 38. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,26	2,28	2,30	2,32	2,33
2	Sumatera Utara	3,52	3,55	3,58	3,61	3,64
3	Sumatera Barat	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68
4	Riau	0,56	0,56	0,57	0,57	0,58
5	Jambi	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76
6	Sumatera Selatan	2,26	2,27	2,29	2,31	2,33
7	Bengkulu	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26
8	Lampung	2,50	2,52	2,54	2,56	2,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
10	Kepulauan Riau	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
11	DKI Jakarta	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32
12	Jawa Barat	7,27	7,33	7,39	7,44	7,50
13	Jawa Tengah	10,37	10,45	10,53	10,62	10,70
14	DI. Yogyakarta	1,51	1,53	1,54	1,55	1,56
15	Jawa Timur	15,74	15,87	15,99	16,11	16,24
16	Banten	3,30	3,32	3,35	3,37	3,40
17	Bali	1,71	1,72	1,73	1,75	1,76
18	Nusa Tenggara Barat	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41
19	Nusa Tenggara Timur	3,69	3,72	3,75	3,77	3,80
20	Kalimantan Barat	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54
21	Kalimantan Tengah	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
22	Kalimantan Selatan	0,67	0,68	0,68	0,69	0,69
23	Kalimantan Timur	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40
24	Kalimantan Utara	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
25	Sulawesi Utara	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41
26	Sulawesi Tengah	2,50	2,52	2,54	2,56	2,58
27	Sulawesi Selatan	1,62	1,63	1,64	1,65	1,67
28	Sulawesi Tenggara	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
29	Gorontalo	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19
30	Sulawesi Barat	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29
31	Maluku	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47
32	Maluku Utara	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
33	Papua Barat	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
34	Papua	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
	Indonesia	66,19	66,71	67,23	67,75	68,28





Lampiran 39. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49
2	Sumatera Utara	2,16	2,24	2,33	2,43	2,52
3	Sumatera Barat	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Riau	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Jambi	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20
6	Sumatera Selatan	0,39	0,40	0,42	0,44	0,46
7	Bengkulu	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
8	Lampung	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
12	Jawa Barat	25,47	26,49	27,55	28,65	29,80
13	Jawa Tengah	6,24	6,49	6,75	7,02	7,30
14	DI. Yogyakarta	2,55	2,65	2,76	2,87	2,98
15	Jawa Timur	6,22	6,47	6,73	7,00	7,28
16	Banten	3,54	3,69	3,83	3,99	4,15
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51
20	Kalimantan Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kalimantan Tengah	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
22	Kalimantan Selatan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
23	Kalimantan Timur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
27	Sulawesi Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sulawesi Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
	Indonesia	48,32	50,26	52,27	54,36	56,53





Lampiran 40. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
2	Sumatera Utara	44,00	46,61	49,38	52,30	55,41
3	Sumatera Barat	0,57	0,60	0,64	0,67	0,71
4	Riau	0,92	0,98	1,03	1,10	1,16
5	Jambi	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31
6	Sumatera Selatan	0,64	0,67	0,71	0,76	0,80
7	Bengkulu	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
8	Lampung	0,65	0,69	0,73	0,78	0,82
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,76	0,80	0,85	0,90	0,95
10	Kepulauan Riau	19,15	20,29	21,49	22,77	24,12
11	DKI Jakarta	9,71	10,29	10,90	11,54	12,23
12	Jawa Barat	1,10	1,16	1,23	1,30	1,38
13	Jawa Tengah	1,88	1,99	2,11	2,23	2,37
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	3,52	3,73	3,95	4,18	4,43
16	Banten	1,14	1,21	1,28	1,36	1,44
17	Bali	138,27	146,47	155,16	164,36	174,11
18	Nusa Tenggara Barat	0,63	0,66	0,70	0,74	0,79
19	Nusa Tenggara Timur	36,15	38,30	40,57	42,97	45,52
20	Kalimantan Barat	29,55	31,31	33,16	35,13	37,21
21	Kalimantan Tengah	2,73	2,89	3,06	3,25	3,44
22	Kalimantan Selatan	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
23	Kalimantan Timur	1,25	1,33	1,41	1,49	1,58
24	Kalimantan Utara	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55
25	Sulawesi Utara	21,48	22,75	24,10	25,53	27,05
26	Sulawesi Tengah	2,67	2,83	3,00	3,18	3,36
27	Sulawesi Selatan	4,42	4,68	4,96	5,25	5,56
28	Sulawesi Tenggara	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74
29	Gorontalo	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12
30	Sulawesi Barat	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48
31	Maluku	3,14	3,33	3,52	3,73	3,96
32	Maluku Utara	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14
33	Papua Barat	1,42	1,50	1,59	1,69	1,79
34	Papua	7,03	7,45	7,89	8,36	8,85
	Indonesia	334,89	354,76	375,80	398,09	421,70



Lampiran 41. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	12,99	13,13	13,28	13,43	13,59
2	Sumatera Utara	18,86	19,07	19,29	19,51	19,73
3	Sumatera Barat	6,17	6,24	6,31	6,38	6,45
4	Riau	3,38	3,42	3,46	3,49	3,53
5	Jambi	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00
6	Sumatera Selatan	7,23	7,31	7,40	7,48	7,57
7	Bengkulu	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51
8	Lampung	13,95	14,11	14,27	14,44	14,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,29	1,31	1,32	1,34	1,35
10	Kepulauan Riau	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
11	DKI Jakarta	34,14	34,53	34,93	35,32	35,73
12	Jawa Barat	27,77	28,09	28,41	28,73	29,06
13	Jawa Tengah	45,08	45,59	46,11	46,64	47,17
14	DI. Yogyakarta	5,62	5,69	5,75	5,82	5,88
15	Jawa Timur	39,46	39,91	40,37	40,83	41,29
16	Banten	9,08	9,18	9,29	9,39	9,50
17	Bali	4,79	4,85	4,90	4,96	5,02
18	Nusa Tenggara Barat	6,05	6,12	6,19	6,26	6,33
19	Nusa Tenggara Timur	11,70	11,83	11,97	12,10	12,24
20	Kalimantan Barat	13,83	13,99	14,15	14,31	14,48
21	Kalimantan Tengah	2,17	2,20	2,22	2,25	2,27
22	Kalimantan Selatan	6,12	6,19	6,26	6,33	6,40
23	Kalimantan Timur	6,35	6,42	6,50	6,57	6,65
24	Kalimantan Utara	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79
25	Sulawesi Utara	2,50	2,53	2,56	2,59	2,62
26	Sulawesi Tengah	8,72	8,82	8,92	9,02	9,13
27	Sulawesi Selatan	6,48	6,55	6,63	6,70	6,78
28	Sulawesi Tenggara	10,37	10,49	10,61	10,73	10,85
29	Gorontalo	1,55	1,57	1,58	1,60	1,62
30	Sulawesi Barat	5,07	5,13	5,19	5,25	5,31
31	Maluku	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44
32	Maluku Utara	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92
33	Papua Barat	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09
34	Papua	2,14	2,17	2,19	2,22	2,24
Indonesia		326,94	330,67	334,44	338,25	342,11



Lampiran 42. Sasaran Produksi Daging Ayam Petelur Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBUT TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,25	0,28	0,30	0,33	0,37
2	Sumatera Utara	14,18	15,60	17,16	18,87	20,76
3	Sumatera Barat	7,96	8,76	9,63	10,60	11,66
4	Riau	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
5	Jambi	0,81	0,89	0,98	1,08	1,19
6	Sumatera Selatan	6,10	6,71	7,38	8,12	8,93
7	Bengkulu	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
8	Lampung	2,55	2,80	3,08	3,39	3,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
10	Kepulauan Riau	0,39	0,43	0,48	0,52	0,58
11	DKI Jakarta	0,69	0,76	0,84	0,92	1,01
12	Jawa Barat	9,62	10,58	11,64	12,80	14,08
13	Jawa Tengah	11,99	13,19	14,51	15,96	17,56
14	DI. Yogyakarta	3,33	3,66	4,03	4,43	4,87
15	Jawa Timur	23,75	26,13	28,74	31,62	34,78
16	Banten	2,75	3,03	3,33	3,66	4,03
17	Bali	3,04	3,34	3,67	4,04	4,45
18	Nusa Tenggara Barat	0,19	0,21	0,23	0,25	0,28
19	Nusa Tenggara Timur	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
20	Kalimantan Barat	3,20	3,52	3,87	4,25	4,68
21	Kalimantan Tengah	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
22	Kalimantan Selatan	1,96	2,15	2,37	2,61	2,87
23	Kalimantan Timur	0,69	0,76	0,84	0,92	1,01
24	Kalimantan Utara	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
25	Sulawesi Utara	1,07	1,18	1,30	1,43	1,57
26	Sulawesi Tengah	0,85	0,93	1,03	1,13	1,24
27	Sulawesi Selatan	2,42	2,66	2,93	3,22	3,54
28	Sulawesi Tenggara	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20
29	Gorontalo	0,30	0,33	0,37	0,40	0,44
30	Sulawesi Barat	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14
31	Maluku	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
32	Maluku Utara	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
33	Papua Barat	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
34	Papua	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17
	Indonesia	98,77	108,65	119,51	131,46	144,61



Lampiran 43. Sasaran Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Tahun
2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	6,82	7,37	7,57	7,92	8,33
2	Sumatera Utara	63,81	68,91	70,86	74,12	77,94
3	Sumatera Barat	28,17	30,42	31,28	32,72	34,41
4	Riau	71,77	77,51	79,70	83,37	87,67
5	Jambi	26,75	28,89	29,70	31,07	32,67
6	Sumatera Selatan	51,35	55,45	57,02	59,64	62,72
7	Bengkulu	3,51	3,79	3,89	4,07	4,28
8	Lampung	70,19	75,81	77,95	81,54	85,74
9	Kepulauan Bangka Belitung	23,94	25,85	26,58	27,80	29,24
10	Kepulauan Riau	12,30	13,28	13,66	14,28	15,02
11	DKI Jakarta	217,89	235,32	241,98	253,11	266,16
12	Jawa Barat	950,33	1.026,36	1.055,39	1.103,93	1.160,87
13	Jawa Tengah	208,65	225,34	231,72	242,37	254,88
14	DI. Yogyakarta	54,95	59,34	61,02	63,83	67,12
15	Jawa Timur	274,70	296,68	305,07	319,10	335,56
16	Banten	183,87	198,58	204,19	213,58	224,60
17	Bali	13,20	14,25	14,66	15,33	16,12
18	Nusa Tenggara Barat	7,68	8,29	8,53	8,92	9,38
19	Nusa Tenggara Timur	1,06	1,15	1,18	1,24	1,30
20	Kalimantan Barat	31,36	33,87	34,83	36,43	38,31
21	Kalimantan Tengah	12,38	13,37	13,74	14,38	15,12
22	Kalimantan Selatan	92,81	100,23	103,07	107,80	113,37
23	Kalimantan Timur	54,85	59,24	60,91	63,71	67,00
24	Kalimantan Utara	5,48	5,92	6,08	6,36	6,69
25	Sulawesi Utara	9,22	9,96	10,24	10,71	11,26
26	Sulawesi Tengah	13,61	14,70	15,11	15,81	16,62
27	Sulawesi Selatan	19,17	20,70	21,29	22,27	23,42
28	Sulawesi Tenggara	7,57	8,17	8,40	8,79	9,24
29	Gorontalo	0,97	1,05	1,08	1,13	1,19
30	Sulawesi Barat	2,83	3,06	3,14	3,29	3,46
31	Maluku	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
32	Maluku Utara	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
33	Papua Barat	0,89	0,96	0,98	1,03	1,08
34	Papua	3,85	4,16	4,28	4,47	4,70
	Indonesia	2.526,01	2.728,09	2.805,26	2.934,26	3.085,63



Lampiran 44. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1,69	1,82	1,95	2,09	2,24
2	Sumatera Utara	2,39	2,56	2,75	2,94	3,15
3	Sumatera Barat	0,79	0,84	0,91	0,97	1,04
4	Riau	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31
5	Jambi	0,18	0,19	0,21	0,22	0,24
6	Sumatera Selatan	1,48	1,59	1,70	1,82	1,95
7	Bengkulu	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
8	Lampung	0,34	0,37	0,39	0,42	0,45
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
10	Kepulauan Riau	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11
11	DKI Jakarta	1,63	1,75	1,88	2,01	2,16
12	Jawa Barat	6,39	6,85	7,34	7,87	8,43
13	Jawa Tengah	3,90	4,18	4,48	4,80	5,14
14	DI. Yogyakarta	0,52	0,56	0,60	0,64	0,69
15	Jawa Timur	5,57	5,97	6,40	6,86	7,35
16	Banten	4,82	5,16	5,53	5,93	6,35
17	Bali	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52
18	Nusa Tenggara Barat	0,78	0,84	0,90	0,96	1,03
19	Nusa Tenggara Timur	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26
20	Kalimantan Barat	0,60	0,65	0,69	0,74	0,79
21	Kalimantan Tengah	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22
22	Kalimantan Selatan	2,33	2,50	2,68	2,87	3,08
23	Kalimantan Timur	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
24	Kalimantan Utara	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
25	Sulawesi Utara	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
26	Sulawesi Tengah	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52
27	Sulawesi Selatan	0,85	0,91	0,97	1,04	1,12
28	Sulawesi Tenggara	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39
29	Gorontalo	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
30	Sulawesi Barat	0,31	0,33	0,36	0,38	0,41
31	Maluku	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12
32	Maluku Utara	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
33	Papua Barat	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
34	Papua	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
	Indonesia	36,89	39,53	42,37	45,40	48,65





Lampiran 45. Sasaran Produksi Telur Ayam Buras Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2,66	2,71	2,76	2,80	2,85
2	Sumatera Utara	13,14	13,37	13,60	13,83	14,07
3	Sumatera Barat	3,25	3,31	3,36	3,42	3,48
4	Riau	1,59	1,62	1,65	1,68	1,70
5	Jambi	5,62	5,71	5,81	5,91	6,01
6	Sumatera Selatan	3,38	3,44	3,50	3,56	3,62
7	Bengkulu	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20
8	Lampung	9,28	9,44	9,60	9,77	9,94
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,19	2,23	2,27	2,31	2,34
10	Kepulauan Riau	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	21,70	22,08	22,46	22,84	23,23
13	Jawa Tengah	37,72	38,37	39,03	39,70	40,38
14	DI. Yogyakarta	2,68	2,72	2,77	2,82	2,86
15	Jawa Timur	19,19	19,52	19,86	20,20	20,54
16	Banten	13,38	13,61	13,84	14,08	14,32
17	Bali	3,08	3,13	3,18	3,24	3,29
18	Nusa Tenggara Barat	3,63	3,69	3,75	3,82	3,88
19	Nusa Tenggara Timur	4,70	4,78	4,87	4,95	5,04
20	Kalimantan Barat	3,66	3,72	3,79	3,85	3,92
21	Kalimantan Tengah	2,79	2,83	2,88	2,93	2,98
22	Kalimantan Selatan	8,48	8,62	8,77	8,92	9,07
23	Kalimantan Timur	3,72	3,79	3,85	3,92	3,98
24	Kalimantan Utara	1,00	1,02	1,04	1,06	1,07
25	Sulawesi Utara	1,94	1,98	2,01	2,05	2,08
26	Sulawesi Tengah	3,31	3,37	3,43	3,49	3,55
27	Sulawesi Selatan	12,38	12,59	12,81	13,03	13,25
28	Sulawesi Tenggara	6,31	6,42	6,53	6,64	6,76
29	Gorontalo	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13
30	Sulawesi Barat	3,08	3,13	3,19	3,24	3,30
31	Maluku	2,58	2,62	2,67	2,71	2,76
32	Maluku Utara	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41
33	Papua Barat	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53
34	Papua	1,30	1,32	1,35	1,37	1,39
	Indonesia	201,36	204,82	208,34	211,92	215,56





Lampiran 46. Sasaran Produksi Telur Ayam Ras Petelur Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	4,75	5,19	5,47	5,61	5,79
2	Sumatera Utara	304,05	332,45	350,56	359,09	370,43
3	Sumatera Barat	141,94	155,20	163,65	167,63	172,93
4	Riau	4,79	5,24	5,52	5,66	5,84
5	Jambi	15,84	17,32	18,27	18,71	19,30
6	Sumatera Selatan	127,72	139,65	147,25	150,84	155,60
7	Bengkulu	1,14	1,25	1,32	1,35	1,39
8	Lampung	111,04	121,41	128,03	131,14	135,28
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,68	2,93	3,08	3,16	3,26
10	Kepulauan Riau	6,81	7,45	7,86	8,05	8,30
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	284,34	310,89	327,83	335,80	346,41
13	Jawa Tengah	441,58	482,82	509,13	521,51	537,99
14	DI. Yogyakarta	53,29	58,26	61,44	62,93	64,92
15	Jawa Timur	634,28	693,51	731,29	749,08	772,75
16	Banten	101,02	110,46	116,47	119,31	123,08
17	Bali	79,07	86,45	91,16	93,38	96,33
18	Nusa Tenggara Barat	3,35	3,66	3,86	3,96	4,08
19	Nusa Tenggara Timur	2,85	3,11	3,28	3,36	3,47
20	Kalimantan Barat	42,95	46,96	49,52	50,72	52,32
21	Kalimantan Tengah	0,62	0,67	0,71	0,73	0,75
22	Kalimantan Selatan	73,35	80,20	84,57	86,63	89,37
23	Kalimantan Timur	19,92	21,78	22,97	23,53	24,27
24	Kalimantan Utara	0,52	0,57	0,60	0,62	0,64
25	Sulawesi Utara	21,12	23,09	24,35	24,94	25,73
26	Sulawesi Tengah	14,46	15,81	16,67	17,07	17,61
27	Sulawesi Selatan	138,33	151,25	159,49	163,37	168,53
28	Sulawesi Tenggara	2,41	2,63	2,77	2,84	2,93
29	Gorontalo	5,27	5,76	6,07	6,22	6,41
30	Sulawesi Barat	1,67	1,83	1,93	1,98	2,04
31	Maluku	0,18	0,19	0,21	0,21	0,22
32	Maluku Utara	0,70	0,77	0,81	0,83	0,86
33	Papua Barat	1,69	1,85	1,95	2,00	2,06
34	Papua	2,01	2,20	2,32	2,38	2,45
	Indonesia	2.645,74	2.892,81	3.050,42	3.124,61	3.223,32





Lampiran 47. Sasaran Produksi Telur Itik Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	9,74	10,11	10,50	10,90	11,32
2	Sumatera Utara	12,47	12,95	13,45	13,96	14,50
3	Sumatera Barat	6,91	7,18	7,45	7,74	8,04
4	Riau	1,90	1,97	2,05	2,13	2,21
5	Jambi	5,66	5,88	6,10	6,34	6,58
6	Sumatera Selatan	5,29	5,49	5,70	5,92	6,15
7	Bengkulu	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56
8	Lampung	3,20	3,33	3,46	3,59	3,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32
10	Kepulauan Riau	0,84	0,87	0,90	0,94	0,97
11	DKI Jakarta	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
12	Jawa Barat	58,59	60,84	63,18	65,61	68,13
13	Jawa Tengah	39,28	40,79	42,36	43,98	45,67
14	DI. Yogyakarta	3,63	3,77	3,91	4,07	4,22
15	Jawa Timur	28,67	29,77	30,92	32,11	33,34
16	Banten	16,67	17,31	17,98	18,67	19,38
17	Ball	4,20	4,36	4,53	4,71	4,89
18	Nusa Tenggara Barat	6,44	6,69	6,95	7,21	7,49
19	Nusa Tenggara Timur	1,54	1,59	1,66	1,72	1,79
20	Kalimantan Barat	3,51	3,65	3,79	3,93	4,08
21	Kalimantan Tengah	1,66	1,72	1,79	1,86	1,93
22	Kalimantan Selatan	32,46	33,71	35,01	36,35	37,75
23	Kalimantan Timur	0,91	0,94	0,98	1,01	1,05
24	Kalimantan Utara	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47
25	Sulawesi Utara	1,06	1,10	1,15	1,19	1,24
26	Sulawesi Tengah	3,75	3,90	4,05	4,20	4,36
27	Sulawesi Selatan	25,87	26,86	27,90	28,97	30,08
28	Sulawesi Tenggara	2,81	2,91	3,02	3,14	3,26
29	Gorontalo	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39
30	Sulawesi Barat	2,97	3,09	3,21	3,33	3,46
31	Maluku	2,12	2,20	2,29	2,37	2,46
32	Maluku Utara	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43
33	Papua Barat	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22
34	Papua	0,39	0,41	0,42	0,44	0,46
	Indonesia	284,79	295,73	307,10	318,90	331,16





Lampiran 48. Sasaran Produksi Susu Tahun 2015-2019

No	Provinsi	PRODUKSI (RIBU TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
2	Sumatera Utara	1,39	1,48	1,58	1,71	1,85
3	Sumatera Barat	1,71	1,82	1,95	2,10	2,28
4	Riau	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20
5	Jambi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Sumatera Selatan	0,33	0,35	0,38	0,40	0,44
7	Bengkulu	0,27	0,29	0,31	0,33	0,36
8	Lampung	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,61	0,65	0,69	0,75	0,81
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	5,35	5,69	6,09	6,56	7,12
12	Jawa Barat	259,81	276,31	295,73	318,57	345,42
13	Jawa Tengah	99,21	105,51	112,92	121,64	131,89
14	DI. Yogyakarta	4,99	5,31	5,68	6,12	6,64
15	Jawa Timur	423,36	450,25	481,90	519,11	562,86
16	Banten	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
17	Bali	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
18	Nusa Tenggara Barat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
19	Nusa Tenggara Timur	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
20	Kalimantan Barat	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
23	Kalimantan Timur	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	1,70	1,81	1,93	2,08	2,26
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
30	Sulawesi Barat	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
	Indonesia	799,97	850,77	910,57	980,88	1.063,56



Lampiran 49. Sasaran Volume Ekspor-Impor Komoditas Pertanian
Utama Tahun 2015-2019

No	Ekspor Utama	VOLUME (RIBU TON)					Growth/ year
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	mangga	1.608	2.171	2.822	3.528	4.233	32,5
2	nenas	269.241	363.476	472.519	590.648	708.778	32,5
3	manggis	14.115	19.055	24.771	30.964	37.156	32,5
4	salak	1.243	1.553	1.864	2.144	2.358	22,5
5	Kelapa sawit	30.689.150	33.451.174	36.294.523	39.198.085	42.137.942	8,8
6	karet	2.872.700	3.131.243	3.397.399	3.669.191	3.944.380	8,8
7	kopi	385.597	386.369	387.141	387.916	388.691	0,2
8	kakao	334.346	335.015	335.685	336.356	337.029	0,2
9	Kelapa	2.053.924	2.423.630	2.811.411	3.205.008	3.589.609	17,0
10	lada	38.206	42.027	46.229	50.852	55.937	10,0
11	pala	16.183	17.801	19.581	21.539	23.693	10,0
12	cengkeh	10.507	12.083	13.895	15.980	18.377	15,0
13	Beras	201.000	502.500	1.005.000	1.306.500	1.698.450	5.070,0
		36.887.820	40.688.095	44.812.841	48.818.711	52.946.634	10,00%
No	Impor Produk Substitusi	VOLUME (RIBU TON)					Growth/ year
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	padi	489.184	342.429	273.943	246.549	246.549	-20,0%
2	jagung	1.976.309	1.383.417	1.106.733	996.060	996.060	-20,0%
3	kedelai	5.937.634	6.115.764	6.299.236	6.488.214	6.682.860	3,0%
4	Gula	136.853	116.325	98.876	84.045	71.438	-15,0%
5	daging sapi	73.016	69.365	65.897	62.602	59.472	-5,0%
6	cabe	27.470	28.843	30.285	31.799	33.389	5,0%
7	bawang merah	58.358	45.467	35.424	27.599	21.503	-22,1%
8	bawang putih	555.853	620.143	691.868	771.890	861.166	11,6%
9	kentang	80.099	69.013	59.461	51.232	44.141	-13,8%
10	jeruk	134.633	114.438	97.272	82.681	70.279	-15,0%
11	durian	6.746	6.072	5.465	4.918	4.426	-10,0%
12	apel	150.886	161.525	172.914	185.106	198.158	7,1%
13	anggur	72.248	95.202	125.449	165.306	217.825	31,8%
		9.699.290	9.168.002	9.062.824	9.198.000	9.507.266	-2,98%





Lampiran 50. Sasaran Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan
Sawah Tahun 2015-2019

No	PROVINSI	LUAS (HA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	-	10.500	11.000	11.000	11.000
2	Sumatera Utara	-	1.600	3.000	3.000	3.000
3	Sumatera Barat	-	1.500	3.000	3.000	3.000
4	Riau	-	3.800	4.000	4.000	4.000
5	Kepulauan Riau	-	600	600	600	600
6	Jambi	-	10.000	15.000	15.000	15.000
7	Sumatera Selatan	-	9.300	9.300	9.300	9.300
8	Bangka Belitung	-	13.000	20.000	20.000	20.000
9	Bengkulu	-	900	900	900	900
10	Lampung	-	4.500	15.000	15.000	15.000
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	800	1.000	1.000	1.000
13	Banten	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	13.000	20.000	20.000	20.000
19	Nusa Tenggara Timur	-	9.400	10.000	10.000	10.000
20	Kalimantan Barat	-	21.500	25.000	25.000	25.000
21	Kalimantan Tengah	-	20.350	25.000	25.000	25.000
22	Kalimantan Selatan	-	8.000	10.000	10.000	10.000
23	Kalimantan Timur	-	5.500	5.500	5.500	5.500
24	Kalimantan Utara	-	3.500	3.600	3.600	3.500
25	Sulawesi Utara	-	1.300	3.000	3.000	3.000
26	Gorontalo	-	1.850	3.000	3.000	3.000
27	Sulawesi Tengah	-	15.000	20.000	20.000	20.000
28	Sulawesi Selatan	-	16.500	20.000	20.000	20.000
29	Sulawesi Barat	-	3.100	6.000	6.000	6.000
30	Sulawesi Tenggara	-	12.500	18.000	18.000	18.000
31	Maluku	-	1.500	3.000	3.000	3.000
32	Maluku Utara	-	1700	3000	3000	3000
33	Papua	-	6200	6200	6200	6200
34	Papua Barat	-	2600	2600	2600	2600
TOTAL		-	200.000	266.700	266.700	266.600





Lampiran 51. Sasaran Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan
Hortikultura Tahun 2015-2019

No	PROVINSI	LUAS (HA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	-	4.350	4.350	4.350	4.350
2	Sumatera Utara	-	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Sumatera Barat	-	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Riau	-	900	900	900	900
5	Kepulauan Riau	-	300	300	300	300
6	Jambi	-	450	450	450	450
7	Sumatera Selatan	-	900	900	900	900
8	Bangka Belitung	-	1.800	1.800	1.800	1.800
9	Bengkulu	-	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Lampung	-	2.250	2.250	2.250	2.250
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	7.650	7.650	7.650	7.650
13	Banten	-	750	750	750	750
14	Jawa Tengah	-	1.125	1.125	1.125	1.125
15	D.I. Yogyakarta	-	300	300	300	300
16	Jawa Timur	-	5.850	5.850	5.850	5.850
17	Bali	-	600	600	600	600
18	Nusa Tenggara Barat	-	900	900	900	900
19	Nusa Tenggara Timur	-	2.850	2.850	2.850	2.850
20	Kalimantan Barat	-	2.250	2.250	2.250	2.250
21	Kalimantan Tengah	-	1.200	1.200	1.200	1.200
22	Kalimantan Selatan	-	1.200	1.200	1.200	1.200
23	Kalimantan Timur	-	450	450	450	450
24	Kalimantan Utara	-	900	900	900	900
25	Sulawesi Utara	-	750	750	750	750
26	Gorontalo	-	1.125	1.125	1.125	1.125
27	Sulawesi Tengah	-	1.950	1.950	1.950	1.950
28	Sulawesi Selatan	-	9.600	9.600	9.600	9.600
29	Sulawesi Barat	-	750	750	750	750
30	Sulawesi Tenggara	-	11.775	11.775	11.775	11.775
31	Maluku	-	900	900	900	900
32	Maluku Utara	-	900	900	900	900
33	Papua	-	1.875	1.875	1.875	1.875
34	Papua Barat	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	TOTAL	-	75.000	75.000	75.000	75.000





Lampiran 52. Sasaran Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan
Perkebunan Tahun 2015-2019

No	PROVINSI	LUAS (HA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	-	12.550	12.550	12.550	12.550
2	Sumatera Utara	-	2.450	2.450	2.450	2.450
3	Sumatera Barat	-	2.520	2.520	2.520	2.520
4	Riau	-	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Kepulauan Riau	-	350	350	350	350
6	Jambi	-	2.940	2.940	2.940	2.940
7	Sumatera Selatan	-	2.750	2.750	2.750	2.750
8	Bangka Belitung	-	2.520	2.520	2.520	2.520
9	Bengkulu	-	3.360	3.360	3.360	3.360
10	Lampung	-	8.400	8.400	8.400	8.400
11	DKI Jakarta	-	0	0	0	0
12	Jawa Barat	-	420	420	420	420
13	Banten	-	1.260	1.260	1.260	1.260
14	Jawa Tengah	-	840	840	840	840
15	D.I. Yogyakarta	-	840	840	840	840
16	Jawa Timur	-	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Bali	-	1.050	1.050	1.050	1.050
18	Nusa Tenggara Barat	-	3.360	3.360	3.360	3.360
19	Nusa Tenggara Timur	-	9.100	9.100	9.100	9.100
20	Kalimantan Barat	-	5.900	5.900	5.900	5.900
21	Kalimantan Tengah	-	1.750	1.750	1.750	1.750
22	Kalimantan Selatan	-	1.750	1.750	1.750	1.750
23	Kalimantan Timur	-	350	350	350	350
24	Kalimantan Utara	-	1.050	1.050	1.050	1.050
25	Sulawesi Utara	-	3.100	3.100	3.100	3.100
26	Gorontalo	-	2.100	2.100	2.100	2.100
27	Sulawesi Tengah	-	6.600	6.600	6.600	6.600
28	Sulawesi Selatan	-	18.340	18.340	18.340	18.340
29	Sulawesi Barat	-	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Sulawesi Tenggara	-	21.650	21.650	21.650	21.650
31	Maluku	-	2.380	2.380	2.380	2.380
32	Maluku Utara	-	2.520	2.520	2.520	2.520
33	Papua	-	6.300	6.300	6.300	6.300
34	Papua Barat	-	7.300	7.300	7.300	7.300
TOTAL		-	150.000	150.000	150.000	150.000





Lampiran 53. Sasaran Perluasan Areal Pertanian untuk Lahan
Hijauan Pakan Ternak dan Padang Pengembalaan
Tahun 2015-2019

No	PROVINSI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	-	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Sumatera Utara	-	200	200	200	200
3	Sumatera Barat	-	600	600	600	600
4	Riau	-	300	300	300	300
5	Kepulauan Riau	-	200	200	200	200
6	Jambi	-	200	200	200	200
7	Sumatera Selatan	-	200	200	200	200
8	Bangka Belitung	-	200	200	200	200
9	Bengkulu	-	100	100	100	100
10	Lampung	-	200	200	200	200
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Banten	-	300	300	300	300
14	Jawa Tengah	-	800	800	800	800
15	D.I. Yogyakarta	-	200	200	200	200
16	Jawa Timur	-	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Bali	-	300	300	300	300
18	Nusa Tenggara Barat	-	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Nusa Tenggara Timur	-	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Kalimantan Barat	-	600	600	600	600
21	Kalimantan Tengah	-	200	200	200	200
22	Kalimantan Selatan	-	300	300	300	300
23	Kalimantan Timur	-	200	200	200	200
24	Kalimantan Utara	-	200	200	200	200
25	Sulawesi Utara	-	500	500	500	500
26	Gorontalo	-	600	600	600	600
27	Sulawesi Tengah	-	900	900	900	900
28	Sulawesi Selatan	-	3.150	3.150	3.150	3.150
29	Sulawesi Barat	-	500	500	500	500
30	Sulawesi Tenggara	-	1.100	1.100	1.100	1.100
31	Maluku	-	900	900	900	900
32	Maluku Utara	-	500	500	500	500
33	Papua	-	1.300	1.300	1.300	1.300
34	Papua Barat	-	1.650	1.650	1.650	1.650
TOTAL		-	25.000	25.000	25.000	25.000





Lampiran 54. Sasaran Tambahan Luas Areal Pertanian Yang Terlayani Jaringan Irigasi Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	LUAS (HA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	ACEH	142.800	12.000	12.000	12.000	12.000
2	SUMATERA UTARA	157.400	25.000	25.000	25.000	25.000
3	SUMATERA BARAT	73.150	20.000	20.000	20.000	20.000
4	RIAU	32.150	16.000	16.000	16.000	16.000
5	JAMBI	62.150	5.000	5.000	5.000	5.000
6	SUMATERA SELATAN	255.600	24.000	24.000	24.000	24.000
7	BENGGULU	57.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	LAMPUNG	159.650	11.000	11.000	11.000	11.000
9	BANGKA BELITUNG	7.750	4.000	4.000	4.000	4.000
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	207.300	66.000	66.000	66.000	66.000
13	JAWA TENGAH	172.100	64.000	64.000	64.000	64.000
14	DI YOGYAKARTA	16.000	3.600	3.600	3.600	3.600
15	JAWA TIMUR	163.200	86.000	86.000	86.000	86.000
16	BANTEN	35.700	8.000	8.000	8.000	8.000
17	BALI	63.600	5.000	5.000	5.000	5.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	106.400	13.000	13.000	13.000	13.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	55.800	6.400	6.400	6.400	6.400
20	KALIMANTAN BARAT	125.900	19.000	19.000	19.000	19.000
21	KALIMANTAN TENGAH	32.600	47.000	47.000	47.000	47.000
22	KALIMANTAN SELATAN	52.600	27.000	27.000	27.000	27.000
23	KALIMANTAN TIMUR	18.350	4.000	4.000	4.000	4.000
24	KALIMANTAN UTARA	7.950	1.000	1.000	1.000	1.000
25	SULAWESI UTARA	53.600	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGAH	64.500	10.000	10.000	10.000	10.000
27	SULAWESI SELATAN	334.450	6.000	6.000	6.000	6.000
28	SULAWESI TENGGARA	64.200	5.000	5.000	5.000	5.000
29	GORONTALO	20.750	1.000	1.000	1.000	1.000
30	SULAWESI BARAT	19.300	2.000	2.000	2.000	2.000
31	MALUKU	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000
32	MALUKU UTARA	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	PAPUA	15.150	4.000	4.000	4.000	4.000
34	PAPUA BARAT	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL		2.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000





Lampiran 55. Sasaran Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian
Dan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	OPTIMASI LAHAN (HA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	57.260	15.000	19.000	25.000	25.000
2	Sumatera Utara	65.100	12.000	15.000	25.000	27.500
3	Sumatera Barat	37.980	12.000	15.000	20.000	25.000
4	Riau	16.890	5.000	6.500	8.500	10.000
5	Kepulauan Riau		-	-	-	-
6	Jambi	30.910	8.000	10.000	12.500	14.000
7	Sumatera Selatan	56.670	14.000	17.500	20.000	23.000
8	Bangka Belitung	4.000	1.000	1.500	3.000	4.000
9	Bengkulu	18.950	5.000	6.500	8.500	10.000
10	Lampung	52.180	14.000	17.500	22.000	25.000
11	DKI Jakarta		-	-	-	-
12	Jawa Barat	66.920	18.000	22.500	25.000	27.000
13	Banten	16.000	5.000	6.500	9.000	10.000
14	Jawa Tengah	73.410	18.000	22.500	25.000	27.000
15	D.I. Yogyakarta	2.150	1.000	1.500	3.000	4.000
16	Jawa Timur	58.740	20.000	25.000	30.000	30.000
17	Bali	20.900	5.000	6.500	8.500	8.500
18	Nusa Tenggara Barat	57.500	15.000	19.000	22.000	22.000
19	Nusa Tenggara Timur	26.530	8.000	10.000	12.000	12.000
20	Kalimantan Barat	58.550	14.000	17.500	20.000	20.000
21	Kalimantan Tengah	16.720	4.000	5.000	6.000	6.000
22	Kalimantan Selatan	37.940	10.000	12.500	13.000	13.000
23	Kalimantan Timur	14.550	4.000	5.000	6.000	6.000
24	Kalimantan Utara	6.400	3.000	4.000	5.000	5.000
25	Sulawesi Utara	25.500	6.000	10.000	11.000	11.000
26	Gorontalo	12.600	6.000	8.000	9.000	9.000
27	Sulawesi Tengah	32.300	8.000	10.000	12.000	12.000
28	Sulawesi Selatan	105.980	26.000	32.500	35.000	35.000
29	Sulawesi Barat	17.600	4.000	5.000	6.000	6.000
30	Sulawesi Tenggara	13.200	4.000	5.000	6.000	6.000
31	Maluku	7.700	3.000	4.000	5.000	5.000
32	Maluku Utara	7.100	3.000	4.000	5.000	5.000
33	Papua	9.670	3.000	4.000	5.000	5.000
34	Papua Barat	2.100	1.000	1.500	2.000	2.000
TOTAL		1.030.000	275.000	350.000	425.000	450.000





Lampiran 56. Sasaran Tambahan Areal SRI (*System of Rice Intensification*) Tahun 2015-2019

No	PROPINSI	LUAS (HA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	11.360	15.000	22.000	22.500	23.000
2	Sumatera Utara	7.260	9.000	12.000	12.500	15.000
3	Sumatera Barat	7.020	8.000	13.000	13.500	15.000
4	Riau	2.600	3.000	7.000	8.000	10.000
5	Kepulauan Riau		500	2.000	3.000	4.000
6	Jambi	3.000	3.500	5.000	6.000	7.000
7	Sumatera Selatan	7.120	7.500	10.000	10.000	11.000
8	Bangka Belitung			2.000	2.000	3.000
9	Bengkulu	1.900	2.000	4.000	4.000	5.000
10	Lampung	7.400	15.000	30.000	30.000	31.000
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	31.760	32.000	35.000	35.000	36.000
13	Banten	2.440	4.000	8.000	8.500	10.000
14	Jawa Tengah	30.500	35.000	40.000	41.000	42.000
15	D.I. Yogyakarta	3.020	4.000	6.000	7.000	8.000
16	Jawa Timur	28.100	30.000	40.000	41.000	42.000
17	Bali	1.600	4.000	7.000	8.000	9.000
18	Nusa Tenggara Barat	9.580	15.000	25.000	26.000	27.000
19	Nusa Tenggara Timur	2.300	2.500	4.000	5.000	6.000
20	Kalimantan Barat	1.720	3.000	5.000	6.000	7.000
21	Kalimantan Tengah	-	1.000	2.000	3.000	4.000
22	Kalimantan Selatan	1.200	4.000	6.000	7.000	8.000
23	Kalimantan Timur	-	2.000	3.500	4.000	5.000
24	Kalimantan Utara	-	2.000	4.000	4.000	5.000
25	Sulawesi Utara	2.500	4.000	6.000	6.000	7.000
26	Gorontalo	-	1.000	1.500	1.500	3.000
27	Sulawesi Tengah	2.800	3.000	4.500	4.500	6.000
28	Sulawesi Selatan	31.020	32.000	33.000	33.000	34.000
29	Sulawesi Barat	1.600	3.000	4.000	4.000	5.000
30	Sulawesi Tenggara	1.600	2.500	4.000	4.000	5.000
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	600	1.500	2.500	3.000	4.000
33	Papua		1.000	2.000	2.000	3.000
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
TOTAL		200.000	250.000	350.000	365.000	400.000





Lampiran 57. Sasaran Desa Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun
2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	40	40	40	40	40
2	Sumatera Utara	46	46	46	46	46
3	Sumatera Barat	60	60	60	60	60
4	Riau	25	25	25	25	25
5	Kepulauan Riau					
6	Jambi	25	25	25	25	25
7	Sumatera Selatan	50	50	50	50	50
8	Bangka Belitung	10	10	10	10	10
9	Bengkulu	25	25	25	25	25
10	Lampung	40	40	40	40	40
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat	55	55	55	55	55
13	Banten	17	17	17	17	17
14	Jawa Tengah	55	55	55	55	55
15	D.I. Yogyakarta	15	15	15	15	15
16	Jawa Timur	55	55	55	55	55
17	Bali	20	20	20	20	20
18	Nusa Tenggara Barat	35	35	35	35	35
19	Nusa Tenggara Timur	35	35	35	35	35
20	Kalimantan Barat	45	45	45	45	45
21	Kalimantan Tengah	30	30	30	30	30
22	Kalimantan Selatan	40	40	40	40	40
23	Kalimantan Timur	27	27	27	27	27
24	Kalimantan Utara	10	10	10	10	10
25	Sulawesi Utara	28	28	28	28	28
26	Gorontalo	20	20	20	20	20
27	Sulawesi Tengah	30	30	30	30	30
28	Sulawesi Selatan	50	50	50	50	50
29	Sulawesi Barat	22	22	22	22	22
30	Sulawesi Tenggara	25	25	25	25	25
31	Maluku	16	16	16	16	16
32	Maluku Utara	15	15	15	15	15
33	Papua	18	18	18	18	18
34	Papua Barat	16	16	16	16	16
INDONESIA		1000	1000	1000	1000	1000





Lampiran 58. Sasaran Desa Mandiri Pembibitan Ternak Sapi dan Kerbau Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH Lokasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh			4	6	
2	Sumatera Utara		6	6	8	
3	Sumatera Barat		6	6	8	
4	Riau		6	6	6	
5	Kepulauan Riau					
6	Jambi		3	3	3	
7	Sumatera Selatan		2	2	2	
8	Bangka Belitung			1	1	
9	Bengkulu		2	2	2	
10	Lampung		2	2	2	
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat		8	8	8	
13	Banten		8	8	8	
14	Jawa Tengah		14	14	14	1
15	D.I. Yogyakarta		3	3	3	
16	Jawa Timur		15	15	15	1
17	Bali		3	3	3	
18	Nusa Tenggara Barat		9	9	9	
19	Nusa Tenggara Timur			3	3	
20	Kalimantan Barat		2	2	2	
21	Kalimantan Tengah			1	1	
22	Kalimantan Selatan		6	6	6	
23	Kalimantan Timur		4	4	4	
24	Kalimantan Utara		2	2	2	
25	Sulawesi Utara		1	1	1	
26	Gorontalo					
27	Sulawesi Tengah		3	3	3	
28	Sulawesi Selatan		12	6	6	
29	Sulawesi Barat		2	2	2	
30	Sulawesi Tenggara		1	1	1	
31	Maluku		1	1	1	
32	Maluku Utara			1	1	
33	Papua		1	1	1	
34	Papua Barat				1	
INDONESIA			122	126	133	13





Lampiran 59. Sasaran Desa Organik Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh		50	50	50	50
2	Sumatera Utara		50	50	50	50
3	Sumatera Barat		50	50	50	50
4	Riau		20	20	20	20
5	Kepulauan Riau		10	10	10	10
6	Jambi		20	20	20	20
7	Sumatera Selatan		50	50	50	50
8	Bangka Belitung		20	20	20	20
9	Bengkulu		20	20	20	20
10	Lampung		50	50	50	50
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat		50	50	50	50
13	Banten		50	50	50	50
14	Jawa Tengah		50	50	50	50
15	D.I. Yogyakarta		50	50	50	50
16	Jawa Timur		50	50	50	50
17	Bali		50	50	50	50
18	Nusa Tenggara Barat		50	50	50	50
19	Nusa Tenggara Timur		20	20	20	20
20	Kalimantan Barat		50	50	50	50
21	Kalimantan Tengah		50	50	50	50
22	Kalimantan Selatan		50	50	50	50
23	Kalimantan Timur		20	20	20	20
24	Kalimantan Utara		20	20	20	20
25	Sulawesi Utara		20	20	20	20
26	Gorontalo		20	20	20	20
27	Sulawesi Tengah		50	50	50	50
28	Sulawesi Selatan		50	50	50	50
29	Sulawesi Barat		20	20	20	20
30	Sulawesi Tenggara		20	20	20	20
31	Maluku		20	20	20	20
32	Maluku Utara		20	20	20	20
33	Papua		20	20	20	20
34	Papua Barat		20	20	20	20
INDONESIA		0	1160	1160	1160	1160





Lampiran 60. Sasaran Desa Organik Ditjen Hortikultura Tahun
2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0	1	1	1	2
2	Sumatera Utara	0	1	1	2	2
3	Sumatera Barat	0	2	3	4	4
4	Riau	0	1	1	1	2
5	Kepulauan Riau	0	1	1	1	1
6	Jambi	0	1	1	2	2
7	Sumatera Selatan	0	1	1	1	2
8	Bangka Belitung	0	1	1	1	2
9	Bengkulu	0	1	1	2	2
10	Lampung	0	1	1	1	2
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	4	4	5	5
13	Banten	0	1	1	2	2
14	Jawa Tengah	0	4	4	5	5
15	D.I. Yogyakarta	0	4	4	4	4
16	Jawa Timur	0	3	3	4	4
17	Bali	0	2	3	3	3
18	Nusa Tenggara Barat	0	3	3	4	4
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	1	2	2
20	Kalimantan Barat	0	1	1	2	2
21	Kalimantan Tengah	0	1	1	1	1
22	Kalimantan Selatan	0	1	1	2	2
23	Kalimantan Timur	0	1	1	2	2
24	Kalimantan Utara	0	1	1	2	2
25	Sulawesi Utara	0	1	1	2	2
26	Gorontalo	0	1	1	1	1
27	Sulawesi Tengah	0	2	2	2	2
28	Sulawesi Selatan	0	3	4	4	4
29	Sulawesi Barat	0	1	1	1	1
30	Sulawesi Tenggara	0	2	2	2	2
31	Maluku	0	0	1	1	1
32	Maluku Utara	0	1	1	1	1
33	Papua	0	0	1	1	1
34	Papua Barat	0	1	1	1	1
INDONESIA			50	55	70	75





Lampiran 61. Sasaran Desa Organik Ditjen PPHP Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh		3	3	3	3
2	Sumatera Utara		3	3	3	3
3	Sumatera Barat		10	10	10	10
4	Riau					
5	Kepulauan Riau					
6	Jambi		3	3	3	3
7	Sumatera Selatan		2	2	2	2
8	Bangka Belitung					
9	Bengkulu					
10	Lampung		3	3	3	3
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat		10	10	10	10
13	Banten		1	1	1	1
14	Jawa Tengah		10	10	10	10
15	D.I. Yogyakarta		5	5	5	5
16	Jawa Timur		10	10	10	10
17	Bali		7	7	7	7
18	Nusa Tenggara Barat		1	1	1	1
19	Nusa Tenggara Timur		3	3	3	3
20	Kalimantan Barat		3	3	3	3
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan		3	3	3	3
23	Kalimantan Timur					
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara		2	2	2	2
26	Gorontalo		1	1	1	1
27	Sulawesi Tengah		2	2	2	2
28	Sulawesi Selatan		4	4	4	4
29	Sulawesi Barat		3	3	3	3
30	Sulawesi Tenggara		3	3	3	3
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua					
34	Papua Barat					
INDONESIA		0	92	92	92	92





Lampiran 62. Sasaran Pembangunan Gudang dengan Fasilitas Pengolahan Pasca panen di Sentra Produksi Hortikultura Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH UNIT				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh		4	4	4	4
2	Sumatera Utara		4	4	4	5
3	Sumatera Barat		4	5	6	6
4	Riau		3	3	4	4
5	Kepulauan Riau		2	2	3	3
6	Jambi		4	4	5	6
7	Sumatera Selatan		3	3	3	4
8	Bangka Belitung		2	2	3	3
9	Bengkulu		5	5	5	6
10	Lampung		4	4	4	4
11	DKI Jakarta		0	0	0	0
12	Jawa Barat		6	7	7	7
13	Banten		3	3	3	3
14	Jawa Tengah		7	7	7	8
15	D.I. Yogyakarta		4	4	4	4
16	Jawa Timur		7	7	7	8
17	Bali		6	6	6	6
18	Nusa Tenggara Barat		6	6	6	6
19	Nusa Tenggara Timur		4	4	4	4
20	Kalimantan Barat		5	5	5	5
21	Kalimantan Tengah		3	3	3	3
22	Kalimantan Selatan		4	4	4	4
23	Kalimantan Timur		6	7	7	7
24	Kalimantan Utara		3	4	4	4
25	Sulawesi Utara		4	4	4	4
26	Gorontalo		2	2	2	2
27	Sulawesi Tengah		4	4	4	4
28	Sulawesi Selatan		7	8	8	8
29	Sulawesi Barat		4	4	4	4
30	Sulawesi Tenggara		4	4	4	4
31	Maluku		0	1	1	1
32	Maluku Utara		1	1	1	1
33	Papua		0	0	1	1
34	Papua Barat		1	1	1	1
	INDONESIA		126	132	138	144





Lampiran 63. Sasaran Pembangunan Gudang Berpendingin dan Fasilitas Rumah Potong Hewan Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH UNIT				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh			1		1
2	Sumatera Utara		1			1
3	Sumatera Barat		1	1		
4	Riau					
5	Kepulauan Riau				1	
6	Jambi			1		
7	Sumatera Selatan			1		
8	Bangka Belitung					
9	Bengkulu					
10	Lampung					
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat					
13	Banten					1
14	Jawa Tengah		1			
15	D.I. Yogyakarta					
16	Jawa Timur	1	1			
17	Bali					1
18	Nusa Tenggara Barat		1			
19	Nusa Tenggara Timur	2			1	
20	Kalimantan Barat			1		1
21	Kalimantan Tengah	1			1	
22	Kalimantan Selatan				1	
23	Kalimantan Timur			1	1	1
24	Kalimantan Utara				1	1
25	Sulawesi Utara					
26	Gorontalo					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Selatan		1			
29	Sulawesi Barat			1		
30	Sulawesi Tenggara					
31	Maluku					
32	Maluku Utara		1			
33	Papua		1			
34	Papua Barat					
INDONESIA		4	8	7	6	7





Lampiran 64. Sasaran Lokasi Pasar Tani Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH UNIT				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh		1	1	1	1
2	Sumatera Utara		1	1	1	1
3	Sumatera Barat	2	2	2	2	2
4	Riau		1	1	1	1
5	Kepulauan Riau					1
6	Jambi					1
7	Sumatera Selatan	6	6	6	7	7
8	Bangka Belitung		1	1	1	1
9	Bengkulu		1	1	1	1
10	Lampung	1	1	1	1	1
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat			1	2	3
13	Banten	1	1	1	1	1
14	Jawa Tengah	1	1	1	1	1
15	D.I. Yogyakarta				1	1
16	Jawa Timur	1	1	1	1	1
17	Bali			1	1	1
18	Nusa Tenggara Barat					
19	Nusa Tenggara Timur	2	2	2	2	2
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1
23	Kalimantan Timur					1
24	Kalimantan Utara				1	1
25	Sulawesi Utara			1	1	1
26	Gorontalo	1	1	1	1	1
27	Sulawesi Tengah	4	4	4	4	4
28	Sulawesi Selatan	2	2	2	3	2
29	Sulawesi Barat					1
30	Sulawesi Tenggara					
31	Maluku			1	1	1
32	Maluku Utara			1	1	1
33	Papua	1	1	1	1	1
34	Papua Barat	1	1	1	1	1
	INDONESIA	24	29	34	39	43





Lampiran 65. Sasaran Lokasi Pasar Ternak Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH UNIT				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	2	3	3	4	4
2	Sumatera Utara	1	1	1	1	4
3	Sumatera Barat	1	2	5	5	5
4	Riau	2	3	3	3	3
5	Kepulauan Riau					
6	Jambi		2	4	4	6
7	Sumatera Selatan	1	1	1	1	1
8	Bangka Belitung					
9	Bengkulu	1	2	3	4	4
10	Lampung	1	1	1	2	3
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat	8	8	10	12	15
13	Banten	3	3	3	3	4
14	Jawa Tengah	4	6	8	11	14
15	D.I. Yogyakarta	2	2	2	3	3
16	Jawa Timur	9	8	10	13	15
17	Bali	1	2	3	4	4
18	Nusa Tenggara Barat	5	5	6	6	6
19	Nusa Tenggara Timur	2	3	3	3	3
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah		1	1	2	2
22	Kalimantan Selatan	1	2	2	2	2
23	Kalimantan Timur	2	2	2	2	2
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara		1	2	2	2
26	Gorontalo			1	2	2
27	Sulawesi Tengah	2	3	3	3	3
28	Sulawesi Selatan	3	3	3	3	4
29	Sulawesi Barat					
30	Sulawesi Tenggara		1	1	1	3
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua	1	2	2	2	2
34	Papua Barat			1	1	1
INDONESIA		52	67	84	99	117





Lampiran 66. Sasaran Lokasi Pembangunan Taman Sains Pertanian - TSP
(Agro Science Park - ASP) Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH LOKASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh			1		
2	Sumatera Utara		1			
3	Sumatera Barat		1			
4	Riau			1		
5	Kepulauan Riau				1	
6	Jambi			1		
7	Sumatera Selatan		1			
8	Bangka Belitung				1	
9	Bengkulu				1	
10	Lampung	1				
11	DKI Jakarta				1	
12	Jawa Barat	1	1			
13	Banten		1			
14	Jawa Tengah	1				
15	D.I. Yogyakarta			1		
16	Jawa Timur		1			
17	Bali			1		
18	Nusa Tenggara Barat			1		
19	Nusa Tenggara Timur		1			
20	Kalimantan Barat		1			
21	Kalimantan Tengah			1		
22	Kalimantan Selatan	1				
23	Kalimantan Timur			1		
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara		1			
26	Gorontalo				1	
27	Sulawesi Tengah	1				
28	Sulawesi Selatan	1				
29	Sulawesi Barat				1	
30	Sulawesi Tenggara		1			
31	Maluku			1		
32	Maluku Utara			1		
33	Papua				1	
34	Papua Barat				1	
INDONESIA		6	10	10	8	0





Lampiran 67. Sasaran Lokasi Pembangunan Taman Tekno Pertanian - TTP
(Agro Techno Park - ATP) Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH LOKASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	1		1	1	
2	Sumatera Utara		1	1	1	
3	Sumatera Barat	1		1	1	1
4	Riau		1	1	1	1
5	Kepulauan Riau		1			1
6	Jambi		1	1	1	
7	Sumatera Selatan	1		1	1	
8	Bangka Belitung		1	1		1
9	Bengkulu		1		1	1
10	Lampung		1		1	1
11	DKI Jakarta			1	1	
12	Jawa Barat	3		1	1	
13	Banten			1	1	1
14	Jawa Tengah	1	1		1	1
15	D.I. Yogyakarta	1		1	1	1
16	Jawa Timur	2		1	1	1
17	Bali		1	1	1	
18	Nusa Tenggara Barat		1	1	1	
19	Nusa Tenggara Timur	1		1	1	
20	Kalimantan Barat		1	1	1	
21	Kalimantan Tengah	1		1		1
22	Kalimantan Selatan	2		1		
23	Kalimantan Timur		2		1	
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara		1	1		1
26	Gorontalo		1	1	1	
27	Sulawesi Tengah	1		1	1	
28	Sulawesi Selatan	1		1	1	
29	Sulawesi Barat		1			1
30	Sulawesi Tenggara		1	1		1
31	Maluku		1		1	
32	Maluku Utara		1	1		
33	Papua			1	1	
34	Papua Barat		1		1	
INDONESIA		16	20	25	25	14



Lampiran 68. Sasaran Lokasi Penelitian Reklamasi Lahan Eks Tambang
Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH REKOMENDASI/SATUAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh					
2	Sumatera Utara					
3	Sumatera Barat			1		
4	Riau					
5	Kepulauan Riau					
6	Jambi					
7	Sumatera Selatan		1			
8	Bangka Belitung		6		1	1
9	Bengkulu					
10	Lampung					
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat		1			
13	Banten		1			
14	Jawa Tengah					
15	D.I. Yogyakarta					
16	Jawa Timur					
17	Bali					
18	Nusa Tenggara Barat					
19	Nusa Tenggara Timur					
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah		1			
22	Kalimantan Selatan		5		1	1
23	Kalimantan Timur			3		
24	Kalimantan Utara			1		
25	Sulawesi Utara			2		
26	Gorontalo					
27	Sulawesi Tengah			2		
28	Sulawesi Selatan			2		
29	Sulawesi Barat					
30	Sulawesi Tenggara			4	1	1
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua					
34	Papua Barat					
INDONESIA			15	15	3	3





Lampiran 69. Sasaran Lokasi Pemanfaatan lahan eks tambang Untuk Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (Ternak) Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	JUMLAH Ha				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh					
2	Sumatera Utara					
3	Sumatera Barat					
4	Riau					
5	Kepulauan Riau					
6	Jambi					
7	Sumatera Selatan					
8	Bangka Belitung	20	100	100	100	100
9	Bengkulu					
10	Lampung					
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat					
13	Banten					
14	Jawa Tengah					
15	D.I. Yogyakarta					
16	Jawa Timur					
17	Bali					
18	Nusa Tenggara Barat					
19	Nusa Tenggara Timur					
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan		100	100	100	100
23	Kalimantan Timur	680	100	100	100	100
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara					
26	Gorontalo					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Selatan					
29	Sulawesi Barat					
30	Sulawesi Tenggara					
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua					
34	Papua Barat					
INDONESIA		700	300	300	300	300





Lampiran 70. Kegiatan Terkait Sasaran Dalam Nawa Cita

No.	NAWACITA	KEGIATAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1	1000 Desa Mandiri Benih	Pengelolaan Sistem Penyediaan benih tanaman Pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi tanaman Pangan	Ditjen Tanaman Pangan
2	Terbangunnya 100 Techno park dan 34 Science Park di 34 provinsi	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Badan Litbang
		Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Badan PSDMP
3	Terbangunnya gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi tanaman Pangan	Ditjen Tanaman Pangan
4	Perbaiki irigasi rusak 3 juta Ha	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Ditjen PSP
5	Pembangunan 1 juta Ha sawah baru	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian		
6	Pemulihan kualitas kesuburan lahan pertanian	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian		
7	Terbentuknya Bank Pertanian	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan		
8	Pemanfaatan lahan bekas pertambangan	Penelitian dan Pengembangan sumber daya lahan pertanian	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Badan Litbang
9	Terselenggaranya SL-Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan	Penelitian dan Pengembangan tanaman pangan	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Badan Litbang





10	1000 desa Pertanian Organik	Pengembangan 600 Desa Pertanian Organik berbasis tanaman pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Ditjen Tanaman Pangan
		Pengembangan 250 Desa Pertanian Organik berbasis tanaman hortikultura	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan	Ditjen Hortikultura
		Pengembangan 150 Desa Pertanian Organik berbasis tanaman perkebunan	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan Berkelanjutan	Ditjen Perkebunan
		Pengembangan Kandang Komunal	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Ditjen PKH
		Pengembangan SRI (System of Rice Intensification)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Ditjen PSP
11	Perluasan lahan Kering 1 juta ha	Perluasan areal lahan kering 1 juta ha mendukung peningkatan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Ditjen PSP
12	Peningkatan Kemampuan Petani, Organisasi Petani, dan Pola Hubungan Pemerintah	Penguatan sistem penyuluhan pertanian	Program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian	BPPSDMP
13	Pelibatan Perempuan Petani/Pekerja	Pemantapan sistem pelatihan pertanian dukungan manajemen dan teknis lainnya	Program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian	BPPSDMP
14	Penciptaan Daya Tarik Pertanian bagi Tenaga Kerja Muda	Pemantapan pendidikan menengah pertanian	Program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian	BPPSDMP
15	Pengembangan Inovasi Teknologi Melalui Kerjasama Swasta, Pemerintah dan PT	Dukungan Manajemen	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan	Badan Litbang
16	Peningkatan Akses dan Aset Petani Melalui Distribusi hak atas tanah	Dukungan sertifikasi lahan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Ditjen PSP
		Manajemen usahatani kooperatif		





Lampiran 71. Strategi, Pendekatan, Faktor Kritis dan Keluaran Pengembangan Kawasan

Strategi	Pendekatan	Faktor Kritis	Keluaran
1. Penguatan perencanaan pengembangan kawasan untuk ketahanan pangan, bioindustri dan bioenergi	Integrasi perencanaan <i>top-down policy</i> dengan <i>bottom-up planin</i> , sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat/petani	Menemukan isu-isu strategis di daerah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan mampu menumbuhkan sikap partisipatif pelaku	Rancang bangun kawasan untuk ketahanan pangan, bioindustri dan bioenergi dan rencana aksi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dalam rincian tahunan.
2. Penguatan kerjasama dan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama Pemerintah dengan Pemda disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategis daerah • Kerjasama kemitraan strategis antar daerah, badan usaha daerah, maupun swasta dan masyarakat dalam penguatan lembaga-lembaga penunjang pelayanan subsistem hulu, produksi, dan hilir • Sinkronisasi master plan dan rencana aksi program pengembangan kawasan 	Keterbatasan dan ketimpangan potensi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah,	<p>Alternatif pola/jenis kemitraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan pola legalitas, dibangun oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang terkait. • Kemitraan pola magang melalui kerjasama dengan perusahaan besar yang terdekat • Kemitraan pola saprodi antara perusahaan pemasok alsintan dan sarana produksi. • Kemitraan pola finansial antara perusahaan atau lembaga keuangan pemerintah atau swasta dengan masyarakat • Kemitraan pola pemasaran, antara perusahaan: distribusi, perdagangan, atau mitra dari luar negeri.
3. Penguatan sarana dan prasarana dasar pengembangan kawasan	Penguatan prasarana dasar dan pendukung seperti infrastruktur perdagangan, energi, dan telekomunikasi, produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan skala kelayakan ekonomi wilayah • Sebaran lokasi antar kawasan yang relatif jauh 	Terbangunnya sarana prasarana dasar dan sarana dan prasarana produksi, lahan, air pertanian serta prasarana pendukung dan pendukung dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan kawasan pertanian dan biaya pelayanan yang terjangkau



4. Penguatan sumber daya manusia	Diklat kepada aparaturnya dan pelaku usaha kunci/kader.	Terbatasnya aparaturnya yang menguasai materi pelatihan: konsep pengembangan kawasan, penetapan komoditas unggulan, penyusunan rancangan bangun dan rencana aksi serta aspek teknis usahatani.	Meningkatnya kapasitas SDM dalam penguasaan aspek budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan.
5. Penguatan kelembagaan;	Kerjasama kelembagaan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dalam membangun kemitraan usaha (<i>public private partnership</i>), bantuan bimbingan teknis serta permodalan dalam kerangka <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .	Perbedaan kapasitas antar kelembagaan yang ada.	Berkembangnya kelembagaan kawasan pertanian bioindustri yang berbasis klaster yang mencakup: kelembagaan pembinaan, pelayanan dan usaha.
6. Percepatan adopsi teknologi dan pengembangan bioindustri dan bioenergi	<ul style="list-style-type: none"> Mengintensifkan peran serta Pemda dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Memerankan pelaku- di kawasan sebagai inovator dan pengguna awal dari teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya peran Pemda dalam mendorong diseminasi paket teknologi tepat guna dan spesifik lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemampuan pelaku dalam mengakses informasi teknologi baik dari dalam maupun luar negeri Ketersediaan paket teknologi rekomendasi dalam bentuk praktis, populer dan mudah diakses oleh kelompok pelaku
7. Pengembangan industri hilir	Standardisasi produk akhir untuk meningkatkan daya saing komoditas yang potensial sebagai komoditas ekspor dan substitusi impor.	Terbatasnya insentif investasi dan fasilitas untuk mengembangkan produk olahan dan terbatasnya fasilitas ekspor.	Identitas produk akhir (<i>final product</i>) dalam bentuk segar/ olahan maupun produk antara (<i>intermediate product</i>)



Lampiran 72. Susunan (Pola) Konsumsi Pangan Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari					Kgj/Kap/Tahun					ton/tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi-padiam	263,8	262,7	261,7	260,7	259,6	96,2	95,9	95,5	95,1	94,8	24.575.415,5	24.810.319,8	25.016.395,2	25.214.057,9	25.403.246,7
	Beras	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	1,5	1,5	1,5	1,5	396.076,0	398.452,1	401.700,5	404.936,1	407.974,5	
	Jagung	28,2	28,1	28,0	27,9	27,8	10,3	10,3	10,2	10,1	2.658.485,7	2.655.367,1	2.675.396,6	2.696.545,4	2.716.776,4	
2	Umbi-umbian	25,1	32,3	39,6	46,8	54,0	9,2	11,8	14,4	17,1	19,7	2.338.817,9	3.051.564,9	3.780.809,7	4.525.427,7	5.285.960,8
	Sirogong	10,5	13,6	16,6	19,6	22,7	3,8	4,9	6,1	7,2	8,3	981.020,9	1.279.983,7	1.586.782,8	1.896.197,8	2.216.994,8
	Ubi jalar	5,8	7,5	9,2	10,9	12,5	2,1	2,7	3,3	4,0	4,6	542.438,1	707.822,6	876.527,5	1.049.891,0	1.225.983,7
	Kentang	1,5	2,0	2,4	2,9	3,3	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	142.533,9	186.970,6	230.400,6	276.791,8	322.110,3
	Sagu	1,6	2,0	2,5	2,9	3,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	147.248,1	192.121,5	238.021,0	284.913,5	332.763,9
3	Pangan bewanti	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	378.382,8	400.003,7	421.953,7	444.214,8	466.766,8
	Daging untaisan	17,1	17,9	18,7	19,4	20,2	6,3	6,5	6,8	7,1	7,4	1.590.703,5	1.690.063,6	1.782.784,6	1.876.800,1	1.972.142,8
	Daging unggas	21,2	22,2	23,1	24,0	25,0	7,8	8,1	8,4	8,8	9,1	1.981.329,9	2.094.543,5	2.208.480,7	2.326.846,9	2.444.146,6
	Telur	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	2,5	2,7	2,8	2,9	3,0	649.572,9	686.689,6	724.371,4	762.597,3	801.305,9
	Susu	57,7	60,3	62,8	65,3	67,9	21,1	22,0	22,9	23,8	24,8	5.382.929,0	5.650.510,5	6.002.774,8	6.319.465,1	6.640.301,5
4	Minyak dan lemak	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	236.026,7	233.203,2	230.183,4	226.967,5	223.566,7
	Minyak kelapa	23,3	22,8	22,2	21,6	21,1	8,5	8,3	8,1	7,9	7,7	1.976.952,4	1.950.910,4	1.923.657,2	1.896.396,0	1.869.937,5
	Minyak sawit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	47.678,9	47.108,5	46.498,5	45.848,8	45.169,8
	Minyak lainnya	6,8	7,6	8,4	9,1	10,1	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	630.869,5	718.370,7	807.688,1	898.764,7	991.600,7
5	Buah/Biji-benih/ Sayur	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	113.778,3	123.559,2	145.667,8	162.091,8	178.816,6
	Kacang-kacangan	24,2	27,1	29,9	32,8	35,6	8,8	9,9	10,9	12,0	13,0	2.950.005,2	2.557.567,6	2.963.032,9	3.172.033,8	3.487.611,5
	Kacang tanah	0,6	1,1	1,2	1,3	1,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	68.119,0	60.736,6	114.592,7	123.676,7	136.966,2
6	Kacang hijau	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	79.743,1	90.256,2	100.985,3	111.922,5	123.052,2
	Kacang buncis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kacang lainnya	23,5	24,4	25,2	26,0	26,8	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	2.195.683,4	2.301.372,3	2.469.484,2	2.516.626,6	2.628.614,7
7	Gula	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	176.648,5	185.157,5	193.766,9	202.493,5	211.316,1
	Gula merah	154,9	166,4	167,9	169,4	170,8	60,2	60,7	61,3	61,8	62,4	15.376.275,2	15.711.773,6	16.047.272,2	16.382.424,0	16.716.905,0
	Gula putih	93,7	94,6	96,4	98,3	97,1	34,2	34,5	34,8	35,1	35,4	8.740.550,7	8.931.282,8	9.121.974,9	9.312.490,2	9.502.823,6
8	Sayuran dan buah	57,3	65,2	73,2	81,1	89,0	20,9	23,8	26,7	29,6	32,5	5.339.633,1	6.167.736,7	6.990.120,4	7.845.463,4	8.713.213,6
	Minuman	11,2	12,7	14,2	15,8	17,3	4,1	4,6	5,2	5,8	6,3	1.039.708,8	1.199.006,2	1.361.668,2	1.527.574,1	1.696.596,9
	Bumbu															
Proyeksi Jumlah Penduduk											255.461.700	258.705.000	261.890.900	265.015.300	268.074.600	

Keterangan :
 1. Proyeksi dengan baseyear tahun 2014 pada RPJMN 2015-2019 dan capaian skor RPH 92,5 dan AKE 2150 pada tahun 2019
 2. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Basespan dari BPS (2013).



Lampiran 73. Matrik Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	I. Input Pertanian					
	Sumberdaya genetik	<ul style="list-style-type: none"> Dengan UU RI No. 4/2006, Indonesia wajib melaksanakan upaya kebijakan dan hukum untuk mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik tanaman guna mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan baik di tingkat nasional, regional maupun global. Diperlukan peraturan pelaksanaan terkait dengan pengaturan mengenai keuntungan finansial dari pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman yang diakses dari sistem multilateral, bilateral, organisasi non pemerintah dan sektor swasta. Diperlukan peraturan pelaksanaan terkait prosedur kepemilikan sumberdaya genetik baik lembaga publik maupun perorangan atau badan usaha swasta terutama terkait dengan perjanjian pengalihan bahan (<i>Material Transfer Agreement</i>) dan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sumberdaya genetik tanaman harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perjanjian. 	UU RI no. 4 tahun 2006 Tentang Pengesahan Internasional Treaty on Plant Genetic Resources for Food And Agriculture (Perjanjian mengenai sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian).	Badan Karantina	Kementerian Keuangan	2019
	Sarana produksi	Mengatur sistem jaminan ketersediaan pupuk dan benih	Pasal 62 UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Kementerian BUMN, BUMN terkait	2019
	Infrastruktur pertanian	Diperlukan UU yang mengatur tentang infrastruktur pertanian dan perdesaan		Ditjen PSP	Kemen PU, Kemendagri	2019



Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian. 	UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Kemendagri, BPN, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/kota	2019
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan penetapan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi maupun kabupaten/kota. 	Pasal 17 UUR I No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Bappenas, Bappeda	2019
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam PP mengenai Rencana tata ruang wilayah nasional, dalam Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi, dan dalam Perda mengenai tata ruang wilayah kabupaten. 	Bagian Ketiga UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Bappenas, Bappeda, BPN, Pemda	2019
Alsintan	Menyusun regulasi yang memberlakukan peredaran dan perdagangan alat mesin pertanian sesuai standar mutu		Ditjen PSP	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian	2019
	II. Budidaya				
Usahatani Tanaman Pangan		UU RI No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Ditjen Tanaman Pangan	Pemda	



	Usahatan Perkebunan	UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	Ditjen Perkebunan	Pemda	2019
Usahatan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lainnya yang terkait. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan pemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Diperlukan peraturan pelaksanaan terkait penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis; pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya genetik melalui pembudidayaan dan pemuliaan; penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan; penetapan jenis dan standar alat dan mesin peternakan yang peredarannya perlu diawasi; pengembangan budidaya dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tataruang; peternakan dan perusahaan peternakan melakukan tatacara panen yang baik; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; Siskeswanas sebagai pelaksanaan otoritas veteriner; 	UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ditjen PKH	Pemda	2019
Usahatan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka mengelola dan mengembangkan sumberdaya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, memenuhi kebutuhan, keinginan selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; meningkatkan sumber devisa negara; dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 	UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura	Ditjen Hortikultura	Pemda	2019



	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan peraturan menteri terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi sumberdaya manusia, standar kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura. • Diperlukan Peraturan Menteri terkait bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan perubahan pola iklim. • Diperlukan penetapan menteri terkait sumberdaya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah dan sebarannya. • Diperlukan ketentuan mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah NKRI dapat merugikan kepentingan nasional. • Diperlukan Peraturan Menteri terkait tata cara uji mutu dan pendaftaran sarana hortikultura. • Diperlukan Peraturan Menteri tentang tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura • Pemerintah dan pemerintah daerah perlu menetapkan kawasan hortikultura, dan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura. • Diperlukan Peraturan Menteri yang mengatur pendataan dan perizinan, kriteria usaha, pendaftaran usaha, standar proses dan persyaratan teknis minimal, pemberian fasilitasi dan insentif, pola kemitraan unit usaha budidaya hortikultura. • Diperlukan Peraturan Menteri terkait ketentuan mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih serta pengeluaran dan pemasukan benih hortikultura. 				
--	---	--	--	--	--



Petani dan perlindungan petani	<ul style="list-style-type: none"> Perindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan; memberikan kepastian usahatani; melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani; serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usahatani. 	UU RI no. 19 tahun 2013 tentang Perindungan dan Pemberdayaan Petani	Badan Litbang	BMKG, Kemen LH	2019
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim 	Pasal 36 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan			
	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan petani dalam bentuk asuransi pertanian 	Pasal 37 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PSP	Bi, Kemenkeu	2019
	III. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran				
Panen dan Pasca Panen	Diperlukan Peraturan Menteri yang mengatur tata cara kegiatan panen dan Pasca panen yang baik	Pasal 69 UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura	Ditjen Hortikultura		2019
Bioindustri dan pengolahan hasil pertanian	Diperlukan UU yang mendorong berkembangnya bioindustri dan pengolahan hasil pertanian		Ditjen PPHP	Kementerian Perindustrian	2019
Harga	Pemerintah perlu mengatur dan melakukan peninjauan secara periodik terhadap harga pembelian pemerintah terhadap produk hasil pertanian.		Ditjen PPHP	Kemendag, Bulog	2019
Impor	Pemerintah mengatur dan menetapkan jenis komoditas pertanian, besaran tarif bea masuk produk pertanian yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri serta kepentingan hajat hidup orang banyak.	Paragraf 2 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PPHP	Kemendag	2019
Ekspor	Pengaturan bea keluar bagi komoditi yang mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri		Ditjen PPHP	Kemendag	2019



Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan Peraturan Menteri terkait kewajiban pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri Diperlukan Peraturan Menteri terkait penerapan tata cara pemasaran yang baik produk hortikultura. Diperlukan Peraturan Menteri terkait sistem informasi hortikultura yang mencakup pengumpulan, Pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura. Pembatasan pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerjasama dengan kelompok tani, gapoktan, koperasi, da/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian 	<p>Pasal 73 UURU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura</p> <p>Pasal 75 UURU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura</p> <p>Pasal 102 UURU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura</p> <p>Pasal 48 UURU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan</p>	<p>Ditjen PPHP</p> <p>Ditjen PPHP</p> <p>Ditjen PPHP</p>	<p>Kemendag.</p> <p>BSN</p> <p>Kementerian Pariwisata</p>	<p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p>
Mutu dan keamanan pangan	Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan	Bagian Ketujuh UURU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PPHP	BSN	2019
Jasa Lingkungan	Regulasi yang memberikan jaminan berkembangnya agrowisata di wilayah pertanian		Ditjen PPHP	Kementerian Pariwisata	2019
IV. Sistem Pendukung					
Sistem Penyuluh	Pengaturan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluh yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluh swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.	UU RI no. 16 tahun 2006 Tentang sistem Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan	BPSDMIP	Kementerian: Perikanan dan Kelautan, Kehutanan	2019
Sistem Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan sumberdaya manusia di pertanian melalui aparat pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.				



Penelitian dan Pengembangan	Diperlukan Peraturan Menteri terkait pemberian insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi, pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura.	Pasal 1111 UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura	Badan Litbang	BPPT	2019
Perkarantinaaan		UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan	Badan Karantina	Kementerian Perikanan dan Kelautan	2019
Pembiayaan	Diperlukan regulasi yang mendorong dibentuknya bank bagi petani dan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian	Pasal 65 UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Kemenkeu, Bank Indonesia,	2019
V.	Konsumsi dan Ketersediaan Pangan				
Penyediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. 	UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	BKP	Pemda	2019
	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah perlu menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai usulan Pemerintah Daerah 	Pasal 12 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	BKP	Pemda	2019
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai distribusi pangan 		BKP	Pemda	2019
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan 	Pasal 88 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PPHP	BSN, BPOM	2019
	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan revisi perundangan terkait otonomi daerah yang menetapkan kembali penangan ketahanan pangan sebagai urusan pemerintah pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional 		BKP	Kemendagri	2019



Lampiran 74. Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
KEMENTERIAN PERTANIAN											
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya kementerian Pertanian						32.810,51	32.392,59	37.412,75	39.105,75	41.284,19
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja kementan serta terkoordinasinya pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi lingkup Kementan.						1.314,28	1.744,63	1.820,41	1.898,07	2.017,49
	Nilai AKIP Kementan	75	76	77	78	79					
	Opini Laporan Keuangan Kementan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui IKM	80	81	82	83	84					
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementan	72	73	74	75	76					
	Persentase tindaklanjut kerjasama luar negeri (%)	80	85	85	90	90					
	Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian						17,09	18,80	20,68	22,75	25,02
	Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan terkelolanya informasi publik serta menujunya permasalahan hukum bidang pertanian										
	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan (persen)	70	75	80	85	90					
	Persentase layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan (persen)	70	72	75	78	80					
	Persentase naskah perjanjian yang dihasilkan (persen)	80	82	84	86	88					



Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks kepuasan pemohon layanan informasi publik bidang pertanian (IKM)	80	83	85	88	90					
Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral						29,96	30,00	30,00	30,00	30,00
Meningkatnya intensitas dan kualitas kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral										
Fasilitasi dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri sektor pertanian (Laporan)	4	4	4	4	4					
Kerjasama bidang pertanian yang ditindak lanjuti dalam kerangka forum bilateral, regional dan multilateral (kegiatan)	10	10	11	11	11					
Dukungan kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral (bulan)	12	12	12	12	12					
Pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kearsipan Kementerian Pertanian						809,66	1.196,13	1.225,40	1.255,70	1.345,50
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta tertib pengelolaan kearsipan/dokumentasi Kementerian Pertanian										
Peningkatan kapasitas pengelola Keuangan (org)	400	400	400	400	400					
Peningkatan sumber-sumber potensi PNBP (satker)	20	20	20	20	20					
Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai	90	91	92	93	95					
Laporan Keuangan lingkup Kementerian berbagai Akrual (%)	100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian						71,59	56,75	62,42	68,66	75,53
Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan										
Nilai SAKIP Setjen (Nilai)	75	76	77	78	79					
Jumlah revisi anggaran yang dilakukan (kali)	5	5	5	5	5					
Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (rekomendasi)	6	6	6	6	6					
Penyusunan peta pengembangan kawasan dan fasilitasi penguatan UPSUS	1	-	-	-	-					
Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian						55,79	112,37	121,36	131,07	141,56
Meningkatnya ketersediaan data komoditas dan non komoditas pertanian serta jumlah dan/atau kapasitas sistem informasi yang tersedia bagi seluruh stakeholders di pusat dan daerah										
Laporan Data Komoditas Pertanian (Laporan)	10	10	10	10	10					
Laporan Data Non Komoditas Pertanian (Laporan)	10	10	10	10	10					
Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian (Sistem)	7	7	7	7	7					
Pembinaan dan Pengembangan SDM Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian (Orang)	527	527	527	527	527					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12					
Pengembangan Database Petani (Database)		1	1	1	1					
Monitoring Data Penggilingan Padi Tahun Berjalan (Laporan)		1	1	1	1					



Penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian										281,04	309,14	336,57	344,99
Terinformasikannya program pembangunan pertanian melalui berbagai media dan terlaksananya komunikasi publik di bidang informasi pembangunan pertanian													
Laporan ketatausahaan Kementerian Pertanian (Laporan)	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
Tingkat kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal (Persen)	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
Meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian (persen)	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
Laporan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, organisasi profesi, dan asosiasi (laporan)	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Laporan keprotokolan dan pelayanan pimpinan (laporan)	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Operasionalisasi gerakan UPSUS	1												
Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian										27,02	27,01	27,71	28,00
Peningkatan kinerja pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman													
Jumlah pelayanan proses permohonan hak PVT (varietas)	55	60	65	70	75								
Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT (sertifikat)	45	50	55	60	65								
Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan (rekomendasi)	110	115	120	125	130								
Administrasi dan Manajemen (laporan)	4	4	4	4	4								
Jumlah pelayanan pendaftaran Tanda Daftar varietas SDG tanaman (tanda daftar)	175	180	185	190	195								



Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target						ALOKASI (Milyar Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
	200	205	210	215	220							
Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran (tanda daftar)												
Jumlah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida (surat izin)	2.100	2.105	2.110	2.115	2.120							
Jumlah pelayanan proses perizinan pemasukan/pengeluaran benih tanaman, SDG Tanaman, obat hewan dan pakan ternak (surat izin)	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030							
Jumlah panduan pemeriksaan subtanif (dokumen)* (izin)	10	-	-	-	-							
Jumlah pemeriksaan Uji BUSS (varietas)	50	55	60	65	70							
Terbitnya surat izin bidang peternakan (surat izin)	290	295	300	305	310							
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akutabilitas Aparatur Kementerian Pertanian							115,53	121,31	127,08	132,86	138,64	
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian												
Tingkat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit (%)	95	95,50	96	96,50	97							
Tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit (%)	95	95,50	96	96,50	97							
Tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit (%)	99	99	99	99	99							
Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/kerugian Negara (%)	80	80	80	80	80							



Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan						7,98	8,54	9,10	10,21	10,77
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan secara efektif dan efisien										
Reviu Laporan Keuangan pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan. (Laporan Reviu)	6	6	6	6	6					
Evaluasi/pengawalan program dan kegiatan strategis pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan Evaluasi/ Pengawalan)	1	1	1	1	1					
Audit kinerja pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan Hasil Audit)	106	99	99	99	99					
Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan Evaluasi)	3	3	3	3	3					
Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian						7,48	8,23	8,98	9,72	10,47



Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Audit kinerja pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan Hasil Audit)	106	99	99	99	99					
Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan Evaluasi)	3	3	3	3	3					
Peningkatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian						5,67	6,24	6,80	7,37	7,94
Terwujudnya pelaksanaan pembinaan komitmen anti korupsi dan pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian										
Pembinaan Komitmen Anti Korupsi lingkup Kementerian Pertanian (Laporan)	1	1	1	1	1					
Audit investigasi lingkup Kementerian Pertanian (Laporan Hasil Audit)	24	24	24	24	24					
Pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian (Laporan Hasil Audit)	2	2	2	2	2					
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal						78,97	81,33	83,68	85,83	88,66
Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran lingkup Inspektorat Jenderal										
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Bagian Perencanaan (Dokumen)	14	14	14	14	14					
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas (Laporan)	9	9	9	9	9					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Kacang Tanah (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00					
Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Kacang Hijau (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00					
Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Ubi Jalar (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00					
Terlaksananya Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI Ubikayu (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00					
Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Padi(%/thn)	0,06	0,18	0,24	0,31	0,37					
Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Jagung (%/thn)	0,31	0,48	0,63	0,77	0,90					
Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Kedelai (%/thn)	0,43	0,65	0,80	1,08	1,34					
Terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil Ubi Kayu(%/thn)		0,08	0,16	0,24	0,31					
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi						957,50	2.422,40	4.281,05	4.628,75	5.111,31
Meningkatnya Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Umbi yang Tepat untuk Peningkatan Produksi Melalui Peningkatan Produktivitas										
Penerapan PTT Kedelai (Ha)										
PAT-PIP Kedelai (Ha)				-	-					
Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu (GPPTT) (Ha)	3.000	5.000	6.000	7.000						

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	1.000									
Pengembangan Seribu Desa Mandiri (Unit)										
Penguatan Kelembagaan Penangkar/Produ-sen Benih (unit)	32	32	32	32	32					
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI					103,99	220,41	216,96	214,98	214,61	
Mengamankan Luas Areal Tanaman Pangan Dari Serangan OPT dan Terkena DPI										
Pemantapan Penerapan PHT (Ha)										
Penerapan Penanganan DPI (Ha)	400	300	350	400	450					
Gerakan Pengendalian OPT Reguler (Kali)	510	687	755	830	913					
Sarana Penanggulangan OPT/DPI (Paket)	1	1	1	1	1					
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan (Paket)	1	1	1	1	1					
Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan										
Penurunan susut hasil tanaman pangan						78,51	1.160,74	1.251,68	1.324,01	1.400,21
Dukungan Sarana Pascapanen Padi (unit)	2.970		4.325	4.450	4.575					
Dukungan Sarana Pascapanen Jagung (unit)	2.531	4.200	1.419	1.378	1.354					
Dukungan Sarana Pascapanen Kedelai (unit)	1.500	1.486	2.400	2.300	2.100					
Dukungan Sarana Pascapanen Ubi Kayu (unit)		1.700								
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pembinaan, Movev (paket)	1	1	1	1	1					
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan						233,30	259,63	286,29	315,52	347,57
Terlaksananya Dukungan manajemen peren-canaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan										

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
4 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan						1.129,09	1.185,54	1.280,38	1.382,81	1.493,44
Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar konsumsi cabai, bawang merah, jeruk dan aneka produk hortikultura lainnya dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan										
Produksi aneka cabai (ton)	183.149	1.865.935	1.910.030	1.964.422	2.004.198					
Produksi bawang merah (ton)	113.247	1.172.656	1.231.765	1.293.886	1.359.412					
Produksi aneka jeruk (ton)	164.037	1.697.790	1.768.702	1.845.159	1.915.588					
Produksi Hortikultura lainnya :										
a. Buah (ton)	179.846	18.357.100	18.735.649	19.130.278	19.510.039					
b. Sayuran (ton)	10.877.908	11.105.864	11.328.338	11.551.644	11.782.187					
c. Florikultura :										
- Bunga dan daun potong lainnya (tangkai)	660.308.004	701.281.750	749.102.883	797.963.004	850.609.313					
- Tanaman Hias Pot dan Lansekap (Pohon)	33.022.991	35.337.338	36.945.182	38.609.785	40.394.953					
- Bunga Tabur (Kg)	23.974.830	24.344.203	25.120.783	25.922.156	26.749.682					
d. Tanaman Obat (ton)	563.702	585.056	606.936	629.370	651.236					
Kehilangan hasil pasca panen :										
a. Buah (%)	-	33	31	28	25					
b. Sayuran :										
- Sayuran Daun (%)	-	19	18	17	16					
- Sayuran Umbi (%)	-	5	5	5	5					
- Sayuran Buah (%)	-	5	5	5	5					
c. Florikultura (%)	-	20	18	16	15					
d. Tanaman Obat (%)	-	19	18	17	16					
Pengamanan produksi dari serangan OPT (%)	Min 95%	Min 95%	Min 95%	Min 95%	Min 95%					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Desa Organik Berbasis Tanaman Florikultura (desa)	-	10	10	15	15					
Registrasi Lahan usaha GAP Florikultura (LU)	50	50	50	50	50					
Sarana dan Prasarana Budidaya Tanaman Florikultura (unit)	-	115	120	120	122					
Sarana dan prasarana pasca panen Tanaman Florikultura (Unit)	-	215	220	225	230					
Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman Florikultura (unit) *	200	-	-	-	-					
Peningkatan usaha budidaya dan pasca panen sayuran dan tanaman obat ramah lingkungan	14.793.136	14.793.131	15.077.542	15.451.122	15.860.123	614,87	376,98	401,76	428,24	456,57
Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman obat dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan (ton)										
Kawasan Cabai (Ha)	-	2.980	3.125	3.280	3.450					
Kawasan Bawang Merah (Ha)	-	1.700	1.790	1.880	1.975					
Kawasan sayuran lainnya (Ha)	-	2.170	2.280	2.395	2.515					
Kawasan Tanaman Obat (Ha)	751	990	1.040	1.090	1.145					
Desa Organik Berbasis Tanaman Sayuran (Desa)	-	15	15	20	20					
Desa Organik Berbasis Tanaman obat (Desa)	-	5	5	10	10					
Registrasi Lahan usaha GAP Sayuran dan Tanaman Obat (LU)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran (unit)	-	210	225	245	260					
Sarana dan Prasarana Budidaya Tanaman Obat (unit)	-	40	45	50	55					



	Sarana dan prasarana pasca panen Sayuran (Unit)	-	805	815	825	835						
	Sarana dan prasarana pasca panen Tanaman Obat (Unit)	-	60	75	80	75						
	Kawasan Tanaman Sayuran (Ha)*	7,991	-	-	-	-						
	Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat (unit)*	742	-	-	-	-						
	Peningkatan produksi dan sistem perbenihan hortikultura						90,71	143,12	156,21	170,41	185,86	
	Terpenuhinya kebutuhan benih hortikultura bermutu untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor (%)	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4						
	Produksi benih Bawang Merah (Kg)	-										
	Produksi Benih Kentang (K Nol)	-										
	Produksi benih Jeruk (batang)	-										
	Produksi benih tanaman florikultura (tanaman)	-										
	Produksi benih tanaman buah lainnya (batang)	-										
	Produksi benih tanaman obat (kg)	-										
	Penguatan kelembagaan (lembaga)	-	64	64	64	64						
	Fasilitas bantuan penangkar benih (kelompok)	-	150	155	160	165						
	Lembaga Perbenihan hortikultura (lembaga *)	160	-	-	-	-						
	Benih Tanaman Sayuran Bermutu (kg) *)		-	-	-	-						
	Benih Tanaman Florikultura bermutu (benih *)		-	-	-	-						
	Benih Tanaman Obat bermutu (kg) *)		-	-	-	-						
	Benih Tanaman Buah Bermutu (batang) *)		-	-	-	-						
	Peningkatan usaha pengamanan dan sistem perlindungan hortikultura						93,05	145,81	159,03	173,38	188,96	
	Terlaksananya usaha pengamanan dan berkembangnya sistem perlindungan hortikultura secara ramah lingkungan (%)	Min 95%	Min 95%	Min 95%	Min 95%	Min 95%						



Program/ Kegiatan	Target					Alokasi (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Lab. PHP/ Lab. Agenasia Hayati/ Lab. Pesticida (Unit)	-	116	116	116	116					
Pengembangan klinik PHT (Unit)	-	370	390	410	430					
Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan (kali)	2.045	2.260	2.370	2.490	2.615					
SL PHT / Penerapan PHT (Kelompok)	660	690	730	760	800					
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)	75	90	95	100	105					
Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (unit) *	310	-	-	-	-					
Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura						165,81	237,77	255,59	274,77	295,42
Meningkatnya usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura (%)	-	83	85	87	90					
Dokumen perencanaan, Evaluasi pelaporan, keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian (jenis dokumen)	-	12	12	12	12					
Fasilitas Kelompok Pengerak Pembangun Hortikultura di Wilayah Penyanggah (kelompok)	-	240	240	240	240					
Fasilitas Horti Tecnopark (lokasi)	-	3	4	5	5					
Lembaga pengembangan hortikultura : Penggerak membangun desa (PMD) / Kelompok tani pada area periruban (kelompok *)	240	-	-	-	-					
Pelayanan Manajemen (bulan) *	12	-	-	-	-					
Laporan Kinerja (laporan) *	7	-	-	-	-					
5 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan						4.754,15	2.481,49	2.482,25	2.081,34	2.052,10
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustry berkelanjutan										
Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%)	12,91	10,03	7,03	4,57	4,37					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	8,44	4,04	4,04	4,04	4,04					
Pengembangan area produktif tanaman semusim lainnya (ribu Ha)										
Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Semusim (dokumen)	23	23	23	23	23					
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan						392,16	176,64	176,94	168,74	139,45
Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan										
Pengembangan area produktif tanaman Karet (ribu Ha)	19,99	6,95	6,95	5,99	4,23					
Pengembangan area produktif tanaman Kelapa (ribu Ha)	35,65	14,05	14,05	14,05	10,05					
Pengembangan area produktif tanaman Kelapa Sawit (ribu Ha)	7,99	3,51	3,51	3,51	3,51					
Pengembangan area produktif tanaman tahunan lainnya (ribu Ha)	2,82	0,88	0,84	0,79	0,75					
Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT)	18	8,61	8,61	8,61	8,61					
Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (Orang)		7.000	7.000	7.000	7.000					
Pengembangan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan (Ha)	218	154	154	154	104					
Pembinaan dan pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao) (laporan)	91,00	43,53	43,53	43,53	43,53					
Pengembangan desa pangan organik berbasis tanaman tahunan (desa)	-	5	10	10	5					
Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan (dokumen)	15	15	15	15	15					
Dukungan Penanganan Pascapanenan dan Pembinaan Usaha						47,78	22,86	22,86	22,86	22,86

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya						194,58	93,08	93,08	93,08	93,08
Terfasilitasinya Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang Berkualitas; Pelayanan Umum, Organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas; serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas										
Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (bulan)	12	12	12	12	12					
Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (bulan)	12	12	12	12	12					
Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian dan umum serta evaluasi dan pelaporan (dokumen)	19	19	19	19	19					
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan						70,37	33,59	33,65	33,67	33,73
Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan dan Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan										
Pembangunan Kebun Contoh, Uji Demploplot dan Uji Koleksi (unit)	100	100	100	100	100					
Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih (juta batang)	17,19	17,54	17,89	18,23	18,60					
Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan (paket teknologi)	29	29	29	29	29					
Eksplorasi, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengujian Agensia Hayati (jenis)	15	15	16	16	17					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	20,493	14,405	14,535	16,765	18,510					
Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton)										
Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan (sampel)	6,700	7,600	7,850	8,100	8,350					
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis						402,01	420,45	444,49	455,97	531,21
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan										
Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ), Viral, Bakterial, parasit dan gangguan reproduksi (dosis)										
Pengujian Penyakit Hewan dan sertifikasi obat hewan (sampel)	131,600	157,600	188,800	226,240	271,168					
Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (wilayah)	34	34	34	34	34					
Produksi vaksin dan bahan biologik (dosis)										
Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SIKESWANNAS)/ wilayah	34	34	34	34	34					
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit						370,79	555,00	571,00	600,00	630,00
Meningkatnya kualitas dan kuantitas benih dan Bibit										
Peningkatan Produksi Benih Ternak (Dosis)										
Peningkatan Produksi Bibit Ternak (Ekor)	460,676	537,209	568,076	598,654	629,061					
Penguatan Kelembagaan dan Wilayah Perbibitan Ternak (Sertifikat/SKLB)										
Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing						178,90	192,30	201,22	210,78	220,80
Meningkatnya produksi hewan yang ASUH dan Berdaya Saing										
Penjaminan Produk hewan yang ASUH (unit)	79	120	166	173	180					

Program/ Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pelaku usaha yang memenuhi persyaratan standar mutu yang sudah diharmonisasikan dan regulasi negara tujuan ekspor (unit usaha)	4	6	8	9	10					
Penyelesaian kasus ketidaksesuaian mutu dan keamanan pangan produk ekspor (%)	70	75	80	80	80					
Peningkatan jumlah produk pangan segar pertanian beredar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (persen)	10	10	10	10	10					
Jumlah alat dan mesin pertanian yang diuji/sertifikasi kesesuaiannya terhadap standar (unit Alsintan)	255	275	275	300	300					
Pengembangan Pemasaran Domestik										
Berkembangnya Pemasaran Domestik Produk Pertanian						79,81	128,59	153,51	184,21	221,06
Peningkatan akses pemasaran antara poktan/gapoktan dengan pihak lembaga pemasaran dan lembaga pengolahan (%/tahun)	10	10	10	10	10					
Peningkatan kualitas layanan ekspor dan impor 5% per tahun dari 65% di tahun 2015 menjadi 85% di tahun 2019 (%/tahun)	10	10	10	10	10					
Peningkatan jumlah bahan kebijakan stabilisasi harga komoditas pertanian strategis (%/tahun)	3	3	3	3	3					
Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian di unit kelembagaan pasar (pasar tani, pasar temak, UPPG, STA dan pasar lelang karet)(%/tahun)	10	10	10	10	10					
Pengembangan Unit Pemasaran Poktan / Gapoktan (UPPG) Cabai dan Bawang Merah (unit usaha) - program Nawacita	-	14	-	-	-					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian										
Berkembangnya Pengolahan Hasil Pertanian										
Peningkatan rendemen penggilingan padi (%)	5	5	5	5	5	299,03	706,37	791,02	875,53	976,94
Jumlah unit usaha hasil pertanian yang dikembangkan / dibangun dan operasional (%)	80	80	80	80	80					
Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit usaha) - Program Nawacita / Biogas	-	12	-	-	-					
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian						182,96	175,22	227,79	273,35	343,95
Pengembangan Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran, Kerjasama, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian										
Penilaian Laporan Kinerja (nilai)	75,50		76,50	77,00	77,50					
Peta unit kerja rawan penyimpangan	5	4	4	4	3					
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian						14.004,23	7.993,75	9.507,82	9.739,64	9.977,24
Penambahan Luas Pertanaman										
Tercapainya Perluasan Areal Tanam :										
Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan Padi (Ha)	-	200.000	266.700	266.700	266.600					
Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi (Ha)	600.000	60.000	45.000	30.000	15.000					
Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan HPT (Ha)	-	25.000	25.000	25.000	25.000					
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian						5.010,65	868,26	908,08	943,70	970,50
Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian										
Jumlah pengembangan sumber air alternatif skala kecil (pengembangan irigasi air permukaan dan irigasi air tanah) (Unit)	-	700	1.000	1.200	1.400					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian (unit)		7.308	7.308	7.543	7.543					
Jumlah Pengembangan UPJA Mandiri (Paket)	-	50	50	50	50					
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan UPJA (UPJA)		166	166	166	166					
Jumlah jenis alsintan yang diawasi di lokasi (Pkt)	-	5	5	5	5					
Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian						1.076,10	224,93	224,93	224,93	224,93
Meningkatnya fasilitas pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal										
Jumlah dokumen perencanaan (Program, Anggaran dan Kerjasama), keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, sarana dan prasarana pertanian (dokumen).	6	6	6	6	6					
Fasilitas Pupuk dan Pestisida						458,33	57,50	57,50	57,50	57,50
Tersalurnya Pupuk Bersubsidi dan Dioptimal-kanya Rumah Kompos di daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sentra peternakan.										
Jumlah Terbangunnya Rumah Kompos (Unit)	897	250	250	250	250					
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)						623,68	736,61	909,56	916,76	1.000,96
Meningkatnya fasilitas dukungan pembiayaan bagi petani melalui terlaksananya panyaluran dana BLM-PUAP, kredit program, asuransi dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, serta pembiayaan sektor pertanian										

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya inovasi pengelolaan dan konservasi SDG, serta sistem produksi pertanian berkelanjutan berbasis bioteknologi										
Jumlah SDG yang terkaraktisasi dan terdokumentasi (akselerasi)	1.340	1.340	1.350	1.350	1.350					
Jumlah galur harapan unggul tanaman (galur)	18	19	22	23	29					
Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (teknologi)	5	5	5	5	5					
Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (rekomendasi)	2	2	2	2	2					
Penelitian dan Penembangan Pasca Panen Pertanian						32,57	44,87	48,01	51,38	54,97
Tersedianya teknologi dan rekomendasi kebijakan pasca panen hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam upaya mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.										
Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan)(teknologi)	13	15	15	17	17					
Jumlah Model Agrobio-industri Terpadu (model)	2	2	2	3	3					
Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian (rekomendasi)	3	3	3	3	3					
Jumlah model revitalisasi penggilingan padi kecil dan penanganan pasca panen jagung dan kedelai (unit)	13	20	20	20	20					
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian						147,35	140,00	149,80	151,84	162,47
Tersedianya Data, Informasi dan Peningkatan Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian										
Jumlah Sistem Informasi Pertanian (Sistem Informasi)	7	5	5	5	12					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian						34,03	59,71	41,42	44,32	47,43
Meningkatnya Inovasi dan Adopsi Teknologi Mekanisasi Pertanian untuk Peningkatan Produktifitas, Efisiensi dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Limbahnya										
Jumlah teknologi (prototipe, model) mekanisasi pertanian mendukung pengembangan pertanian bioindustri (Teknologi)	7	7	8	8	9					
Jumlah rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian (Rekomendasi)	2	2	3	3	3					
Jumlah prototipe alisintan yang siap didiseminasikan (Unit)	20	25	30	35	40					
Jumlah Agro Science Park (ASP) (Provinsi)	-	1	-	-	-					
Penelitian/Analisis Sosialisasi Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan pertanian						33,45	49,79	43,28	46,31	49,55
Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan										
Jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan (Rekomendasi)	12	12	12	12	12					
Jumlah rekomendasi kebijakan responsif dan antispasif isu-isu aktual pembangunan pertanian (Rekomendasi)	10	10	10	10	10					
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura						103,73	144,29	131,92	141,16	151,04
Meningkatnya Inovasi Mendukung Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura untuk Terwujudnya Industri Hortikultura yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan										
Jumlah VUB hortikultura (VUB)	22	23	25	28	30					
Jumlah teknologi hortikultura berbasis pertanian bioindustri (Teknologi)	20	20	20	21	22					

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah benih sumber: Kopi Arabika, lindak (Biji)	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000					
Jumlah benih sumber: Kopi Robusta dan karet (ribu Entres)										
Jumlah benih sumber: Tebu (G2) (Budset)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000					
Jumlah benih sumber: Rami (ribu Rizome)	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000					
Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi)	6	6	6	6	6					
Jumlah model bioindustri berbasis perkebunan (Model)	5	7	7	7	7					
Jumlah Agro Science Park (ASP) (Provinsi)	-	1	-	-	-					
Penelitian dan Pengembangan Peternakan						115,34	146,76	157,03	168,03	179,79
Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung ketersediaan protein hewani										
Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun)	16	16	16	16	16					
Jumlah bibit sumber ternak (Ekor)	11.675	13.905	14.235	14.570	14.960					
Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak (Batang)	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000					
Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri, bioscience dan bioengineering (Teknologi)	34	34	34	34	34					
Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi)	5	5	5	5	5					

Program/ Kegiatan	Program / Sasaran					Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian											419,08	448,66	480,07	513,68	549,63
Pengembangan Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran, Kerjasama, Pengelolaan Sumberdaya, dan Hasil Litbang Pertanian															
Jumlah dokumen manajemen Litbang Pertanian (Dokumen)	12	12	12	12	12										
Jumlah kerjasama kemitraan pengembangan teknologi (Kontrak)	150	150	150	150	150										
Jumlah perlindungan HKI dalam rangka alih teknologi (Invensi)	45	45	45	45	45										
Jumlah perjanjian kerjasama lisensi hasil Balitbangtan (Lisensi)	10	10	10	10	10										
Jumlah pengembangan SDM litbang (Orang)	1.380	1.405	1.430	1.455	1.455										
Jumlah pengadaan sarana prasarana penelitian (Paket)	7	7	7	7	7										
10. Program Peningkatan Penyeruluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian											1.293,61	2.383,43	2.636,22	2.876,39	3.158,98
Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani															
Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur															
Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian															
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen															
- Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17.808	31.220	32.250	32.350	32.700										
- Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit)	4.132	5.538	5.638	5.650	5.750										

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah desa yang meningkatkan Kapasitasnya melalui program Replikasi READ (desa)	30	-	-	-	-					
Jumlah Dukungan pemertanian sistem pelatihan pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12					
Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian						191,01	393,72	404,30	429,66	449,72
Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda	7.130 orang;5 doku- men standar-isasi; 23 unit; 12 bulan	11.954 orang;5 doku- men standar-isasi; 26 unit; 12 bulan	12.170 orang;5 doku- men standar-isasi; 29 unit; 12 bulan	12.385 orang;5 men standar-isasi; 32 unit; 12 bulan	12.600 orang;5 doku- men standar-isasi; 35 unit; 12 bulan					
Jumlah profesi bidang pertanian yang distandarisasi (Dokumen)	5	5	5	5	5					
Jumlah SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800					
Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	23	26	29	32	35					
Jumlah ketenagaan pendidikan tinggi pertanian serta standarisasi dan sertifikasi profesi yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya (Orang)	824	854	870	885	900					
Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian dan Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana dan mahasiswa yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan (orang)	3.006	7.600	7.700	7.800	7.900					
Jumlah dukungan Revitalisasi Pendidikan Pertanian dan Pengembangan Standardisasi serta Sertifikasi Profesi SDM Pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12					
Pemertanian Sistem Penyuluhan Pertanian						680,63	1.172,97	1.341,04	1.475,37	1.649,89



Mantapnya sistem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani; kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah	22.479 unit; 68 doku- men; 48.608 orang	37.303 unit; 68 doku- men; 58.860 orang	38.433 unit; 73 doku- men; 59.060 orang	38.549 unit; 74 doku- men; 59.360 orang	38.995 unit; 78 doku- men; 59.860 orang					
Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi (Unit)	4.671	6.083	6.183	6.195	6.295					
Jumlah kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	17.808	31.220	32.250	32.350	32.700					
Jumlah dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev dan Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan (Dokumen)	68	68	73	74	78					
Jumlah ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi (Orang)	48.608	58.860	59.060	59.360	59.860					
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengem- bangan SDM Pertanian						62,92	79,21	83,47	87,97	92,70
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen	71 do- kumen; 12 bulan	70 doku- men; 12 bulan	70 do- kumen; 12 bulan	70 doku- men; 12 bulan	70 doku- men; 12 bulan					
Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undan- gan, Kepegawaian, Keuangan dan perleng- kapan, evaluasi, pelaporan, kehormatan dan perpustakaan (Dokumen)	71	70	70	70	70					
Dukungan manajemen dan teknis lainnya (Bulan)	12	12	12	12	12					
Pendidikan Menengah Pertanian						59,60	69,45	75,81	82,13	88,98
Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatkan kapasitas non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda										



Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang)										
Jumlah Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	84	84	84	84	84					
Jumlah Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	381	596	596	596	596					
Jumlah Dokumen Program, Kerjasama dan Penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian yang dihasilkan (Dokumen)	13	15	20	25	30					
Jumlah Dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)	12	12	12	12	12					
11 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						63,2,39	705,39	789,00	816,75	687,41
Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat										
-Skor Pola Pangan Harapan	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5					
Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)										
-Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.004,0	2.040,0	2.077,0	2.113,0	2.150,0					
-Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	56,1	56,4	56,6	56,8	57,0					
Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen										
-Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥	≥	≥	≥	≥					
-Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	HPP CV<5%	HPP CV<5%	HPP CV<5%	HPP CV<5%	HPP CV<5%					
Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
-Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/Tahun)										
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan						105,04	103,40	88,57	110,11	112,80
Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan Serta Stabilitas Harga Pangan	≥	≥	≥	≥	≥					

Program/ Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Rekomendasi)	35	35	35	35	35					
Promosi penganekekaragaman konsumsi pangan (Lokasi)	35	35	35	35	35					
Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (Rekomendasi)	35	35	35	35	35					
Koordinasi penanganan keamanan pangan segar (Rekomendasi)	65	85	105	125	145					
Model Pangan Pokok Lokal (Unit)	31	37	21	21	21					
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan						285,70	319,22	331,99	345,27	208,77
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan	12 Bulan Lay-anan	12 Bulan Lay-anan	12 Bulan Lay-anan	12 Bulan Lay-anan	12 Bulan Lay-anan					
Hasil Usaha tani terpadu (KM)	11	11	11	11	-					
Pemberdayaan petani kecil (KM)					-					
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Desa)	224	224	224	224	-					
Pengelolaan Sumberdaya dan infrastruktur (Unit)	224	2.240	2.240	2.240	-					
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama (Dokumen)	39	35	35	35	35					
Dokumen Keuangan dan Perlengkapan (Dokumen)	35	35	35	35	35					
Hasil pemantauan dan evaluasi program (Laporan)	39	35	35	35	35					
Dokumen kepegawaian, organisasi, humas, hukum (Dokumen)	153	1	1	1	1					
Sidang pleno, Konferensi dan Sidang Regional ketahanan pangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1					

Program/ Kegiatan	Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	-Nilai IKM	84	85	86	87	88					
	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantina-an						10,51	18,60	18,90	20,60	22,80
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantina-an										
	Meningkatnya kualitas koordinasi dan ker-jasama antar lembaga										
	Meningkatnya pemahaman SPS dengan instansi terkait										
	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses										
	Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pengawasan dan peninda-kan perkarantina-an pertanian (Dokumen)	2	2	2	2	2					
	Jumlah pembinaan bimbingan teknis dan monitoring pengawasan dan penindakan (Laporan)	5	5	5	5	5					
	Jumlah protokol karantina yang harmonis dengan negara mitra yang terimplementasi-kan (Laporan)	1	2	2	2	1					
	Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan (Dokumen)	1	1	1	1	1					
	Jumlah draf regulasi yang di notifikasi ke SPS WTO (Dokumen)	15	15	20	15	10					
	Jumlah Aplikasi Terkait Internal dan Eksternal Perkarantina-an Pertanian (Aplikasi)	6	6	6	6	6					
	Jumlah Layanan E-Government (Dokumen)	4	4	4	4	4					
	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani						8,20	12,46	13,80	15,20	16,80
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantina-an dan peningkatan kemampuan deteksi resiko										

Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokumen Rencana Kinerja & Penyusunan Anggaran (Dokumen)	1	11	11	11	11					
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran & Laporan Keuangan (Laporan)	3	3	3	3	3					
Jumlah Dokumen Pengembangan & pengelolaan Kepegawaian (Dokumen)	1	6	6	6	6					
Jumlah Dokumen Pengembangan Integritas Barantan dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	3	3	3	3					
Jumlah Dokumen Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi	1	3	3	3	3					
Jumlah Peraturan Perkarantinaan yang telah disahkan (Dokumen)	3	3	3	3	3					
Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Informasi Layanan Perkarantinaan (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12					
Jumlah Laporan Pengelolaan TU & Rumah Tangga (Laporan)	12	12	12	12	12					
Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Karantina Pertanian (Dokumen)	17	17	17	17	17					
Tingkat Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12					
Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)	88	100	100	100	100					
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar an Uji Terap Teknis dan Metode Karantina Pertanian						35,30	56,50	55,70	60,50	66,20
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknis dan Metode Karantina Pertanian										
Jumlah Teknik dan Metode Uji Terap yang dikembangkan (Dokumen)	3	3	3	3	3					
Jumlah Desiminasi pedoman juklak juknis yang telah dilakukan (Dokumen)	10	10	10	10	10					



KEMENTERIAN PERTANIAN

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
Jl. Harsono RM No.3, Gedung A lantai 4
Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp/Fax. 62-21 7804156
www.pertanian.go.id
@2015